



Rancangan Akhir

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024



PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, telah selesai disusun sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan pembangunan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rancangan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun pertama RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Selanjutnya, dokumen Rancangan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 akan menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rancangan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 ini, kami ucapkan terima kasih.

Sukabumi, 7 JULI 2023

WALI KOTA SUKABUMI

ttd

ACHMAD FAHMI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	9
1.3 Hubungan Antar Dokumen	14
1.4 Maksud dan Tujuan	16
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	18
BAB II GAMBAR UMUM KONDISI DAERAH	21
2.1 Kondisi Umum Daerah	21
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi	21
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	37
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum	72
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	196
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	196
3.1.1 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional	199
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Regional Jawa Barat.....	202
3.1.3 Kondisi Perekonomian Kota Sukabumi.	206
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	211
3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan	213
3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	215
3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah	222
3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	227
3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah..	231
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024	236
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan	236
4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2023.....	239
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023	243
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi	248
4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024..	259
4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024	259
4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	272



4.2.3	Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD	286
4.2.4	Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi	293
4.2.5	Prioritas Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024	308
4.2.6	Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024	351
4.2.7	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan...	418
4.2.8	Standar Pelayanan Minimal	424
4.2.9	Inovasi Daerah	433
BAB V	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2024	464
BAB VI	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	480
6.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	482
6.2	Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Kunci (IKK)	483
BAB VII	PENUTUP	501



**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 55 TAHUN 2023

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI
TAHUN 2024**

WALI KOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022 - 2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kota Sukabumi untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2024 dan berakhir tanggal 31 Desember 2024.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD Tahun Anggaran 2024; dan
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2024.

Pasal 3

Dalam hal RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berbeda dengan RAPBD hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi menggunakan RAPBD Tahun 2024 hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di : S U K A B U M I
pada tanggal : 7 J U L I 2023

WALI KOTA SUKABUMI,

ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2023 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI,

YUDI PEBRIANSYAH, SH
NIP.19830207 200604 1 010



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanahkan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pelaksanaan pembangunan daerah diawali dengan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai sebuah siklus dan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Pemerintah daerah harus menyusun dan menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk pembangunan 2005-2025 periode 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk pembangunan 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi akan berakhir pada 20 September Tahun 2023, dengan demikian terdapat konsekuensi logis dimana Kota Sukabumi tidak memiliki dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah sampai nanti disusunnya RPJMD periode Tahun 2025-2030 yang merupakan merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih masa bakti 2025-2030.



Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yaitu RKPD, yang selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB), Pemerintah Daerah Kota Sukabumi harus menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang nantinya akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

Penyusunan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 saat ini masih berlangsung dan ditargetkan selesai pada Bulan Maret 2023. Namun demikian karena proses penyusunan RKPD harus juga tetap berjalan, maka penyusunan RKPD tetap berlangsung sebagaimana mestinya dengan mengacu pada Draft RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang sudah dilakukan Konsultasi Publik dan dibahas secara simultan oleh Tim Penyusun.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun, dan sebagai dokumen resmi rencana daerah, RKPD mempunyai kedudukan strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Kota Sukabumi sebagai salah satu bagian pemerintah daerah senantiasa menyusun RKPD sesuai dengan tahapan dan alur yang diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting, antara lain:

1. merupakan instrumen pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024–2026;
2. menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah;
3. mewujudkan keselarasan program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026;
4. menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2024; dan
5. menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Penyusunan dokumen Rancangan Awal RKPD dengan berpedoman kepada tujuan dan sasaran yang tertuang dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan dokumen RPD Tahun 2024 – 2026, Rancangan Awal RKP Tahun 2024, hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 Tahun 2023 Triwulan I;
2. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari tahapan awal yang terdiri dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan, Forum Konsultasi Publik rancangan awal RKPD, Forum Perangkat Daerah, penelaahan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau hasil reses DPRD serta Musrenbang Tingkat Kota;
3. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, melalui tahapan pembahasan prioritas bidang urusan oleh Bappeda dan Perangkat Daerah, memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD, serta pendapat dari kalangan akademisi, dunia usaha dan komunitas;
4. Penetapan RKPD, berpijak kepada Rancangan Akhir RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, hasil Rapat Koordinasi Teknis dan Pra Musrenbang Provinsi Jawa Barat dan Musrenbang Jawa Barat serta verifikasi akhir untuk program dan kegiatan prioritas untuk

kemudian diterbitkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024.

Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 dilaksanakan melalui pendekatan:

1. *Top down* yaitu pendekatan yang memperhatikan program-program prioritas dan kebijakan pemerintah pusat provinsi dan kota;
2. *Bottom-up* yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan, Forum Perangkat Daerah (FPD), dengan hasil prioritas usulan dari setiap tahapan berupa matrik program/kegiatan prioritas sampai dengan Acara Puncak Musrenbang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024;
3. Teknokratik yaitu pendekatan perencanaan yang mengedepankan hasil kajian dan evaluasi periode sebelumnya berbasis pengetahuan, ilmu, dan teknologi. Hal ini ditunjukkan dengan diakomodasinya saran dan pendapat dari akademisi dan praktisi pembangunan;
4. Politik yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodasinya Pokok-pokok Pikiran atau hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi;
5. Partisipatif yaitu pendekatan perencanaan yang mengakomodir hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
6. Pendekatan Perencanaan Tematik, yaitu dengan penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan;
7. Pendekatan Perencanaan Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan kedalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir sebagai suatu rangkaian kegiatan;
8. Pendekatan integratif yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program pembangunan yang dilihat dari peran kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya dan upaya leterpaduan berbagai sumber pendanaan;

9. Pendekatan spasial merupakan penjabaran program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Selain pendekatan di atas, penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 juga menerapkan pendekatan substansi pada proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, yaitu melalui:

- 1) Kolaborasi Pemangku Kepentingan pembangunan melalui implementasi pendekatan Pentahelix – ABCGM (*Academic, Business, Community, Government, and Media*).

Dalam proses ini *Academic* terdiri dari unsur perguruan tinggi dan peneliti yang bisa berperan sebagai konseptor dengan memberikan ide-ide dan masukan terbaik bagi pembangunan daerah. Hal yang dapat dilakukan diantaranya melakukan identifikasi potensi daerah serta berperan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya akan bisa mendorong inovasi-inovasi terbaru dalam proses pembangunan daerah. *Business* meliputi unsur pengusaha/pihak swasta yang berperan sebagai *enabler* atau fasilitator. Disini sektor swasta sangat berperan dalam menciptakan nilai tambah dan sebagai unsur penting dalam mempertahankan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu sektor swasta diharapkan juga dapat berperan dalam mendukung hadirnya infrastruktur teknologi dan modal usaha khususnya bagi kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). *Community* merupakan unsur masyarakat yang berperan sebagai akselerator dan penerima manfaat. Dalam proses perencanaan pembangunan daerah yang selama ini dijalankan, masyarakat senantiasa dilibatkan sejak proses awal yaitu melalui Musrenbang di tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai tingkat Kota serta dalam pelaksanaan Forum Perangkat Daerah. *Government* atau pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator yaitu menetapkan kebijakan, peraturan perundang-undangan serta dalam proses pengawasannya. Pemerintah berperan dari mulai sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengendalian dan evaluasi, serta dalam proses perizinan dan pelayanan publik. Selain itu pemerintah harus juga berperan sebagai koordinator dan pengatur irama dalam menyatukan berbagai kepentingan demi pengembangan potensi dan

pendapatan daerah serta pembangunan daerah secara keseluruhan. *Media* berperan dalam menjalankan fungsi publikasi dan promosi serta membuat *brand image* bagi suatu tujuan atau prosuk tertentu. Selanjutnya media juga bisa berperan sebagai perantara desiminasi informasi di antara pemangku kepentingan dalam konsep *pentahelix*.

- 2) Kolaborasi Pendanaan Pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN), APBD Provinsi, APBD Kabupaten/Kota, dana masyarakat/umat, Pinjaman Daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR), Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Obligasi Daerah.

Dalam proses ini tentu Pemerintah Daerah Kota Sukabumi sangat membutuhkan *support* anggaran dari berbagai sumber dalam menjalankan pelayanan publik serta melaksanakan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Untuk itu dukungan anggaran dari pemerintah pusat, provinsi, swasta dan lain-lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan diolah sedemikian rupa supaya tepat sasaran dan tepat guna.

- 3) Penerapan *Dynamic Government* sebagai inovasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui *Dynamic Government* maka pilihan-pilihan kebijakan yang ditetapkan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terkini dalam lingkungan yang sering mengalami perubahan sehingga lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuannya serta senantiasa menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan efisien.

- 4) Implementasi *Scoppi* (*Scenario Planning* untuk Perencanaan Inklusif)

Scoppi akan mendorong keterbukaan dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga akan berdampak pada optimalisasi petran serta seluruh lapisan masyarakat dalam memberikan masukan, saran dan ide bagi proses perencanaan pembangunan yang dilakukan. Melalui *Scoppi* disediakan fasilitas bagi individu/kelompok masyarakat dalam memberikan saran dan masukannya serta yang tak kalah penting adalah adanya sarana bagi kelompok tertentu seperti remaja, disabilitas dan lansia dalam memberikan saran dan masukannya.

5) Sinkronisasi Aplikasi dan Interkoneksi Data

Pada era digitalisasi seperti sekarang ini, maka sistem informasi menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan agar kita tidak ketinggalan dan tentunya dapat membantu memudahkan pekerjaan. Namun demikian sebuah sistem informasi yang baik adalah yang terintegrasi dengan sistem lainnya sehingga akan semakin memudahkan para penggunanya. Sinkronisasi aplikasi yang dilakukan di Kota Sukabumi adalah melalui:

- a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) terintegrasi;
- b. Sistem perencanaan dan penganggaran terintegrasi dengan pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
- c. Sistem Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- d. E-Walidata Kota Sukabumi.

Dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi masih dihadapkan pada tantangan dalam penanganan pasca Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang sampai saat ini masih dirasakan dampaknya. Tahun 2024 merupakan salah satu kunci untuk memperkuat pemulihan ekonomi, karena itu dalam RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023 perlu dicantumkan pokok-pokok penting yang akan dilakukan dalam proses pemulihan ekonomi tersebut.

Pandemi *Covid-19* telah memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilakukan. Selain itu pandemi ini juga telah membawa perubahan besar pada semua aspek kehidupan, termasuk yang berkaitan dengan teknologi, namun demikian harus disadari bahwa pandemi ini menghasilkan peluang baru bagi proses kehidupan terutama dari sisi ekonomi. Terdapat 10 (sepuluh) tren yang bisa menjadi peluang pengembangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2024, yaitu: 1. Industri 4.0; 2. Digital dan Data; 3. Kebangkitan Disrupsi Digital; 4. Perangkat Pintar dan Infra; 5. Mengubah Keseimbangan Kekuatan Ekonomi; 6. Revitalisasi Energi; 7. Kesehatan; 8. Tempat Tinggal; 9. Globalisasi dan 10. Perkembangan Ilmu Pengetahuan.

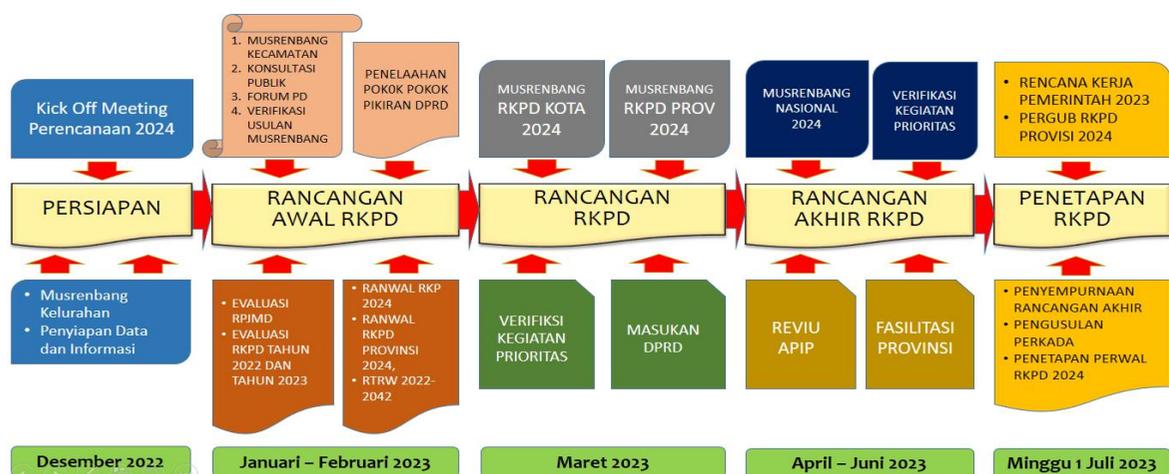
Berdasarkan 10 (sepuluh) tren diatas, maka beberapa asumsi yang bisa menjadi peluang bagi Kota Sukabumi sebagai berikut:

1. Masyarakat dapat hidup mandiri dengan meningkatkan kegiatan ekonomi setelah mengalami krisis pandemi *Covid-19*
2. Angka dan data menjadi acuan masyarakat untuk menggunakan perangkat dan infrastruktur pintar untuk transaksi perdagangan
3. Dimulainya kegiatan (kapasitas dan tenaga kerja) di bidang manufaktur, investasi, dan pariwisata terkait dengan pemulihan kemandirian kehidupan masyarakat
4. Menciptakan dan menjadi pusat inovasi digital dengan memproduksi sesuai dengan permintaan
5. Menciptakan peluang dalam berinvestasi maupun berusaha di bidang pariwisata

Dalam penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, maka akan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Selanjutnya telah dilakukan berbagai rangkaian kegiatan dalam mendukung proses penyusunan RKPD Tahun 2024, yaitu berupa: pelaksanaan *Kick Off Meeting* Perencanaan Tahun 2024, Musrenbang tingkat Kelurahan, Musrenbang tingkat Kecamatan, Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Forum Perangkat Daerah dan diakhiri dengan Musrenbang tingkat Kota Sukabumi. Setelah itu akan dilakukan tahapan penetapan RKPD Tahun 2024 melalui Peraturan Wali Kota tentang RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024.

Penyusunan dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 dilaksanakan melalui tahapan dan alur sebagaimana gambar di bawah ini.

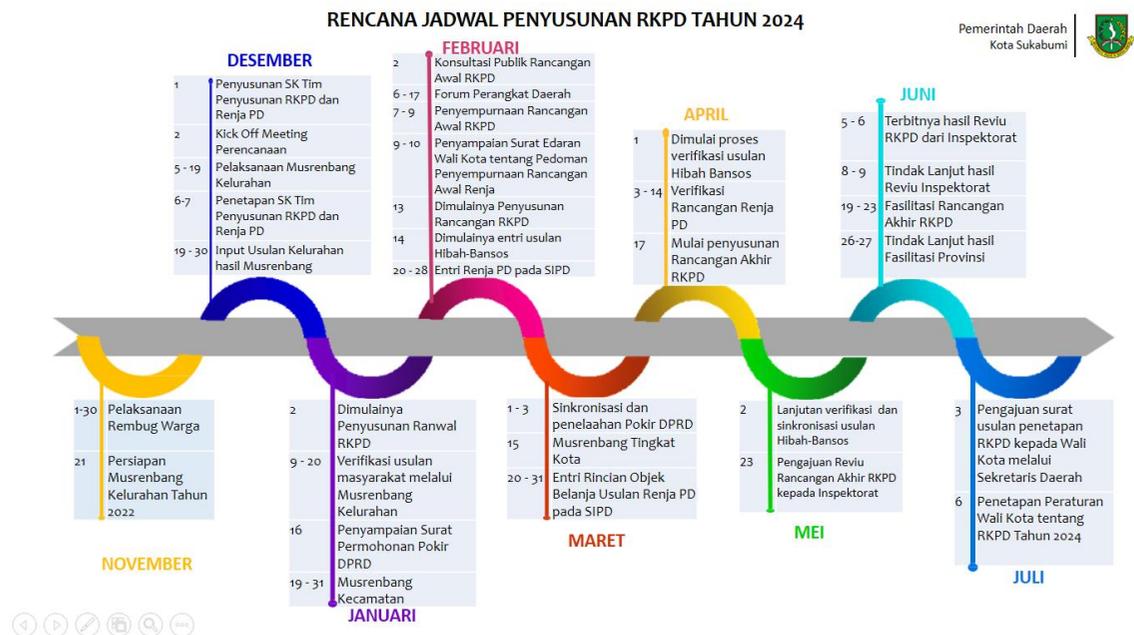
Gambar 1.1
Alur dan Tahapan Proses Penyusunan Substansi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan alur dan tahapan proses penyusunan RKPD diatas, maka telah disusun jadwal tentative pelaksanaan perencanaan Tahun 2024 sebagai berikut:

Gambar 1.2
Jadwal Penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023

1.2 DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 442);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

- diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 –



- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Akibat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 21. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 22. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 23. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;



30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
32. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023;
33. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
34. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010, Nomor 22 Seri E);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 252) sebagaimana telah mengubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
39. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;

40. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 (Tambahkan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7);
41. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Kota Sukabumi Tahun 2016 Nomor 9);
42. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi 2022 – 2042 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2022 Nomor 1);
43. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 -2026 (Lembar Daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 Nomor 16).

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, hubungan antar dokumen perencanaan daerah terdiri atas dokumen perencanaan jangka panjang yaitu RPJPD, jangka menengah yaitu RPJMD dan jangka pendek yaitu RKPD.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOB) mengamanahkan bahwa Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 yang apabila dilihat dari sisi fungsi dan manfaat RPD maka sebenarnya kedudukannya sama dengan RPJMD. Perbedaan signifikannya RPD tidak disusun melalui pendekatan politis dimana tidak menjabarkan visi misi dan janji kepala daerah terpilih. Dengan demikian maka ketika berbicara hubungan antara dokumen RPD dengan dokumen perencanaan lainnya sama maknanya dengan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

Oleh karena itu, maka RPD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk

mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

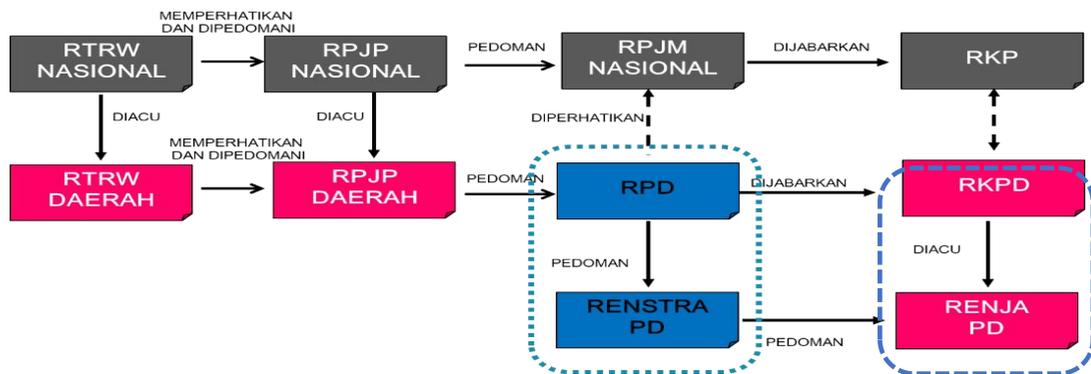
RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RKPD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Secara struktur, dokumen perencanaan dibagi atas dokumen perencanaan berskala nasional dan dokumen perencanaan berskala daerah. Adapun yang termasuk dalam dokumen perencanaan berskala daerah adalah:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan/atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD);
3. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD);
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Penyusunan RKPD diperlukan untuk menjamin terjadinya keselarasan, keterkaitan, dan konsistensi dalam sistem pembangunan daerah antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Permendagri 86 Tahun 2017 serta Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022, maka hubungan antar dokumen perencanaan dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1.3
Hubungan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Berdasarkan gambar di atas RPJMN dan RPD merupakan 2 (dua) dokumen perencanaan yang saling berhubungan dan bersinergi. RPD adalah dokumen perencanaan daerah jangka menengah sebagai pengganti dari RPJMD yang berisi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, prioritas pembangunan, dan program prioritas pembangunan RPD Tahun 2024-2026; tema, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan RKP Tahun 2024; serta RTRW Kota Sukabumi Tahun 2022-2042.

Dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Renja PD yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi dari tiap Perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD akan dijadikan penganggaran dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2024, yang terdiri atas KUA-PPAS yang dituangkan secara detail di dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA Perangkat Daerah) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA Perangkat Daerah).

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

RKPD merupakan rencana pembangunan tahunan yang bersifat aspiratif dan terpadu yang bersumber dari berbagai pelaku pembangunan agar tercipta pembangunan yang sinergi dan efisien.

Penyusunan RKPD disesuaikan dengan alokasi sumber daya pembangunan yang dimiliki dan diharapkan akan memberi arah rencana kerja pembangunan di Tahun 2024 bagi Perangkat Daerah agar sesuai dengan sasaran RPD dan renstra Perangkat Daerah terkait. RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 telah mempertimbangkan isu strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi proses pembangunan di Tahun 2024, serta telah mempertimbangkan arah kebijakan dan target indikator kinerja pembangunan pada tingkat Nasional, Provinsi, dan Kota Sukabumi Tahun 2024.

Maksud dari penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai acuan dan pedoman penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 serta pedoman bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi tahun 2024. Tujuan yang akan dicapai dari penyusunan RKPD, yaitu:

1. Tercapainya sasaran pembangunan Kota Sukabumi;
2. Terlaksananya program prioritas pembangunan Kota Sukabumi yang selaras dengan prioritas nasional tahun 2024 dan Prioritas Provinsi Jawa Barat
3. Terlaksananya program, kegiatan, dan sub kegiatan yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah;
4. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi pembangunan, baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antartingkat pemerintahan;
5. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan dunia usaha, perguruan tinggi dan komunitas; dan
6. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Fungsi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan untuk:

- 1) Perangkat Daerah Kota Sukabumi dalam menyusun Renja PD;
- 2) Penyusunan RAPBD Kota Sukabumi Tahun 2024; dan
- 3) Memfasilitasi berbagai potensi sumber daya para pemangku kepentingan pembangunan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024.

1.5 SISTEMATIKA DOKUMEN RKPD

Penyusunan dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, disajikan dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024, terdiri dari:

- 1.1 Latar Belakang;
- 1.2 Dasar Hukum;
- 1.3 Hubungan antar Dokumen;
- 1.4 Maksud dan Tujuan;
- 1.5 Sistematika Dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pada bagian ini menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan, terdiri dari:

- 2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah, terdiri dari:
 - 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi;
 - 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
 - 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum;
 - 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah;
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan serta Realisasi RPJMD
 - 2.2.1 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
 - 2.2.2 Kondisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022.
- 2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah
 - 2.3.1 Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
 - 2.3.2 Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, terdiri dari:

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, menjelaskan arah kebijakan pembangunan ekonomi Nasional, Provinsi dan Kota Sukabumi Tahun 2023, proyeksi dan tantangan pembangunan ekonomi Tahun 2024.
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah, menjelaskan arah kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan Tahun 2024 serta pendanaan pembangunan lainnya.
- 3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah
- 3.4 Pemetaan Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada Bab ini dijelaskan tentang:

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.
- 4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan, menjelaskan tentang program prioritas pembangunan nasional, Provinsi dan Kota Sukabumi Tahun 2024.
- 4.3 Inovasi Daerah.

BAB V. PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2024.

Menjelaskan tentang Sinkronisasi Program Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional, dan kegiatan prioritas Kota



Sukabumi, serta rencana program dan kegiatan Tahun 2024.

BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menjelaskan tentang realisasi dan proyeksi indikator makro Kota Sukabumi, penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB VII. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKPD Tahun 2024 serta kaidah pelaksanaan RKPD.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Gambaran umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam merencanakan pembangunan, baik dari aspek geografi dan demografi, serta capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah beserta interpretasinya.

Hal yang perlu diperhatikan bahwa sumber data dan informasi yang akan diolah untuk mengevaluasi capaian indikator kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi, merupakan data dan informasi yang menggambarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Tahun berjalan sebagai bahan acuan.

2.1 Kondisi Umum Daerah

2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi

Kondisi dari aspek geografi dan demografi Kota Sukabumi dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Wilayah Kota Sukabumi terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan dengan 33 (tiga puluh tiga) kelurahan. Wilayah Kota Sukabumi berbatasan dengan beberapa Kecamatan di kabupaten Sukabumi, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sukabumi, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi.

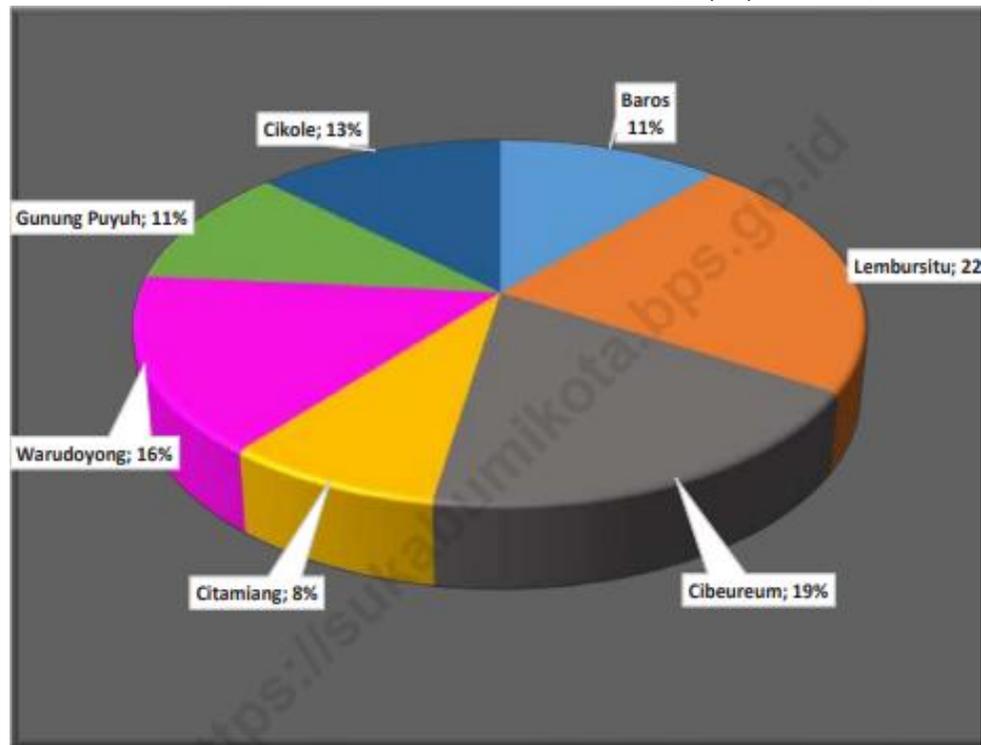
Wilayah administrasi Kota Sukabumi terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungpuyuh, Kecamatan Cikole, Kecamatan Citamiang, Kecamatan Warudoyong, Kecamatan Baros, Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Cibeureum. Jarak terjauh dari Balaikota Sukabumi adalah Kecamatan Lembursitu, yakni sejauh 7 km. Luas dataran masing-masing kecamatan disajikan pada Tabel 2.1 sedangkan persentase luas wilayah Kota Sukabumi per Kecamatan disajikan pada Gambar 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
Luas Dataran Masing-masing Kecamatan di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Baros	5,58
2	Lembursitu	10,69
3	Cibeureum	9,12
4	Citamiang	4,01
5	Warudoyong	7,56
6	Gunungpuyuh	5,15
7	Cikole	6,22
Luas Total		48,33

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka , 2023

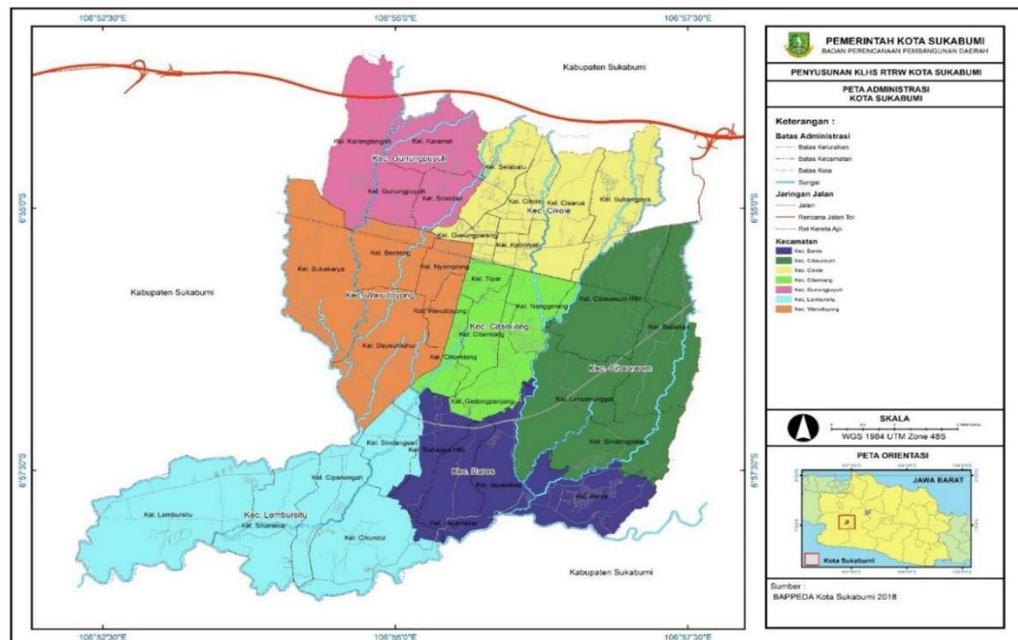
Gambar 2.1
Luas Daerah menurut Kecamatan (%) 2022



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

Peta wilayah administrasi Kota Sukabumi tercantum dalam Gambar 2.2 berikut ini:

Gambar 2.2
Peta Administrasi Kota Sukabumi



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

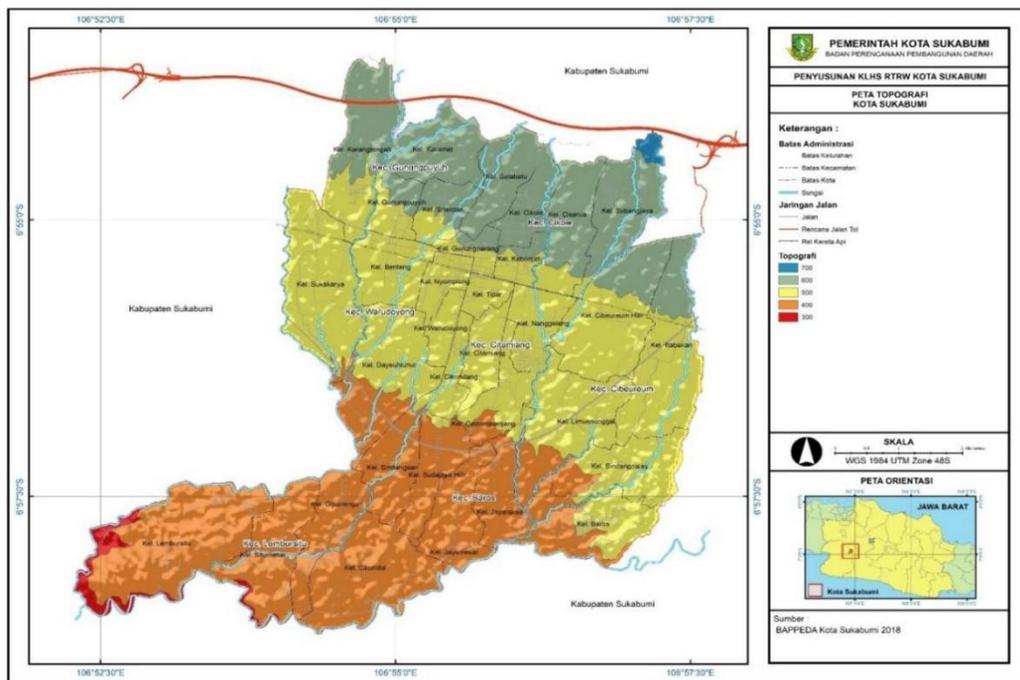
Wilayah Kota Sukabumi terletak pada bagian selatan tengah Provinsi Jawa Barat pada titik koordinat $106^{\circ} 45' 50''$ BT - $106^{\circ} 45' 10''$ BT sampai dengan $6^{\circ} 49' 29''$ LS - $6^{\circ} 50' 44''$ LS, secara geografis Kota Sukabumi terletak di antara pusat pertumbuhan megaurban Jabodetabek dan Bandung Raya. Jarak dari Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) ± 92 Km dan Jarak dari Ibukota Negara (Jakarta) ± 120 Km. Cukup dekatnya jarak membuat tingginya pergerakan orang dan barang dari kota-kota tersebut. Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dengan Ibukota Negara (Jakarta) serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Secara ekonomis hal tersebut menguntungkan Kota Sukabumi, karena dapat menciptakan lapangan kerja baru serta dapat meningkatkan pendapatan baik dari sektor jasa, perdagangan dan sektor lainnya.

2.1.1.3 Topografi dan Kemiringan Lahan

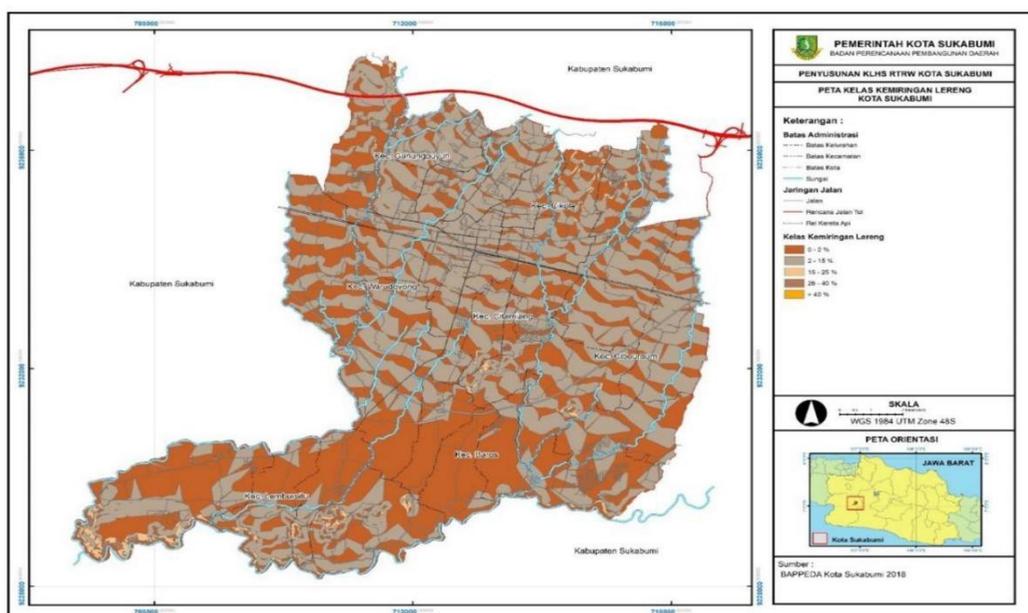
Wilayah Kota Sukabumi merupakan lereng selatan dari Gunung Gede dan gunung Pangrango, yang berada pada ketinggian 584 meter di atas permukaan laut dan pada bagian selatan 770 meter di atas permukaan laut bagian utara.

Sedangkan di bagian tengah mempunyai ketinggian rata-rata 650 meter dari permukaan laut. Bentuk bentangan alam Kota Sukabumi berupa perbukitan bergelombang dengan sudut lereng beragam. Wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh kemiringan lereng 0-2% dan 2-15%. Peta kondisi topografi Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar 2.3 berikut ini.

Gambar 2.3 Peta Topografi Kota Sukabumi

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 - 2023

Luas Daerah Kota Sukabumi dengan kemiringan lereng 0-2% mencapai 2.228,795 Ha atau sekitar 45,59% dari total luas kota, dan kemiringan lereng 2-15% mencapai 2553.219 Ha atau sekitar 52,22% dari total luas kota. Adapun kondisi kemiringan lereng di wilayah Kota Sukabumi dapat dilihat pada gambar 2.4 berikut:

Gambar 2.4 Peta Kemiringan Lereng Kota Sukabumi

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 - 2023

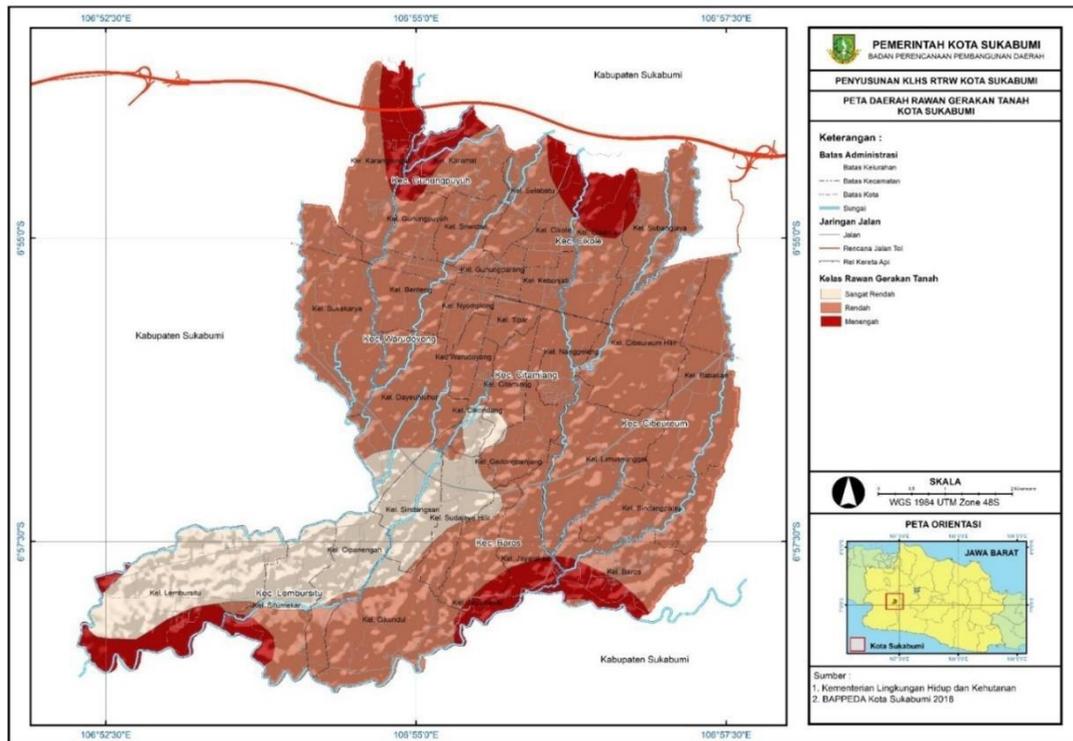
Berdasarkan peta kerentanan gerakan tanah, Kota Sukabumi termasuk kepada zona kerentanan gerakan tanah menengah, rendah dan sangat rendah. Kerentanan gerakan tanah pada tiga kelas ini masih mungkin terjadi adanya longsor terutama pada lereng-lereng terjal dan pada saat curah hujan yang tinggi. Zona gerakan tanah sedang merupakan daerah yang secara umum mempunyai kerentanan gerakan tanah menengah untuk terjadi gerakan tanah. Gerakan tanah besar maupun kecil dapat terjadi terutama di daerah yang berbatasan dengan lembah sungai, gawir, tebing pemotongan jalan dan pada lereng yang mengalami gangguan. Gerakan tanah lama masih mungkin dapat aktif kembali terutama oleh curah hujan yang tinggi dan aktivitas manusia. Adapun Luas Gerakan Tanah di Kota Sukabumi Berdasarkan Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.2 dan Gambar 2.5 berikut:

Tabel 2.2
Luas Potensi Gerakan Tanah di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Potensi Rawan Gerakan Tanah	Luas (Ha)
1	Baros	Menengah	137,97
		Rendah	345,31
		Sangat Rendah	77,20
2	Cibeureum	Rendah	932,21
3	Cikole	Menengah	140,05
		Rendah	504,32
4	Citamiang	Rendah	343,29
		Sangat Rendah	39,67
5	Gunungpuyuh	Menengah	145,73
		Rendah	368,50
6	Lembursitu	Menengah	135,26
		Rendah	351,54
		Sangat Rendah	608,55
7	Warudoyong	Rendah	722,65
		Sangat Rendah	36,99

Sumber : RPJMD Kota Sukabumi 2018-2023

Gambar 2.5
Peta Rawan Gerakan Tanah di Kota Sukabumi



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

2.1.1.4 Struktur Geologi

Berdasarkan peta geologi susunan litologi batuan di wilayah Kota Sukabumi dan daerah sekitarnya didominasi oleh singkapan batuan vulkanik yaitu produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango berumur Holosen. Secara regional, stratigrafi wilayah ini ditandai oleh batuan sedimen dari Formasi Walat berumur Oligosen Awal yang merupakan satuan yang tertua dijumpai di daerah ini. Formasi Walat ditutupi oleh batuan sedimen dari Formasi Rajamandala dengan kisaran umur dari Oligosen Akhir sampai Miosen Awal. Satuan ini selanjutnya ditutupi oleh Formasi Jampang yang berumur Miosen Awal. Satuan batuan sedimen ini tersingkap di bagian selatan-tenggara dan barat-barat daya dari wilayah Kota Sukabumi.

Formasi batuan sedimen di atas ditutupi oleh endapan vulkanik berumur Holosen yaitu batuan produk gunung api dari aktivitas Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Satuan batuan vulkanik ini tersebar secara luas sehingga sebagian besar dari wilayah Kota Sukabumi didominasi oleh singkapan batuan vulkanik. Endapan vulkanik Gunung Gede (Qvg) terdiri dari breksi tufan

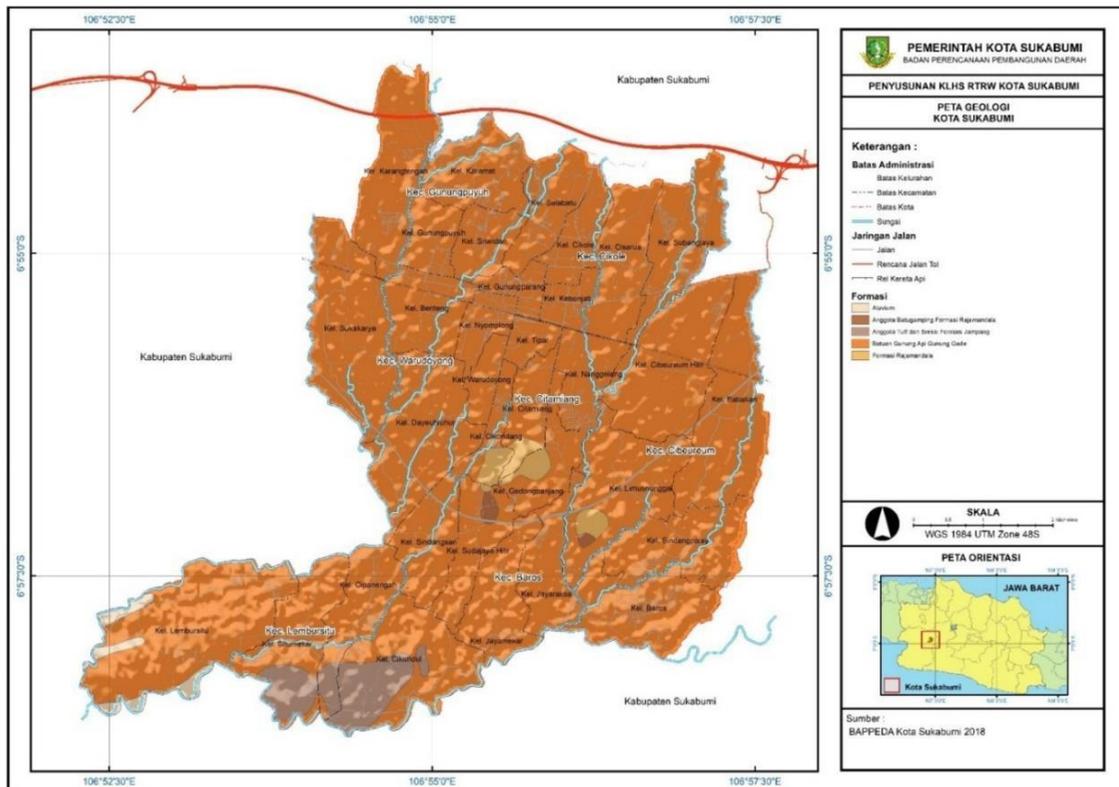
dan lahar, andesit dengan oligoklas-andesin, piroksen dan banyak sekali hornblenda, tekstur seperti trachit, umumnya lapuk sekali. Batuan ini tersebar pada wilayah yang cukup luas mulai dari bagian timur sampai bagian tengah dan mulai dari bagian utara sampai bagian selatan Kota Sukabumi. Sedangkan endapan vulkanik Gunung Pangrango (Qvpo) merupakan endapan yang lebih tua yang tersusun dari lahar dan lava, basal-andesit dengan oligoklas-andesin, labradorit, olivin, piroksen, dan hornblenda. Posisi stratigrafi satuan batuan ini relatif lebih tua daripada endapan vulkanik Gunung Gede dan penyebaran satuan ini terbatas di bagian barat dan barat laut wilayah Kota Sukabumi. Adapun batuan dasar yang menyusun wilayah Kota Sukabumi berdasarkan Kecamatannya dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan gambar 2.6.

Tabel 2.3
Luas dan Jenis Batuan di DAS Cimandiri

No	Kecamatan	Simbol	Formasi	Luas (Ha)
1	Baros	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	550,52
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	8,66
		Tmor	Formasi Rajamandala	1,31
2	Cibeureum	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	913,46
		Tmol	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	3,65
		Tmor	Formasi Rajamandala	15,09
3	Cikole	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	644,37
4	Citamiang	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	333,51
		Tmor	Formasi Rajamandala	49,45
5	Gunungpuyuh	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	514,23
6	Lembursitu	Qa	Aluvium	43,42
		Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	894,87
		Tmjt	Anggota Tuff dan Breksi Formasi	157,06
7	Warudoyong	Qvg	Batuan Gunung Api Gunung Gede	759,64

Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

Gambar 2.6
Peta Geologi Kota Sukabumi



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

2.1.1.5 Hidrologi

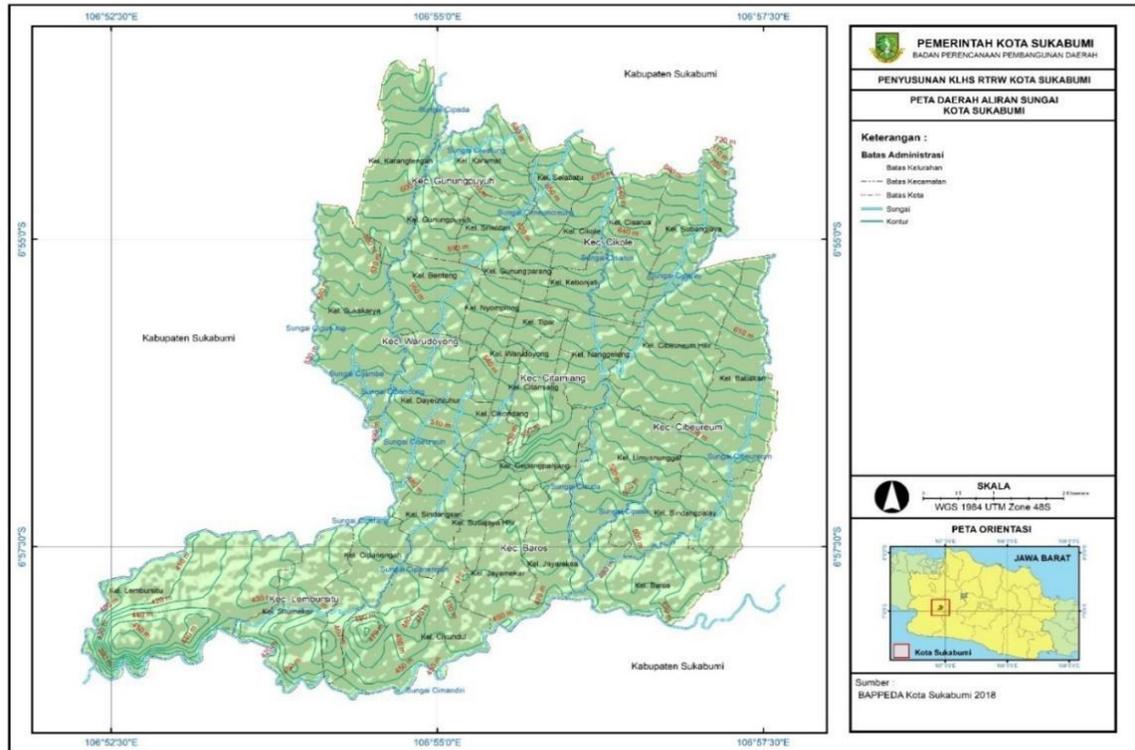
Kondisi air tanah di wilayah Kota Sukabumi dan sekitarnya untuk kebutuhan sehari-hari secara umum cukup tersedia. Sumbernya berasal dari air tanah, mata air dan air tanah tertekan, sebaran akuifer dengan produktivitas tinggi terdapat di sekitar Kota Sukabumi dengan sebaran paling dominan mulai dari barat hingga timur. Di bagian utara merupakan zona air tanah dengan akuifer berproduktifitas sedang dan berpenyebaran luas. Bagian selatan merupakan zona akuifer yang produktivitasnya rendah hingga langka. Kondisi air permukaan maupun air tanah (*groundwater*) baik dari sisi pergerakan, distribusi maupun kualitasnya di Kota Sukabumi sangat erat kaitannya dengan sungai-sungai yang mengalir di wilayah Kota Sukabumi. Daerah Aliran Sungai (DAS) dan sungai-sungai yang melewati Kota Sukabumi dijelaskan Tabel 2.4 dan Gambar 2.7 berikut ini.

Tabel 2.4
Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kota Sukabumi

No	Nama Sungai	Luas DAS (Ha)	Panjang (km)	Debit (m ³ /dtk)
1	Ceger	0,004129	4,129	-
2	Cibeureum	0,0076	7,600	-
3	Salakaso	0,003244	3,244	-
4	Cibitung	0,006125	6,125	-
5	Cisuda	0,009659	9,659	0,40
6	Tonjong	0,004625	4,625	-
7	Cimandiri	0,012705	12,705	4,60
8	Cikapek	0,001851	1,851	0,01
9	Cipelang Leutik	0,003727	3,727	0,08
10	Cipelang	0,01508	15,080	1,26
11	Ciseureuh	0,004827	4,827	0,07
12	Cijambe	0,002252	2,252	0,20
13	Cigunung	0,004252	4,252	0,27
14	Bantarpanjang	0,001908	1,908	-
15	Gunungpuyuh	0,001068	1,068	-
16	Cikujang	0,001359	1,359	-
17	Cipanengah	0,005592	5,592	0,54
18	Ciseupan	0,003583	3,583	-
19	Ciparigi	0,001629	1,629	-
20	Cipada	0,001164	1,164	2,13
21	Ciwalung	0,001773	1,773	0,02
22	Cibandung	0,002847	2,847	0,06
23	Ciharempoy	0,004776	4,776	-
24	Cisarua	0,004127	4,127	0,36
25	Ciaul	0,003420	3,420	-
26	Cipicung	0,001503	1,503	-
27	Cisaray	0,002429	2,429	0,2
28	Tipar	0,003926	3,926	-
29	Cipasir	0,001948	1,948	-

Sumber : Masterplan Drainase Kota Sukabumi, 2014

Gambar 2.7
Peta Daerah Aliran Sungai Kota Sukabumi

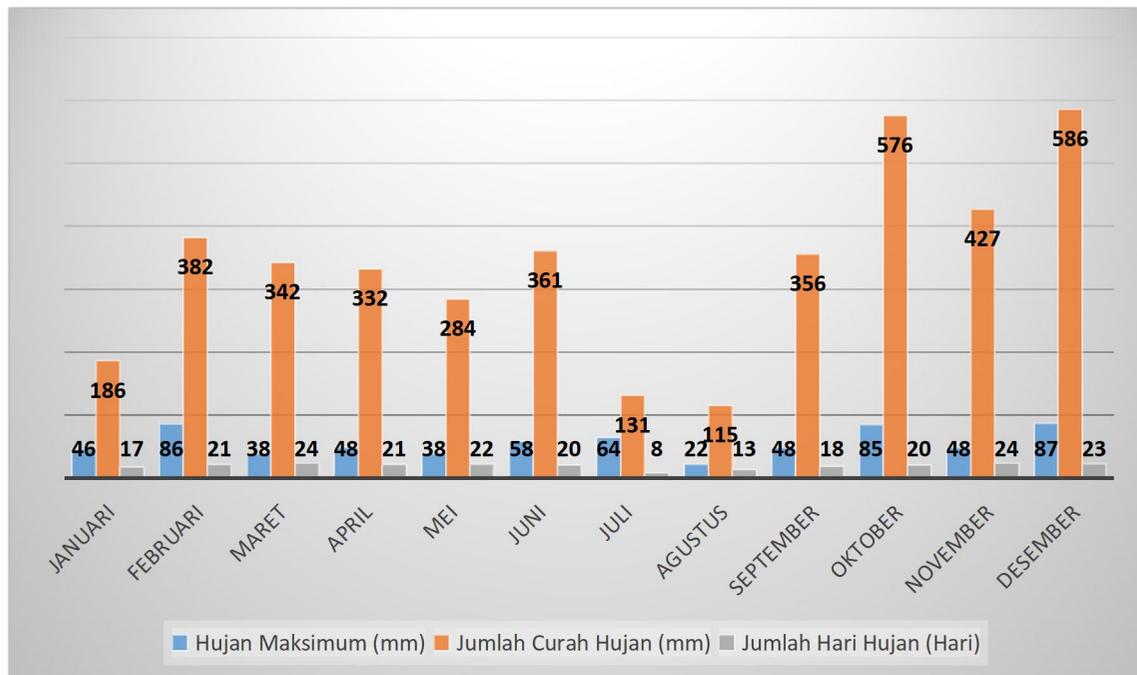


Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

2.1.1.6 Klimatologi

Pemantauan curah hujan di Kota Sukabumi menggunakan data dari 3 (tiga) stasiun pengamatan, yaitu Cimandiri, Ciaul, dan Situmekar. Ketiga stasiun pengamatan tersebut mencatat jumlah curah hujan yang turun di Kota Sukabumi sepanjang Tahun 2022 dengan hari hujan terbanyak pada bulan Maret dan November sebanyak 24 hari dalam setahun. Hasil pengamatan dari stasiun Ciaul, mencatat bahwa pada bulan Desember 2022 adalah bulan dengan curah hujan tertinggi dengan curah hujan sebanyak 586 mm dan sebaliknya curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus 2022 dengan curah hujan sebanyak 115 mm.

Gambar 2.8
Curah Hujan Harian (mm) di Kota Sukabumi Pada Stasiun Ciaul



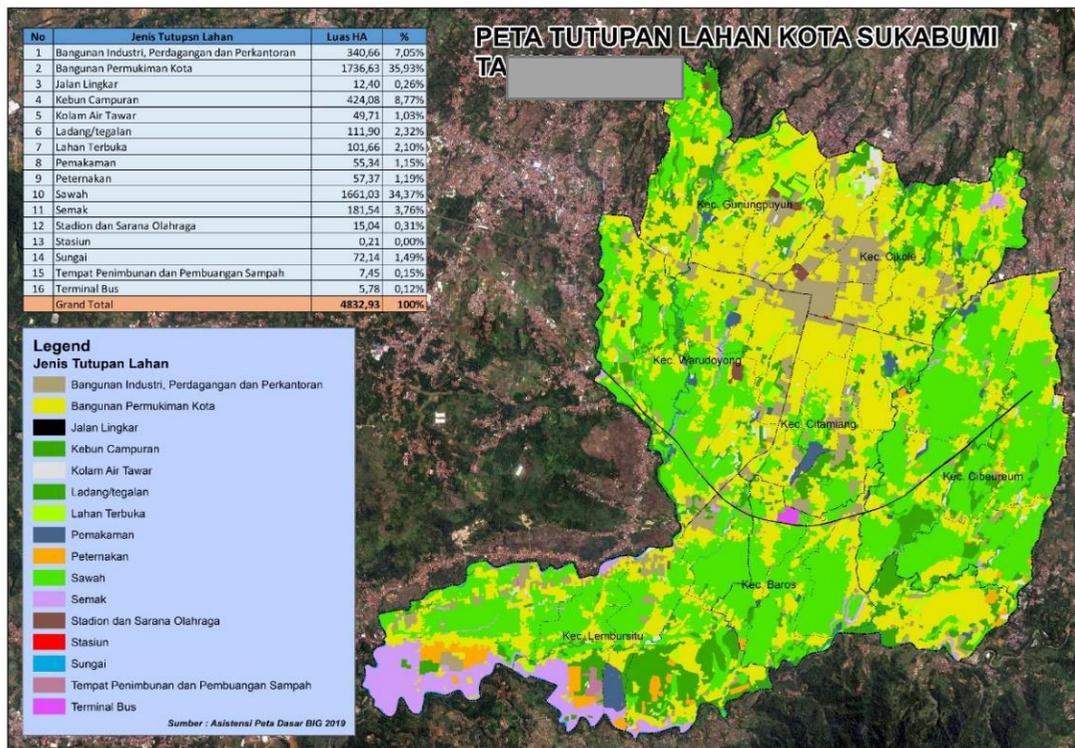
Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka 2023

Keadaan iklim di Kota Sukabumi cenderung basah. Berdasarkan hasil pemantauan dari tiga stasiun pemantau, salahsatu diantaranya yakni Stasiun Ciaul mencatat bahwa setiap bulan di Kota Sukabumi terjadi hujan dengan intensitas tertentu.

2.1.1.7 Pola Penggunaan Lahan

Potensi Pengembangan wilayah di Kota Sukabumi, sesuai dengan Visi Pembangunan Kota Sukabumi sebagai pusat pelayanan berkualitas bidang pendidikan, kesehatan dan perdagangan di Jawa Barat berdasarkan Iman dan Takwa. Kota Sukabumi juga dirancang dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan pendidikan, kesehatan dan perdagangan yang mempunyai jangkauan pelayanan skala kota dan/atau regional, sesuai dengan arahan dalam dokumen RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 dan juga dokumen RTRW Kota Sukabumi Tahun 2011-2031. Potensi pengembangan wilayah Kota Sukabumi pada masa-masa mendatang dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.9
Peta Tutupan Lahan Kota Sukabumi



Sumber data: Bappeda Kota Sukabumi

2.1.1.8 Daerah Rawan Bencana

Daerah rawan bencana yang berada di wilayah Kota Sukabumi, meliputi daerah-daerah sebagai berikut :

- 1 Daerah rawan letusan gunung berapi karena berlokasi relatif dekat dengan kawasan Gunung Gede Pangrango;
- 2 Daerah rawan gempa bumi di mana Kota Sukabumi terletak di jalur daerah rawan gempa Sukabumi-Padalarang-Bandung;
- 3 Daerah rawan banjir yang tersebar di beberapa titik wilayah kota. Di mana secara umum penyebab terjadinya genangan atau banjir di wilayah Kota Sukabumi lebih banyak diakibatkan oleh kondisi saluran yang sudah tidak terawat, tersumbat oleh sampah dan tingginya sedimentasi;
- 4 Daerah rawan gerakan tanah zona patahan aktif, yaitu patahan Cimandiri;
- 5 Daerah longsor di beberapa bagian daerah wilayah kota;

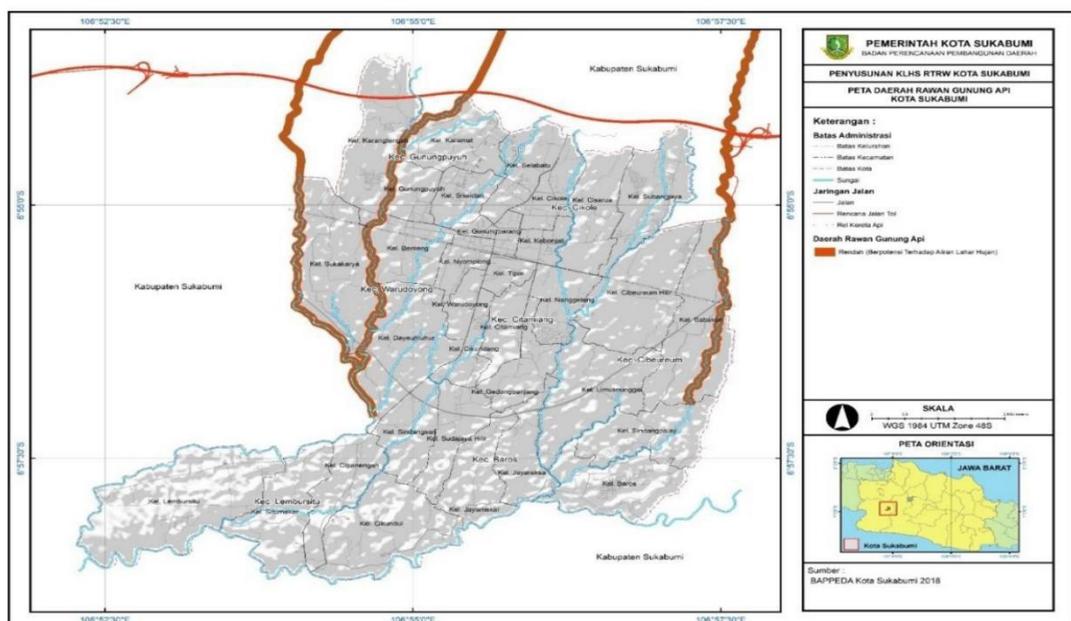
Daerah potensi gempa di Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel 2.6 sedangkan peta rawan letusan gunung berapi serta peta rawan gempa disajikan berturut-turut pada Gambar 2.9 dan Gambar 2.10.

Tabel 2.5
Potensi Gempa di Kota Sukabumi

No	Kecamatan	Potensi gempa	Luas (Ha)
1	Baros	Daerah Aman	97,69
		Daerah Rawan Gempa	462,78
2	Cibeureum	Daerah Aman	835,26
		Daerah Rawan Gempa	96,94
3	Cikole	Daerah Aman	644,37
4	Citamiang	Daerah Aman	382,96
5	Gunungpuyuh	Daerah Aman	514,23
6	Lembursitu	Daerah Aman	49,10
		Daerah Rawan Gempa	1.046,25
7	Warudoyong	Daerah Aman	758,23
		Daerah Rawan Gempa	1,41

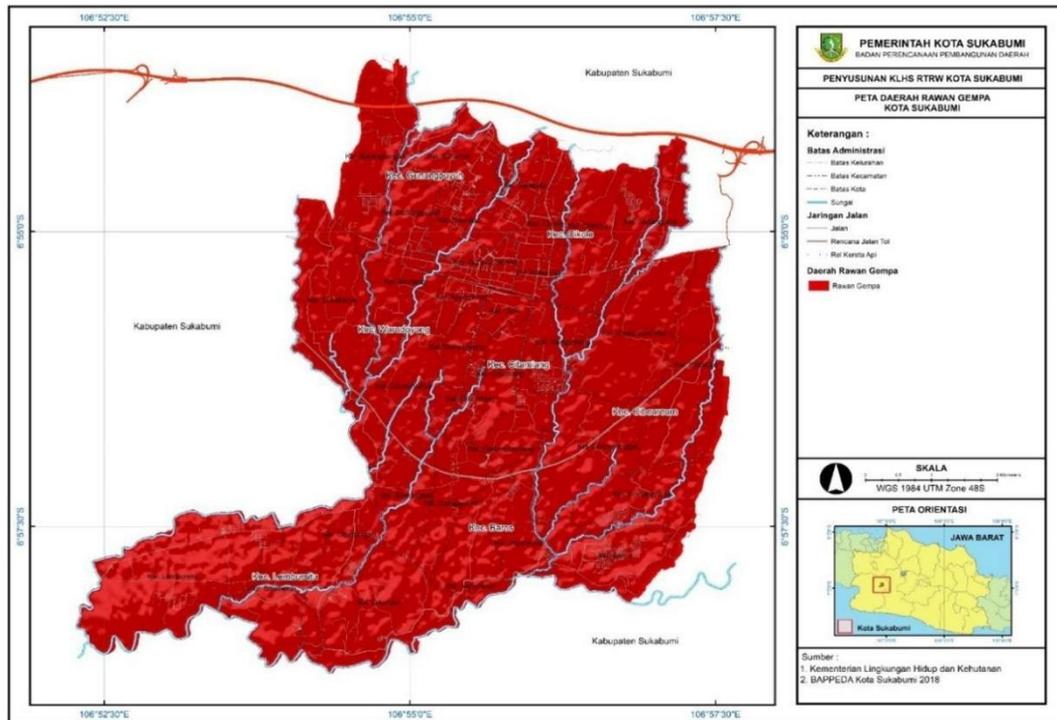
Sumber : Hasil Analisis Peta, 2017

Gambar 2.10
Peta Rawan Gunung Api Kota Sukabumi



Sumber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

Gambar 2.11
Peta Rawan Gempa Kota Sukabumi



umber: RPJMD Kota Sukabumi 2018 – 2023

2.1.1.9 Demografi

Penduduk menurut Badan Pusat Statistik adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografi Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bertujuan menetap. Sedangkan penduduk menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah orang yang mempunyai Kartu Tanda Penduduk dan/atau mempunyai Kartu Keluarga (beridentitas).

Letak Kota Sukabumi yang strategis yaitu berada pada jalur lintasan Ibukota Provinsi Jawa Barat dengan Ibukota Negara, serta didukung oleh infrastruktur yang cukup memadai, menjadikan Kota Sukabumi sebagai salah satu tujuan para migran dari berbagai daerah untuk datang dan tinggal baik sebagai penanam modal maupun sebagai pencari kerja.

Kota Sukabumi dianugerahi wilayah yang sejuk dengan infrastruktur kota yang sudah berdiri sejak dahulu kala. Namun, seperti karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas yang terbatas, yakni 48,33

km², serta jumlah penduduk Tahun 2022 sebanyak 356.410 jiwa, kepadatan penduduk 7.375 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,56%. Laju pertumbuhan dan jumlah penduduk Kota Sukabumi dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.6
Laju Pertumbuhan dan Jumlah Penduduk Kota Sukabumi
Tahun 2018-2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk perTahun (%)
1	2018	326.282	0,77
2	2019	328.680	0,73
3	2020	346.325	1,44
4	2021	350.804	1,73
5	2022	356.410	1,65

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka 2023

Tingkat kepadatan penduduk Kota Sukabumi tahun 2021 berdasarkan hasil proyeksi penduduk adalah sebesar 7.259 jiwa/km². Jika dirinci menurut kecamatan, Citamiang adalah kecamatan terpadat dan Cibeureum menjadi kecamatan dengan tingkat kepadatan terendah. Di sisi lain rasio jenis kelamin penduduk Kota Sukabumi tahun 2021 berada di kisaran angka 101 yang berarti bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Adapun rincian jumlah penduduk masing-masing kecamatan dapat di lihat pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Sukabumi, 2022

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2021	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis kelamin in
Baros	39.548	2,72	11,10	7.087	103
Lembursitu	43.098	2,28	12,09	4.032	99
Cibeureum	47.247	2,87	13,26	5.181	102
Citamiang	53.517	1,19	15,19	13.505	101

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020–2021	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis kelamin
Warudoyong	60.236	1,22	16,90	7.968	103
Gunung Puyuh	49230	1,11	13,81	9.559	103
Cikole	62.897	0,93	17,65	10.112	99
Kota Sukabumi	356.410	1,65	100.00	7.259	101

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1 Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto atau PDRB. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu Atas Dasar Harga Berlaku atau ADHB dan Atas Dasar Harga Konstan atau ADHK. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi, untuk mengetahui struktur perekonomian, untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, dan untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

PDRB atas dasar harga berlaku disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan dengan tujuan untuk melihat struktur (distribusi) perekonomian. Berdasarkan penghitungan PDRB dengan tahun dasar 2010, PDRB Kota Sukabumi atas dasar harga berlaku tahun 2021 sebesar Rp 13,05 triliun, sementara di tahun 2022 nilai tersebut meningkat menjadi Rp 14,19 triliun. Perkembangan PDRB ADHB Daerah Tahun 2018-2022 disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.8
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Sukabumi (Miliar Rupiah) Tahun 2018-2022

No	Tahun	PDRB ADHB
1	2018	11 472,89
2	2019	12 387,69
3	2020	12 401,54
4	2021	13 052,99
5	2022	14 192,25

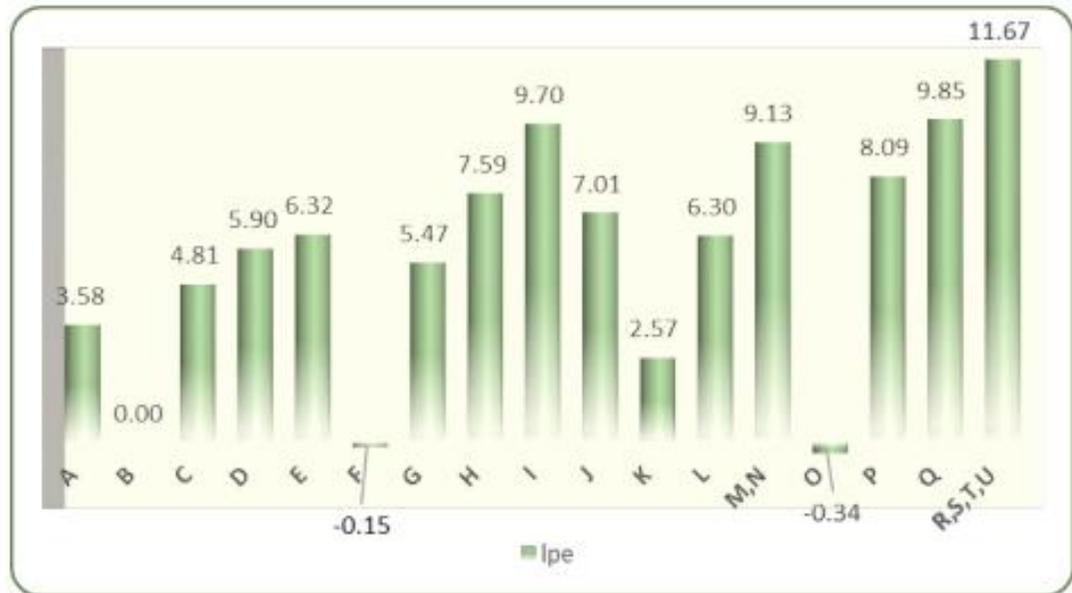
Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

Tabel diatas menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun mengalami peningkatan.

Pertumbuhan perekonomian Kota Sukabumi tahun 2022 menunjukkan kinerja positif. Kota Sukabumi mengalami pertumbuhan sebesar 5,35 persen sepanjang tahun 2022. Gerakan positif dalam perekonomian terjadi pada empat belas dari enam belas lapangan usaha yang terdapat di Kota Sukabumi. Sementara dua lapangan usaha lainnya mengalami kontraksi di 2022.

Kategori R,S,T,U (Jasa lainnya) tumbuh hingga mencapai 2 digit, sehingga memiliki angka pertumbuhan tertinggi di tahun 2022 yaitu mencapai 11,67 persen. Kemudian diikuti oleh kategori Q (Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial) sebesar 9,85 persen, Kategori I (Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum) sebesar 9,70 persen serta Kategori M,N (Jasa Perusahaan) sebesar 9,13 persen. Sementara Kategori O (Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib) serta Kategori F (Konstruksi) mengalami kontraksi di tahun 2022, masing-masing sebesar 0,34 persen dan 0,15 persen.

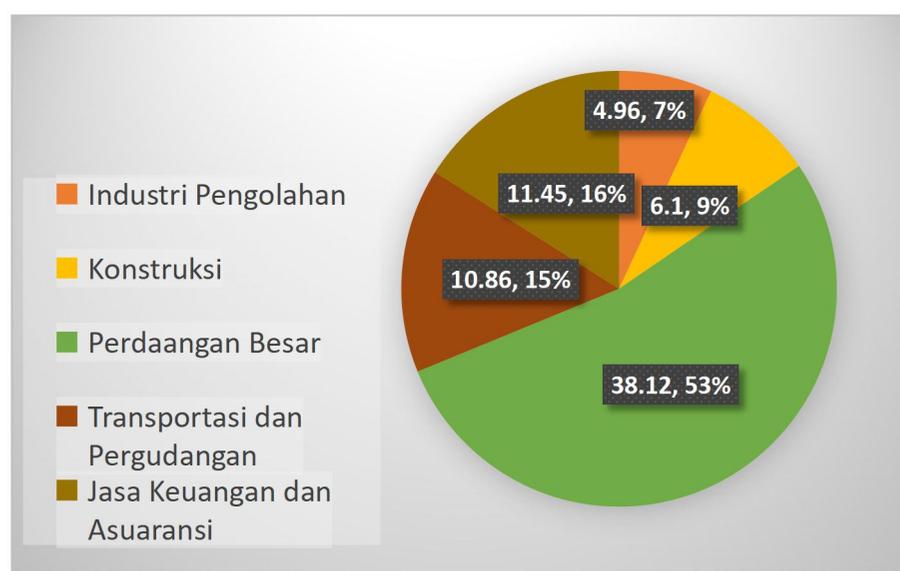
Gambar. 2.12
Pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan Usaha Tahun 2022 (Persen)



Sumber : *Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2022*

Secara umum, struktur perekonomian Kota Sukabumi masih didominasi oleh lima kategori lapangan usaha yaitu kategori C (Industri Pengolahan), F (Konstruksi), G (Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor), H (Transportasi dan Pergudangan) dan kategori K (Jasa Keuangan dan Asuransi). Kategori G memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kota Sukabumi yaitu sebanyak 38,12 persen. Kelima kategori tersebut secara serentak berkontribusi sebesar 72 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi tahun 2022

Gambar. 2.13
Lapangan Usaha dengan Peranan Terbesar Tahun 2022 (Persen)



Sumber : *Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023*

Tabel 2.9
Laju Pertumbuhan dan Distribusi PDRB Menurut Lapangan
Usaha Tahun 2020-2022 (persen).

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan ADHK 2010			Distribusi PDRB ADHB		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,62	0,76	3,58	3,51	3,43	3,46
B. Pertambangan dan Pengalihan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	-1,93	2,49	4,81	5,04	5,04	4,96
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,99	8,98	5,90	0,20	0,21	0,21
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,85	8,02	6,32	0,13	0,14	0,14
F. Konstruksi	-4,06	4,00	0,15	6,80	6,83	6,65
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-2,68	3,64	5,47	38,02	37,86	38,12
H. Transportasi dan Pergudangan	-6,98	3,41	7,59	10,51	10,66	10,86
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-3,41	2,74	9,70	2,93	2,95	3,08
J. Informasi dan Komunikas	10,78	8,23	7,01	4,18	4,26	4,15
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,81	4,79	2,57	11,43	11,66	11,45
L. Real Estat	-0,86	7,76	6,30	1,14	1,17	1,19
M, N. Jasa Perusahaan	-7,67	7,87	9,13	1,70	1,75	1,80
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	-3,93	-2,76	-0,34	4,76	4,47	4,09
P. Jasa Pendidikan	4,39	2,88	8,09	4,50	4,48	4,51
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,82	7,82	9,85	1,89	1,96	2,00
R,S,T,U. Jasa Lainnya	-0,82	1,42	11,67	3,25	3,10	3,33
Produk Domestik Regional Bruto	-1,48	3,71	5,35	100	100	100

Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi Tahun 2022

Pertumbuhan Ekonomi adalah peningkatan produksi barang dan jasa ekonomi dari satu periode ke periode lainnya, pengukurannya dengan cara membandingkan komponen yang dapat mewakili keadaan ekonomi masa kini dan periode sebelumnya. Komponen yang

digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto (PDB).

Laju pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi tahun 2022 kembali menunjukkan trend positif yaitu diangka 5,35%. Keberhasilan pengendalian pandemi, partisipasi masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan vaksinasi, efektivitas kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah serta sinergi yang baik antar otoritas dalam menjaga stabilitas dan percepatan pemulihan ekonomi menjadi faktor utama terjaganya keberlanjutan pemulihan ekonomi.

Pada saat terjadi pandemi Covid 19 di tahun 2020, kontraksi juga terjadi pada seluruh komponen pada PDRB menurut pengeluaran, yang terdalam dialami oleh komponen Pembentukan Modal tetap Bruto. Kemudian di tahun 2021, dimana perekonomian tampak mulai pulih, ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang kembali tumbuh positif karena ditunjang oleh kinerja positif dari seluruh komponen. Perekonomian membaik di tahun 2022 dengan laju pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi dan diwarnai oleh peranan komponen LNPRT yang dominan.

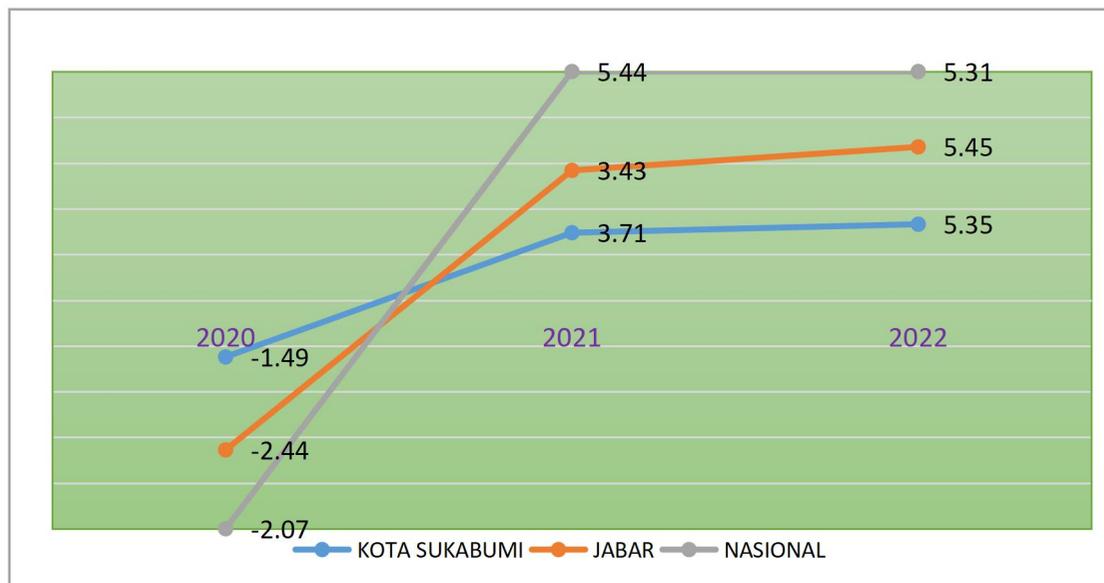
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RPJMD Perubahan 2018-2023 selama kurun waktu 2020-2022 maka di tahun 2022 Kota Sukabumi dapat melampaui target yang ditetapkan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10
Capaian dan Target Laju Pertumbuhan Ekonomi 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Target	-1,50	4,45	3,9
Capaian	-1,48	3,71	5,35

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023
RPJMDP 2018-2023 Kota Sukabumi

Gambar 2.14
Perbandingan capaian pertumbuhan ekonomi dengan provinsi dan nasional 2020-2022



Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

Berdasarkan gambar diatas didapatkan informasi bahwa ekonomi kota sukabumi mengalami pertumbuhan yang signifikan selama periode 2020-2022. Ekonomi Kota Sukabumi tahun 2022 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,1 persen dibanding pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, akan tetapi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional Kota Sukabumi lebih tinggi sebesar 0,04 persen.

Perekonomian Kota Sukabumi berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut lapangan usaha baik Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) ataupun atas dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 pada kurun waktu 2020-2022 terus menunjukkan peningkatan dan pada tahun 2022 mencapai Rp.14.192,25 milyar untuk ADHB sedangkan ADKH mencapai Rp. 9.324,16 milyar yang memperlihatkan tingkat pertumbuhan ekonomi sebagai refleksi capaian yang diperoleh dalam pembangunan.

Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha
2020-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB ADHB			PDRB ADHK 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	435,77	447,76	491,17	274,97	277,05	286,97
B. Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C. Industri Pengolahan	625,53	658,06	704,40	448,37	459,55	481,63
D. Pengadaan Listrik dan Gas	25,19	27,52	29,53	15,59	16,99	18,00
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	16,58	16,58	19,25	10,86	11,73	12,47
F. Konstruksi	843,35	892,12	943,84	578,34	601,49	600,60
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4 715,44	4 941,55	5 410,49	3 447,12	3 572,48	3 767,92
H. Transportasi dan Pergudangan	1 303,93	1 391,72	1 541,49	751,90	777,52	836,52
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	363,05	385,49	436,87	241,16	247,78	271,81
J. Informasi dan Komunikas	516,89	556,42	588,91	493,86	534,52	571,97
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1 417,86	1 522,26	1 624,98	891,90	934,62	958,67
L. Real Estat	141,54	153,33	169,07	108,13	116,52	123,86
M, N. Jasa Perusahaan	210,82	228,98	255,45	135,03	145,66	158,96
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	590,52	583,17	580,24	338,66	329,32	328,20
P. Jasa Pendidikan	558,13	585,18	640,08	334,49	344,12	371,97
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	233,80	256,39	283,83	168,39	181,55	199,43
R,S,T,U. Jasa Lainnya	403,14	405,09	472,64	295,94	300,15	335,16
Produk Domestik Regional Bruto	12 401,54	13 053,04	14 192,25	8 534,72	8 851,05	9 324,16

Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi, BPS Tahun 2022

Pada sisi pengeluaran, penurunan kinerja terjadi pada 3 (tiga) komponen dengan penurunan tertinggi yaitu Perubahan Inventori sebesar -98,01 persen, diikuti Ekspor Barang dan Jasa sebesar -6,79

persen persen, dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar -1,18 persen. Sementara kenaikan kinerja terjadi pada 3 (tiga) komponen lainnya yaitu Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 6,94 persen, diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 5,42 persen, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 0,37 persen.

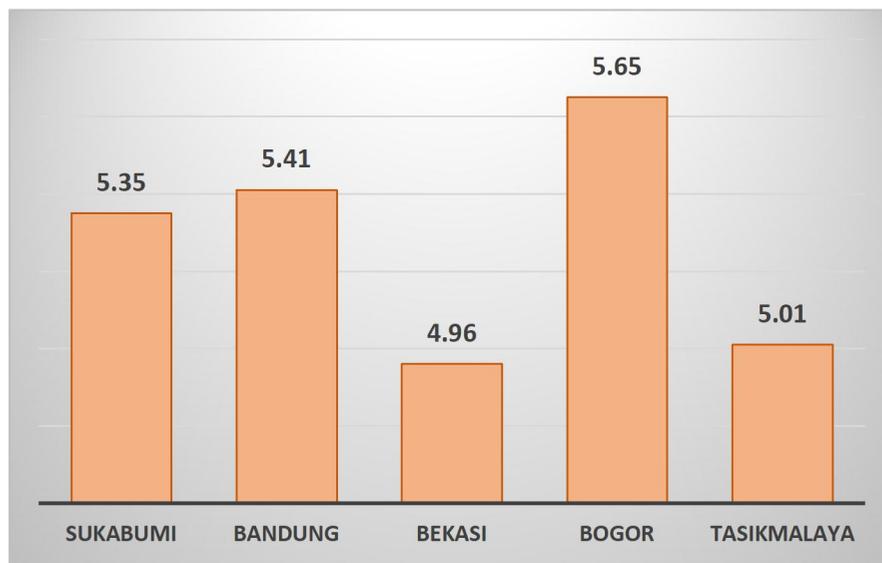
Struktur ekonomi Kota Sukabumi tahun 2022 menurut pengeluaran didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 80,32 persen; diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 15,63 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 10,61 persen. Sementara komponen pengeluaran lainnya memiliki kontribusi relatif kecil

Tabel 2.12
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Pengeluaran Tahun 2020-2022 (miliar rupiah)

Komponen Pengeluaran	Atas Dasar Harga Berlaku			Atas Dasar Harga Konstan 2010		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9 860,16	10 421,22	11 399,16	6 427,90	6 661,37	7 022,52
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	550,33	568,41	626,53	369,67	376,61	402,5
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 435,19	1 488,68	1 506,40	886,09	898,7	888,3
Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 913,68	2 122,79	2 218,41	1 319,26	1 391,21	1 396,15
Perubahan Inventor	203,97	-110,39	-6,37	136,63	-69,15	-3,98
Net Ekspor Barang dan Jasa	-1 561,79	-1 437,66	-1 551,89	-604,83	-407,68	-381,33
Produk Domestik Regional Bruto	12 401,54	13 053,04	14 192,25	8 534,72	8 851,05	9 324,16

Sumber : Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi, BPS Tahun 2022

Gambar 2.15
Perbandingan Laju pertumbuhan ekonomi dengan Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 (persen)



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Jika dibandingkan dengan kota-kota lain di Jawa Barat Laju pertumbuhan Kota Sukabumi berada dibawah kota Bandung dan Bogor, dan diatas kota Bekasi juga Kota Tasikmalaya.

2.1.2.2 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu gambaran makro rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk selama satu tahun dalam suatu wilayah tertentu dan biasanya digunakan sebagai indikator tingkat kemakmuran. PDRB Perkapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk, sementara PDRB per kapita atas harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi penduduk di suatu wilayah. Angka pendapatan per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Berikut menunjukkan perkembangan PDRB per kapita dari tahun 2020 hingga 2022 atas dasar harga berlaku maupun harga konstan.

Tabel 2.13
PDRB Per Kapita Kota Sukabumi Tahun 2020-2022 (Juta Rupiah)

No	PDRB Per Kapita (Juta Rupiah)	2020	2021*	2022**
1	Atas Dasar Harga Berlaku	35,93	37,21	39,82
2	Atas Dasar Harga Konstan	24,72	25,23	26,16
Persentase Pertumbuhan PDRB per kapita (%)		-6,80	2,05	3,69

Sumber: *Pertumbuhan Ekonomi Kota Sukabumi, 2023*

Dengan positifnya pertumbuhan ekonomi menyebabkan pendapatan per kapita Kota Sukabumi (PDRB per Kapita) pada tahun 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. PDRB per Kapita ADHK naik sebesar Rp. 2,61 juta sedangkan PDRB per Kapita ADHB Kota Sukabumi naik sebesar Rp.0,93 juta.

Tabel 2.14
Capaian dan Target PDRB Perkapita ADHK Kota Sukabumi 2020-2022 (Juta Rupiah)

Uraian	2020	2021	2022
Target	25,6	26,3	25,80
Capaian	24,72	25,23	26,16

Sumber : *Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023*
RKPD 2021, RKPD 2022

Pencapaian target PDRB per Kapita ADHK Kota Sukabumi, untuk kurun waktu 2020-2022 terlihat dari tabel diatas, dimana tahun 2020 dan 2021 target tidak tercapai ini bisa di prediksi karena pengaruh pandemi covid-19, baru di tahun 2022 target bisa dicapai karena geliat perekonomian yang mulai terlihat di seluruh sektor.

Tabel 2.15
Capaian dan Target PDRB Perkapita ADHB Kota Sukabumi 2020-2022 (Juta Rupiah)

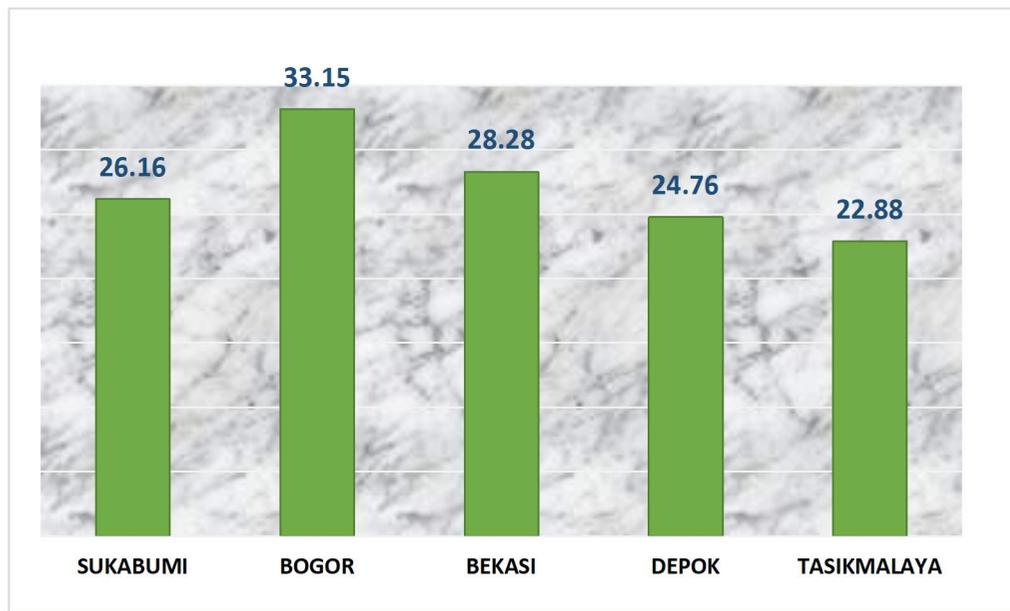
Uraian	2020	2021	2022
Target	36,60	37,71	38,52
Capaian	35,93	37,21	39,82

Sumber : *Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023*
RKPD 2021, RKPD 2022

Sama halnya dengan PDRB per Kapita ADHB Kota Sukabumi, untuk kurun waktu 2020-2022, hanya target di tahun 2022 saja yang bisa dicapai.

PDRB per Kapita Kota Sukabumi dibandingkan dengan beberapa kota lainnya di Jawa Barat masih berada dibawah Kota Bogor dan Kota Bekasi, akan tetapi ada diatas Kota Depok dan Kota Tasikmalaya.

Gambar 2.16
Perbandingan PDRB Per Kapita ADHK dengan Kota lainnya di Provinsi Jawa Barat tahun 2022 (Juta Rupiah)

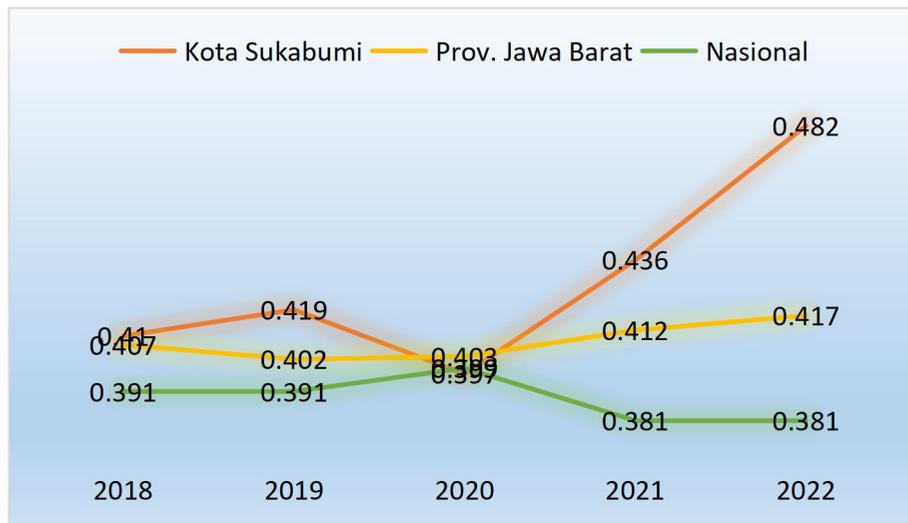


Sumber : Provinsi Jawa Barat Dalam Angka, 2023

2.1.2.3 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Pada tahun 2018-2022, indeks Gini Kota Sukabumi menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada Tahun 2022 Tingkat ketimpangan pendapatan sebesar 0,482 termasuk dalam kategori ketimpangan sedang, Perkembangan Indeks Gini Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama periode 2018 - 2022 disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.17
Perbandingan Indeks Gini Kota Sukabumi, Jawa Barat dan Nasional
Tahun 2018-2022



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

Tahun 2018-2020 Indeks Gini Kota Sukabumi tidak menunjukkan perbedaan terlalu jauh disbanding nasional dan Jawa Barat akan tetapi mulai tahun 2021 perbedaan yang cukup signifikan terjadi bahkan di tahun 2022 tinggi sekali perbedaannya dengan nasional berbeda 0,101 point sedangkan dengan Jawa Barat berbeda 0,065 point.

Berdasarkan analisis dari Bank Dunia ada 4 (empat) penyebab kenapa terjadi ketimpangan:

1. Ketimpangan peluang, yang tercermin pada nasib anak-anak dari keluarga miskin, yang terpengaruh oleh tempat mereka dilahirkan atau pendidikan orang tua mereka. Menurut Bank Dunia, awal yang tidak adil dapat menentukan kurangnya peluang bagi mereka selanjutnya.
2. Ketimpangan pasar tenaga kerja, dimana pekerja dengan keterampilan tinggi menerima gaji yang lebih besar, dan tenaga kerja lainnya hampir tidak memiliki peluang untuk mengembangkan keterampilan mereka. Hal ini mengakibatkan mereka terperangkap dalam pekerjaan informal dengan produktivitas rendah dan pemasukan yang kecil.
3. Konsentrasi kekayaan, dimana kaum elit memiliki aset keuangan seperti properti atau saham, yang ikut mendorong ketimpangan saat ini dan masa depan.
4. Ketimpangan dalam menghadapi guncangan. Hal ini terlihat saat terjadi guncangan, dimana masyarakat miskin dan rentan akan

lebih terkena dampak. Guncangan akan menurunkan kemampuan mereka untuk memperoleh pemasukan dan melakukan investasi kesehatan dan pendidikan.

Jika dilihat dari ke empat penyebab diatas masyarakat kota sukabumi memiliki kemungkinan disetiap penyebab tersebut, terutama dalam hal ketimpangan ketika menghadapi guncangan misalkan dengan adanya Pandemi Covid-19.

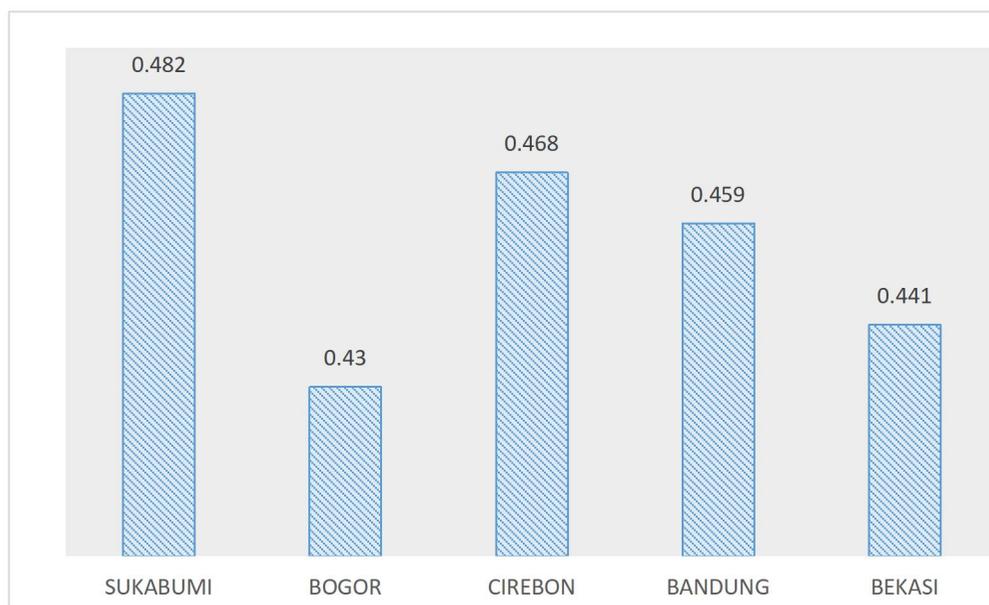
Tabel 2.16
Capaian dan Target Gini Ratio 2020-2022

Uraian	2020	2021	2022
Target	0,412	0,410	0,427
Capaian	0,397	0,436	0,482

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023
RPJMDP 2018-2023 Kota Sukabumi

Selama kurun waktu 2019-2021 hanya tahun 2020 capaian Gini Rasio mencapai target malah lebih kecil dari target yang ditetapkan, bahkan dibandingkan dengan beberapa kota lainnya di Jawa Barat Gini Rasio Kota Sukabumi di tahun 2022 masih tertinggi.

Gambar 2.18
Perbandingan Indeks Gini Kota Sukabumi dengan Kota lainnya di Jawa Barat Tahun 2022



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2023

2.1.2.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tingkat kesejahteraan sosial dapat dilihat dari pembangunan manusia yang dilakukan. Keberhasilan pembangunan manusia terindikasikan oleh beberapa indikator kinerja, yang paling banyak dipakai adalah penggunaan indikator indeks pembangunan manusia atau IPM atau disebut juga *Human development index* atau HDI yang diperkenalkan oleh *United Nation Developmen Programme* (UNDP). UNDP mengukur pembangunan manusia melalui tiga dimensi dasar yaitu :

1. umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);
2. pengetahuan (*knowledge*); dan
3. standar hidup layak (*decent standard of living*).

Nilai capaian IPM dapat digunakan untuk membandingkan keberhasilan dalam upaya pembangunan manusia antar daerah atau negara.

Pada tahun 2010, UNDP melakukan perubahan metodologi dalam perhitungan IPM, ada beberapa alasan yang melandasi perubahan metodologi perhitungan yaitu:

1. Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik;
2. Produk domestik bruto atau PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah; dan
3. Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

Dua perubahan yang dilakukan yaitu perubahan indikator dan perubahan metode perhitungan. Perubahan indikator yang dilakukan yaitu: Angka Melek Huruf atau AMH pada metode lama diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah atau HLS dan Produk Domestik Bruto atau PDB per kapita diganti dengan Produk Nasional Bruto atau PNB per kapita. Sedangkan metode perhitungan berubah dari metode agregasi diubah dari rata-rata aritmatik menjadi rata-rata geometrik.

Pembangunan manusia di Kota Sukabumi terus memperlihatkan perkembangan yang positif. Selama periode 3 (tiga) tahun terakhir, IPM Kota Sukabumi mengalami kenaikan hingga pada tahun 2022 mencapai 75,4 poin. Pertumbuhan IPM tertinggi terjadi pada periode 2021-2022 yang tumbuh sebesar 1,07 persen. Pasca Pandemi COVID-19 telah berimbas pada pertumbuhan IPM di tahun 2022, masyarakat mulai bangkit kembali menata kehidupannya di berbagai aspek sehingga IPM mengalami kenaikan sebesar 0,8 poin.

Gambar 2.19
Trend Indeks Pembangunan Manusia dan Pertumbuhannya Kota Sukabumi 2020-



2022

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, diolah Bappeda Kota Sukabumi, 2023

Tabel 2.17
IPM beserta Komponennya Kota Sukabumi 2020-2022

Indikator	Satuan	2020	2021	2022
Usia Harapan Hidup	Tahun	72,40	72,58	72,85
Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,47	13,58	13,59
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,59	9,81	10,14
Pengeluaran per Kapita Disesuaika	Ribu Rupiah	10.999	10.942	11.229
Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	74,21	74,6	75,4

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

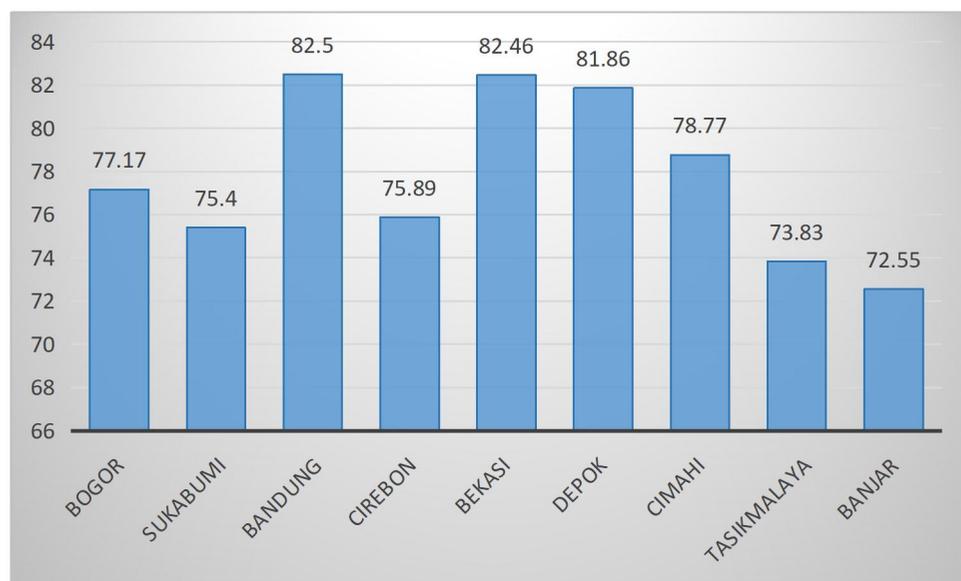
Tabel 2.18
Capaian dan Target Indeks Pembangunan Manusia 2020-2022
(Poin)

Uraian	2020	2021	2022
Target	74,20	74,45	74,60
Capaian	74,21	74,60	75,40

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023
RPJMDP 2018-2023 Kota Sukabumi

Selama kurun waktu 2020-2022 capaian IPM kota sukabumi selalu mencapai target dan bahkan melebihi target yang ditetapkan.

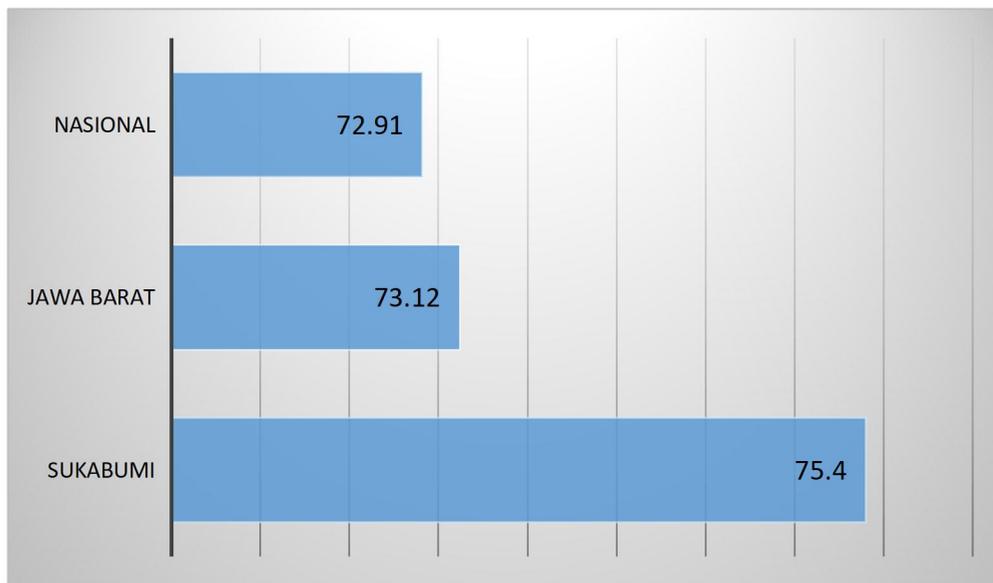
Gambar 2.20
Perbandingan IPM Kota Sukabumi dengan Kota-Kota di Jawa Barat
Tahun 2022



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Dibandingkan dengan 8 (delapan) Kota lainnya di Jawa Barat capaian IPM Kota Sukabumi masih rendah, yaitu berada di urutan ke tiga terendah setelah Kota Banjar dan Kota Tasikmalaya, ini menjadi pekerjaan rumah bagi daerah untuk terus meningkatkan pendapatan yang layak, kesehatan dan pendidikan yang baik.

Gambar 2.21
Perbandingan capaian IPM dengan Provinsi Jawa Barat dan nasional 2022



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Untuk Capaian IPM dari data yang ditampilkan diatas memberikan informasi yang menggembirakan, artinya masyarakat kota sukabumi dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan yang layak, kesehatan dan pendidikan yang baik. Kriteria IPM yang dicapai adalah kategori tinggi ($70 < IPM < 80$) dan dibandingkan dengan provinsi dan Nasional IPM Kota Sukabumi jauh lebih besar capaiannya untuk tahun 2022.

Dimensi pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang.

Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020-2022, HLS di Kota Sukabumi telah meningkat sebesar 0,12, sementara RLS meningkat sebesar 0,55 tahun. HLS menunjukkan peningkatan tahun bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun di masa

mendatang. Pada tahun 2022 HLS di Kota Sukabumi telah mencapai 13,59 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan hingga lulus SMA atau hingga menempuh jenjang Diploma I.

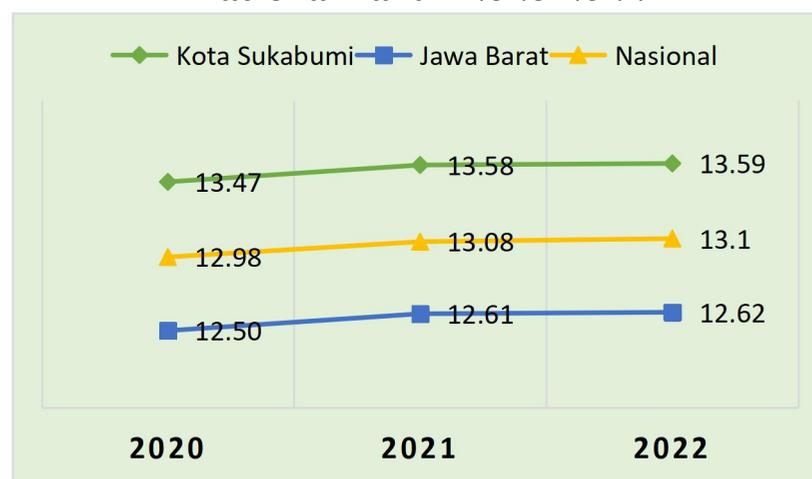
Gambar 2.22
Tren Harapan lama Sekolah dan Laju Pertumbuhannya
Kota Sukabumi 2020-2022



Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

Laju Pertumbuhan HLS Kota Sukabumi tertinggi pada tahun 2021 sebesar 0,82%. Perkembangan HLS Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional disajikan pada Gambar berikut ini:

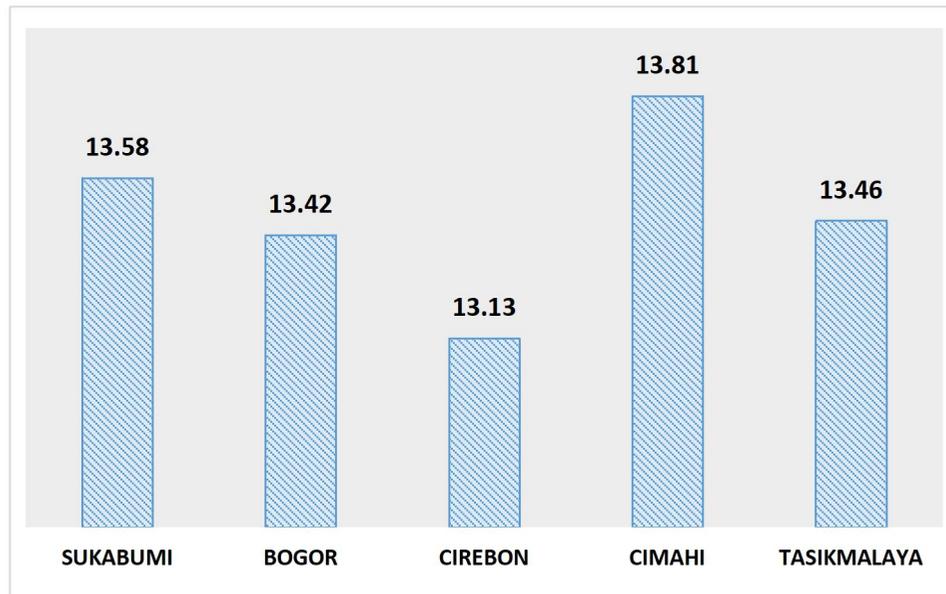
Gambar 2.23
Perbandingan Angka HLS Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan
Nasional Tahun 2020-2022



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

Dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional selama kurun waktu 2020-2022 HLS Kota Sukabumi selalu tertinggi, sementara itu dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Jawa Barat HLS Kota Sukabumi masih lebih tinggi dibandingkan Kota Bogor, Cirebon dan Tasikmalaya tetapi masih dibawah Kota Cimahi.

Gambar 2.24
Perbandingan Angka HLS Kota Sukabumi dengan kota lainnya di Jawa Barat 2022



Sumber: Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Tabel 2.19
Capaian dan Target Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 2020-2022 (Tahun)

Uraian	2020	2021	2022
Target	13,64	13,47	13,58
Capaian	13,47	13,58	13,59

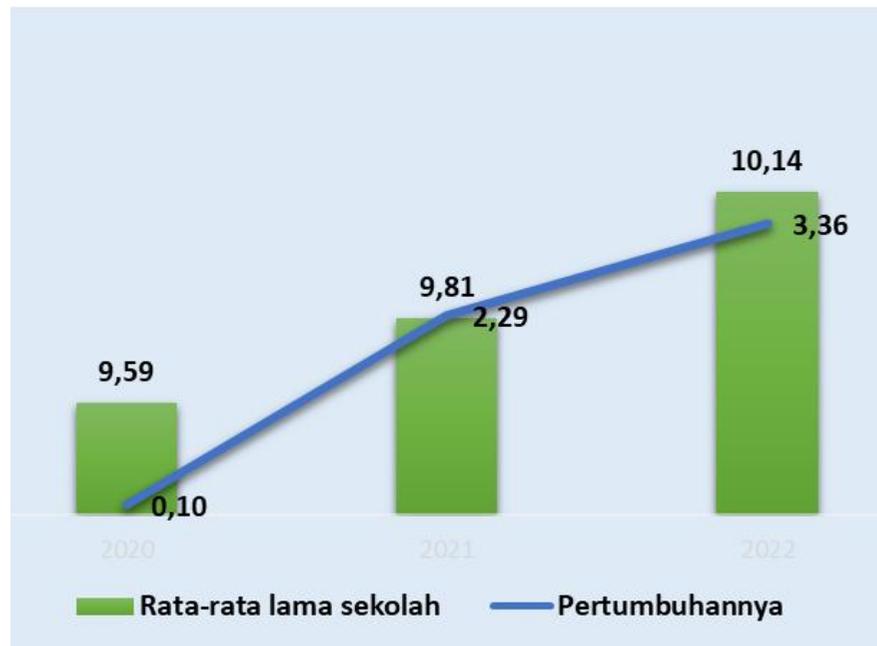
Sumber : BPS Kota Sukabumi, 2022
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel diatas selama kurun waktu 2020-2022 Capaian HLS Kota Sukabumi mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Sementara RLS penduduk usia 25 tahun ke atas di Kota Sukabumi mengalami peningkatan dari 9,59 tahun pada tahun 2020 menjadi 10,14 tahun di tahun 2022 . Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia Kota Sukabumi yang lebih baik. Pada tahun 2022, secara

rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah bersekolah selama 10,14 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas X (atau setara SMA kelas 1).

Gambar 2.25
Tren Rata-rata Lama Sekolah dan Laju Pertumbuhannya
Kota Sukabumi 2020-2022



Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

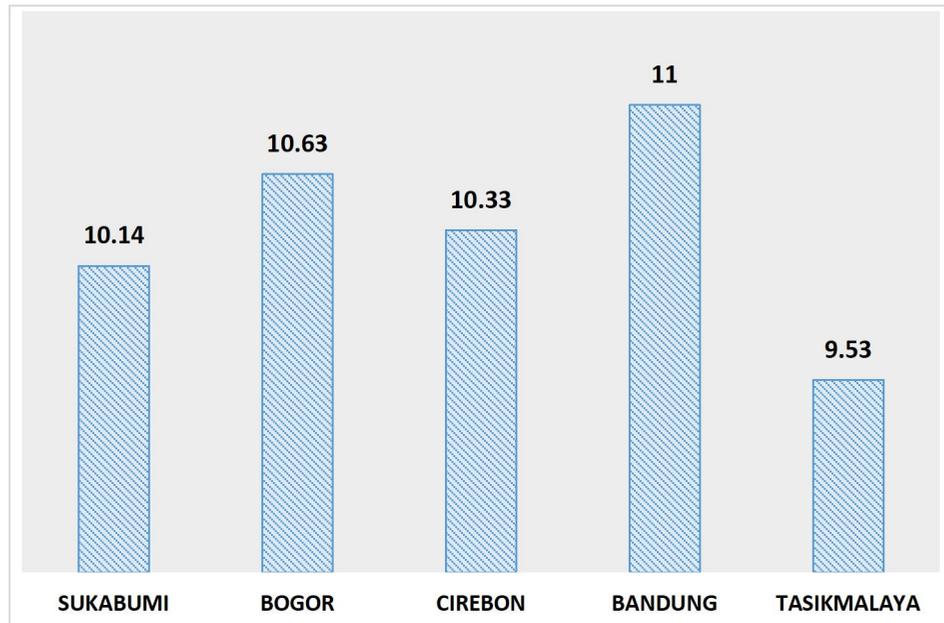
Gambar 2.26
Perkembangan Angka RLS Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2022



Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

Kota Sukabumi pada tahun 2022 capaian rata-rata lama sekolahnya adalah 10,14 lebih tinggi dibandingkan capaian RLS Jawa Barat dan Nasional.

Gambar 2.27
Perbandingan Angka RLS Kota Sukabumi dengan kota lainnya di Jawa Barat 2022



Sumber: Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Tabel 2.20
Capaian dan Target Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 2019-2021(Tahun)

Uraian	2020	2021	2022
Target	9,58	10,34	9,81
Capaian	9,59	9,81	10,14

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi

Dalam kurun waktu 2020-2022 capaian angka RLS Kota Sukabumi terus meningkat dan mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Salah satu indikasi meningkatnya derajat kesehatan suatu wilayah adalah rata-rata umur harapan hidup yang lebih lama. Peningkatan derajat kesehatan merupakan salah satu prioritas pembangunan daerah di Provinsi Jawa Barat melalui desentralisasi layanan kesehatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat direpresentasikan oleh indikator Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir yang dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, aksesibilitas, SDM kesehatan hingga kualitas pelayanan kesehatan.

Selama periode Tahun 2020-2022, Kota Sukabumi telah berhasil meningkatkan UHH saat lahir sebesar 0,45 tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,27 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH saat lahir di Kota Sukabumi sebesar 72,4 tahun dan tahun 2022 meningkat menjadi 72,85 tahun. Peningkatan UHH saat lahir mengindikasikan kemajuan pembangunan bidang kesehatan.

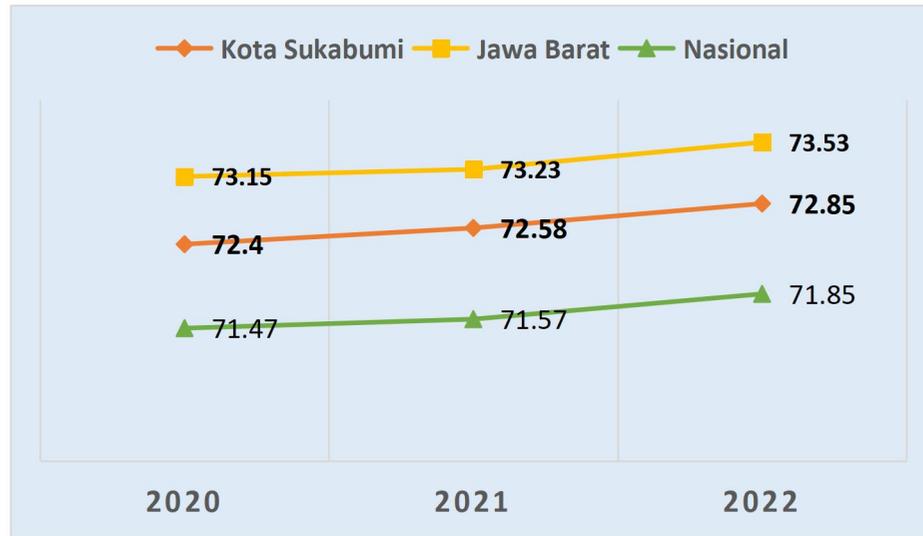
Gambar 2.28
Tren Umur Harapan Hidup Saat Lahir dan Laju Pertumbuhannya
Kota Sukabumi 2020-2022



Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

Selama kurun waktu 2020-2022 capaian AHH Kota Sukabumi dibandingkan Jawa Barat dan Nasional masih tertinggi ini menunjukkan derajat kesehatan masyarakat Kota Sukabumi dalam kategori baik.

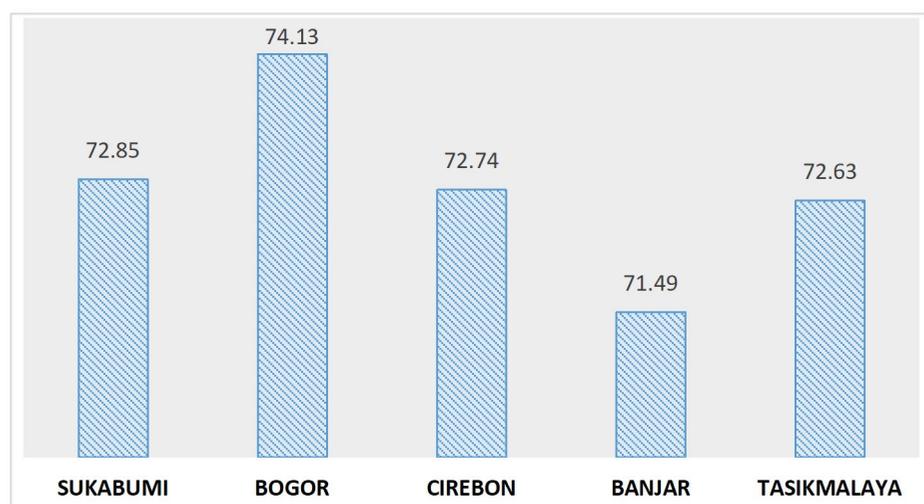
Gambar 2.29
Perkembangan Angka AHH Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2022



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Dalam skala regional provinsi Jawa Barat, pada tahun 2022 capaian UHH secara rata-rata sudah diatas 70 tahun. Umur Harapan Hidup Kota Sukabumi lebih lama dibandingkan Kota Cirebon, Banjar dan Tasikmalaya, namun capaian UHH kota Sukabumi masih dibawah capaian kota Bogor.

Gambar 2.30
Perbandingan AHH Kota Sukabumi dengan kota lainnya di Jawa Barat 2022



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Tabel 2.21
Capaian dan Target Umur Harapan Hidup (UHH)
2020-2022 (Tahun)

Uraian	2020	2021	2022
Target	72,10	72,58	72,58
Capaian	72,40	72,58	72,85

*Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023
Renstra Dinas Kesehatan Kota Sukabumi 2018-2023*

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir Angka Harapan Hidup yang merupakan cerminan tingkat derajat Kesehatan masyarakat Kota Sukabumi tingkat realisasi/capaiannya selalu mencapai target yang ditetapkan.

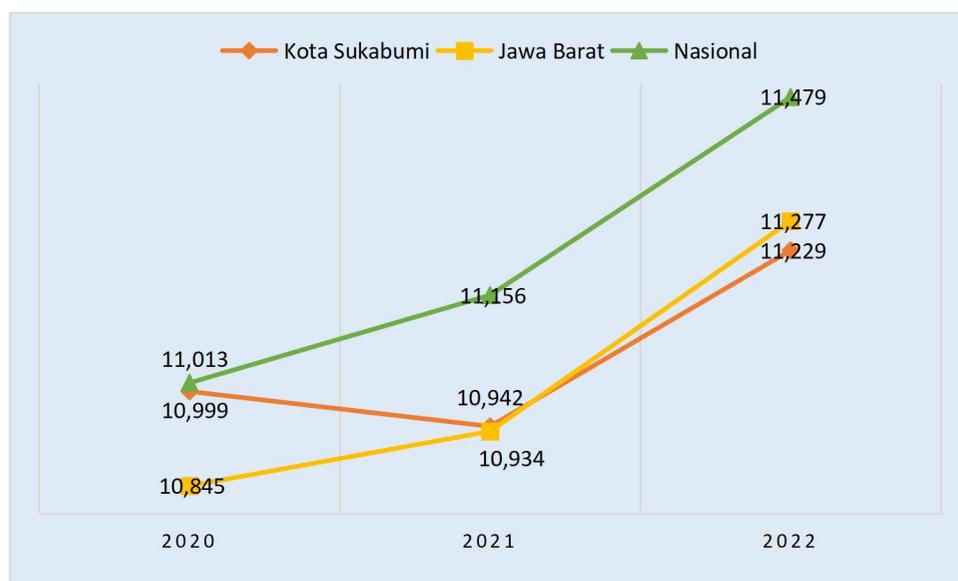
Dimensi lainnya dari IPM adalah standar hidup layak yang diukur dengan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan. Kurun waktu Tahun 2020-2022 pengeluaran per kapita masyarakat meningkat sebesar Rp230.000 dari tahun 2020 sebesar Rp10.999.000 menjadi sebesar Rp11.299.000 di tahun 2022, pertumbuhan tertinggi juga terjadi pada tahun 2022 ini yaitu sebesar 2,62%. Tahun 2021 pengeluaran per kapita sebesar Rp10.942.000 yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp57.000. Penurunan pengeluaran per kapita mengindikasikan penurunan daya beli masyarakat secara umum. Terlihat dari tabel dibawah bahwa tahun 2020 ketika pandemi covid-19 melanda adalah tahun terberat terjadinya penurunan daya beli masyarakat (pertumbuhan -1,83%). Pasca Pandemi Covid-19 Daya beli masyarakat kembali meningkat terutama di tahun 2022.

Gambar 2.31
Tren Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan dan Laju Pertumbuhannya Kota Sukabumi 2020-2022 (Ribu Rupiah/orang/tahun)



Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

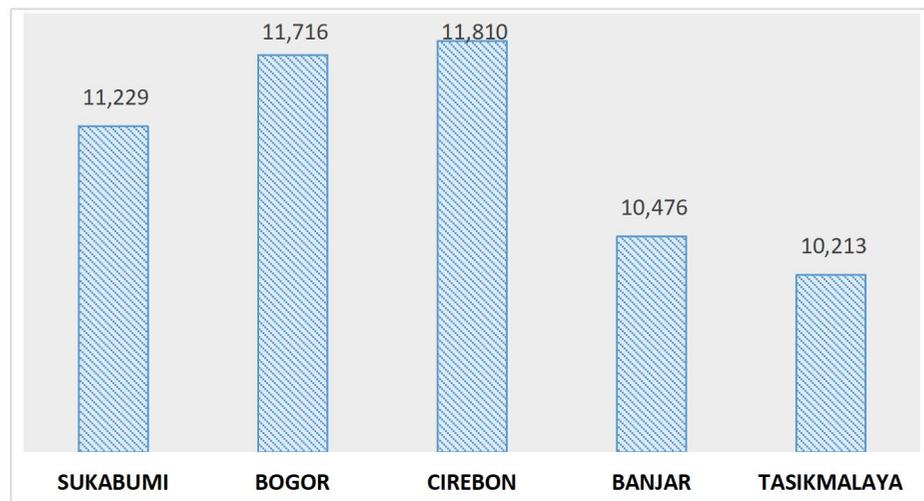
Gambar 2.32
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 (Ribu Rupiah/orang/tahun)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Selama kurun waktu 2020-2022 Pengeluaran per Kapita Kota Sukabumi menunjukkan tren peningkatan dan capaiannya diatas Provinsi Jawa Barat akan tetapi masih dibawah capaian nasional.

Gambar 2.33
Perbandingan Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kota Sukabumi dengan kota lainnya di Jawa Barat 2022 (Ribu Rupah/orang/tahun)



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Dalam skala regional provinsi Jawa Barat, pada tahun 2022 capaian Pengeluaran Per Kapita secara rata-rata sudah diatas Rp.10.000.000,-/orang/tahun. Pengeluaran per Kapita Kota Sukabumi lebih tinggi dibandingkan Kota Banjar dan Tasikmalaya, namun capaian kota Sukabumi masih dibawah capaian kota Bogor dan Kota Cirebon.

Tabel 2.22
Capaian dan Target Pengeluaran per kapita Kota Sukabumi 2020-2022 (Ribu Rupah/orang/tahun)

Uraian	2020	2021	2022
Target	10.648	10.806	10.942
Capaian	10.999	10.942	11.229

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

Dari target yang ditetapkan daerah selama kurun waktu 2020-2022, selama tiga tahun tersebut pula target tetap tercapai, dan capaian tahun 2022 merupakan capaian tertinggi.

2.1.2.5 Persentase Penduduk Miskin

Kemiskinan sering sekali menjadi penghambat laju pembangunan manusia, misalnya penduduk miskin sering mengalami

kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan sehingga berpengaruh buruk bagi hidupnya. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain. Oleh sebab itu, penanggulangan kemiskinan perlu aksi yang mencakup berbagai dimensi yang berkaitan. Persentase penduduk miskin mengalami penurunan dibanding kondisi 2021 dari 8,25 persen menjadi 8,02 persen. Hal ini berarti jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi berkurang sebesar ±610 ribu jiwa.

Gambar 2.34
Tren Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi
2020-2022



Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar. Berdasarkan tabel di bawah dalam kurun waktu tiga tahun terakhir indeks kedalaman kemiskinan tertinggi di Kota Sukabumi sebesar 1,39 persen pada tahun 2021, dan terendah sebesar 1,17 persen di tahun 2020, dan meningkat lagi pada tahun 2021 menjadi 1,39 persen. Penurunan angka ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan.

Tabel 2.23
Indikator Kemiskinan Kota Sukabumi Tahun 202-2022

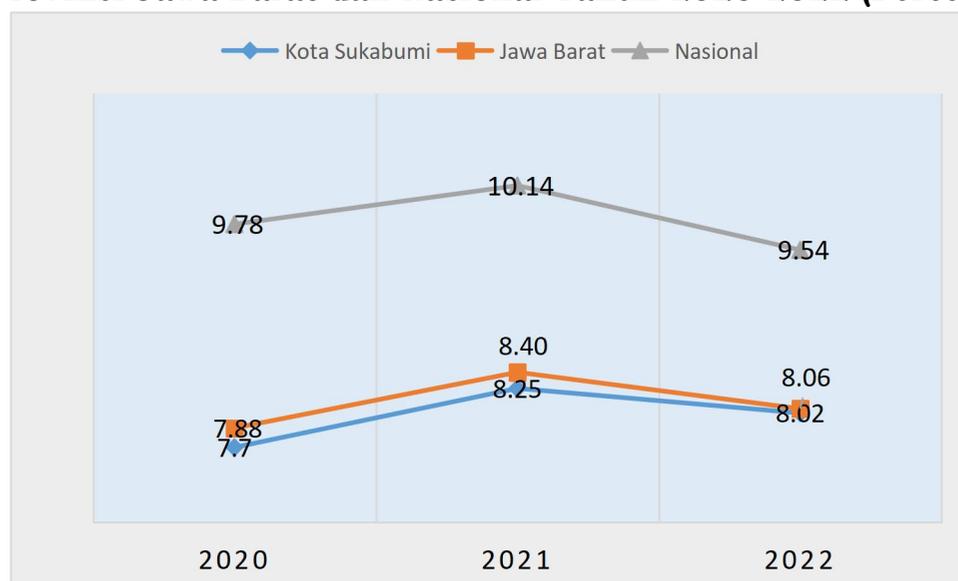
No.	Indikator	Indikator Kemiskinan		
		2020	2021	2022
1	Jumlah Penduduk Miskin (juta jiwa)	25,4	27,19	26,59
2	Persentase penduduk miskin	7,7	8,25	8,02
3	Garis Kemiskinan (Rupiah/kapita/bulan)	547.415,00	567.734,00	594.118,00
4	Indeks Kedalaman kemiskinan (P1)	1,17	1,39	1,27
5	Indeks Keparahan kemiskinan (P2)	0,22	0,36	0,38

Sumber: Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) merupakan indeks yang memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Berdasarkan tabel di atas, Indeks Keparahan Kemiskinan tertinggi sebesar 0,38 persen di tahun 2022, dan terendah sebesar 0,22 persen di tahun 2020. Kondisi keparahan kemiskinan di Kota Sukabumi sebesar 0,38 persen pada tahun 2022 yang berarti naik dari tahun sebelumnya, memiliki makna bahwa sebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sukabumi meningkat.

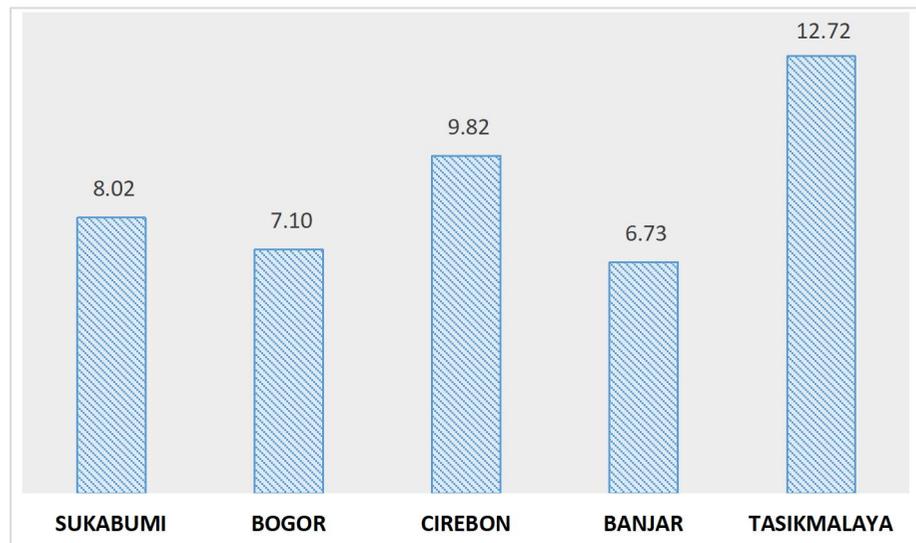
Dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat dan Nasional, capaian persentase penduduk miskin Kota Sukabumi berada dibawahnya. Tersaji dalam gambar berikut:

Gambar 2.35
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

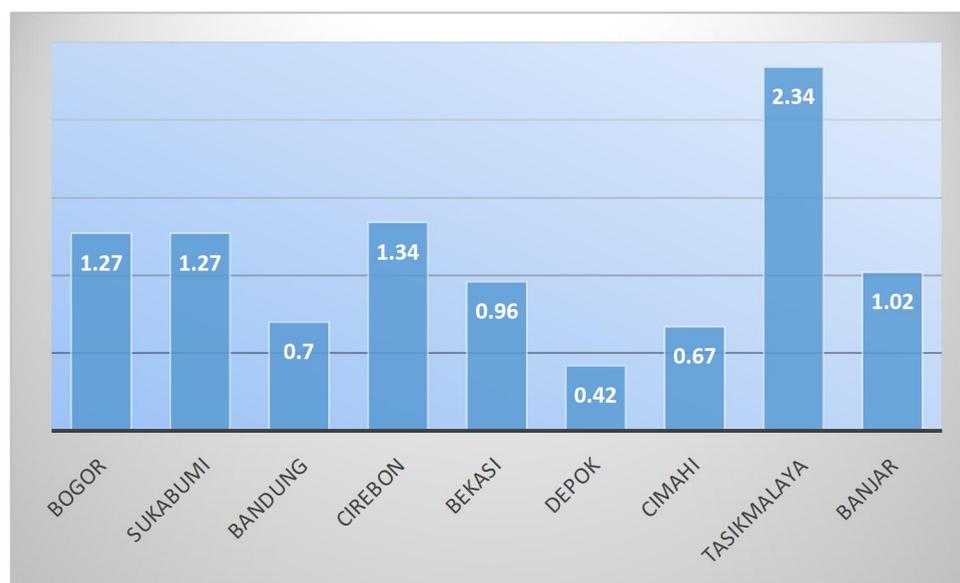
Gambar 2.36
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Kota Sukabumi dengan kota lainnya di Jawa Barat 2022 (Persen)



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Persentase penduduk miskin Kota Sukabumi tahun 2022 jika disandingkan dengan kota lain di Provinsi Jawa Barat berada dibawah Cirebon dan Tasikmalaya dan diatas Kota Bogor dan Banjar.

Gambar 2.37
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sukabumi dengan Rata-rata Capaian Kota Lainnya di Jawa Barat 2022 (Poin)



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Sementara dilihat dari kedalaman kemiskinan (P1) Kota Sukabumi pada tahun 2022, dibanding dengan Kota sekitar di Jawa Barat masih berada dibawah Kota Tasikmalaya dan Kota Cirebon, tapi

dibandingkan dengan Kota Depok, Bandung, Bekasi, Cimahi dan Kota Banjar, Kota Sukabumi masih jauh lebih tinggi.

Tabel 2.24
Capaian dan Target Persentase Penduduk Miskin 2020-2022
(Persen)

Uraian	2020	2021	2022
Target	7,90	7,80	8,17
Capaian	7,70	8,25	8,02

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023
RPJMDP 2018-2023 Kota Sukabumi

Dari tabel diatas persentase penduduk miskin tahun 2021 tidak mencapai target yang ditetapkan, dan terjadi peningkatan persentase penduduk miskin sebesar 0,55 % dari tahun sebelumnya, sedangkan di tahun 2022 target tercapai dan terjadi penurunan angka kemiskinan sekitar 0,23 % dari tahun sebelumnya.

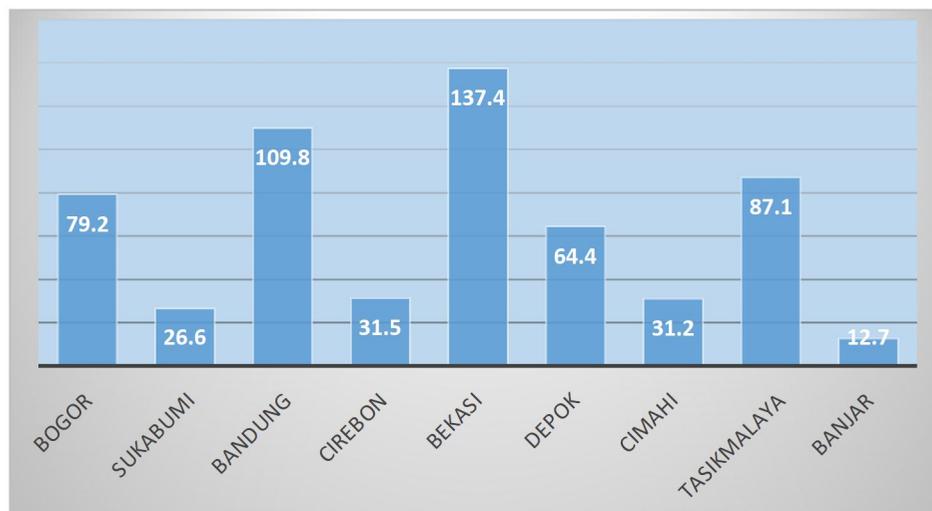
Tabel 2.25
Capaian dan Target Jumlah Penduduk Miskin 2020-2022
(Ribu Jiwa)

Uraian	2020	2021	2022
Target	27,4	27,6	27,01
Capaian	25,42	27,19	26,59

Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023
Analisa Bappea Kota Sukabumi

Berdasarkan tabel diatas selama kurun waktu 2020-2022 capaian jumlah penduduk miskin di Kota Sakabumi sudah dari target yang ditetapkan , tahun 2022 dari analisa target yang ditetapkan sebesar 27,01 ribu jiwa penduduk mikin ternyata capaiannya hanya 26,59 rbu jiwa.

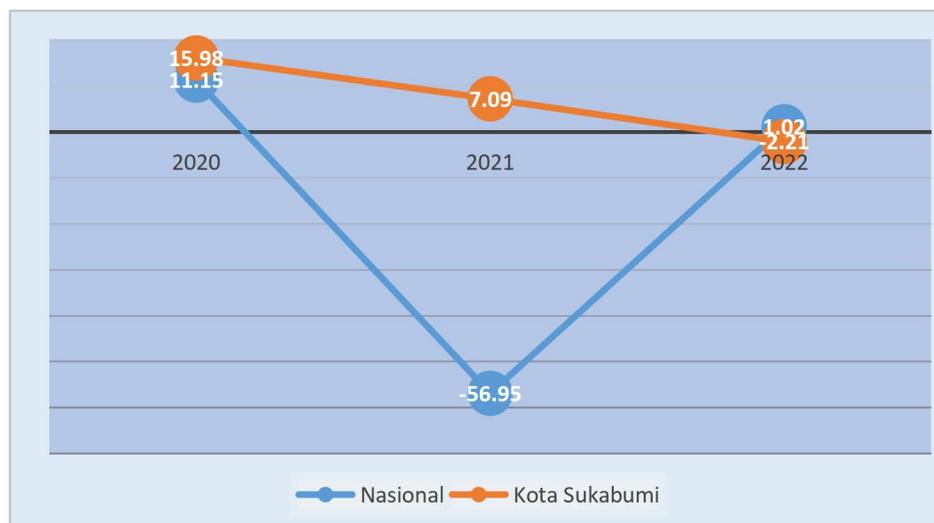
Gambar 2.38
Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata-rata capaian Wilayah Sekitar (Ribuan Jiwa)



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2023

Tabel diatas menunjukkan bahwa Kota Sukabumi dibandingkan dengan Kota-Kota di Jawa Barat memiliki Jumlah penduduk Miskin yang relatif kecil pada tahun 2022, yaitu kedua terendah setelah Kota Banjar.

Gambar 2.39
Perbandingan Pertumbuhan Jumlah Penduduk Miskin dengan Rata-rata Capaian Nasional (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Tabel diatas menunjukkan perbandingan pertumbuhan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu 2020-2022, Pertumbuhan tertinggi baik nasional maupun Kota Sukabumi terjadi pada tahun 2020, ini bisa dipahami karena pandemi covid-19 berpengaruh besar

terhadap penghasilan masyarakat di seluruh sektor. Penduduk miskin Kembali menurun di tahun 2021 dan 2022.

2.1.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka atau TPT merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja yang mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk ke dalam pengangguran. Nilai TPT menunjukkan bahwa terdapat angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Permasalahan ketenagakerjaan dirasa sangat kompleks dengan kondisi Kota Sukabumi yang tidak besar memiliki sumber daya alam dan angkatan kerja semakin meningkat, akan tetapi selama Periode 2020-2022, kondisi TPT di Kota Sukabumi turun sebesar 3,37 persen, akan tetapi jumlah pengangguran relatif meningkat setiap tahunnya.

Gambar 2.40
Jumlah Pengangguran dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sukabumi Tahun 2020-2022



Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023

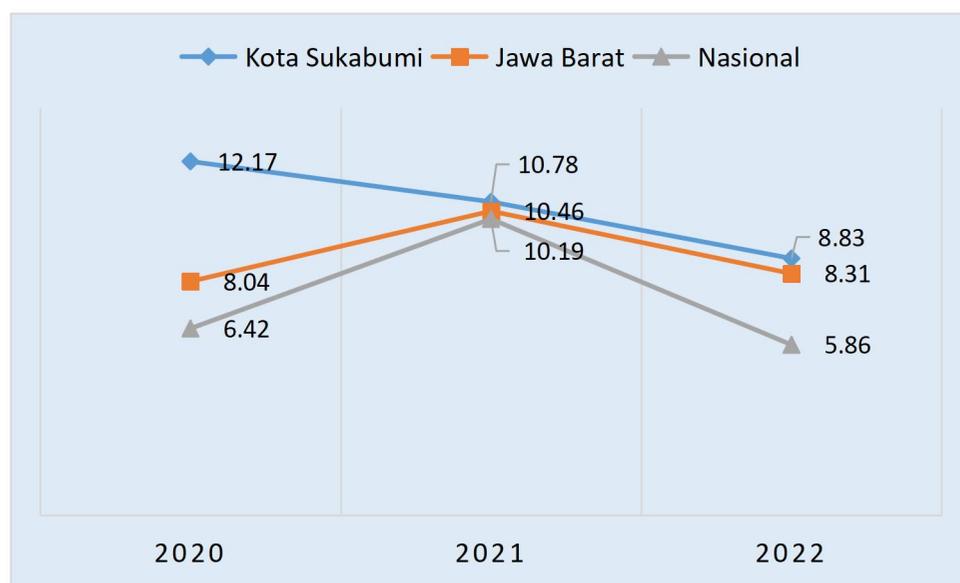
Gambar 2.41
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sukabumi dengan Kota Lain di Jawa Barat Tahun 2022 (Persen)



Sumber : Jawa Barat Dalam Angka, 2023

TPT Kota Sukabumi tahun 2022 dibandingkan dengan Kota lain di Jawa Barat berada dibawah Bekasi dan Tasikmalaya tapi masih lebih baik dibandingkan Bandung dan Ciamis

Gambar 2.42
Perkembangan Persentase TPT Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2020-2022 (Persen)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Sementara itu dibandingkan dengan TPT nasional dan Jawa Barat Kota Sukabumi masih berada dibawah, atau TPT nya lebih tinggi.

Pekerjaan rumah besar bagi pemerintah Kota Sukabumi untuk dapat menekan Tingkat pengangguran terbuka yang selama kurun waktu tiga tahun terakhir tidak menunjukkan penurunan yang berarti. Permasalahan terkait pengangguran dan dunia kerja antara lain:

1. Jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja;
2. Belum terintegrasinya antara kebutuhan dunia usaha dengan kemampuan tenaga kerja

Tabel 2.26
Capaian dan Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
2020-2022(Persen)

Uraian	2020	2021	2022
Target	10,25	9,81	10,15
Capaian	12,17	10,78	8,83

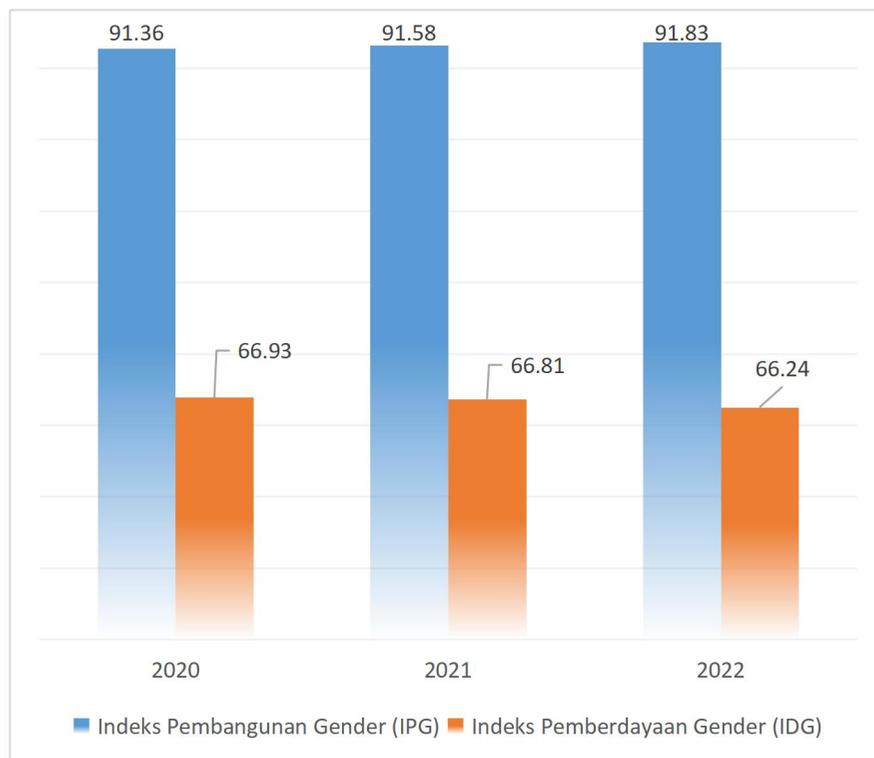
Sumber : Kota Sukabumi Dalam Angka, 2023
RPJMDP 2018-2023 Kota Sukabumi

Selama kurun waktu 2020-2022 hanya tahun 2022 capaiannya memenuhi target dan persentasenya menunjukkan peningkatan.

2.1.2.7 Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Dalam mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender dapat digunakan beberapa indikator, diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki.

Gambar 2.43
Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Kota Sukabumi Tahun 2020-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Dalam mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender dapat digunakan beberapa indikator, diantaranya Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara Indeks Pembangunan Manusia perempuan dan laki-laki. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan.

Berdasarkan data beberapa tahun terakhir, diketahui bahwa IPG Jawa Barat selama periode 2019 sampai 2021 menunjukkan kecenderungan peningkatan dari tahun ke tahun kecuali tahun 2020 yang sempat turun dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, IPG Kota Sukabumi berada di nilai 91,36 meningkat menjadi 91,83 pada tahun 2022. Nilai IDG Kota Sukabumi mengalami penurunan dari tahun ke tahun yang diawali dengan nilai 66,93 pada tahun 2020 menjadi 66,84 pada tahun 2022, ini menjadi indikasi bahwa Kota Sukabumi harus terus meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi dan politik.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Gambaran aspek pelayanan umum Kota Sukabumi menjelaskan perkembangan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, baik pada urusan wajib dan urusan pilihan serta fungsi penunjang urusan pemerintahan. Adapun indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditetapkan dalam Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Kunci Tahun 2020 dan 2021 yang dilaksanakan di Kota Sukabumi mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sementara untuk Tahun 2019 yang dilaksanakan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.1.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

2.1.3.1.1 Pendidikan

Tabel 2.25
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Pendidikan					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	68,7	80,7	70,17	80,9
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	99,5	101,83	98,3	99,76
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	97	108,34	92,79	98,18

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	-	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator urusan Pendidikan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan dasar sembilan Tahun, meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, dan meningkatkan tata kelola pendidikan yang berkualitas

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar = 37.791. Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 37.882.
2. Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama = 17.919. Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan = 18.252.
3. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan = 4.198. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada provinsi yang bersangkutan = 4.198.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pendidikan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.26
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan
Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/Mts)	100%	99,76%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	100%	100%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD	100%	80,90%

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Tahun 2022

Capaian SPM Pendidikan di Kota Sukabumi untuk jenis layanan dasar pada jenjang Pendidikan Dasar adalah 99.76% dan sisanya sebanyak 0,24% sudah ada pada jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA sederajat), jenjang kesetaraan capaiannya adalah 100% dan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini adalah 80.90%, untuk PAUD capaiannya belum optimal dikarenakan pada jenjang ini belum masuk dalam kategori Program Wajib Belajar, namun demikian capaiannya sudah dapat dikategorikan “Baik”.

2.1.3.1.2 Kesehatan

Tabel 2.27
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kesehatan Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Kesehatan					
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Angka	0,017	0,4	0,45	0,4
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	75	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	83	100	101,91	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	103,83	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persen	100	100	108,69	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	73,97	99,15	95,90
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	24,07	100	80,73
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	26,6	90,16	41,35
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	72,45	75	89,47
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	12,46	100	89,54
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	13,03	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	91,93	100	87,63
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	94,56	100	94,79
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator urusan Kesehatan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan, meningkatkan kualitas dan pemerataan sumber daya manusia kesehatan, dan menurunkan angka kematian.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1.131. Jumlah Penduduk di Kota Sukabumi= 353.631;
2. Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 6. Jumlah RS di Kota Sukabumi = 6;
3. Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 5.804. Jumlah ibu hamil di Kota Sukabumi = 5.804;
4. Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 5.536. Jumlah ibu bersalin di Kota Sukabumi = 5.536;
5. Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 5.401. Jumlah bayi baru lahir di Kota Sukabumi = 5.401;
6. Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 19.419. Jumlah balita di Kota Sukabumi = 20.250;
7. Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar = 43.460. Jumlah anak usia pendidikan dasar di Kota Sukabumi = 53.834;
8. Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 89.397. Jumlah orang usia 15-59 tahun di Kota Sukabumi = 216.169;
9. Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar = 34.853. Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di Kota Sukabumi = 38.955 ;
10. Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 22.090. Jumlah penderita hipertensi di Kota Sukabumi = 24.670;
11. Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 4.337. Jumlah penderita DM di Kota Sukabumi = 4.337;
12. Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 432. Jumlah penderita ODGJ di Kota Sukabumi = 493;
13. Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar = 5.709. Jumlah penderita TBC di Kota Sukabumi = 6.023;

14. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar = 11.342. Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kota Sukabumi = 11.342;

Capaian indikator kinerja di atas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Kesehatan di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.28
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan
Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	95,90%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	84,56%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	43,36%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	89,47%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	89,54%
9	Pelayanan kesehatan penderita <i>diabetes melitus</i>	Jumlah Warga Negara penderita <i>diabetes melitus</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	87,63%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga <i>tuberculosis</i> yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	94,79%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Sukabumi, Tahun 2022

Capaian SPM Urusan Kesehatan di Kota Sukabumi untuk jenis layanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut adalah 89,47% dikarenakan kemampuan sumber dana APBD belum bisa memenuhi ketersediaan BMHP (Belanja Medis Habis Pakai) untuk belanja stik kolesterol yang dibutuhkan untuk pemeriksaan belum semuanya terpenuhi, walaupun penyebaran Pos Binaan Terpadu (Posbindu) sudah merata disetiap Rukun Warga (RW) yang ada di wilayah Kota Sukabumi, dimana jumlah Posbindu yaitu sebanyak 445 Posbindu dari 461 Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang ada dengan persentase sebesar 96,52%, sehingga banyak kelompok lansia yang sudah tersentuh dalam skrining Kesehatan, walaupun belum menyeluruh.

2.1.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Tabel 2.29
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Persen	-	478,95	-	57,32

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	1.500	165,25	57,57	55,41
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	68,77	100	100	94,39
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	87,57	71,54	91,2	91,51
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Persen	-	3,43	100	100
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Persen	84,19	84,81	81,08	87,63
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	-	5,36	100	100
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	-	100	100	-

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan, terwujudnya kesiapsiagaan kebencanaan, dan terwujudnya kawasan permukiman yang layak dan Meningkatnya disiplin, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan sarana dan prasarana jalan, mengembangkan penataan ruang wilayah, meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, meningkatkan penataan kawasan kumuh, meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman, Meningkatkan pengawasan dan pengendalian kawasan rawan bencana (KRB), dan Meningkatkan kesiagaan, pencegahan, dan penanggulangan bahaya kebakaran, Meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran

peraturan Perda, Meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, dan Meningkatkan pendidikan politik yang berkualitas.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota Sukabumi (ha) = 118.05. Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kota Sukabumi (ha) = 205.95;
2. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 0. Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan Kota Sukabumi (m) = 0;
3. Luas irigasi kewenangan Kota Sukabumi yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting = 726.79. luas daerah irigasi kewenangan Kota Sukabumi = 1311.50;
4. Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kota Sukabumi = 82.075. Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Sukabumi = 86.949;
5. Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 94.536. Jumlah rumah di Kota Sukabumi = 103.303;
6. Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 40. Jumlah IMB yang berlaku = 40;
7. Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 101,42. Jumlah total panjang jalan Kota Sukabumi = 115,74;
8. Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kota Sukabumi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator

dan teknis/analisis = 20 . Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kota Sukabumi = 20 ;

Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi = 1. Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya = 1.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.30

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-sehari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	94.39%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	91,51%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi, Tahun 2022

Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Sukabumi untuk jenis pelayanan dasar Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah 94,39%, Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik adalah 91,51%, ini merupakan pencapaian yang sangat tinggi.

2.1.3.1.4 Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tabel 2.31

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Persen				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	-	24,49	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	0,17	12,87	89,3	0,15
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	96,41	3,01	1,87	1,41
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	-	0	100	0

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik walaupun banyaknya anggaran yang di *refocusing*. Namun dalam pelaksanaannya tetap diprioritaskan kegiatan yang mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu terwujudnya terwujudnya kawasan permukiman yang layak. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan kualitas perumahan dan permukiman, meningkatkan penataan kawasan kumuh, meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n = 96. Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n = 96;
2. Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni = 0. Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0;
3. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 0,23. Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 153,03;

4. Jumlah unit rumah tidak layak huni = 1.465. Jumlah total unit rumah Kota Sukabumi = 103.303;
5. Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 0. Jumlah unit rumah Kota Sukabumi = 0.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.32
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	- %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Sukabumi,

Capaian SPM Perumahan Rakyat di Kota Sukabumi untuk jenis pelayanan dasar Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah nol persen dikarenakan terdapat kebijakan refocusing anggaran.

2.1.3.1.5 Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

Tabel 2.33
Capaian Indikator Kinerja Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2019 - 2021

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	80	100	100	100
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	-	100	100	100
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	-	100	100	100
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	-	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	-	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	-	15	8,5	8,9

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya disiplin, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi meningkatkan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda, meningkatkan antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban, dan meningkatkan pendidikan politik yang berkualitas.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pengaduan yang ditangani = 34. Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 34;
2. Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan = 7. Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi = 7;
3. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana 5.905;

4. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana 722;
5. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 1.092. Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan = 0;
6. Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di Kota Sukabumi dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kota Sukabumi = 41. Jumlah kejadian kebakaran di Kota Sukabumi = 41;
7. Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran 8,5 menit;

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.34
Pencapaian SPM Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Serta Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	100%	100%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	100%

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sukabumi,

2.1.3.1.6 Sosial

Tabel 2.35

Capaian Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Sosial					
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	55	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Sosial di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, Meningkatkan pelayanan dasar dan penghidupan penduduk miskin dan rentan miskin.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran = 140. Populasi korban bencana alam dan sosial di Kota Sukabumi yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Kota Sukabumi = 140;
2. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 7. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 7.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.36

Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Sosial Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN	TARGET CAPAIAN	REALISASI CAPAIAN SPM
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	100%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%

Sumber : Dinas Sosial Kota Sukabumi, Tahun 2022

2.1.3.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan

2.1.3.2.1 Tenaga Kerja

Tabel 2.37

Capaian Indikator Kinerja Urusan Tenaga Kerja Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	-	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat Kompetensi	Persen	3	100	1,91	27,88
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen	-	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	-	40,33	29,33	25,61
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	-	41,16	41,1	48,54

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2021, diolah

Capaian Indikator urusan Urusan tenaga kerja di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi menyusun kebijakan terkait tenaga kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, meningkatkan optimalisasi program peningkatan kesempatan kerja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD = 7. Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kota Sukabumi = 7;
2. Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi = 3.139. Jumlah tenaga kerja keseluruhan = 11.256;
3. PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) = 25.230.759,88. Jumlah tenaga kerja = 11.256;
4. Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 259. Jumlah Perusahaan = 1.011;
5. Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 1.908. Jumlah pencaker yang terdaftar = 3.930;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.38

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	45,46	63,92	77,369	77,56
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Persen	0,005	0,04	0,036	0,32
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Persen	0,0005	0,01	11,464	0,011

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator urusan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu meningkatnya pengarusutamaan gender, perlindungan perempuan, dan anak. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyusun kebijakan terkait pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan perempuan, dan Meningkatkan peran serta gender dalam pembangunan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = 423.993.145.166. Jumlah seluruh belanja langsung APBD = 546.666.993.557;
2. Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kota Sukabumi yang

didampingi = 36. Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) = 113.711;

3. Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan = 14. Jumlah penduduk perempuan = 124.927;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.3 Pangan

Tabel 2.39

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pangan Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Pangan					
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Persen	86	116,59	133,081	138

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Pangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi memiliki cadangan pangan yang cukup yaitu sebanyak = 58.084 dari jumlah kebutuhan pangan = 42.049.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan

2.1.3.2.4 Pertanahan

Tabel 2.40

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Pertanahan					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	-	26,65	n/a	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	-	0	n/a	n/a
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Persen	-	26,65	n/a	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator urusan Urusan Pertanahan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 belum terealisasi dengan baik, dan belum mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD. Hal ini disebabkan belum adanya perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam menerbitkan ijin lokasi pemanfaatan tanah sesuai peruntukannya.

2.1.3.2.5 Lingkungan Hidup

Tabel 2.41

Capaian Indikator Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2019 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Poin	74,64	59,58	60,3	59,71
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Persen	80	88,63	85,94	73,76
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persen	20	0	0	0,03

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Lingkungan Hidup di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengendalian pencemaran tanah, air, dan udara, Meningkatkan peran serta masyarakat dan pelaku usaha atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan, Meningkatkan pengendalian kerusakan lingkungan, Meningkatkan kerjasama pengelolaan persampahan, Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sukabumi 59,71;
2. Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani = 48.555,95. Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalan Kota Sukabumi = 65.828,41;
3. Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kota Sukabumi = 1. usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan = 35.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel 2.42
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	100	98,19	99,45	99,11
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	-	28,44	49,75	45,09

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	97,69	98,02	98,83
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	100	100	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman = 252.976. Jumlah penduduk wajib KTP-el = 255.249;
2. Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA = 46.704. Jumlah anak usia 0-17 tahun = 103.572;
3. Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir = 106.255. Jumlah anak usia 0-18 tahun = 107.515;
4. Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama = 31. Jumlah OPD = 31;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tabel 2.43
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Persen	2,21	0	2,03
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persen	67,8	75,52	74,64
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	-	8,11	9,33

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyusun kebijakan terkait pengendalian pertumbuhan penduduk, Optimalisasi program keluarga berencana, reproduksi remaja, dan pelayanan kontrasepsi, dan Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi remaja.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. TFR (Angka Kelahiran Total) 2;
2. Jumlah peserta KB Aktif Modern = 31.434 . Jumlas Pasangan Usia Subur = 59.868;
3. Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani = 5.533. Jumlas Pasangan Usia Subur = 59.868;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.8 Perhubungan

Tabel 2.44

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Tahun 2019 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Perhubungan					
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	angka	-	80,8	100	100
2	V/C Ratio di J alan Kabupaten/Kota	angka	-	0,48 (arteri sekunder) 0,32 (kolektor sekunder) 0,23 (local sekunder)	0,38	0,37

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022

Capaian Indikator Urusan Perhubungan di Kota Sukabumi Tahun 2022 dapat terealisasi cukup baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya infrastruktur kota yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan sarana dan prasarana jalan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Rasio konektivitas Kota Sukabumi 100;
2. Kinerja lalu lintas Kota Sukabumi 0,37.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.9 Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.45

Capaian Indikator Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan	Persen	-	71,87	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	-	100	75,76	75,76
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	-	75,27	76,93	76,93

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Komunikasi dan Informatika di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan *smart city*. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, Meningkatkan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo = 31. Jumlah OPD = 31
2. Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 80. Jumlah Layanan Publik = 100;
3. Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kota Sukabumi = 280.048. Jumlah penduduk = 358.854;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.10 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Tabel 2.46

Capaian Indikator Kinerja Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN		
			2019	2020	2021
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persen	-	13,16	14,83
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	Persen	-	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan kualitas iklim usaha dan investasi. Dalam RPJMD, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset = 67. Jumlah seluruh koperasi = 353;
2. Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha = 31.926. Jumlah usaha mikro keseluruhan = 31.926;
3. (Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di Kota Sukabumi = 3.322.374.968.365. Jumlah investasi tahun n-1 di Kota Sukabumi = 3.411.037.717.214.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.11 Penanaman Modal

Tabel 2.47

Capaian Indikator Kinerja Urusan Penanaman Modal Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	100	50,05	451,16	-102,56

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Penanaman Modal di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi kurang baik dan tidak mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Menurunnya kualitas iklim usaha dan investasi.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa investasi di Kota Sukabumi mengalami penurunan dengan jumlah investasi tahun 2022 - jumlah investasi tahun 2021 di Kota Sukabumi = $3.322.374.968.365 - 3.411.037.717.214 = -88.662.748.851$.

Capaian indikator kinerja diatas tidak selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 2.48

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Kepemudaan dan Olahraga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	5	17,6	25,59	24,41
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	25	22,6	23,87	22,78
3	Peningkatan prestasi olahraga	jenis	27	9	15	17

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepemudaan dan Olah Raga di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 dapat terealisasi cukup baik karena adanya pandemi Covid-19, namun tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga, dan prestasi olah raga Daerah, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan pemuda dan Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di Kota Sukabumi = 21.241. Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 87.010;
2. Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di Kota Sukabumi = 19.823. jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di Kota Sukabumi = 87.010;
3. Peningkatan prestasi olahraga dengan perolehan 17 medali.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.13 Kebudayaan

Tabel 2.49

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Kebudayaan					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Persen	8	73	73,33	73,3

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Kebudayaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa kinerja Kota Sukabumi mampu melestarikan cagar budaya sejumlah = 55, dari jumlah cagar budaya yang terdata = 75.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.14 Statistik

Tabel 2.50

Capaian Indikator Kinerja Urusan Statistik Tahun 2019 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Statistik					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	60	71,87	100	100
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	60	78,12	100	100

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Statistik di Kota Sukabumi pada Tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;
2. Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah = 31. jumlah OPD = 31;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.15 Persandian

Tabel 2.51

Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Tahun 2019 – 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Persandian					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	40	0	62,95	63,41

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Persandian di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 belum terealisasi dengan baik, namun tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi untuk publik dalam mengimplementasikan smart city, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Optimalisasi penggunaan informasi teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan Meningkatkan integrasi sarana aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, mengelola 25 sistem elektronik yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik, dan mengamankan 25 titik system komunikasi. Adapun jumlah nilai per area keamanan informasi = 409 dengan jumlah area penilaian = 645. Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.16 Perpustakaan

Tabel 2.52

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perpustakaan Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Perpustakaan					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	15.416	61,49	65,34	70,10
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	-	55,06	39,68	96,85

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Perpustakaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik, dan mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang merata dan bermutu, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pendidikan nonformal, dan Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan lokal.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 87.097 koleksi buku yang tersebar di berbagai perpustakaan, dikunjungi oleh 209.163 orang baik secara *online* maupun *onsite*, memiliki 280 tenaga perpustakaan, mengelola 27 perpustakaan berstandar nasional, melaksanakan 11 kegiatan sosialisasi gemar membaca, dan memiliki 148 judul dan 740 eksemplar budaya etnis.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.2.17 Kearsipan

Tabel 2.53

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Kearsipan					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	-	55,03	56,03	63,12
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	-	50	51,67	66,67

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Kearsipan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publi, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berdasarkan pada standar pelayanan serta standar operasional prosedur (SOP), dan Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, memiliki 99.000 arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 358.000 arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip, 2.000 arsip statis, dan 800 arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3 Layanan Urusan Pilihan

2.1.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Tabel 2.54
Capaian Indikator Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Kelautan dan Perikanan					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	jumlah (ton)	24,71	1.243,83	1.388,07	1.401,11

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Kelautan dan Perikanan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut, melaksanakan pemberdayaan terhadap 30 orang pembudidaya ikan, memproduksi benih budidaya air tawar sebanyak 35.102.000 ekor, dan mengelola 4 destinasi entitas pengelolaan. Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3.2 Pariwisata

Tabel 2.55

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Pariwisata					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	-	7	1,999	2,24
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	-	27	21,74	21,97
3	Tingkat hunian akomodasi	hari	2	4.475	36.000	887
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	persen	-	2,92	2,95	2,95
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	-	13.419.712.356	46.861.100.000	22.448.213.698

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Pariwisata di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi cukup baik, dan tetap mampu mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas iklim usaha dan investasi, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan ekonomi kreatif, Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Daerah berbasis wisata kuliner dan warisan budaya lokal

melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi dan Mengembangkan disain Daerah sebagai objek wisata *heritage*.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah membina pengelolaan 5 destinasi wisata, melengkapi infrastruktur dasar untuk 7 destinasi wisat, dan mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah wisatawan mancanegara tahun 2022 – Jumlah wisatawan tahun 2021 = 79. Jumlah wisatawan tahun 2021 = 3520;
2. Jumlah wisatawan nusantara tahun 2022 – Jumlah wisatawan tahun 2021 = 79.468. Jumlah wisatawan tahun n-1 = 361.664;
3. Jumlah kamar yang terjual = 887. Jumlah kamar yang tersedia = 1.081;
4. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD adalah 3,08%

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3.3 Pertanian

Tabel 2.56

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Pertanian					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	6,16	24.480	664,65	6,7
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	-	26,87	0	0

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian indikator Urusan Pertanian di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi cukup baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya ketahanan pangan, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Bergizi, Sehat, dan Aman (B2SA), dan Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun = 21.256. luas panen = 3.173;
2. Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun 2022 – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2021 = 0. Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2021= 0.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3.4 Perdagangan

Tabel 2.57

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Perdagangan						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	-	6,19	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	-	91,95	53,78	45,157
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	-	23,6	89,33	208.75

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Perdagangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatkan peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan = 1.927. Jumlah pelaku usaha di wilayah Kota Sukabumi = 1.927;
2. Realisasi = 1.009,61. RDKK = 2.235,79;
3. Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan = 853. jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kota Sukabumi = 400.

Capaian indikator kinerja kunci diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.3.5 Perindustrian

Tabel 2.58
Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian
Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Perindustrian					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	0,2	3,88	0,42	3,19
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	-	10	0	10
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	-	16,27	0	100
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	-	0	0	100
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Buku	-	85	85	85

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Perindustrian di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya peran perdagangan dalam stabilitas perekonomian, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah, Meningkatkan kualitas sarana distribusi perdagangan.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Industri kecil dan menengah tahun 2022 – Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2021 = -2552. Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020 = 2.636;
2. Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 1. Jumlah izin yang dikeluarkan = 1;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

2.1.3.4.1 Perencanaan dan Keuangan

Tabel 2.59

Capaian Indikator Kinerja Urusan Perencanaan dan Keuangan Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Perencanaan dan Keuangan					
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	-	18,19	n/a
2	Rasio PAD	Persen	-	29,77	2,78
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	-	3	3	3
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	-	2	2	3
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	-	1	82,4	86,18
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	-	WTP	WTP	WTP

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian IKK urusan Urusan Perencanaan dan Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah PAD = 317.611.319.254.;
2. Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures = 1.147.965.743.489. jumlah belanja APBD = 1.251.744.741.073

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4.2 Pengadaan

Tabel 2.60

Capaian Indikator Kinerja Urusan Pengadaan Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Pengadaan					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	-	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	-	19,6	6,55	3,3
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	-	74,1	96,51	62,74

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Pengadaan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan

dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan proses perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, Meningkatkan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, dan Meningkatkan pengordinasian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2022 = 0. jumlah kontrak keseluruhan tahun 2022 = 26;
2. jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 26. Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = 780;
3. Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan = 741.928.000.000. total belanja langsung = 1.182.555.335.792;

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4.3 Kepegawaian

Tabel 2.61

Capaian Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Kepegawaian					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	-	210	283,76	76,06
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	3,6	9,86	7,8
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	-	3,09	84,75	37,6

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Kepegawaian di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan manajemen pegawai ASN dan Meningkatkan pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, dan Meningkatkan evaluasi dan pembinaan kinerja penyelenggaraan pemerintah .

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas = 1.325. Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah = 1.742;
2. Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan) = 136. seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 1.742;
3. Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi = 138. seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) = 367.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4.4 Manajemen Keuangan

Tabel 2.62
Capaian Indikator Kinerja Urusan Manajemen Keuangan
Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
	Manajemen Keuangan					
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-	1	2,8	3,87
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	-	1	14,71	0,31
3	Manajemen Aset	Persen	-	50	2	2
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	-	6,06	10,02	10,79

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Manajemen Keuangan di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik, dan mendukung

tercapainya sasaran RPJMD yaitu Terwujudnya birokrasi yang bersih, transparan dan akuntabel, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, transparan, dan akuntabel berbasis IT.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi

telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi = 1.251.744.741.073. total belanja APBD dikurangi satu = 1.205.069.299.476;
2. Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi = 363.263.682.587. dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu = 362.135.926.773;
3. Nilai realisasi SiLPA = 120.840.911.331. total belanja anggaran tahun sebelumnya = 1.120.051.026.976.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.3.4.5 Transparansi dan Partisipasi Publik

Tabel 2.63
Capaian Indikator Kinerja Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik Tahun 2019 - 2022

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN			
			2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
	Transparansi dan Partisipasi Publik					
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Persen	-	110,96	0	0
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	-	83,33	41,67	41,67

Sumber: LPPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Capaian Indikator Urusan Transparansi dan Partisipasi Publik di Kota Sukabumi pada Tahun 2022 terealisasi dengan baik, dan mendukung tercapainya sasaran RPJMD yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, Sasaran tersebut dapat dicapai melalui strategi

Meningkatkan keterbukaan informasi publik transparansi, partisipasi publik, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Berdasarkan outputnya dapat dijelaskan bahwa Kota Sukabumi telah mampu mencapai kinerja sebagai berikut:

1. Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda. Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda;
2. Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda = 5. total jumlah dokumen yang telah dirinci = 12.

Capaian indikator kinerja diatas selaras dengan strategi RPJMD dalam mencapai sasaran yang diinginkan.

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama atau IKU Daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi indikator kinerja kunci atau IKK pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator kinerja outcomes atau impact yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas, dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran serta penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kota Sukabumi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 4. Dalam Perda tersebut ditetapkan jumlah indikator sasaran

atau indikator kinerja utama sebanyak 19 (sembilan belas), indikator kinerja tersebut terdiri dari 6 (enam) indikator untuk Misi I, 4 (empat) indikator untuk Misi II, 4 (empat) indikator untuk Misi III, dan 5 (lima) indikator untuk Misi IV.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap IKU yang merupakan indikator dari sasaran strategis RPJMD dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk mempermudah interpretasi atas penilaian tingkat realisasi kinerja setiap sasaran, digunakan interpretasi pencapaian IKU sebagaimana ditampilkan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.64
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2022

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TAHUN 2022			KETERANGAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
Misi 1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERAKHLAK MULIA, SEHAT, CERDAS, KREATIF DAN BERBUDAYA SERTA MEMILIKI KESETIAKAWANAN SOSIAL YANG TINGGI BERBASIS KETAHANAN KELUARGA									
1.1	MEWUJUDKAN MASYARAKAT BERKUALITAS YANG BERAKHLAK MULIA	a.	Indeks rasa aman	Perse n	75,31	64,6	75,91	100	Sangat Tinggi
		b.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	74,6	74,6	75,4	100	Sangat Tinggi
1.1.1.	MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR UMAT BERAGAMA, PEMAHAMAN WAWASAN KEBANGSAAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT	a.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Angka	74,9	78,02	78,10	100	Sangat Tinggi
1.1.2.	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	a.	Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,29	0,317	0,318	100	Sangat Tinggi
1.1.3.	MENINGKATNYA KETERSEDIAAN LAYANAN PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN MERATA	a.	Indeks Pendidikan	Angka	70,42	69,83	71,55	100	Sangat Tinggi
1.1.4.	TERWUJUDNYA MASYARAKAT	a.	Indeks Kota	Angka	27,93	48,8	49,01	100	Sangat Tinggi

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TAHUN 2022			KETERANGAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8		
	YANG KREATIF DAN BERBUDAYA		Kreatif (IKK)						
1.1.5.	MENINGKATNYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK	a.	Indeks pembangunan gender	Angka	91,58	91,25	91,83	100	Sangat Tinggi
1.1.6.	MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	a.	Indeks Ketahanan Keluarga	Angka	79,5	67,96	79,63	100	Sangat Tinggi
MISI 2 : MEWUJUDKAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKUALITAS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN									
2.1.	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	a.	Indeks kenyamanan	Angka	22,91	24	22,46	93,89	Sangat Tinggi
2.1.1.	TERWUJUDNYA PEMERATAAN INFRASTRUKTUR KOTA YANG BERKELANJUTAN	a.	Indeks kepuasan layanan infrastruktur	Angka	86,2	80	86,75	100	Sangat Tinggi
		b.	Persentase Kesesuaian Pembangunan Infrastruktur Dengan Rencana Tata Ruang	Persen	36	20	15,10	76	Tinggi
2.1.2.	TERWUJUDNYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKUALITAS	a.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Point	60,3	59	59,71	100	Sangat Tinggi
2.1.3.	TERWUJUDNYA KETANGGUHAN TERHADAP BENCANA	a.	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	Point	0,49	0,53	0,53	100	Sangat Tinggi
MISI 3 : MEWUJUDKAN EKONOMI DAERAH YANG MAJU BERTUMPU PADA SEKTOR PERDAGANGAN, EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA MELALUI PRINSIP KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN DAN DAERAH SEKITAR									
3.1.	MEWUJUDKAN PENGEMBANGAN EKONOMI DAERAH YANG KREATIF DAN BERKELANJUTAN	a.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	persen	3,71	5,23	5,35	100	Sangat Tinggi
3.1.1.	MENINGKATNYA KUALITAS IKLIM USAHA DAN INVESTASI	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Milyar Rupiah	3.411,03*	212.000*	3.322,37*	100	Sangat Tinggi
3.1.2.	MENINGKATNYA PERAN PERDAGANGAN DALAM STABILITAS PEREKONOMIAN MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR	a.	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	persen	3,64*	2	5,5	100	Sangat Tinggi

TUJUAN/SASARAN		INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/SASARAN)		SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TAHUN 2022			KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1		2		3	4	5	6	7	8
3.1.3.	MENINGKATNYA SEKTOR PARIWISATA KREATIF MELALUI KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA, DUNIA PENDIDIKAN, DAN DAERAH SEKITAR	a.	kontribusi pariwisata terhadap PDRB	persen	2,95	1,15-1,29	3,08	100	Sangat Tinggi
3.1.4.	MENINGKATNYA PENGEMBANGAN USAHA DAN KETERSEDIAAN PANGAN MASYARAKAT	a.	Skor Pola Pangan Harapan	persen	84,8	79,99	83,9	100	Sangat Tinggi
MISI 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) DAN INOVATIF									
4.1.	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK MELALUI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI	a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skala	67,91	68,98	71,1	100	Sangat Tinggi
4.1.1.	TERWUJUDNYA BIROKRASI YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL	a.	Nilai SAKIP	Skor	76,35	79	76,7	97,08	Sangat Tinggi
		b.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	100	Sangat Tinggi
4.1.2.	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	a.	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,28	2,91	4,06	100	Sangat Tinggi
4.1.3.	MENINGKATNYA PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI DAN TEKNOLOGI UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK	a.	Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,98	2,4	2,98	100	Sangat Tinggi
4.2	MENINGKATKAN INOVASI DAERAH	a.	Skor Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Terinovatif (4675)	Terinovatif (≥ 1001)	Inovatif	100	Sangat Tinggi
4.2.1.	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	a.	Indeks Daya Saing Daerah	Predikat	6,84	Tinggi	Tinggi	100	Sangat Tinggi
4.2.1.	MENINGKATNYA PENDAYAGUNAAN INOVASI DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI	a.	Indeks Daya Saing Daerah	Predikat	6,84	Tinggi	sangat tinggi	100	Sangat Tinggi

Sumber : Evaluasi RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa seluruh IKU termasuk dalam kriteria capaian sangat tinggi. Walaupun nilai capaiannya tidak sampai 100% namun dengan nilai di atas 91% maka termasuk dalam kriteria sangat tinggi dan secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian IKU sudah berhasil.

Kondisi pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang masih terjadi di tahun 2022 mengakibatkan beberapa anggaran kegiatan di-*refocussing*. Namun anggaran yang terbatas tidak menghambat perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan mendongkrak pencapaian realisasi IKU. Bentuk tanggung jawab perangkat daerah dalam menyukseskan visi misi kepala daerah dan meningkatkan daya saing di Kota Sukabumi dapat terlihat dari pencapaian nilai IKU yang masuk dalam kriteria sangat tinggi.

2.1.4.2. Inovasi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Adapun sasaran inovasi daerah tersebut diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan publik;
2. Pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
3. Peningkatan daya saing daerah.

Pembaharuan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah dapat berbentuk:

1. Inovasi tata kelola publik, merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen;
2. Inovasi pelayanan publik, merupakan inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian

pelayanan barang/jasa publik dan inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik;

3. Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Untuk mencapai visi Kota Sukabumi yaitu terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman dan Sejahtera, maka diperlukan adanya beberapa inovasi daerah dalam rangka mengakselerasi pencapaian sesuai dengan yang ditargetkan. Adapun inovasi daerah Kota Sukabumi yang dilaksanakan pada periode 2018-2023 dituangkan dalam 15 (lima belas) program unggulan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD 2018-2023.

Hingga akhir tahun 2022, Kota Sukabumi telah berhasil mencetak berbagai prestasi baik dari sisi perencanaan maupun pembangunan Kota Sukabumi. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari inovasi-inovasi yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggara pemerintahan daerah dan mendukung percepatan pembangunan.

Adapun inovasi daerah yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama;
Untuk mencapai pilar religius yaitu mewujudkan masyarakat yang berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga, maka dilaksanakan program inovasi ini melalui:
 - a) Program peningkatan kualitas lembaga keagamaan;
 - b) Program gerakan magrib mengaji;
 - c) Program gerakan subuh berjamaah;
 - d) Program pembiasaan akhlakul karimah;
 - e) Program peningkatan toleransi;
 - f) Program family straightening (pelatihan pranikah, pelatihan parenting, konseling keluarga);
 - g) Program promosi kota halal *friendly*.

Adapun hasil kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2021 diantaranya:

- a) Magrib Mengaji
 - Insentif Guru Mengaji (200 orang x @ Rp. 200.000).
 - b) Bantuan Sarana Pengajian
 - Jumlah Mesjid yang mendapatkan Bantuan Paket Sarana Pengajian yaitu 35 mesjid;
 - Isi Paket : Al Qur'an, Buku Iqro (1,2,3), Hambalan Qur'an.
 - c) Fasilitasi Pembinaan
 - Insentif Marbot: 478 orang x Rp. 150.000;
 - Insentif Kordinator Marbot: 7 orang x Rp. 250.000;
 - Insentif Tenaga Pendidik Guru Agama (MD, MI, RA, TPQ, dan Pontran): 1.322 orang x Rp. 150.000;
 - Insentif Kordinator Tenaga Pendidik Guru Agama (MD, MI, RA, TPQ, dan Pontran): 11 orang x Rp. 250.000.
- 2) Program Peningkatan Literasi;
Program ini merupakan salah satu inovasi untuk mengembangkan budaya literasi, mengajak warga untuk semakin gemar membaca dengan mengadakan acara-acara menarik di Daerah yang dilaksanakan oleh penggerak perpustakaan keliling. Kegiatan-kegiatan literasi yang dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya adalah Jumlah pengunjung perpustakaan rujukan (perpustakaan umum, storry telling, parenting, puskel), jumlah kunjungan 209.136 Orang
- 3) Uduan Online di dukung oleh Forum Silih Asih Silih Asuh;
Forum Silih Asih Silih Asuh atau Uduan Online, merupakan program inovasi untuk mendorong kesetiakawanan warga kota untuk saling membantu, silih asih silih asuh dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan karena Pemerintah Daerah memiliki keterbatasan secara kewenangan maupun secara anggaran sehingga masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi untuk berkontribusi secara langsung.
Pemerintah mendorong secara optimal kepedulian masyarakat serta kesetiakawanan sosial. Hal ini penting dilakukan karena dengan dua prinsip tersebut masyarakat diajak untuk terbiasa

dengan model partisipatif dalam bermasyarakat. Partisipasi jelas diperlukan dalam menumbuh kembangkan kemajuan kota tempat tinggalnya.

Mekanisme online digunakan dalam program ini adalah untuk mendorong prinsip transparansi serta kecepatan dalam pelaksanaannya. Selain itu melalui program ini, masyarakat perkotaan yang telah relatif terbiasa dengan iklim digitalisasi akan mendapatkan kemudahan dalam berpartisipasi serta ikut peduli dengan anggota masyarakat kota lainnya yang tengah dalam kondisi kesulitan.

Pada tahun 2022 kegiatan ini telah mampu menghasilkan transaksi sebanyak 1.912 (seribu sembilan ratus dua belas) transaksi, yaitu sebesar Rp. 343.242.346,- (tiga ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh enam rupiah). Jumlah tersebut disalurkan untuk 38 (tiga puluh delapan) kasus, diantaranya bantuan untuk orang sakit, renovasi rumah roboh/ tidak layak huni, isolasi mandiri Covid-19, dan donasi palestina.

4) Program Students Camp;

Program Students Camp, merupakan program pendidikan holistik yang bertujuan melakukan pembentukan karakter bagi siswa SMP, SMA dan SMK sederajat. Program ini diharapkan akan melahirkan pelajar-pelajar yang dapat berperan sebagai agen-agen perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungannya. Program ini dirancang untuk memperkaya para peserta dengan pelatihan-pelatihan yang merangsang pertumbuhan jiwa kepemimpinan dan wawasan pengetahuan lingkungan para peserta.

Perlu kiranya diketahui bahwa program ini titik tolaknya ada pada bagaimana melakukan pelatihan pada siswa-siswa pilihan yang dianggap memiliki kemampuan untuk menyebarkan nilai-nilai yang baik bagi siswa-siswa lainnya dari hasil pelatihan.

Pelatihan ini diharapkan untuk membangun rasa persaudaraan antar para pelajar di Daerah, sehingga diharapkan mampu menekan dan meredusir masalah-masalah kenakalan pelajar serta berbagai perilaku negatif lainnya.

Untuk melaksanakan inovasi tersebut, maka pada tahun 2022 telah dilaksanakan 4 kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 100 orang.

5) Program Optimalisasi Puskesmas;

Program Optimalisasi Puskesmas, merupakan program untuk peningkatan mutu dan layanan Puskesmas di setiap kecamatan dengan menyediakan dokter spesialis, peralatan medis, layanan peserta BPJS nonstop 24 jam, dan ambulan SIGAP. Dengan tambahan satu perawat di setiap kelurahan atau home care sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi pelayanan warga yang memerlukan pengobatan, pertolongan medis di setiap kecamatan agar terhindar dari penumpukan pasien di RSUD sehingga pelayanan dapat dilakukan lebih optimal.

Program ini turut mengimbangi pertumbuhan Daerah yang cukup signifikan. Kebutuhan penduduk perkotaan yang terus bertambah dari sisi kuantitas penduduk menuntut perimbangan dari sisi kualitas dan fasilitas sebuah kota. Khusus di bidang kesehatan, program ini diupayakan pemerintah untuk mendorong perimbangan itu terjadi serta upaya optimalisasi.

Program ini dirancang dengan basis puskesmas di setiap kewilayahan, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan diharapkan dapat mengalami peningkatan. Daerah memiliki harapan bahwa peningkatan ini tidak hanya berdampak bagi peningkatan pelayanan kesehatan saja namun juga berdampak pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Daerah secara lebih menyeluruh.

Pada tahun 2022 capaian yang dihasilkan adalah:

- a) Ambulan Sigap: Pelayanan 781 (Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu) Kasus;
- b) Home Care: Pelayanan 7.415 (Tujuh Ribu Empat Ratus Lima Belas) kasus;
- c) Klinik Sore : Pelayanan 28.311 (Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Sebelas) kunjungan ;

6) Program Rumah Singgah;

Program rumah singgah merupakan program untuk menyediakan rumah singgah dan tenaga administrasinya bagi masyarakat yang

tidak mampu untuk memeriksakan kesehatan, pengobatan dan perawatan medis setelah dirujuk ke Rumah Sakit di sekitar Kota Bandung.

Program ini dirancang dengan tujuan untuk mengurangi beban dan memudahkan masyarakat Daerah ketika harus memenuhi kebutuhan pengobatan ke rumah sakit rujukan di Kota Bandung khususnya RS Hasan Sadikin. Kesulitan-kesulitan yang sering timbul akibat lokasi pengobatan jauh dari tempat tinggalnya dan tidak mampu untuk membiayainya.

Dengan adanya rumah singgah yang disertai tenaga administrasi maka fungsi fasilitas ini tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara saja bagi pasien yang hendak merujuk namun hal-hal yang biasanya menjadi kesulitan khususnya persoalan administratif pada rumah sakit rujukan dapat ditanggulangi dengan baik.

Alamat Rumah Singgah yaitu di Jl. Turangga No. 33, Bandung.

Pada tahun 2022, kegiatan ini mampu membantu masyarakat yang membutuhkan dengan penerima manfaat sebanyak 411 (empat ratus sebelas) orang, Selain itu juga dilaporkan penerima manfaat layanan ambulan sebanyak 822 (Delapan ratus dua puluh dua) kali.

7) Kelurahan *Sport Center*;

Inovasi ini merupakan program penyediaan ruang terbuka publik dan fasilitas olahraga yang berkualitas di setiap kelurahan.

Pada tahun 2022 hasil pembangunan *Sport Center* telah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebanyak 1 (satu) lokasi.

Hingga akhir tahun 2022 terhitung 26 (dua puluh lima) lokasi sudah terbangun *Sport Center*, dan masih menyisakan 7 (delapan) dikarenakan tidak adanya lokasi milik pemerintah yang bisa dijadikan lapang sport center;

8) Program Revitalisasi Pedestrian

Program ini merupakan konsep penataan integrasi kawasan lapang merdeka sehingga dapat menjadi ruang terbuka publik yang lebih nyaman serta dapat menjadi salah satu *landmark* kota; selain kawasan terintegrasi lapang merdeka dan alun-alun juga diprioritaskan untuk revitalisasi pedestrian lainnya yang dapat

merubah wajah Daerah atau dilokasi-lokasi pintuk masuk Daerah.

Pada tahun 2022 kawasan terintegrasi lapang merdeka dan alun-alun telah terbangun dan menjadi salah satu fasilitas publik yang kebanggan warga Kota Sukabumi.

Selain itu pembangunan pedestrian yang berlokasi di Jl. A. Yani mampu dibangun dengan total panjang jalan yaitu $\pm 866,12$ m², jalan R. Samsudin, SH dengan total Panjang jalan yaitu ± 380 m² dan jalan Suryakencana 1086,19 m².

9) Program Sukabumi KECE;

Program ini merupakan program pemberdayaan anak muda melalui pelatihan dan pendampingan wirausaha baru, sehingga terbentuk wira usaha baru dengan jenis bidang usaha tertentu.

Pada tahun 2022 telah dilaksanakan Pendidikan dan pelatihan bagi 700 orang calon wirausaha muda baru yang siap bersaing.

10) Program Kredit Anyelir;

Program ini merupakan program bantuan permodalan yang terintegrasi dengan program Sukabumi Kece, diberikan kepada wirausaha baru atau WUB yang telah dinyatakan lulus pelatihan.

Pada tahun 2022 adalah tahun pengembalian pinjaman modal dari para pelaku UMKM yang mendapat fasilitas permodalan.

11) Program *Little* Sukabumi;

Program *Little* Sukabumi merupakan program pusat layanan informasi, promosi, pusat belanja, dan display produk unggulan Daerah yang bersinergi dengan daerah lain yang berfungsi sebagai potensi pasar bagi produk unggulan Daerah.

Pada tahun 2022 Kota Sukabumi sudah melakukan Kerjasama (penandatanganan MoU) dengan Kota Depok dan Kota Tangerang sebagai pasar produk unggulan daerah.

12) Program Sukabumi *Creative Hub*;

Program Sukabumi *Creative Hub* merupakan program pembangunan ruang kreasi bagi warga dengan menyediakan studio foto, televisi, fashion, ruang ICT, galeri seni, serta bioskop mini untuk pemutaran film karya anak bangsa, ruang belajar, kafetaria, radio komunitas anak muda, studio rekaman, dan lain sebagainya.

Pada tahun 2022 rencana pembangunan Gedung SCH tidak dapat dilaksanakan karena mengandalkan anggaran dari bantuan keuangan provinsi. Namun ketiadaan Gedung tidak menghambat kreatifitas anak-anak muda dalam menghasilkan karya. Adapun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan telah menghasilkan:

- 6 Subsektor Ekonomi Kreatif yang teraktifasi dan mengikuti pelatihan;
- 2 Event;
- M O U;

13) Program Pendidikan Vokasi;

Program Pendidikan Vokasi, merupakan program pendidikan yang berorientasi kepada penguasaan keahlian tertentu atau vokasi yang relevan dengan dunia kerja dan usaha.

Sesuai dengan amanat undang-undang bahwa salah satu kualifikasi penyelenggaraan pendidikan nasional di Indonesia adalah pendidikan vokasi, dimana kualifikasi pendidikan ini menekankan pada penguasaan keahlian terapan tertentu.

Dalam program ini dirancang untuk lebih dapat menyalurkan para calon tenaga kerja lulusan pendidikan vokasi untuk dapat bekerja sesuai dengan keahlian yang dipelajarinya di masa sekolah. Titik beratnya ada pada upaya pemerintah untuk mempertemukan para lulusan pendidikan vokasi dengan dunia kerja. Daya serap bagi para lulusan pendidikan vokasi ini didorong dengan mengadakan dan menciptakan ruang komunikasi yang lebih intens berupa kegiatan-kegiatan bursa kerja.

Diharapkan dengan upaya dan banyaknya ruang komunikasi yang diciptakan maka para lulusan pendidikan vokasi lebih memiliki peluang untuk menemukan lapangan pekerjaannya. Serta di sisi lain perusahaan-perusahaan di Daerah ataupun di luar itu mendapatkan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan SDM sesuai bidang yang mereka butuhkan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2022 diantaranya:

- Melaksanakan pelatihan kompetensi dengan jumlah peserta yang berkompetensi dan ditempatkan sebanyak 133 orang;
- 14) Program Sukabumi *Artist Association*;
- Program Sukabumi *Artist Association* merupakan program yang menjembatani seniman dengan pihak-pihak perusahaan agar karya-karya para seniman di Daerah bisa terpublikasikan, dikenali, dan dinikmati masyarakat yang tidak saja memiliki nilai estetis namun juga memiliki nilai bisnis.
- Program ini bersinergi dengan program Sukabumi Creative Hub dalam memfasilitasi para kreator untuk menghasilkan karyanya dan mempublikasikan kepada masyarakat.
- 15) Program Sukabumi Participatory Responder atau SUPER
- Program ini merupakan sebuah aplikasi resmi milik Pemerintah Daerah yang terintegrasi langsung dengan e-LAPOR yang menawarkan kemudahan bagi warga untuk berinteraksi dengan Pemerintah Daerah baik untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, pengaduan atas pelayanan publik, pertanyaan, dan lain sebagainya.
- Pada tahun 2022 tercatat ada 382 pengaduan dan seluruhnya (100%) telah ditindaklanjuti.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2022

Pendekatan *Gap Analysis* (analisis kesenjangan) dan Analisis Deskriptif dapat digunakan sebagai metode evaluasi RKPD. *Gap Analysis* dipergunakan untuk membandingkan antara realisasi hasil kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dan membandingkan antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD. Sementara Analisis Deskriptif dipergunakan untuk menggambarkan keadaan data secara umum. Dalam Analisis Deskriptif, data-data disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan

lain-lain untuk mempermudah memahami data dan penyampaian informasi sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik.

Kedua metode diatas dipergunakan untuk menilai capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah dan menjadi bahan evaluasi untuk perencanaan yang akan datang. Adapun hasil evaluasi capaian anggaran dan kinerja perangkat daerah tahun 2022 ditampilkan dalam table di bawah ini.

Tabel 2.65
Capaian Anggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2022

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
	1.304.204.494.439	1.250.650.723.198	95,894		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	871.521.776.903	835.626.813.764	95,881		68,90
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	268.764.140.235	255.875.315.912	95,204		66,07
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	268.764.140.235	255.875.315.912	95,204		66,07
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	181.643.763.403	172.355.815.438	94,887	100	99,20
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	87.058.286.932	83.457.894.774	95,864	100	-
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	95,86			96,89
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	62.089.900	61.605.700	99,220	100	99
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	451.343.062.311	437.081.224.501	96,840		-
Dinas Kesehatan	451.343.062.311	437.081.224.501	96,840		-
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	386.482.037.926	378.472.797.922	97,928	100	-
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			-
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			Sangat Rendah
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	61.389.674.060	55.405.558.104	90,252	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	90			-
	Predikat Kinerja	tinggi			Sangat Rendah
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.904.335.750	1.643.962.600	86,327		-
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	86			-
	Predikat Kinerja	tinggi			Sangat Rendah



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.567.014.575	1.558.905.875		100	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					55
Predikat Kinerja					99
Predikat Kinerja					sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	112.293.367.749	105.491.883.839	93,943		88
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	112.293.367.749	105.491.883.839	93,943		88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.168.987.226	14.013.567.062	98,903		100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					100
Predikat Kinerja					99
Predikat Kinerja					sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.288.876.004	7.236.441.601	99,281	9	9
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					100
Predikat Kinerja					99
Predikat Kinerja					sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.081.499.800	3.442.548.402	84,345	100	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					83
Predikat Kinerja					84
Predikat Kinerja					tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	610.070.000	-	0,000	100	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					-
Predikat Kinerja					564
Predikat Kinerja					sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	4.198.055.963	4.175.879.000	99,472	73,20	-
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					100
Predikat Kinerja					99
Predikat Kinerja					sangat tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	8.366.811.150	8.337.048.200	99,644	47,00	95
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					95
Predikat Kinerja					100
Predikat Kinerja					sangat tinggi
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	4.583.395.350	4.381.444.250	95,594		91
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					91
Predikat Kinerja					96
Predikat Kinerja					sangat tinggi
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	3.270.072.000	3.057.498.298	93,499		100
Rata-rata Capaian Kinerja (%)					100
Predikat Kinerja					93
Predikat Kinerja					sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	65.357.430.256	60.486.810.026	92,548		100
Rata-rata Capaian					100



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
	Kinerja (%)	93			
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000	50.000.000	100,000		95
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			95
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	318.170.000	310.647.000	97,636		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.060.746.595	12.039.896.745	99,827		98
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.060.746.595	12.039.896.745	99,827		98
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	140.285.970	139.552.200	99,477	98,61	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	11.705.125.000	11.685.531.000	99,833	0,07	-
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			93
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	76.535.625	76.241.800	99,616	98,61	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	138.800.000	138.571.745	99,836	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	18.449.823.195	17.388.174.553	94,246		98
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	14.280.142.545	13.405.955.416	93,878		99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.181.021.065	11.067.124.316	98,981	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	3.055.276.600	2.296.583.450	75,168	100	96
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	75			96
	Predikat Kinerja	sedang			sangat tinggi
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	43.844.880	42.247.650	96,357	60 90 80	81 100 100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	96			100



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.169.680.650	3.982.219.137	95,504		98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.640.013.000	3.456.376.587	94,955		99
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	95			99
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	529.667.650	525.842.550	99,278		98
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99			98
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.610.636.818	7.750.318.214	90,009		96,46
Dinas Sosial	8.610.636.818	7.750.318.214	90,009		96,46
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.061.735.243	4.896.556.220	96,737	100	96,45
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			96
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.536.577.200	1.466.377.200	95,431	1. 40 2. 35 3. 15	1. 40 2. 35 3. 18
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	95			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000	1.500.000	100,000	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	719.617.500	612.873.319	85,167	1. 100 2. 100	91
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	85			91
	Predikat Kinerja	tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.181.935.000	670.047.100	56,691	100	87
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	57			87
	Predikat Kinerja	Rendah			tinggi
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	94.656.250	89.848.750	94,921	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	95			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.615.625	14.615.625	100,000	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	127.539.849.156	121.677.185.986	95,403		89
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4.143.366.356	4.040.344.174	97,514		89
Dinas Tenaga Kerja	4.143.366.356	4.040.344.174	97,514		89
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.625.817.756	3.557.065.024	98,104	100%	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	405.605.000	375.604.750	92,604	80%	80
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	43.975.000	41.000.000	93,235	85%	85
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	67.968.600	66.674.400	98,096	90%	90
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1.605.679.600	1.432.967.490	89,244		90
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	1.605.679.600	1.432.967.490	89,244		90
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	-	0,000		-
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	-			-
	Predikat Kinerja	-			-
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	276.769.700	270.767.749	97,831	30	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	346.068.300	286.880.300	82,897	85	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	83			100
	Predikat Kinerja	tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	539.835.100	537.973.641	99,655	85	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	41.340.000	41.340.000	100,000	madya	madya
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	401.666.500	296.005.800	73,694	85	92
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	74			92
	Predikat Kinerja	sedang			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11.648.023.829	11.434.842.531	98,170		100
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	11.648.023.829	11.434.842.531	98,170		100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.329.372.984	10.117.239.511	97,946	100	99
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			99
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	37.274.750	37.274.750	100,000	10	10
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	1.131.521.650	1.130.473.825	99,907	40	35
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	128.705.000	128.705.000	100,000	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	21.149.445	21.149.445	100,000	88	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.628.695.158	27.886.271.507	97,407		88
Dinas Lingkungan Hidup	28.628.695.158	27.886.271.507	97,407		88
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	25.036.978.656	24.319.464.403	97,134	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	171.036.800	170.936.800	99,942	50	100
	Rata-rata Capaian				100



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
	Kinerja (%)	100			
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	214.489.900	214.277.926	99,901	14	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	260.479.600	258.850.092	99,374	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	8.745.000	8.700.000	99,485	10	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	60.417.700	60.417.700	100,000	100	83
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			83
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			tinggi
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	22.874.900	22.874.900	100,000	13	85
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			85
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			tinggi
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	82.430.500	82.226.880	99,753	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.771.242.102	2.748.522.806	99,180	26	24
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99			95
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	6.369.182.405	6.210.291.630	97,505		100
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.369.182.405	6.210.291.630	97,505		100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.063.397.705	5.904.506.930	97,380	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	221.668.500	221.668.500	100,000		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	44.491.200	44.491.200	100,000		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	30.250.000	30.250.000	100,000		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.375.000	9.375.000	100,000		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	11.428.428.890	10.447.988.749	91,421		92
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	11.428.428.890	10.447.988.749	91,421		92
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.607.077.415	6.351.184.199	96,127	100	98
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	96			98
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	91.052.000	90.800.200	99,723	82	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.690.460.375	2.615.815.250	97,226	67,89	74,62
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			96
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.039.839.100	1.390.189.100	68,152	75	96
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	68			96
	Predikat Kinerja	sedang			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	19.287.573.315	18.251.409.067	94,628		100
Dinas Perhubungan	19.287.573.315	18.251.409.067	94,628		100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.407.063.440	13.710.899.657	95,168		99
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	95			99
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	4.880.509.875	4.540.509.410	93,034		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.204.334.759	5.985.524.022	96,473		100
Dinas Komunikasi dan Informatika	6.204.334.759	5.985.524.022	96,473		100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.464.281.809	5.248.585.920	96,053	80	99
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	96			99
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	580.813.250	578.288.402	99,565	90	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	159.239.700	158.649.700	99,629		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	13.271.089.130	12.756.811.506	96,125		86
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	13.271.089.130	12.756.811.506	96,125		102
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.218.508.630	9.021.075.374	97,858	100	99
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			99
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.429.125	4.429.125	100,000	62	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00			100,00
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	6.852.175	6.702.175	97,811	62	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	404.200.000	399.170.000	98,756	62	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	80.000.000	78.242.000	97,803	15	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	3.057.099.200	2.844.015.200	93,030		99
		-			-
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93			99
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	500.000.000	403.177.632	80,636	600	116
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	81			100
	Predikat Kinerja	tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.864.098.688	5.647.819.867	96,312		92
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.864.098.688	5.647.819.867	96,312		92
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.748.455.038	4.602.789.067	96,932	80	95
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			95
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	460.749.000	420.069.800	91,171	189	90
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	91			90
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			tinggi
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	72.741.250	70.165.500	96,459	60	96
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	96			-
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			Sangat Rendah
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	203.008.400	199.960.500	98,499	1.000	69
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			69
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sedang
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	369.695.000	345.385.000	93,424	210	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.450.000	9.450.000	100,000	400	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			65
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLARHAGA	13.478.810.713	12.274.306.106	91,064		91
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	13.478.810.713	12.274.306.106	91,064		91



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.427.939.940	6.061.237.834	94,295	100	80
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	94			80
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.389.326.898	1.018.548.177	73,312	81.000	78.000
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	73			98
	Predikat Kinerja	sedang			sangat tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	5.661.543.875	5.194.520.095	91,751	124	120
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	92			15
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	47.658.000	47.658.000	100,000		100
Dinas Komunikasi dan Informatika	47.658.000	47.658.000	100,000		100
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	47.658.000	47.658.000	100,000	60	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	25.041.450	25.041.450	100,000		100
Dinas Komunikasi dan Informatika	25.041.450	25.041.450	100,000		100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	25.041.450	25.041.450	100,000	60	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	310.121.300	117.371.800	37,847		91
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	310.121.300	117.371.800	37,847		91
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	53.349.700	53.065.900	99,468	15	13
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99			87
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	187.199.800	187.079.800	99,936	50	36
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	69.571.800	64.305.900	92,431	50	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	92			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	5.084.542.763	4.975.345.287	97,852		99
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			97,852		99



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
	5.084.542.763	4.975.345.287			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.692.036.763	4.587.833.437	97,779	100	99
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	98 sangat tinggi			99 sangat tinggi
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	392.506.000	387.511.850	98,728	58	65,34
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	99 sangat tinggi			100 sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	143.202.800	143.192.800	99,993		100
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	143.202.800	143.192.800	99,993		100
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	143.202.800	143.192.800	99,993	77	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	100 sangat tinggi			100 sangat tinggi
		-			-
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.767.265.625	11.553.729.380	90,495		89,51
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	449.691.150	445.226.388	99,007		97,00
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	449.691.150	445.226.388	99,007		97,00
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	424.536.250	420.812.888	99,123	24,83	25,47
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	99 sangat tinggi			100 sangat tinggi
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	25.154.900	24.413.500	97,053	42,31	38
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	97 sangat tinggi			94 sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	6.735.681.000	5.910.137.545	87,744		100
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	6.735.681.000	5.910.137.545	87,744		100
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	5.316.902.000	4.494.666.545	84,535	100	98
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	85 tinggi			98 sangat tinggi
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	136.835.500	136.835.500	100,000	4	4
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	100 sangat tinggi			100 sangat tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	66.947.500	66.447.500	99,253		100



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.214.996.000	1.212.188.000	99,769	11	11
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.474.415.100	1.442.959.422	97,867		97
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.474.415.100	1.442.959.422	97,867		97
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	294.077.300	276.552.300	94,041	20.156	20.730
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	94			88
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			tinggi
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	822.385.000	809.112.000	98,386	40	47
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			95
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	192.648.000	191.990.322	99,659	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	8.662.500	8.662.500	100,000	70	80
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	156.642.300	156.642.300	100,000	7 7	7 6,25
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			95
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	2.457.194.775	2.263.091.925	92,101		100
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	2.457.194.775	2.263.091.925	92,101		100
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.353.661.250	2.162.973.800	91,898	-	-
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	92			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.263.750	4.000.500	93,826	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	94			100



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	11.250.000	10.419.000	92,613	2.298.9 25,8	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	88.019.775	85.698.625	97,363	25	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			-
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			Sangat Rendah
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.617.283.600	1.464.133.600	90,530		94
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	1.617.283.600	1.464.133.600	90,530		94
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.564.025.000	1.412.025.000	90,281	0,50	3
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	90			82
	Predikat Kinerja	tinggi			tinggi
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	41.250.000	40.100.000	97,212	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	12.008.600	12.008.600	100,000	1	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	33.000.000	28.180.500	85,395		86
Dinas Tenaga Kerja	33.000.000	28.180.500	85,395		86
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	33.000.000	28.180.500	85,395	90	86
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	85			86
	Predikat Kinerja	tinggi			Tinggi
					-
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	109.359.094.324	106.122.108.353			50
SEKRETARIAT DAERAH	55.801.144.561	53.310.752.062	95,537		100
Sekretariat Daerah	55.801.144.561	53.310.752.062	95,537		100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	40.171.733.471	39.047.450.425	97,201		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			Sangat Rendah



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	14.973.614.190	13.654.717.204	91,192	90 100 80	90 100 80
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	91			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	655.796.900	608.584.433			100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	93			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
SEKRETARIAT DPRD	53.557.949.763	52.811.356.291	98,606		98
Sekretariat DPRD	53.557.949.763	52.811.356.291	98,606		98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	34.897.984.863	34.194.404.992	97,984	100	96
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			96
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	18.659.964.900	18.616.951.299	99,769	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
					-
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	88.490.668.596	84.399.633.229	95,377		58,78
PERENCANAAN	15.770.944.925	15.296.117.915	96,989		100
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	15.770.944.925	15.296.117.915	96,989		100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.646.949.375	11.295.607.564	96,983	80	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			-
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			Sangat Rendah
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.560.740.850	1.519.315.810	97,346	1. 100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			-
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			Sangat Rendah
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.563.254.700	2.481.194.541	96,799	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			-
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			Sangat Rendah
KEUANGAN	62.800.470.174	59.599.037.384	94,902		99
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	62.800.470.174	59.599.037.384	94,902		99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	46.166.053.211	43.366.572.325	93,936	90	96



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	94 sangat tinggi			96 sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	11.915.947.863	11.616.364.634	97,486		99
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	97 sangat tinggi			99 sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.145.826.200	1.089.048.555	95,045	90	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	95 sangat tinggi			100 sangat tinggi
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.572.642.900	3.527.051.870	98,724	100	99
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	99 sangat tinggi			99 sangat tinggi
KEPEGAWAIAN	7.380.884.347	7.247.401.194	98,192		95,40
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.380.884.347	7.247.401.194	98,192		95,40
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.761.965.847	6.649.963.333	98,344	100	95,67
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	98 sangat tinggi			96 sangat tinggi
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	618.918.500	597.437.861	96,529	90	95
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	97 sangat tinggi			95 sangat tinggi
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.544.892.650	1.269.044.920	82,145		100
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.544.892.650	1.269.044.920	82,145		100
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.544.892.650	1.269.044.920	82,145	90	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	82 tinggi			100 sangat tinggi
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	993.476.500	988.031.816	99,452		-
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	993.476.500	988.031.816	99,452		-
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	993.476.500	988.031.816	99,452	35	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	99 sangat tinggi			100 sangat tinggi
					-
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.416.611.676	8.301.725.272	98,635		99,87
INSPEKTORAT DAERAH	8.416.611.676	8.301.725.272	98,635		99,87



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
Inspektorat Daerah	8.416.611.676	8.301.725.272	98,635		99,87
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.670.123.676	7.559.895.912	98,563	65	99,62
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	99 sangat tinggi			100 sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	447.597.000	445.456.510	99,522	65% 40% 40%	% 76% 81%
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	100 sangat tinggi			100 sangat tinggi
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	298.891.000	296.372.850	99,158	3 3	3 3
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	99 sangat tinggi			100 sangat tinggi
		-			-
UNSUR KEWILAYAHAN	78.462.372.719	75.585.078.571	96,333		99
KECAMATAN	78.462.372.719	75.585.078.571	96,333		99
Kecamatan Cikole	13.897.779.291	13.640.756.559	98,151		99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.291.925.491	9.040.059.288	97,289	100	98
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	97 sangat tinggi			98 sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.569.663.300	3.565.568.771	99,885	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	100 sangat tinggi			100 sangat tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.024.190.500	1.023.128.500	99,896	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	100 sangat tinggi			100 sangat tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.000.000	12.000.000	100,000	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	100 sangat tinggi			100 sangat tinggi
Kecamatan Gunung Puyuh	10.629.942.205	10.087.426.766	94,896		204
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.223.010.905	6.749.325.582	93,442	100	514
	Rata-rata Capaian Kinerja (%) Predikat Kinerja	93 sangat tinggi			514 sangat tinggi



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.599.543.400	2.534.976.784	97,516	85	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	788.187.900	784.319.400	99,509	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.200.000	18.805.000	97,943	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
Kecamatan Citamiang	11.548.152.391	11.245.731.641	97,381		99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.264.933.691	8.064.936.648	97,580	100	95
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			95
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.396.952.800	2.294.580.243	95,729	79	-
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	96			98
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	880.661.100	880.620.750	99,995	30	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.370.000	4.360.000	99,771	75	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.234.800	1.234.000	99,935	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
Kecamatan Warudoyong	12.413.835.682	11.818.273.511	95,202		99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.527.521.193	8.126.708.911	95,300	85	95
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	95			95
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	3.016.159.600	2.913.359.411	96,592	83	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	835.799.889	757.973.189	90,688	87	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	91			100
	Predikat Kinerja	tinggi			sangat tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	4.905.000	4.810.000	98,063	60	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	98			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	29.450.000	15.422.000	52,367	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	52			100
	Predikat Kinerja	Rendah			sangat tinggi
Kecamatan Baros	9.022.843.393	8.451.560.802	93,668		99
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.254.697.093	5.689.679.147	90,967	100	96
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	91			96
	Predikat Kinerja	tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.076.608.400	2.073.105.055	99,831		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	685.223.500	682.473.400	99,599		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.212.400	2.201.200	99,494		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,49			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	4.102.000	4.102.000	100,000		100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100,00			100,00
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
Kecamatan Lembur Situ	11.085.679.721	10.881.544.065	98,159		98
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.622.258.621	7.419.927.365	97,346	90	100



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.577.326.400	2.576.575.200	99,971	84	92
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			92
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	869.794.700	868.741.500	99,879	30	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10.000.000	10.000.000	100,000	75	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.300.000	6.300.000	100,000	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
Kecamatan Cibureum	9.864.140.036	9.459.785.227	95,901		100
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.979.290.361	6.581.747.959	94,304	100	99
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	94			99
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	2.168.600.175	2.162.919.668	99,738	79	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	688.418.000	688.263.600	99,978	30	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	17.944.000	16.969.000	94,566	76	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	95			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	9.887.500	9.885.000	99,975	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
					-
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	7.646.855.440	7.384.448.643			98
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	7.646.855.440	7.384.448.643	96,568		98
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7.646.855.440	7.384.448.643	96,568		98

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			kinerja	
	Jumlah Rp.	Realisasi Rp.	Capaian %	Target %	Realisasi %
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.873.314.001	3.742.039.704	96,611	100	99
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	97			99
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	187.304.500	187.304.500	100,000	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	825.458.039	822.875.539	99,687	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	668.279.100	553.279.100	82,792	100	91
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	83			91
	Predikat Kinerja	tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	371.800.000	371.300.000	99,866	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	100			100
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.720.699.800	1.707.649.800	99,242	100	100
	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	99,24			100,00
	Predikat Kinerja	sangat tinggi			sangat tinggi
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SELURUHNYA (%)	95,89			96,03
	PREDIKAT KINERJA	sangat tinggi			Sangat tinggi

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Penilaian rata-rata capaian kinerja berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 diklasifikasikan pada kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.66
Skala Nilai Peringkat Kinerja

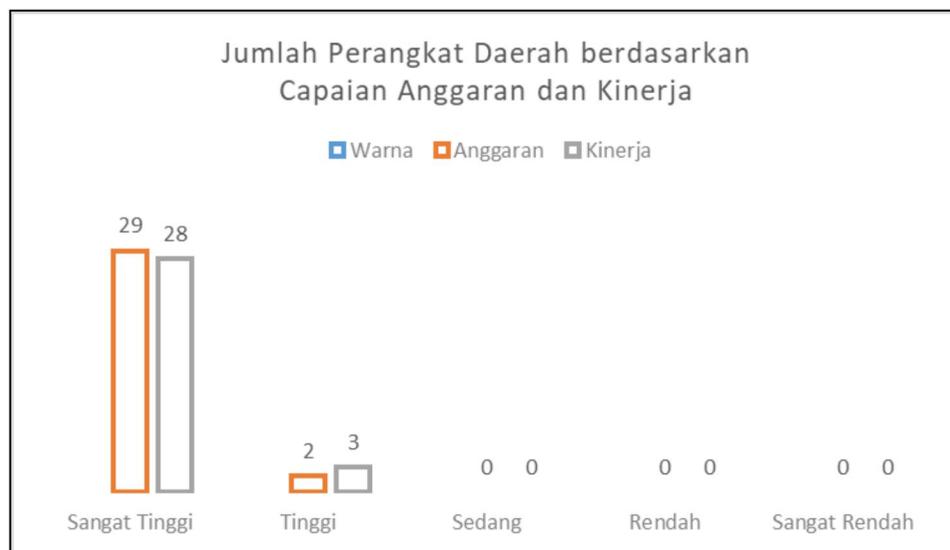
No	Interval Nilai	Kriteria
1	91 ≤ 100	Sangat Tinggi
2	76 ≤ 90	Tinggi
3	66 ≤ 75	Sedang
4	51 ≤ 65	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 tahun 2017

Secara umum capaian realisasi anggaran dan kinerja masing-masing perangkat daerah di Kota Sukabumi pada tahun 2022 sangat baik. Rata-rata perangkat daerah masuk dalam kriteria sangat tinggi dalam hal penyerapan anggaran maupun kinerjanya, dan tidak ada perangkat daerah yang masuk dalam kriteria sedang atau lebih rendah dari itu. Jumlah perangkat daerah di Kota Sukabumi berdasarkan kriteria capaian anggaran dan kinerja pada tahun 2022 dijelaskan dalam gambar dibawah ini.

Gambar 2.24

Jumlah Perangkat Daerah berdasarkan Kriteria Capaian Anggaran dan Kinerja tahun 2022



Sumber: Evaluasi RKPD Kota Sukabumi Tahun 2022, diolah

Dari gambar diatas dapat diketahui untuk penyerapan anggaran, dari 31 perangkat daerah ada 29 yang mencapai kriteria sangat tinggi dan hanya 2 yang memperoleh kriteria tinggi. Ada 8 perangkat daerah yang mampu menyerap anggaran 99%, sementara perangkat daerah yang melakukan penyerapan terendah adalah Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata. Hal tersebut disebabkan oleh efektifitas anggaran dari pelaksanaan lelang pembangunan Taman Rekreasi dan Olahraga Kenari, dimana hasil pelelangan mampu menekan biaya pembangunan fisik dan berimbang pada nilai serapan anggaran. Walaupun nilai serapan anggarannya lebih rendah namun hasil kinerjanya sangat tinggi.

Untuk pencapaian kinerjanya, dari 31 perangkat daerah masuk dalam kriteria kinerja sangat tinggi, artinya bahwa seluruh output yang direncanakan mampu terealisasi dengan baik.

Rata-rata capaian realisasi anggaran dan kinerja seluruh perangkat daerah di Kota Sukabumi pada tahun 2021 dijelaskan dalam gambar di bawah ini.

Realisasi penyerapan anggaran (95,89%) bisa dikatakan berbanding lurus dengan capaian realisasi kinerjanya (96,03%), ini membuktikan bahwa perencanaan kegiatan di Kota Sukabumi sangat baik karena dapat mengalokasikan penganggaran kegiatan sesuai dengan kinerja yang direncanakan. Kota Sukabumi dalam hal ini adalah Bappeda Kota Sukabumi telah mampu melaksanakan perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan dengan sangat baik sehingga seluruh pelaksanaan kegiatan di perangkat daerah mampu berjalan sesuai dengan perencanaan.

2.2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun 2023 Triwulan I dan Realisasi RPJMD

Pada tahap penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2023, telah dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan RKPD tahun 2023 triwulan I. Pada Tahun 2022 dilaksanakan 88 (delapan puluh delapan) program dan 279 (dua ratus tujuh puluh sembilan) kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 1.156.864.434.915,- (satu trilyun seratus lima puluh enam milyar delapan ratus enam puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima belas rupiah).

Berdasarkan hasil evaluasi hingga triwulan I diketahui bahwa realisasi anggaran menacapai Rp. 222.861.059.724 (dua ratus dua puluh dua milyar delapan ratus enam puluh satu juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh empat rupiah). Adapun hasil realisasi RKPD yang disandingkan dengan RPJMD hingga triwulan I ditampilkan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.67
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Derah Tahun 2023
Triwulan I

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
	1.204.567.228.937,00		222.861.059.724
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	804.006.701.740	7,62	136.662.756.409
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	262.917.784.368	0,13	38.967.687.727
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	262.917.784.368	0,13	38.967.687.727
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	186.158.499.818	40%	25.437.422.656
PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	47.986.050	22%	31.101.400
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	178.989.156.242	20%	23.820.080.880
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	29.000.000	0%	9.600.000
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.023.313.700	88%	282.992.974
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	5.440.653.000	87,5%	1.238.066.802
PEMELIHARAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	628.390.826	22,00%	55.580.600
PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	76.672.994.750		13.495.851.671
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR	35.184.293.200		6.436.727.732
PENGELOLAAN PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	27.161.567.200		
PENGELOLAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	7.718.143.000		838.281.200
PENGELOLAAN PENDIDIKAN NONFORMAL/KESETARAAN	6.608.991.350		1.023.196.950
PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	59.889.800		30.913.400
PEMERATAAN KUANTITAS DAN KUALITAS PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BAGI SATUAN PENDIDIKAN DASAR, PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL/ KESETERAAN	59.889.800		30.913.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	428.901.110.504	0,09	86.073.076.071
Dinas Kesehatan	428.901.110.504	0,09	86.073.076.071
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	355.290.542.022	22%	77.982.579.725
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.350.000	28%	12.213.400



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	73.487.802.813	21%	15.237.432.268
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	39.717.113	4%	1.400.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	106.400.000	0%	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.625.398.175	22%	351.302.192
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.013.670.072	23%	916.043.901
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	389.750.000	20%	79.392.015
Peningkatan Pelayanan BLUD	275.584.453.849	22%	61.384.795.949
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	66.941.308.157	11%	7.597.629.146
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	18.413.191.073	3%	462.171.000
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.162.817.784	15%	6.913.196.560
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	812.918.300	21%	167.525.000
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	552.381.000	10%	54.736.586
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.755.081.750	0,2%	6.647.900
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.977.331.000	0,3%	6.647.900
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	777.750.750	0%	-
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	370.356.000	0%	-
Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	80.148.000	0%	-
Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	144.742.000		-
Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	-		-
Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan	-		-



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
	145.466.000	0%	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	3.543.822.575	14%	486.219.300
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	97.364.750	0%	-
Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	19.535.000	0%	-
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.426.922.825	14%	486.219.300
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	91.225.821.018	0,02	7.775.160.199
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	91.225.821.018	0,02	7.775.160.199
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.251.454.198	19,41%	2.765.575.524
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.500.000	10 Buku	2.500.000
Administrasi Keuangan	9.503.474.948	79 Orang/bulan	1.731.253.848
Administrasi Umum Perangkat Daerah	572.433.550	37 Paket	133.079.040
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.923.685.700	160 Orang/bulan	854.181.133
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	249.360.000	20 Unit	44.561.503
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.435.876.004	0 Unit	1.109.257.807
Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	250.876.004	1 Dokumen	130.296.701
		2 KM	
Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Kabupaten/Kota Ha dalam 1 (Satu) Daerah	1.185.000.000	2 Dokumen	978.961.106
		0 Unit	
		402,7 Meter	
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	2.136.249.800	0	23.103.000
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	2.136.249.800		23.103.000



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.590.278.900		193.398.650
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.590.278.900		193.398.650
PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	4.133.390.150	0	984.850.738
Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	4.133.390.150		984.850.738
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	3.118.206.500	0,00	942.815.988
Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	3.118.206.500		942.815.988
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.299.772.000	0	941.753.250
Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.299.772.000		941.753.250
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	56.895.102.450		773.718.242
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	56.895.102.450		773.718.242
PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	50.000.000	0	32.787.500
Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000		32.787.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	315.491.016	0	7.899.500
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	17.500.000		784.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	202.566.016		-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota	89.850.000		4.534.000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	5.575.000		2.581.500
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	569.346.570	0	255.025.260
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	569.346.570		255.025.260
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	140.285.970	2 Unit	115.334.400



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	140.285.970	2 Unit	115.334.400
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	305.225.000	0	46.584.250
Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	41.225.000		15.273.450
Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	264.000.000		31.310.800
PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	35.035.600		6.802.400
Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	35.035.600		6.802.400
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	88.800.000		86.304.210
Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	88.800.000		86.304.210
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	11.912.554.534	25,37	2.263.894.092
Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	11.912.554.534	20,37	2.263.894.092
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab	10.439.132.584	25	2.119.225.092
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.020.000	25	7.950.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.712.447.234	25	1.239.168.517
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	67	7.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	357.015.800	99,26	97.425.700
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.850.000		-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.786.364.300	52,5	636.757.519
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	555.435.250	47	130.923.356
PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.348.422.500	32	127.010.000
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 daerah Kab/Kot	348.090.000	32	95.595.000
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.000.332.500	12	31.415.000
PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELEMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	124.999.450	5	17.659.000



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/ko	119.444.500	9	17.659.000
Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	5.554.950		-
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.446.365.670	30,36	949.527.361
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.076.563.120	23,29	872.754.761
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.649.750	3,00	6.249.750
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.408.684.560	31,25	244.599.317
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	61.626.900	3	54.370.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	251.844.700	33	124.850.900
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	28.820.000	50	11.180.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	946.251.760	24,61	232.841.894
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	371.685.450	17,65	198.662.900
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	369.802.550	37,43	76.772.600
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	24.191.250	12,00	12.415.000
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	162.061.300	22,71	30.076.300
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	170.550.000	15	21.281.300
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	13.000.000	100	13.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	8.480.084.746	20,10	1.327.913.060
Dinas Sosial	8.480.084.746	20,10	1.327.913.060
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.477.265.686	29,30	946.752.460
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	53.917.660	17	19.272.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.295.421.376	100	600.923.883
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	8.646.850	100	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.725.000	93	11.850.000



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Administrasi Umum Perangkat Daerah	224.046.600	100	63.443.850
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	164.030.300	100	5.550.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	501.093.950	21	104.836.577
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	217.383.950	50	140.876.150
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	2.274.577.200	33,00	283.076.200
Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.700.000	2	-
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2.271.877.200	1. 40 2. 20 3. 21	283.076.200
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	1.500.000	0,00	-
Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1.500.000	0	-
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.401.327.950	5,31	74.414.400
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	188.796.850	100	44.860.000
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.212.531.100	100	29.554.400
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	216.953.850	53	11.270.000
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	8.380.100	100	-
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	208.573.750	6	11.270.000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	93.845.060	0,00	6.700.000
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	55.252.020	0	6.700.000
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	38.593.040		-
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	14.615.000	0	5.700.000
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	14.615.000	0	5.700.000



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	125.852.254.017	6,94	23.792.390.974
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	3.891.223.818	9,12	699.419.658
Dinas Tenaga Kerja	3.891.223.818	9,12	699.419.658
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.328.274.418	36,34	694.090.283
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.500.000	74%	9.240.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.816.796.408	19%	525.631.808
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.245.000	100	11.245.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.287.200	33,67	66.118.460
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	33.985.000	50	10.600.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	178.080.560	43,75	32.665.015
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	113.380.250	26,00	38.590.000
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	429.700.000	-	-
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	399.700.000		-
Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	-		-
Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000		-
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	28.000.000	0,16	4.454.375
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota			
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	28.000.000	16%	4.454.375
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	69.149.900	-	875.000
Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk perusahaan yang beroperasi dalam satu daerah kab/kota	21.499.900		875.000
Pencegahan dan penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial, Mogok kerja dan Penutupan perusahaan di Daerah kab/kota	47.650.000		-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	12.403.510.297	2,46	1.366.450.759



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	12.403.510.297	2,46	1.366.450.759
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.966.457.912	10	1.188.415.172
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.374.550	10%	3.269.200
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.897.995.522	10%	985.018.217
Administrasi Umum Perangkat Daerah	232.062.900	16%	37.704.164
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	756.952.940	10%	142.091.417
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75.072.000		20.332.174
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	169.269.700	10	23.751.472
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	14.269.700	0	0
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	155.000.000		23.751.472
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	424.883.860	2,30	71.937.760
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	424.883.860	2	71.937.760
PROGRAM PENGELOLAAN DATA GENDER DAN ANAK	25.000.000	0	0
Pengumpulan, Pengolahan analisis dan Penyajian data gender dan Anak dalam kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	25.000.000		
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	244.265.100	13	5.968.100
Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	44.850.000		-
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	151.192.400		-
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	48.222.700	13	5.968.100
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	68.740.000	0	14.090.000
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	68.740.000		14.090.000



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	518.869.200	0	-
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	150.557.300		
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	266.651.900		
Penguatan dan Pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat kabupaten/kota	101.660.000		
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	10.389.545.215	16,90	1.921.505.673
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	10.389.545.215	16,90	1.921.505.673
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	10.108.005.815	19,50	1.871.775.673
Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.649.850	50	11.963.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.793.326.065	62,5	1.527.309.312
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.887.300	0	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	182.180.700	57,43333333	96.689.660
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.875.000	0	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	904.896.900	71,875	172.681.429
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	163.190.000	44,28571429	63.132.272
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	37.274.750	0,00	14.350.000
Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	37.274.750	2	14.350.000
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	220.320.250		22.825.000
Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	25.556.750	30	9.135.000
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	166.157.600	90	5.800.000
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka	28.605.900	5	7.890.000



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Kecukupan Gizi			
PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	17.195.000	45,00	11.995.000
Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kab/Kota	17.195.000	90	11.995.000
PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	6.749.400	10,0	560.000
Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kab/Kota	6.749.400	10	560.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	28.895.342.502	16,70	6.141.685.148
Dinas Lingkungan Hidup	28.895.342.502	16,70	6.141.685.148
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	23.946.925.402	44,50	5.723.976.590
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	29.795.700	25	19.956.900
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.436.251.402	25	1.826.481.530
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.998.000	100	4.762.900
Administrasi Umum Perangkat Daerah	271.303.600	40	146.716.420
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.549.950	100	23.335.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	9.819.168.100	30	2.253.386.118
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.360.858.650	34	1.449.337.722
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	167.286.600	0	3.739.400
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	167.286.600	0	3.739.400
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	167.587.300	0	55.572.708
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	141.130.800	5	50.185.708
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	26.456.500	5	5.387.000
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	435.477.500	100,00	10.037.300
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	435.477.500	100	10.037.300
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH	8.745.000	1,80	-



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
B3)			
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	8.745.000	1,8	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	64.167.050	4,00	15.182.600
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH ditertibkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	64.167.050	0	15.182.600
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	22.874.850	0	21.974.850
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.874.850	38	21.974.850
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	0	-
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	82.429.800	0	26.972.000
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	82.429.800	0	26.972.000
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	3.999.849.000	10	284.229.700
Pengelolaan Sampah	3.998.699.000	67	284.229.700
Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	400.000	0	400.000
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	750.000	16	-
Penerbitan Izin Pendaaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta	400.000	0	-
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	750.000	30	-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	8.149.116.044	11,48	1.497.515.087
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8.149.116.044	11	1.497.515.087



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN.KOTA	7.659.457.294	7,42	1.246.945.087
Perencanaan Penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat Daerah	25.282.550		8.840.900
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.136.855.613		575.088.265
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.144.700		32.770.500
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.251.525.320		323.441.740
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	1.925.905.000		-
Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.127.884.160		249.408.282
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	156.859.951		57.395.400
II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	405.543.150	0,00	208.855.000
Pelayanan Pendaftaran Penduduk	405.543.150		208.855.000
III PROGRAM PENCATATAN SIPIL	44.490.600	0,00	19.680.000
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL	44.490.600		19.680.000
IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI	30.250.000	50,00	22.035.000
Pengumpulan data Kependudukan dan pemanfaatan	8.215.000		-
Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi	22.035.000	100	22.035.000
PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.375.000	0,00	-
PENYUSUNAN PROFIL KEPENDUDUKAN	9.375.000		
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	2.431.718.150		19.310.700
BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA SEJAHTERA	2.431.718.150	-	19.310.700
PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	172.252.000		2.409.200
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	172.252.000		2.409.200
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.259.466.150		16.901.500
Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.245.253.650		16.336.600
Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	14.212.500		564.900



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA	2.554.306.375		42.977.555
BIDANG KELUARGA BERENCANA	2.554.306.375		42.977.555
PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.554.306.375		42.977.555
Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	787.183.063		2.646.880
Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	108.790.812		2.990.500
Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	1.367.132.500		3.140.175
Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	291.200.000		34.200.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	16.629.021.347	9,92	4.995.096.901
Dinas Perhubungan	16.629.021.347	9,92	4.995.096.901
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	14.000.260.147	19,84	4.489.416.451
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.615.300	0,00	4.250.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah/ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.011.597.957	16,37	1.475.261.170
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	92.500.000	0,00	-
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000	2	4.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	404.831.850	0,00	90.833.213
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102.890.000	0,00	39.650.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.046.573.540	66,55	2.692.952.068
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	333.251.500	55,95	186.470.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.628.761.200	-	505.680.450
Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	31.541.600		26.111.000
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	887.278.750		164.649.200



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	362.915.600		30.481.750
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	340.408.000		70.171.500
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	472.470.700		158.435.000
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	344.179.400		7.219.400
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	152.864.450		44.612.600
Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.102.700	1	4.000.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.521.835.566	17,98	1.211.087.249
Dinas Komunikasi dan Informatika	5.521.835.566	18	1.211.087.249
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.154.242.316	24,33	1.096.865.499
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.750.500	50,00	13.781.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.692.861.984	16,8	667.602.032
Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.445.550	30,40	99.380.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.067.389.282	36	288.245.167
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.795.000	12,80	27.856.800
PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	367.593.250	8,10	114.221.750
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	367.593.250		114.221.750
PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		21,50	
Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lngkup Pemerntah Daerah Kabupaten/Kota	12.907.700	30,00	11.102.700
Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40.332.000	13	24.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI,	13.820.426.201	9,22	1.823.496.162



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	13.820.426.201	9,22	1.823.496.162
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.567.070.121	19	1.635.424.682
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.399.900	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.346.893.961	3	1.328.357.363
Administrasi Umum Perangkat Daerah	351.342.700	1	131.903.906
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	26.930.000	4	15.430.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	736.375.560	4	137.798.313
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	63.128.000	3	10.035.000
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	4.429.050	0	-
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.429.050		-
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	6.851.100	0	-
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	6.851.100		
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	531.236.000	45,46	93.588.300
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	207.454.700	65	10.231.800
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	323.781.300	25,93	83.356.500
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	81.400.000	0	8.500.000
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	81.400.000		8.500.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.572.995.380	0	31.003.880
Pemberdayaan Usaha Mikro, yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku	2.572.995.380		31.003.880



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Kepentingan			
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	464.500.000	0	0
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	464.500.000		-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	5.341.695.467	-	876.302.442
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.341.695.467	-	876.302.442
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.257.687.567	0,00	860.630.802
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.475.000		4.007.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.330.171.827		589.999.157
Administrasi Umum Perangkat Daerah	350.480.900		144.657.904
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.540.000		-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	427.348.840		89.893.791
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	134.671.000		32.072.350
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	558.000.000	0	5.196.340
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	558.000.000		5.196.340
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	72.664.600	0	5.278.000
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	72.664.600		5.278.000
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	89.193.300	0	5.197.300
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	89.193.300		5.197.300
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	354.700.000	0	-
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	354.700.000		0
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	9.450.000	0	-
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat	9.450.000		0



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Daerah Kabupaten/Kota			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	10.379.493.859	7,70	2.193.513.710
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	10.379.493.859	7,70	2.193.513.710
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.862.615.359	20	1.162.084.610
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.413.350	80	22.622.750
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.191.495.309	19,18	803.792.949
Administrasi Umum Perangkat Daerah	367.148.300	32,86	120.629.632
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	918.486.400	17,94	164.740.607
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	357.072.000		50.298.672
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	906.225.000	4,17	37.801.200
Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	284.215.000	1,40	3.978.400
Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	622.010.000	5,44	33.822.800
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	3.610.653.500	27,52	993.627.900
Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	824.273.100	3,26	26.909.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	140.933.700	0,00	-
Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	1.037.000.000	79,56	825.000.000
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	1.608.446.700	8,81	141.718.900
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	29.658.000	0,00	3.946.000
Dinas Komunikasi dan Informatika	29.658.000	0	3.946.000
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	29.658.000	0,00	3.946.000
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	29.658.000		3.946.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	25.041.450	0	-



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
PERSANDIAN			
Dinas Komunikasi dan Informatika	25.041.450	0	-
Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	25.041.450	0,00	-
penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	15.441.450		
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	9.600.000		
RAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	26.400.000		3.500.000
Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	26.400.000		3.500.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	310.121.300	0	21.166.000
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	310.121.300	0,00	21.166.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	53.349.700	0	9.059.000
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	-		
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	53.349.700		9.059.000
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	187.199.800	0	12.107.000
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	187.199.800		12.107.000
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	69.571.800	0	0
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA PERINGKAT KABUPATEN KOTA	69.571.800		-
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	4.946.996.526	16,46	981.190.035
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	4.946.996.526	16,46	981.190.035
Program penunjang urusan pemerintah daerah	4.569.490.526	32,91	901.590.635
Kegiatan Perencanaan, Penggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.396.850	78,09	6.643.250
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.911.053.226	28,57	706.982.971
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	133.999.950	21,07	60.658.196



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	47.500.000		-
Kegiatan Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	379.551.200	40,97	83.854.518
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88.989.300	27,86	43.451.700
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	377.506.000		79.599.400
Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kab/Kota	136.470.000		19.411.000
Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kab/Kota	241.036.000	35	60.188.400
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	133.201.900	-	40.705.450
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	133.201.900	-	40.705.450
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	133.201.900		40.705.450
Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	39.001.300	25,00	20.562.450
Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kab/Kota	42.323.600	31,46	10.536.000
Kegiatan Pengolahan simpul jaringan informasi kearsipan nasional tingkat kota /kab	51.877.000	0,063	9.607.000
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	6.424.621.565	11,89	832.314.989
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	466.800.350	18,75	67.622.500
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	466.800.350	18,75	67.622.500
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	396.375.650	1,00	63.372.500
Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	75.200.000	2	26.400.000
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	321.175.650	0	36.972.500
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	70.424.700	0	4.250.000
Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	50.000.000	50	0
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	20.424.700	25	4.250.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1.009.103.000	29	361.713.701
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	1.009.103.000	28,61	361.713.701



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	325.320.000	71,92	233.975.701
Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	325.320.000	71,92	233.975.701
Program Pemasaran Pariwisata	116.835.500	14	-
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	116.835.500	13,98	16.333.000
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	66.947.500	7,25	4.852.000
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	66.947.500	7,25	4.852.000
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	500.000.000	21,31	106.553.000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	500.000.000	21,31	106.553.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	1.975.653.865	24,00	281.330.938
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1.975.653.865	24,00	281.330.938
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	1.404.347.750		17.993.000
Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.123.967.750	80	11.138.000
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota	280.380.000	0	6.855.000
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	314.756.000		232.228.508
Pengembangan Prasarana Pertanian	193.056.000		174.955.000
Pembangunan Prasarana Pertanian	121.700.000	90	57.273.508
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	87.585.515		21.049.580
Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	39.939.335		11.052.700
Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000		7.500.000
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	27.646.180	90	2.496.880



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	8.629.750	80,00	8.629.750
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/ Kota	8.629.750	10	8.629.750
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	160.334.850		1.430.100
Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	160.334.850	0	1.430.100
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	1.484.211.250	-	36.715.850
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	1.484.211.250	-	36.715.850
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.484.211.250		36.715.850
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.423.281.250	0	35.615.850
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan masyarakat di Wilayah Kerjanya	60.930.000		1.100.000
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.263.750	0	-
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	4.263.750		-
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	12.650.000	-	-
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.650.000	0	-
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	90.819.550		18.263.450
Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	90.819.550	43,33	18.263.450
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	-	0	0
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	1.452.753.600	-	84.932.000
Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	1.452.753.600	-	84.932.000
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.366.543.000	0,00	34.750.000
Penyusunan dan Evaluasi Rencana	1.366.543.000		34.750.000



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	49.832.000	0	46.332.000
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	49.832.000		46.332.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	36.378.600	0	3.850.000
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	36.378.600		3.850.000
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	36.099.500	-	-
Dinas Tenaga Kerja	36.099.500	-	-
PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	36.099.500	0	-
Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	36.099.500		
PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	0		0
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	0	0	0
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	103.518.953.858	23,77	63.723.204.332
SEKRETARIAT DAERAH	51.796.604.812	16	12.000.855.286
Sekretariat Daerah	51.796.604.812	16,45	12.000.855.286
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	35.300.658.982	20	10.111.733.774
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	105.099.700	32	33.468.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	17.218.784.918	17	2.879.833.137
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	17.959.750	0	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	46.679.700	44	20.543.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.098.646.200	56	1.731.745.347
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	283.190.000	12	33.750.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.774.339.000	24	1.135.683.612



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.016.719.750	24	490.849.482
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.505.877.164	23	341.543.730
Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah	618.185.000		43.777.400
Penataan Organisasi	354.059.600	6,25	82.590.000
Pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan	5.261.118.200	6,25	3.317.950.066
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	15.934.854.190	20,82	1.798.719.812
Administrasi Tata Pemerintahan	2.967.019.000	6,25	381.296.968
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	11.824.085.190	11,76	1.130.014.300
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	697.500.000	44,45	188.796.800
Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama Daerah	446.250.000	12,5	98.611.744
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	561.091.640	8,215	90.401.700
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	209.125.000	0,6	37.864.000
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	80.000.000		10.027.000
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	271.966.640	15,83	42.510.700
SEKRETARIAT DPRD	51.722.349.046	31,10	51.722.349.046
Sekretariat DPRD	52.715.638.455	31,10	15.121.525.861
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	37.431.290.605	25	9.491.020.168
PRENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	42.598.700	49	20.717.000
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	3.983.390.997	20	780.052.002
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	499.905.850	29	144.989.018
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	1.472.831.250	37	549.155.400
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	69.948.000	71	49.350.000
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	758.047.660	24	184.871.397
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	614.895.050	14	84.724.551



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
LAYANAN KEUANGAN & KESEJAHTERAAN DPRD	29.189.674.048	26	7.611.380.100
LAYANAN ADMINISTRASI DPRD	799.999.050	8	65.780.700
DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS & FUNGSI DPRD	15.284.347.850	37	5.630.505.693
PEMBENTUKAN PERDA & PERATURAN DAERAH	2.043.917.500	21	427.528.000
PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN	2.052.762.250	23	481.726.300
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN	4.810.309.500	51	2.441.082.893
PENINGKATAN KAPASITAS DPRD	2.557.939.400	27	695.968.150
PENYERAPAN & PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT	1.701.449.950	46	780.070.000
PELAKSANAAN & PENGAWASAN KODE ETIK DPRD	355.944.850	40	141.515.300
FASILITASI TUGAS DPRD	1.762.024.400	38	662.615.050
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	78.572.780.617	7,79	14.296.278.165
PERENCANAAN	13.889.290.503	19,33	2.828.337.399
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.889.290.503	19,33	2.828.337.399
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.122.831.453	12	1.979.728.699
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	786.438.500	12	101.066.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.511.243.483	16	934.756.768
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	2	525.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	343.489.950	32	109.961.225
Administrasi Umum Perangkat Daerah	974.789.500	43	427.160.168
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	548.660.000	0	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.448.340.020	15	299.149.567
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489.870.000	21	107.109.971
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.834.082.850	1. 100	562.483.800
		2. 100	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.196.483.050	33	510.673.800
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	215.188.250	0	4.515.000
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	344.611.550	12	4.125.000



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	77.800.000	55	43.170.000
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.932.376.200	1.100	286.124.900
		2.100	
		3.100	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	763.785.100	13	99.428.400
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	510.058.000	13	66.697.000
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	658.533.100	18	119.999.500
KEUANGAN	56.051.255.988	12,73	10.310.348.964
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	56.051.255.988	12,73	10.310.348.964
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	36.605.005.506	50,91	7.830.500.340
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.479.000	58	25.200.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	30.597.410.341	100	6.219.219.106
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	33.600.000	100	1.800.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.078.287.920	98,39	580.896.867
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.255.462.500		539.778.372
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.493.063.245		296.272.620
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.103.702.500		167.333.375
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	11.559.169.632		720.740.554
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	1.073.645.350	3	377.530.163
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	635.728.500	100	152.078.350
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	815.181.950,00	23%	191.132.041,00
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	4.650.379.850		345.540.364
Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.413.678.850		345.540.364
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	3.236.701.000		1.413.567.706
Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3.236.701.000		1.413.567.706



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
KEPEGAWAIAN	6.181.951.726	6,87	1.040.925.752
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.181.951.726	6,87	1.040.925.752
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.647.509.576	0,21	1.023.240.702
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.952.250	40%	7.575.400
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.485.667.146	17%	780.706.823
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.350.000	29%	5.345.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	523.305.530	22%	113.753.840
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41.505.000	0%	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	426.958.400	21%	90.689.339
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	132.771.250	19%	25.170.300
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	534.442.150	13,53	17.685.050
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	286.198.550	27,06	16.023.650
Mutasi dan Promosi ASN	214.173.100		8.623.050
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	34.070.500	0	
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.323.371.900	-	28.764.500
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.323.371.900	-	28.764.500
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.323.371.900	0,00	28.764.500
Pengembangan Kompetensi Teknis	319.686.900		1.541.800
Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.003.685.000		27.222.700
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1.126.910.500	-	87.901.550
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.126.910.500	-	87.901.550
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1.126.910.500	0%	87.901.550
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	596.645.600		42.103.800
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	530.264.900		45.797.750



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	8.686.643.473	0,09	1.677.105.741
INSPEKTORAT DAERAH	8.686.643.473	0,09	1.677.105.741
Inspektorat Daerah	8.686.643.473	0,09	1.677.105.741
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.345.294.618	27%	1.530.749.361
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	34.956.800	67%	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.695.360.748	22%	1.037.546.061
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	283.650.000	10%	55.892.900
Administrasi Umum Perangkat Daerah	711.160.163	66%	337.372.098,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	196.825.000	2%	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	229.222.907	100%	49.132.686,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	194.119.000	8%	50.805.616,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	648.462.500	0,07	55.696.380
Penyelenggaraan Pengawasan Internal	476.085.000	13%	55.696.380
Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	172.377.500	-	-
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	692.886.355	0,20	90.660.000
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	185.679.689	17%	-
Pendampingan dan Asistensi	507.206.666	23%	90.660.000
UNSUR KEWILAYAHAN	69.264.598.136	44,65	11.963.275.096
KECAMATAN	69.264.598.136	44,65	11.963.275.096
Kecamatan Cikole	8.697.978.493	100,00	1.670.586.934
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA	8.697.978.493	100	1.670.586.934
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.900.000	31	1.500.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.132.947.563	18	1.297.743.107
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	116.450.550	41	47.991.121
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	12.350.000	95	11.750.000



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Urusan Perangkat Daerah			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.232.274.380	21	254.782.206
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.056.000	29	56.820.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK	1.864.580.500	100	83.512.186
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.862.384.500	1	14.143.786
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	2.196.000	3.159	69.368.400
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	2.431.333.850	100	342.064.650
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	220.002.600	32	69.368.400
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	81.961.250	28	23.143.250
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2.129.370.000	12	249.553.000
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	74.763.600	100	19.634.124
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	74.763.600	26	19.634.124
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	0	0	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Kecamatan Gunung Puyuh	9.674.968.543	6,33	1.760.330.411
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.539.614.193	21	1.405.906.061
Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.979.450	48	5.255.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.026.045.448	19	955.611.313
Administrasi Umum Perangkat Daerah	155.444.750	26,41	41.047.800
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.350.000	95	11.750.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.188.958.550	29,67	352.743.548
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	145.835.995	27,08	39.498.400
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.461.242.100	2,44	35.625.450
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.461.242.100	2,44	35.625.450



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.627.073.250	2,15	310.245.300
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	150.130.350	1	46.359.300
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	88.495.000	3	152.103.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.388.447.900	8	111.783.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	34.344.000	0	8.553.600
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	34.344.000	25	8.553.600
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	12.695.000	-	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	12.695.000		-
Kecamatan Citamiang	10.684.115.402	0,33	1.898.728.411
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.697.451.352	19,34%	1.488.471.062
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.420.000	21,57%	1.385.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.275.200.652	17,86%	1.120.956.175
Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.540.600	42,95%	65.079.500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.710.000	94,72%	21.510.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.069.430.600	21,96%	234.843.928
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	172.149.500	25,96%	44.696.459
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.226.365.950	4,21%	51.623.050
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.189.112.500	1	14.369.600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	37.253.450	100,00%	37.253.450
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.710.374.900	20,26%	346.564.300
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	176.865.900	1	73.444.300
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.533.509.000	17,81%	273.120.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	48.693.200	24,79%	12.069.999
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	48.693.200	24,79%	12.069.999



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	1.230.000	0,00%	0
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	1.230.000	0,00%	0
Kecamatan Warudoyong	11.357.907.236	8,30	1.756.438.121
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.722.394.536	8,30	1.350.857.622
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.090.000	29	1.270.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.439.057.316	31	1.120.315.819
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.159.000	0	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	105.850.720	17	23.757.990
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.564.600	20	11.750.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.004.069.900	43	178.999.313
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	145.603.000	10	14.764.500
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.615.685.100	30,00	64.668.799
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.615.685.100	30	64.668.799
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.921.302.400	20,50	324.426.900
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	166.094.800	13	59.648.200
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.755.207.600	29	264.778.700
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	46.077.200	12	9784800
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	46.077.200	12	9.784.800
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	52.448.000	0	6.700.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	52.448.000	13	6.700.000
Kecamatan Baros	8.942.579.353	4,33	1.436.953.468
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.421.491.603	17,00	1.018.631.168
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.199.150	3	3.199.150



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	599.750	2	354.750
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	599.550	2	354.550
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.124.426.031	11	801.408.272
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	499.050	1	499.050
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana/Semesteran SKPD	499.050	0	0
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	499.050	0	0
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.352.500	57	1.575.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.798.552	2	14.309.155
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1.012.250	2	150.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.874.200	326	531.500
Fasilitas Kunjungan Tamu	38.493.000	154	5.390.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	9.685.000	7	3.630.000
Pengadaan Mebel	5.000.000	1	5.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.349.900	1	19.240.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.037.000	30	336.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	98.399.920	3	19.314.896
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	192.000.000	3	48.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	493.434.700	2	76.542.245
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	111.211.250	6	17.336.600
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	3.340.000	2	1.460.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	281.181.700	0	0
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.177.172.350	1,00	48.367.100
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1.072.981.400	1	2.800.000
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	64.941.500	3	6.318.000
Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	33.999.750	4	33.999.400
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan	5.249.700	1	5.249.700



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.284.854.550	0,67	360.821.150
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	127.676.150	1	41.003.150
Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	45.130.400	0	0
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1.112.048.000	1	319.818.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	41.559.050	2,5	8.609.050
Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	40.653.150	2	7.711.200
Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	905.900	3	897.850
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	17.501.800	0,50	525.000
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	3.826.950	0	0
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	13.674.850	1	525.000
Kecamatan Lembur Situ	10.305.444.808	71,00	1.895.200.390
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.086.644.476	0,00	1.406.282.240
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.572.450	0,00	1.645.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.795.447.876	0,00	1.064.883.089
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	18.749.850	0,00	3.600.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	152.407.150	0,00	100.827.450
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.350.000	0,00	11.750.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	943.501.900	0,00	186.740.601
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	150.615.250	0,00	36.836.100
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.466.408.850	90	51.324.750
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.466.408.850	3,50	51.324.750



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.690.369.882	90	415.611.400
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	147.979.300	36,28	53.687.900
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.542.390.582	90	361.923.500
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	47.921.600	85	10.882.000
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	47.921.600	22,71	10.882.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	14.100.000	90	11.100.000
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	14.100.000	78,72	11.100.000
Kecamatan Cibeureum	9.601.604.301	122	1.545.037.361
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.842.927.326,00	52,28	1.220.606.611,00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.530.000,00	41,67	950.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.566.178.526,00	86,79	975.730.488,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.237.500,00	100	8.237.500,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	86.070.300,00	17,22	25.397.250,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.500.000,00	33,3	11.750.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	859.139.500,00	65,00	173.282.673,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	295.271.500,00	21,95	25.258.700,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	31.812.500,00	0,00	-
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	31.812.500,00	0,00	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	1.187.489.275,00	50	34.540.750,00
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.164.612.400,00	0	11.664.200,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	22.876.875,00	3	22.876.550,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	1.494.863.200,00	0,00	268.039.200,00
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	126.390.200,00	1	34.499.200,00
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1.368.473.000,00	0,00	233.540.000,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN	44.512.000,00	100	21.850.800,00



Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
KETERTIBAN UMUM			
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-	-
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	44.512.000,00	100,00	21.850.800,00
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.786.228.437	0,13	1.215.935.781
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.786.228.437	0,13	1.215.935.781
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.786.228.437	0,13	1.215.935.781
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.671.346.115	22,83%	838.000.058
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.449.000	80%	9.682.500
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.993.475.515	23,08%	532.596.211
Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	500.000	100%	500.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.942.250	100%	50.501.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	234.884.700	44,69%	131.298.890
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.468.650	34,94%	52.045.062
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	126.626.000	46,53%	61.376.395
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	627.206.383	0,00%	32.906.623
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	627.206.383	0,00%	32.906.623
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	819.104.039	0%	-
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	819.104.039	0%	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	556.829.100	49,63%	276.374.100
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	556.829.100	49,63%	276.374.100
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	376.800.000	1,79%	6.745.000

Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	
		K	Rp.
Perumusan Kebijakan teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	376.800.000	1,79%	6.745.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.734.942.800	2,26%	61.910.000
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.734.942.800	2,26%	61.910.000
	RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SELURUHNYA (%)	12,86	21,13
	PREDIKAT KINERJA	Sangat Rendah	Sangat Rendah

Sumber: Evaluasi RKPD Triwulan I tahun 2023, Bappeda 2023

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi anggaran dan kinerja hingga triwulan I tahun 2023 belum ada yang mencapai target karena masih banyak kegiatan belum dapat dilaksanakan karena beberapa faktor, misalnya karena belum waktunya dilaksanakan atau masih dalam tahapan persiapan. Dalam kerangka acuan kerja masing-masing subkegiatan di perangkat daerah rata-rata capaian kinerja baru dapat terlihat di awal triwulan III.

Sementara itu untuk capaian realisasi RPJMD hingga akhir tahun 2022 rata-rata berada di kriteria sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa target-target yang ditetapkan dalam RPJMD dapat dilaksanakan dengan baik oleh perangkat daerah. Walaupun kondisi pasca pandemi Covid-19 dan ada beberapa anggaran kegiatan yang *refocusing* namun beberapa kegiatan yang berfokus pada pencapaian target RPJMD tetap menjadi prioritas.

2.3 Kondisi Masa Pandemi COVID-19 di Kota Sukabumi

Bencana pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal Tahun 2020 memiliki dampak yang sangat luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Termasuk juga di Kota Sukabumi, dampak pandemic ini terasa pada aspek perekonomian dan kesehatan

sehingga berimplikasi negatif pada kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif pada perekonomian masyarakat sangat dirasakan dengan terganggunya aktivitas dunia usaha terutama menurunnya aktivitas perdagangan pada sektor UMKM, penurunan produktivitas sektor industri yang mengakibatkan terjadinya gelombang PHK yang begitu besar, dan terhambatnya proyek-proyek infrastruktur yang mengakibatkan perlambatan pembentukan modal/investasi. Selain pada aspek perekonomian, dengan penyebarannya yang begitu masif, wabah ini tentunya berdampak buruk pada kondisi Kesehatan masyarakat dan semuanya berujung pada kondisi kerentanan social masyarakat yang meningkat.

2.3.1 Kondisi Kesehatan Masa Pandemi COVID-19

Dampak pandemi Covid-19 di sektor kesehatan yang paling banyak adalah meningkatnya angka kesakitan dan yang lebih fatal adalah meningkatnya angka kematian. Terdapat juga dampak penyerta lainnya terkait dengan pengendalian dan penanganan pasien yang terkonfirmasi positif diantaranya proses karantina atau isolasi dan penyembuhan pasien dengan gejala berat akibat efek infeksi Covid-19. Karena itu strategi penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor kesehatan terdiri dari 2 (dua) hal besar, yaitu pencegahan dan yang kedua adalah penyembuhan untuk pasien yang terkonfirmasi positif.

Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor kesehatan Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program dan kegiatan yang diharapkan mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program dan kegiatan tersebut adalah program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat dengan kegiatan penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota, kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan, kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB), pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan dan kegiatan pengadaan bahan habis pakai. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 49.011.383.495 (empat

puluh sembilan milyar sebelas juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus Sembilan puluh lima rupiah).

2.3.2 Kondisi Ekonomi Pasca Pandemi COVID-19 Tahun 2022

Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor ekonomi Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program yang diharapkan mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program tersebut adalah program pelayanan izin usaha simpan pinjaman, program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian, program pemberdayaan dan perlindungan koperasi, program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM, program perizinan dan pendaftaran perusahaan, program peningkatan sarana distribusi perdagangan, program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, program pengembangan ekspor, program standarisasi dan perlindungan konsumen, program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, program perencanaan dan pembangunan industri, program pengendalian izin usaha industri Kabupaten/Kota dan program pengelolaan sistem informasi industri nasional. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 62.324.774.000 (Enam puluh dua milyar tiga ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

2.3.3 Kondisi Sosial Pasca Pandemi COVID-19 Tahun 2022

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka pemulihan dampak pandemi covid 19 di sektor sosial adalah dengan memberikan bantuan sosial dan insentif sebagai stimulus bagi masyarakat. Aliran bantuan ini akan disalurkan melalui program-program pemerintah seperti program keluarga harapan, kredit usaha rakyat, kredit ultra mikro, kartu sembako, hingga program bantuan pangan non tunai. Diharapkan bansos dan stimulus akan meningkatkan daya beli dan memberikan bantuan modal kerja bagi masyarakat untuk memulai kembali usahanya sehingga ekonomi bertahap akan bangkit. Untuk penanganan dan pemulihan pandemi covid-19 di sektor sosial Pemerintah Daerah sudah menyiapkan program yang diharapkan

mampu menangani permasalahan pandemi covid19 di Daerah. Adapun program tersebut adalah program pemberdayaan sosial, program rehabilitasi sosial, program perlindungan sosial dan program penanganan bencana. Rencana anggaran yang dialokasikan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut dari tahun 2021 sampai dengan 2023 sebesar Rp. 7.894.750.000 (Tujuh milyar delapan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

2.3.4 Kondisi Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022

Dampak pandemi Covid-19 sangat luas termasuk pada aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga bisa terimbas dampak tersebut. Kondisi tersebut juga terjadi di Kota Sukabumi, dimana sektor penerimaan pendapatan daerah khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah. Hasil pendapatan daerah Kota Sukabumi pada Tahun 2022 melampaui target yang ditetapkan, apabila dibandingkan dengan tahun 2021 pendapatan Kota Sukabumi mengalami penurunan. Realiasi Pendapatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.212.391.016.133,00 ,- menurun bila dibandingkan Tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 1.244.104.862.003,00,-, hal ini disebabkan adanya beberapa pendapatan terutama pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat yang mengalami penurunan. Dilihat dari sisi anggaran belanja, Tahun 2022 Kota Sukabumi telah berhasil merealisasikan anggaran sebesar Rp. 1.251.736.198.234,00 ,- dari target sebesar Rp. 1.304.258.580.462,00 ,- atau sebesar 95,97 persen.

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa

mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan daerah di masa lalu.

2.4.1 Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas Pembangunan Daerah

Berdasarkan berbagai isu pembangunan maka dapat dirumuskan beberapa masalah kebijakan serta isu strategis Daerah. Penentuan isu strategis menjadi bagian penting karena dari tahap ini akan diketahui tantangan utama/ permasalahan daerah yang harus diselesaikan Kepala Daerah beserta seluruh Perangkat Daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Berdasarkan hasil analisis terhadap berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan, maka telah ditetapkan 3 (tiga) prioritas pembangunan sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kondusifitas Kota;
- 2) Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa;
- 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif.

2.4.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pembangunan pada Tahun 2021, dapat diidentifikasi berbagai permasalahan pembangunan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.68
Rekapitulasi Permasalahan Perangkat Daerah Berdasarkan Urusan

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN
1	2	3	4
1) Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar			
a) Pendidikan	1. Belum meratanya kases pendidikan karena distribusi guru yang kurang	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
	2. Belum Optimalnya mutu pendidikan	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
b) Kesehatan	1. adanya pandemi <i>Covid-19</i>	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	2. meningkatnya angka penyakit tidak menular	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	3. banyaknya fasilitas sanitasi yang tidak layak/tidak sehat	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. adanya disparitas pembangunan infrastruktur	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
	2. rendahnya fasilitas RTH publik	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
	3. kurangnya pedestrian yang nyaman	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
	4. belum terdistribusinya PDAM secara luas	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
	5. masih banyaknya alih fungsi lahan	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
	6. belum memiliki RDTR	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
d) Perumahan Rakyat	1. luasan pemukiman kumuh sebesar 17%	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
	2. rendahnya tingkat serah terima aset PSU	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
e) Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. termasuk dalam IRB tinggi	1	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORI TAS PEMBANGU NAN	SASARAN
1	2	3	4
	2. belum adanya alat dateksi bencana	1	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
	3. belum berjalannya mekanisme pendirian bangunan melalui assesment dari Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) serta belum adanya sertifikat layak fungsi bangunan	1	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
f) Sosial	1. belum optimalnya pemberian pelayanan sosial	1	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
	2. belum optimalnya peran serta dan pemanfaatan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
2) Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar			
a) Tenaga Kerja	1. jumlah lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja	2	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
	2. kualitas tenaga kerja relatif rendah	2	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
	3. meningkatnya pengangguran akibat pandemi <i>Covid-19</i>	2	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	2. rendahnya peran serta perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
c) Pangan	1. peningkatan produksi dan produktivitas pangan yaitu beras belum optimal	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	2. pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) Daerah belum optimal	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	3. volume cadangan pangan tingkat pemerintah belum memenuhi target SPM	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN
1	2	3	4
e) Lingkungan Hidup	1. kurangnya luasan RTH	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
	2. menurunnya kualitas lingkungan	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
	3. belum optimalnya pengelolaan dan pengolahan sampah	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. masih terdapat penduduk yang belum memiliki dokumen kependudukan	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	2. masih banyak Perangkat Daerah yang belum melakukan kerja sama pemanfaatan data kependudukan	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	3. masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	4. masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang menguasai informasi teknologi dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
g) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. belum optimalnya peran lembaga dan organisasi yang ada di masyarakat	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	2. keterbatasan SDM baik aparatur maupun kader di bidang pengendalian penduduk dan KB	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	3. peningkatan cakupan PUS peserta KB aktif belum diikuti dengan penurunan <i>unmet need</i> secara proporsional	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
	4. belum optimalnya pelaksanaan kegiatan KIE dan pemanfaatan kegiatan KB momentum	1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
h) Perhubungan	1. kemacetan yang cukup tinggi	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
	2. belum optimalnya pelayanan angkutan umum massal di	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN
1	2	3	4
	Daerah		
	3. kurangnya penyediaan parkir dalam memenuhi tingginya bangkitan kegiatan di pusat Daerah	1	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
i) Komunikasi dan Informatika	1. terbatasnya alokasi dana untuk pengembangan jaringan komunikasi dan informasi	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	2. terbatasnya sumberdaya manusia bidang telematika	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	3. terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	4. masih mahalnya harga bandwidth internet yang berkualitas	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	5. belum tersedianya data center	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
j) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1. kondisi usaha mikro dan kecil (UMK) belum optimal	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	2. pola kemitraan atau kerjasama antara koperasi dan UMK, dengan pengusaha besar belum optimal	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	3. kurangnya dukungan pendanaan untuk promosi produk usaha mikro	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	4. belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	5. belum tersedianya sistem database koperasi dan usaha mikro yang baik	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	6. kurangnya SDM aparatur urusan koperasi dan UMK	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN
1	2	3	4
k) Penanaman Modal	1. kurangnya investor terutama sektor industri	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	2. turunnya nilai investasi	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
l) Kepemudaan dan Olahraga	1. masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung urusan kepemudaan	1	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
	2. belum optimalnya pemanfaatan Sarana Olah Raga (SOR)	2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
m) Statistik	1. belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	2. tingkat partisipasi dan distribusi data dari pengguna/ Perangkat Daerah terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	3. belum optimalnya sistem aplikasi yang memudahkan pengelolaan dan penyelenggaraan data statistik sektoral	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
n) Persandian	-		
o) Kebudayaan	1. belum adanya pembangunan museum kepurbakalaan dan jarahnitra	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
	2. kurangnya perlindungan pemeliharaan dan penyelamatan warisan budaya tak benda dan hak kekayaan intelektual	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
p) Perpustakaan	1. belum idealnya kondisi gedung perpustakaan umum daerah	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
	2. terbatasnya SDM (pustakawan)	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN
1	2	3	4
	3. rendahnya budaya literasi masyarakat	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
q) Kearsipan	1. kurangnya SDM (arsiparis)	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
	2. gedung depo arsip kurang representatif	1	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
3) Urusan Pilihan			
a) Kelautan dan Perikanan	1. tingkat konsumsi ikan masih rendah	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	2. belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
b) Pariwisata	1. belum maksimalnya pertumbuhan dan pengembangan Pariwisata Ekonomi Kreatif	2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
	2. masih minimnya Obyek Daerah Tujuan Wisata (ODTW)	2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
	3. masih rendahnya sumber daya manusia pengelola destinasi pariwisata milik Daerah	2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
	4. kurangnya promosi pariwisata	2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
	5. Kurangnya sarana prasarana destinasi pariwisata unggulan milik Daerah	2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
c) Pertanian	1. Tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
d) Perdagangan	1. perlunya peningkatan ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	2. perlunya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	3. perlunya peningkatan pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL)	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERMASALAHAN	PRIORITAS PEMBANGUNAN	SASARAN
1	2	3	4
e) Perindustrian	1. kegiatan usaha industri kecil pada umumnya masih menggunakan teknologi yang relatif sederhana	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	2. rendahnya IKM Produktif	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	3. adanya potensi pengaruh negatif globalisasi dan liberalisasi investasi dan perdagangan	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	4. kurangnya inovasi pemasaran	2	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
4) Unsur Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
	1. Nilai SAKIP masih belum optimal	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	2. Nilai indeks Reformasi Birokrasi masih belum optimal	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	3. Masih ada instansi pelayanan public yang bernilai kurang baik	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	4. Belum terdapatnya mekanisme tunjangan kinerja berdasarkan kinerja	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	5. Pelayanan public masih belum terpusat di satu tempat missal di mall pelayanan public	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
	6. Masih ditemukannya temuan-temuan oleh pemeriksa atau tim audit	3	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi (hasil analisis)

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi Daerah Tahun 2024 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2024. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Sukabumi yang dipengaruhi faktor internal dan variabel eksternal yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun global serta tentunya kondisi perekonomian pada masa pasca pandemi *Covid-19*. Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2024.

Dalam rangka mencapai target kinerja daerah yang telah ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting. Memberikan fakta dan analisis terkait perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan kemampuan pembelanjaan dan pembiayaan untuk pembangunan Tahun 2024. Kerangka pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja.

Hasil kajian dan analisis berkenaan dengan rancangan kerangka ekonomi Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi acuan pada proses perencanaan hingga menjadi penganggaran sampai nanti dijadikan dasar dalam proses pelaksanaan pembangunan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2024 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2022 dan awal Tahun 2023, prospek serta tantangan perekonomian Tahun 2023 dan 2024. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah dapat mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dengan penerapan prinsip pembangunan

berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi.

Pada awal Tahun 2020, dunia dihadapkan pada kondisi terjadinya Pandemi *Covid-19* yang membuat kondisi ekonomi global memburuk hingga berdampak juga pada kondisi perekonomian Nasional, Regional Jawa Barat serta Kota Sukabumi. Pandemi *Covid-19* telah merenggut ribuan nyawa di Indonesia serta mengakibatkan kerugian material yang berdampak pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Kondisi tersebut mengharuskan pemerintah melakukan berbagai upaya untuk penyelamatan baik dari sisi kesehatan, jaringan pengaman sosial serta penanganan dampak ekonomi yang didalamnya termasuk dunia usaha dan masyarakat lain yang terkena dampak.

Pada Tahun 2024, kondisi kesehatan masyarakat akibat adanya Pandemi *Covid-19* diprediksi akan semakin membaik sehingga perekonomian nasional dan global termasuk Kota Sukabumi diperkirakan mulai bangkit. Prediksi perbaikan kondisi ekonomi ini seiring dengan semakin menurunnya jumlah masyarakat yang terkonfirmasi positif *Covid-19* serta semakin massifnya pelaksanaan Vaksinasi oleh pemerintah dan sekarang sudah pada tahap vaksinasi ketiga (Booster) serta vaksinasi pada usia sekolah dasar. Selain itu optimisme didapatkan setelah melihat fakta bahwa semakin meningkatnya aktivitas di beberapa sektor usaha, dimulainya kembali pembangunan proyek-proyek infrastruktur berbasis padat karya dan digitalisasi perdagangan.

Kota Sukabumi dianugerahi wilayah yang sejuk dengan segenap infrastruktur kota yang sudah berdiri sejak dahulu kala. Namun, seperti karakteristik daerah perkotaan pada umumnya, Kota Sukabumi memiliki wilayah dengan luas yang terbatas, yakni 48 km², serta jumlah penduduk Tahun 2022 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 358.854 jiwa, dan berdasarkan Data BPS sebesar 356.410 jiwa. Kepadatan penduduk 7.375 jiwa/Km², dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.65 persen. Luas wilayah yang terbatas dengan jumlah penduduk yang cukup padat menjadi masalah tersendiri dalam pengembangan potensi ekonomi di Kota Sukabumi.

Namun demikian, letak geografis Kota Sukabumi yang cukup strategis di antara dua pusat pertumbuhan ekonomi, yaitu wilayah Bandung Raya dan wilayah megapolitan Jakarta, menciptakan suatu peluang yang dapat dikembangkan sebagai modal dasar dalam menggerakkan roda perekonomian. Posisi geografis tersebut memberikan keunggulan potensial dalam segi arus lintas barang dan jasa. Seyogyanya pengembangan ekonomi di Kota Sukabumi mengarah pada pendayagunaan potensi sosio-geografis yang dimilikinya.

Berdasarkan kondisi diatas, maka Arah Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 telah dirumuskan melalui 3 (tiga) Prioritas Pembangunan, meliputi:

1. peningkatan Kondusifitas Kota meliputi:
 - a. Peningkatan Kualitas pendidikan dan kesehatan
 - b. Pembangunan Insfrastruktur yang berkualitas
 - c. Penguatan Kondisi sosial
 - d. Menjaga Stabilitas kemandirian dan ketertiban
2. Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa:
 - a. Revitalisasi Pariwisata
 - b. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
3. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan penguatan budaya kreatif dan inovatif melalui
 - a. Peningkatan inovasi pelayanan publik dalam kerangka *smart city*

Dari 3 (tiga) Prioritas Pembangunan tersebut, dua diantaranya, optimalisasi sektor perdagangan dan jasa berhubungan langsung dengan bidang ekonomi. Secara keseluruhan 3 (tiga) prioritas pembangunan tersebut mendukung kepada upaya upaya mewujudkan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, serta mewujudkan pengembangan sektor perdagangan, sektor jasa dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi. Di sini jelas bahwa Kota Sukabumi telah menetapkan arah pengembangan bidang ekonominya ke sektor jasa pendidikan, sektor jasa kesehatan, sektor perdagangan, sektor-sektor jasa lainnya yang memiliki daya saing tinggi, sebagaimana telah ditetapkan dalam arah perencanaan jangka panjang RPJPD Kota Sukabumi 2005-2025.

3.1.1 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Nasional

Tantangan dan risiko baru telah muncul dari faktor global baik dari sisi geopolitik, ekonomi dan keuangan yang sangat kompleks dan dinamis. Dalam World Economic Outlook (WEO) Bulan Oktober 2022, lembaga keuangan dunia yaitu International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan melambatnya pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 sebesar 3,2 persen, atau turun signifikan 1,2 persen dari proyeksi di Januari 2022 sebesar 4,4 persen. Sedangkan tahun 2023 WEO memproyeksikan ekonomi global tumbuh 2,7 persen.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju juga diperkirakan akan mengalami penurunan. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan turun oleh WEO IMF menjadi sebesar 1,6 persen di tahun 2022 dan 1,0 persen di tahun 2023. Dalam periode yang sama, proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok adalah 3,2 persen di tahun 2022, dan 4,4 persen di tahun 2023; Jepang diproyeksikan tumbuh 1,7 persen di tahun 2022, dan 1,6 persen di tahun 2023; dan negara Zona Eropa diproyeksikan tumbuh sebesar 3,1 persen di tahun 2022 dan 0,5 persen di tahun 2023. Sedangkan untuk negara-negara berkembang seperti India diproyeksikan tumbuh tinggi sebesar 6,8 persen di tahun 2022 dan 6,1 persen di tahun 2023, termasuk juga pertumbuhan ekonomi di Kawasan ASEAN diperkirakan berada dalam tren meningkat.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya selesai, tantangan ekonomi lain yang perlu diwaspadai danantisipasi yaitu masih dihadapkan pada dampak perang Rusia dan Ukraina yang mengakibatkan krisis pangan dan energi, serta meningkatnya suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Fed dikarenakan inflasi yang tinggi. Perang Rusia –Ukraina telah menyebabkan disrupsi sisi produksi/supply yang sangat besar, sehingga mendorong volatilitas harga-harga komoditas global dan penuh ketidakpastian khususnya komoditas energi dan pangan.

Harga komoditas energi seperti gas alam dan batu bara masih persisten tinggi sejak perang di Ukraina, sedangkan harga minyak mentah turun setelah pengumuman supply cut oleh Organization of The Petroleum Exporting Countries (OPEC). Harga komoditas pangan

seperti kedelai dan jagung kembali naik karena faktor cuaca dan geopolitik, serta harga Crude Palm Oil (CPO) sedikit kembali naik sedangkan harga gandum turun. Kenaikan pada harga komoditas pangan dan energi memicu tekanan inflasi di banyak negara yang kemudian mendorong pengetatan kebijakan moneter.

Peringatan dini terhadap potensi resesi ekonomi global tahun 2023 mulai digaungkan berbagai institusi finansial global seperti *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia. Krisis ekonomi yang sudah terjadi di beberapa negara saat ini menjadi indikasi nyata terhadap kemunculan resesi tersebut.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resesi ekonomi seperti inflasi yang sangat tinggi dan kenaikan suku bunga. Tingginya inflasi di banyak negara saat ini disebabkan oleh minimnya suplai barang untuk mencukupi jumlah permintaan yang meningkat, terlebih di tengah perang Rusia-Ukraina. Disrupsi yang ditimbulkan Perang Rusia-Ukraina berdampak negatif terhadap kestabilan pasokan energi dan suplai bahan makanan secara global. Akibatnya, perang tersebut memicu lonjakan harga barang dan energi yang semakin menipis serta mendorong inflasi terus naik.

Guna menahan laju inflasi, bank sentral perlu menaikkan tingkat suku bunga sehingga pinjaman dan kemauan belanja dari masyarakat berkurang. Pengurangan tersebut akan mengurangi laju permintaan dari masyarakat sehingga inflasi semakin terkendali. Kenaikan suku bunga di berbagai negara dinilai cukup agresif untuk menahan laju inflasi. Meski dapat menekan inflasi, kenaikan suku bunga di berbagai negara secara signifikan tidak otomatis mencegah terjadinya resesi ekonomi global.

Tingkat inflasi di Amerika Serikat pada September 2022 sebesar 8,2 persen kemudian diikuti kenaikan tingkat acuan suku bunga sebesar 3,25 persen, inflasi negara Inggris bulan September 2022 sebesar 10,1 persen yang direspon dengan kenaikan tingkat suku bunga acuan sebesar 2,25 persen, India dengan inflasi sebesar 7,4 persen di Bulan September 2022, menaikkan suku bunga acuannya sebesar 5,90 persen, dan Indonesia dengan inflasi Bulan Oktober 2022 sebesar 5,95 persen menaikkan suku bunga acuannya sebesar 4,75 persen. Proyeksi inflasi global oleh WEO IMF tahun 2022

akan naik sebesar 8,8 persen dan tahun 2023 sebesar 6,5 persen. Spillover effect dari pengetatan kebijakan moneter dan likuiditas global ini harus kita waspadai khususnya terhadap kenaikan cost of fund untuk pembiayaan, baik APBN/APBD maupun sektor korporasi, di tengah fase pemulihan ekonomi yang masih awal dan masih rapuh.

Pergeseran risiko, tantangan inflasi, dan pengetatan moneter ini menimbulkan situasi pilihan kebijakan (policy trade-off) yang sangat sulit, yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Pilihan kebijakan tersebut adalah apakah segera mengembalikan stabilitas harga (mengendalikan inflasi) yang berarti pengetatan moneter dan fiskal yang akan memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan, atau tetap mendukung akselerasi pemulihan ekonomi setelah terpuak pandemi. Jika tidak terkelola, risiko global ini akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Amerika Serikat pada periode awal 1980 an dan 1990 an.

Saat ini, negara-negara di seluruh dunia tengah berjuang untuk memulihkan perekonomian pasca pandemi Covid-19, termasuk Indonesia. Ada tiga kunci menuju pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pertama, memaksimalkan terbukanya lapangan kerja dalam sektor-sektor potensial seperti sektor digital melalui pembangunan kapasitas dan keterampilan yang relevan. Kedua, adalah mendorong produktivitas untuk menciptakan nilai tambah pada sektor yang menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Ketiga, menciptakan ekosistem untuk bumi yang layak huni, mendorong lapangan kerja yang berkelanjutan dan transisi energi yang adil dan terjangkau.

Kendati demikian, Indonesia perlu waspada lantaran jumlah penduduk yang jauh lebih besar, terutama periode tahun 2020-2030, dimana Indonesia ingin keluar dari *middle income trap*. Ini menjadi tantangan bagi generasi muda sehingga perlu meningkatkan produktivitasnya, salah satunya dengan terlibat aktif dalam menguatkan pertumbuhan perekonomian nasional.

Perekonomian Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 diperkirakan dapat tumbuh tinggi meskipun ekonomi global diprediksi mengalami perlambatan. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing mencapai 4,3

persen dan 4,7 persen. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 dan 2024 dipengaruhi oleh efektivitas penanganan COVID-19 serta kebijakan nasional dalam memberikan stimulus pertumbuhan ekonomi.

Tantangan ekonomi nasional antara lain dampak dari konflik di Ukraina, meningkatnya kembali kasus dan varian baru COVID-19, perlambatan pertumbuhan ekonomi Tiongkok dan peningkatan tekanan sosial akibat kenaikan harga pangan dan energi.

3.1.2 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia. Salah satu elemen penting dalam mendorong perbaikan ekonomi dan mendukung pencapaian ketahanan ekonomi Jawa Barat adalah investasi. Jawa Barat menjadi destinasi investasi utama secara nasional, baik investasi yang bersumber dari luar negeri (PMA) maupun domestik (PMDN). Keunggulan investasi di Jawa Barat adalah efisiensi investasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan nasional, bahkan bersaing dengan berbagai negara di Asia Tenggara.

Di era pasca pandemi ini, Jawa Barat memiliki tujuh ekonomi baru yang bisa dijadikan sasaran investasi. Di antaranya, destinasi investasi Asean, kedaulatan pangan, investasi bidang kesehatan, manufaktur 4.0, digital, *green economy* dan pariwisata lokal.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih tercatat tumbuh positif, bahkan selalu di atas nasional. Ekonomi Jawa Barat triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 4,61 persen (Y-on-Y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Perusahaan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,52 persen.

Ekonomi Jawa Barat sepanjang tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,45 persen meningkat dibanding capaian tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,74 persen. ekonomi Jawa Barat triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,39 persen (Q-to-Q).

"Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,71 persen. perekonomian Jawa Barat berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan IV-2022 mencapai Rp627,00 triliun dan

atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp405,76 triliun. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 26,29 persen.

Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 5,33 persen.

Tantangan perekonomian yang dihadapi Jawa Barat pada tahun 2024, terdapat beberapa faktor yang memengaruhi laju inflasi Jabar di 2024 yang perlu diwaspadai, seperti perubahan cuaca, pencabutan PPKM, penyesuaian UMK/UMP 2023, persiapan tahun politik 2024, hingga tantangan geopolitik dunia dan adanya perubahan fenomena La Nina ke El Nino dapat membuat lahan menjadi lebih kering hingga mengganggu produksi padi serta produk hortikultura lainnya. Akhirnya, pasokan pangan pun terancam terganggu. Di samping itu, terdapat pula situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi berbagai kebijakan ekonomi.

Prospek perekonomian pada tahun 2023 diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan dengan menurunnya jumlah kasus COVID-19 dan peningkatan persentase vaksinasi dosis kedua dan ketiga. Kinerja ekspor mulai membaik seiring dengan semakin banyaknya negara yang membuka perbatasan dan mengizinkan kembali proses ekspor-impor terjadi, pengembangan pasar tujuan ekspor, peluang penetrasi pasar non tradisional, serta adanya reformasi regulasi. Impor barang produksi atau bahan baku juga mulai membaik. Perdagangan dalam negeri didorong oleh penggunaan digitalisasi pemasaran, juga QRcode dalam pembayaran.

Tantangan perekonomian Jawa Barat pada tahun 2024 meliputi:

1. Penormalan kinerja perekonomian dari dampak dinamika perekonomian global;
2. Akselerasi produktivitas sektor kunci PDRB Jawa Barat melalui percepatan realisasi investasi;
3. Digitalisasi ekonomi dan industri yang berbasis *high tech*, dan industri kecil menengah dan UMKM;
4. Penguatan konektivitas dan inklusivitas ekonomi Jawa Barat, khususnya UMKM, IKM serta pariwisata; dan
5. Pencapaian kemandirian pangan berkelanjutan

Secara sektoral, tantangan di atas digambarkan sebagai berikut:

1. Tantangan pada sektor investasi:
 - a. Implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS- RBA) pada seluruh sektor perizinan;
 - b. Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi;
 - c. Memperkuat fungsi kelembagaan dalam promosi, *business matching, market sounding, link and match* investor industri kecil dan industri besar; dan
 - d. Formalisasi Usaha Mikro Kecil (UMK) pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Tantangan pada sektor industri:
 - a. Perwujudan kawasan industri pada Kawasan Peruntukan Industri;
 - b. Substitusi bahan baku impor;
 - c. Kemitraan industri besar dan IKM; dan
 - d. Pemanfaatan tingkat komponen dalam negeri 40 persen.
3. Tantangan pada sektor UMKM:
 - a. Memperkuat ekosistem digital UMKM dari hulu ke hilir; dan
 - b. Meningkatkan kontribusi sektor UMKM dalam perekonomian Jawa Barat melalui wirausaha baru dan UMKM naik kelas.
4. Tantangan pada sektor pariwisata:
 - a. Operasionalisasi dan optimalisasi destinasi wisata;
 - b. Pengembangan Desa Wisata;
 - c. Pengembangan destinasi pariwisata berstandar nasional dan internasional; dan
 - d. Percepatan Sertifikasi *Cleanliness, Health, Safety and Environment Sustainability* (CHSE).
5. Tantangan pada sektor perdagangan:
 - a. Perdagangan berorientasi ekspor ke luar negeri maupun antar provinsi;
 - b. Standarisasi pasar rakyat ber-SNI;
 - c. Ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok yang terjangkau melalui Pusat Distribusi Provinsi;
 - d. *Market intelligence* untuk penetrasi pasar regional dan

- ekspor;
- e. Promosi dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - f. Penyediaan komoditas perdagangan yang kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya terjaga.
6. Tantangan pada sektor pertanian dan pangan:
- a. Ketersediaan pangan yang terjangkau;
 - b. Perlindungan harga ditingkat produsen;
 - c. Peningkatan produksi komoditas substitusi bahan pangan dan hortikultura impor; dan
 - d. Ketersediaan pangan berkualitas.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan:
- a. Kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - b. Penempatan calon tenaga kerja Jawa Barat;
 - c. Penguatan Balai Pelatihan Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
 - d. Pengangguran baru sebagai dampak dari relokasi industri ke luar wilayah Jawa Barat; dan
 - e. penciptaan lapangan pekerjaan melalui usaha mandiri.

Secara umum kinerja perdagangan luar negeri maupun dalam negeri pada tahun 2022 membaik. Proyeksi perekonomian Jawa Barat tahun 2023 secara lengkap disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022-2023

No	Indikator	Realisasi 2022	Target	
			2023	2024
1	Nilai PDRB-ADHB (triliun rupiah)	2.422,78	2.641,42- 2.706,48	2.961,28
2	Laju Pertumbuhan PDRB (persen)	5,45	4,35	5,42
3	Inflasi (persen)	6,04	3,00	2,50
4	Pendapatan per Kapita (juta rupiah)	48,32	49,29	57,28
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	8,31	9,69	8,01
6	Persentase Penduduk Miskin (persen)	7,98	7,54	7,31

No	Indikator	Realisasi 2022	Target	
			2023	2024
7	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHB (triliun rupiah)	576,89	531,87	

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

3.1.3 Perkembangan dan Tantangan Ekonomi Kota Sukabumi

Pada awal tahun 2020, dunia termasuk Indonesia terkena pandemi *Covid-19* dengan penyebaran yang sangat cepat. Hal ini berdampak pada banyak aspek lain yaitu sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga bisa terimbas dampak tersebut. Kondisi tersebut juga terjadi di Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi, di mana sektor penerimaan pendapatan daerah khususnya dari retribusi, maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai 14,19 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 9,32 triliun rupiah. Ekonomi Kota Sukabumi tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,35 persen dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh positif sebesar 3,71 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,67 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,76 persen.

Prospek ekonomi makro Kota Sukabumi pada Tahun 2023 dan Tahun 2024 diperkirakan akan mengalami peningkatan. Hal tersebut bisa dilihat dari semakin menggeliatnya perekonomian masyarakat. Setelah melakukan analisis kondisi perekonomian Tahun 2022 dan awal 2023, maka telah ditetapkan target pencapaian indikator makro bidang ekonomi sebagai dasar dan bahan bagi perencanaan Tahun 2024. Proyeksi indikator makro tersebut sejalan

dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Berikut target ekonomi makro Kota Sukabumi Tahun 2024 dibandingkan dengan target Provinsi dan Nasional:

Tabel 3.2
Proyeksi Indikator Ekonomi Makro Kota Sukabumi disandingkan dengan Provinsi dan Nasional

INDIKATOR	RPJMN 2024 (Target)	RPD JAWA BARAT 2024 (Target)	KOTA SUKABUMI 2022 (Capaian)	KOTA SUKABUMI 2023 (Target)	RPD KOTA SUKABUMI 2024 (Target)
LPE (%)	6,20	5,42	5,35	5,37	5,37
Kemiskinan (%)	8,15	7,31	8,02	8,00	8,00
TPT (%)	3,10	8,01	8,83	8,43	8,41
IPM (Poin)	74,60- 84,23	73,56	75,4	75,55	75,55
Rasio Gini (Poin)	0,360- 0,474	0,394	0,482	0,482	0,475

Sumber: RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026

Berdasarkan tabel di atas, maka dapat dijelaskan realisasi dan proyeksi ekonomi makro Tahun 2024 sebagai berikut:

1) Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Perekonomian Kota Sukabumi tahun 2022 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku mencapai 14,19 triliun rupiah dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai 9,32 triliun rupiah. Ekonomi Kota Sukabumi tahun 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,35 persen dibandingkan tahun 2021 yang tumbuh positif sebesar 3,71 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,67 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah tangga mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 3,76 persen.

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Sukabumi pada Tahun 2024 berdasarkan target RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebesar 5,37 persen. Proyeksi ini cukup berat, mengingatkan kondisi akhir Tahun 2022 adalah sebesar 5.35 %.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan berbagai strategi pemulihan ekonomi yang efektif dalam mencapai proyeksi target tersebut. Fokus pada pelaksanaan program pemulihan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* merupakan salah satu langkah rasional yang harus dilakukan, terutama pada sektor-sektor tertentu yang paling besar atau banyak terdampak seperti rumah tangga, UMKM, korporasi, dan sektor keuangan.

2) Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Salah satu permasalahan yang terus menjadi beban pemerintah dan menjadi salah satu faktor penghambat laju pembangunan manusia adalah kemiskinan. Dengan kemiskinan ini selalu dijadikan alasan sebagai penghambat masyarakat dalam mengakses kebutuhan dasar berupa pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan disebabkan oleh berbagai dimensi yang terkait satu sama lain, oleh sebab itu maka penanggulangan kemiskinan perlu aksi dan upaya dari berbagai sektor yang berkaitan.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Pada tahun 2022 standar garis kemiskinannya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tetapi jumlah penduduk miskin di kota sukabumi menurun hal ini membuktikan bahwa tingkat daya beli masyarakat meningkat dan perekonomian di kota sukabumi semakin membaik.

Target persentase penduduk miskin di Kota Sukabumi pada Tahun 2024 berdasarkan dokumen RPD adalah sebesar 8,00 %. Apabila melihat target yang ditetapkan, maka target tersebut

cukup realistis untuk tercapai sehubungan angka capaian persentase penduduk miskin tahun 2022 berdasarkan data BPS adalah sebesar 8,02 %, sedangkan target Tahun 2022 sebesar 7,70 %.

Pada tahun 2022 standar garis kemiskinannya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya tetapi jumlah penduduk miskin di kota sukabumi menurun hal ini membuktikan bahwa tingkat daya beli masyarakat meningkat dan perekonomian di kota sukabumi semakin membaik.

Berdasarkan hal tersebut, maka persentase penduduk miskin harus menjadi perhatian khusus untuk dilakukan berbagai upaya dan langkah dalam melakukan pencapaian target tersebut. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemulihan ekonomi pasca *pandemi Covid-19* harus dilakukan dengan sungguh-sungguh dan ditambah dengan pelaksanaan jarring pengaman social dalam rangka mencegah meningkatnya angka kemiskinan.

3) Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Permasalahan ketenagakerjaan sangat berkorelasi erat dengan jumlah penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja. Dampak dari pandemi *Covid-19* pada sektor industri memengaruhi ketenagakerjaan (pekerja/buruh). Sektor usaha yang memberlakukan kebijakan untuk merumahkan pekerja/buruh selama pandemi *Covid-19* adalah sektor industri, sektor akomodasi/restoran dan sektor usaha manufaktur. Sektor usaha yang merumahkan paling sedikit pekerja/buruh adalah industri elektronik dan konstruksi.

Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2022 sebanyak 159,62 ribu orang, naik 15,71 ribu orang dibanding Agustus 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) naik sebesar 5,62 persen poin dari 56,86 persen menjadi 62,48 persen. Penduduk yang bekerja sebanyak 145,52 ribu orang, naik sebanyak 17,13 ribu orang dari Agustus 2021. Lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah jasa sebesar 71,61 persen; Manufaktur sebesar 24,20 persen; dan Pertanian sebesar 4,19 persen. Penduduk yang bekerja pada kegiatan formal sebanyak 78,03 ribu orang (53,62 persen), sedangkan yang

bekerja pada kegiatan informal sebanyak 67,49 ribu orang (46,38 persen).

Berdasarkan dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, target TPT Tahun 2024 adalah sebesar 8,41%, menurun dari capaian Tahun 2022 sebesar 8,83 %. Target ini cukup tinggi dan berat untuk dicapai, sehingga tentunya dibutuhkan berbagai strategi dan program dalam melakukan intervensi sehingga dapat mengurangi jumlah pengangguran.

4) Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Proyeksi Nilai IPM Kota Sukabumi Tahun 2024 berdasarkan target RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah sebesar 75,55. Target ini meningkat dari capaian Nilai IPM Tahun 2022 yang telah diterbitkan BPS yaitu sebesar 75,40. Dari aspek pembangunan manusia, Kota Sukabumi menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Angka IPM Kota Sukabumi setiap tahun selalu di atas rata-rata angka IPM Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2022, nilai IPM Kota Sukabumi adalah sebesar 75,40. Selama periode 2010-2022, IPM Kota Sukabumi rata-rata meningkat sebesar 0,87 persen.

Target IPM Tahun 2024 sangat wajar dan bisa untuk tercapai, hal tersebut berkaca pada capaian IPM Tahun 2022 yang mencapai 75,40 dari target yang ditetapkan sebesar 74,60.

Namun demikian, tentu kewaspadaan harus terus ditingkatkan terutama untuk sektor yang terkait dengan pencapaian IPM seperti kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Terutama sisi ekonomi perlu terus didorong peningkatan daya beli masyarakat dan peningkatan UMKM. Semoga upaya-upaya yang telah direncanakan pemerintah dalam kerangka pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* akan juga berhasil mendorong pencapaian target IPM Kota Sukabumi.

5) Proyeksi Indeks Gini/ Gini Rasio

Pemerintah daerah akan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar terciptanya pemerataan pada tatanan pendapatan di masyarakat. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks Gini digunakan

untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh.

Gini rasio kota sukabumi naik sebesar 0,046 (dari 0,436 pada 2021 menjadi 0,482 pada 2022). Maka distribusi pengeluaran penduduk mengalami peningkatan ketimpangan. Akan tetapi, persentase penduduk miskin kota sukabumi mengalami penurunan dari 8,25% menjadi 8,02%, dimana Indeks kedalaman kemiskinan (P1) pun menurun dari 1,39 menjadi 1,27 serta indeks keparahan kemiskinan (P2) mengalami kenaikan dari 0,36 menjadi 0,38.

Selain mempertimbangkan proyeksi indikator di atas, beberapa asumsi-asumsi yang bisa dijadikan dasar bagi perencanaan Tahun 2024 diantaranya adalah:

1. Inflasi yang diperkirakan terjaga;
2. Nilai tukar rupiah diperkirakan kembali stabil;
3. Transaksi digital menjadi preferensi masyarakat dalam bertransaksi jual beli dan sebagainya;
4. Pemanfaatan program relaksasi kredit berjalan optimal tetapi memerlukan dukungan stimulus modal;
5. Aktivitas industri manufaktur, investasi dan pariwisata mulai bergerak (kapasitas produksi dan tenaga kerja) terkait penerapan protokol kesehatan pada lini produksi;
6. Proyek-proyek infrastruktur yang tertunda mulai berjalan kembali.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalan dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang

serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Selanjutnya Pasal 27 Ayat (1) menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas (i) Pendapatan Daerah; (ii) Belanja Daerah, dan (iii) Pembiayaan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat penyerahan urusan pemerintahan.

Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel yang diimplementasikan dalam sistem anggaran berbasis kinerja. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Daerah, bahwa penganggaran daerah yang didasarkan kepada kemampuan keuangan daerah diarahkan dan dikelola berazaskan fungsi:

- a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
- b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
- c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
- e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, Pinjaman Bank, Dana Umat, Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (PHLN), Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)/*Public Private Partnership* (PPP), swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta Bina Lingkungan di Kota Sukabumi yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

3.2.1 Kondisi dan Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting. Daerah yang mempunyai kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melakukan perencanaan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah. Kemampuan pemerintah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah. Analisis dan proyeksi mempertimbangkan perkembangan

realisasi pendapatan Tahun 2020, 2021 dan Tahun 2022 serta asumsi pendapatan Tahun 2023.

Berdasarkan masalah dan tantangan yang akan dihadapi dalam pengelolaan keuangan daerah pada Tahun 2024, strategi dan arah kebijakan yang akan ditempuh adalah mengupayakan terwujudnya optimalisasi pengeluaran pemerintah dengan memperhatikan keberlanjutan APBD yang sehat. Untuk mendukung hal tersebut, reformasi struktural di bidang pengelolaan keuangan daerah di antaranya melalui reformasi administrasi dan kebijakan di bidang perpajakan daerah, belanja daerah, serta pengelolaan aset pemerintah. Dengan demikian, secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada:

1. Penyeimbangan antara peningkatan alokasi anggaran dan upaya untuk memantapkan kesinambungan fiskal melalui:
 - (a) peningkatan penerimaan daerah dan efisiensi belanja daerah;
 - (b) merumuskan pembiayaan defisit anggaran;
2. Peningkatan penerimaan daerah terutama ditempuh melalui reformasi kebijakan dan administrasi perpajakan daerah;
3. Revitalisasi pengelolaan keuangan daerah;
4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengeluaran daerah terutama ditempuh melalui penajaman alokasi anggaran antara lain dengan realokasi dan *refocusing* belanja daerah agar lebih terarah dan tepat sasaran;
5. Implementasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Adapun strategi yang ditempuh dalam perencanaan Tahun 2024 adalah:

1. Penetapan kebijakan belanja yang efektif, dan efisien dengan memperhatikan aspek kemampuan dalam menghimpun pendapatan;
2. Pemantapan pelaksanaan anggaran terpadu (*unified budget*), penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja (*performance*

based budget), dan penerapan alokasi belanja daerah dalam kerangka pengeluaran jangka menengah (*medium term expenditure framework*);

3. Perencanaan dan alokasi anggaran yang tepat sasaran dan adil berdasarkan prioritas program pembangunan;
4. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan kekayaan daerah, dan penilaian kekayaan daerah untuk menentukan nilai ekonomi (*existing value*) serta nilai potensi (*potential value*) kekayaan daerah;
5. Optimalisasi pendapatan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat; serta;
6. Pengelolaan pembiayaan dan pengendalian defisit dengan resiko yang minimal;

3.2.2 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Efektifitas penyelenggaraan pemerintah tidak terlepas dari kapasitas keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota Sukabumi. Kebijakan belanja pembangunan daerah akan mempertimbangkan kapasitas fiskal yang dimiliki. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi Jawa Barat merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

Hasil pendapatan daerah Kota Sukabumi pada Tahun 2022 sudah mencapai target bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hasil tersebut dapat dilihat dari Laporan Realisasi APBD Tahun 2022, dimana dari target pendapatan Tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.190.541.508.400,- dengan realisasinya sebesar Rp 1.212.367.670.664,- atau realisasi sebesar 101.83 %. Dari tiga

komponen pendapatan, dua komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer sesuai dan bahkan melebihi target yang ditetapkan sedangkan untuk lain-lain pendapatan yang sah belum mencapai target dimana realisasi baru mencapai 87,94%.

Secara umum penyusunan proyeksi pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi makro yang diproyeksikan mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun 2023, walaupun peningkatannya tidak signifikan. Hal ini terkait dengan status *Endemi Covid-19* pada tahun 2023 ini, pengaturan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah, serta upaya intensifikasi yang akan dilakukan. Selain itu, di Kota Sukabumi diyakini masih banyak potensi yang harus digali dan dioptimalkan kembali sehingga diharapkan pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan pada tahun-tahun mendatang.

Adapun proyeksi pendapatan pada tahun 2024, berdasarkan dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 serta estimasi yang dilakukan berdasarkan kondisi terkini terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.3
PENDAPATAN TAHUN 2021 - 2022 DAN PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2023 - 2024

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET APBD 2023 (Parsial)	PROYEKSI RPD 2024	PROYEKSI RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN DAERAH	1,243,764,424,083	1,212,367,670,664	1,181,044,450,978	997,771,547,239	1,017,809,213,239
1.1	Pendapatan Asli Daerah	344,060,591,430	363,263,682,587	349,327,555,306	375,433,154,296	375,433,154,296
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	54,442,710,141	67,552,075,530	58,532,530,859	64,385,783,945	64,385,783,945
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	6,604,301,840	6,215,920,368	58,611,407,000	6,183,784,385	6,183,784,385
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4,346,251,729	4,753,064,486	4,823,095,967	4,753,064,486	4,753,064,486
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	278,667,327,720	284,742,622,203	280,110,521,480	300,110,521,480	300,110,521,480
1.2	Pendapatan Transfer	860,294,504,597	821,147,030,215	815,834,912,872	609,911,892,943	629,949,558,943
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat:	745,379,173,118	821,147,030,215	687,538,243,670	525,699,629,300	545,737,295,300
1.2.1.1	Dana Perimbangan	703,688,702,118	717,381,967,231	687,538,243,670	525,699,629,300	545,737,295,300
1.2.1.1.1	Dana Transfer Umum	563,798,808,531	536,390,643,856	542,861,039,000	525,699,629,300	545,737,295,300
1.2.1.1.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	100,231,153,531	73,635,888,856	57,525,126,000	60,401,382,300	60,401,382,300
1.2.1.1.1.2	Dana Alokasi Umum	463,567,655,000	462,754,755,000	483,335,913,000	465,298,247,000	485,335,913,000
1.2.1.1.2	Dana Transfer Khusus	139,889,893,587	180,991,323,375	144,677,204,670	0	0
1.2.1.1.2.1	Dana Alokasi Khusus Fisik	63,381,741,757	58,804,148,375	20,887,762,970	0	0
1.2.1.1.2.2	Dana Alokasi Khusus non Fisik	76,508,151,830	122,187,175,000	123,789,441,700	0	0
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	41,690,471,000	3,504,359,000	0	0	0
1.2.1.3	Dana Otonomi Khusus					
1.2.1.4	Dana Keistimewaan					
1.2.1.5	Dana Desa					

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET APBD 2023 (Parsial)	PROYEKSI RPD 2024	PROYEKSI RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7
1.2.2	Transfer Antar Daerah	114,915,331,479	100,260,703,984	128,296,669,202	84,212,263,643	84,212,263,643
1.2.2.1	Pendapatan bagi hasil;	67,707,680,435	72,196,746,544	80,202,155,850	84,212,263,643	84,212,263,643
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	47,207,651,044	28,063,957,440	48094513352	0	0
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	39,409,328,056	15,881,982,800	15,881,982,800	12,426,500,000	12,426,500,000
1.3.1	Hibah (BOS Pusat)	-	1,500,000,000	1,500,000,000	0	0
1.3.2	Dana Darurat					
1.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	39,409,328,056	14,381,982,800	14,381,982,800	12,426,500,000	12,426,500,000

Sumber: Hasil analisis Bappeda

Berdasarkan tabel diatas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Target penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2024 berdasarkan dokumen RPD adalah sebesar Rp 997,771,547,239,- mengalami penurunan signifikan sebesar 15,52 persen dibanding target penerimaan pendapatan daerah Tahun 2023 sebesar Rp 1,181,044,450,978,-. Penurunan ini disebabkan pendapatan bersumber transfer khusus yaitu Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik serta Bantuan Keuangan Provinsi belum dimasukkan sebagai unsur pendapatan. Hal tersebut didasari bahwa kelompok pendapatan tersebut merupakan dana transfer yang bersifat belum pasti dan tergantung pada menu atau prioritas pusat dan provinsi serta senantiasa mengalami perubahan setiap tahunnya. Pendapatan ini akan dimasukkan pada saat sudah adanya kepastian pendapatan transfer berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 2) Target penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2024 berdasarkan dokumen RKPD adalah sebesar Rp 1,017,809,213,239,- bertambah sebesar Rp 20,037,666,000,- atau 2,01% dari target yang ditentukan dalam dokumen RPD. Penambahan tersebut berasal dari sumber Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu asumsi bahwa pendapatan dari DAU P3K masih tetap akan diluncurkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Target penerimaan pendapatan pada pos PAD Tahun 2024 ditargetkan sebesar Rp 375,433,154,296,- atau mengalami kenaikan sebesar Rp 26,105,598,990,- (7,47 %) dibanding target Tahun 2023 sebesar Rp 349,327,555,306,-. Penambahan proyeksi pendapatan ini berasal dari komponen pajak daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sahyaitu berupa pendapatan BLUD.
- 4) Pada pos Pendapatan Transfer Tahun 2024 direncanakan sebesar Rp 629,949,558,943,- mengalami kenaikan sebesar Rp 20,037,666,000,- atau 3,29 % dari target yang telah ditentukan dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026.
- 5) Penerimaan pendapatan pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun 2024 ditargetkan sebesar

Rp12,426,500,00,- meningkat sekitar 7,14% dibandingkan target Tahun 2023 dan sama dengan dokumen RPD.

Arah kebijakan keuangan daerah dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 antara lain:

- 1) Mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah melalui:
 - a) Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak daerah, terutama pajak yang memiliki potensi besar seperti PBB, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan Pajak Reklame;
 - b) Melakukan pendataan ulang obyek pajak dan retribusi untuk akurasi dan pemutahiran data dalam menggali sumber penerimaan yang belum optimal;
 - c) Melakukan digitalisasi pajak daerah dan retribusi daerah melalui pemasangan *tapping box* dan alat bantu *software* rekam transaksi;
 - d) Pembenahan manajemen penerimaan PAD;
 - e) Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif;
 - f) mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;
 - g) Meningkatkan kemampuan aparatur dalam rangka peningkatan pendapatan dan menciptakan kepuasan pelayanan prima.
- 2) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Mengoptimalkan sumber pendapatan lain yang sah.
- 4) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah. Optimalisasi potensi pendapatan dari bagi hasil BUMD juga dilakukan melalui dana bergulir dan optimalisasi peran BUMD *holding company*.
- 5) Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

- 6) Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan selain dari APBD, terutama melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR).
- 7) Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi.

Kebijakan untuk peningkatan pendapatan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024, dilakukan dengan berbagai strategi sebagai berikut:

1. Strategi pencapaian target pendapatan asli daerah, dilakukan melalui:
 - a. Penataan kelembagaan pengelolaan pendapatan daerah
 - b. Penyederhanaan sistem dan prosedur layanan
 - c. Meningkatkan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai kemampuan
 - d. Pembentukan tim monitoring dan evaluasi pajak daerah dan retribusi daerah secara terpadu
 - e. Melaksanakan dan mengembangkan inovasi dalam pelayanan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, salah satunya melalui pengembangan sistem informasi pajak daerah
 - f. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, ditempuh melalui:
 - a. Meningkatkan akurasi data potensi pajak maupun potensi sumber daya alam
 - b. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait, DPRD, DPR RI, DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran dana transfer
3. Strategi pencapaian anggaran lain-lain pendapatan yang sah dilakukan melalui:
 - a. Koordinasi dengan kementerian teknis
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat

3.2.3 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal maupun belanja tidak terduga. Belanja operasi digunakan untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah. Belanja Modal digunakan untuk membiayai program/kegiatan prioritas baik untuk urusan wajib/pilihan maupun urusan pendukung yang bersifat fisik yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah, sedangkan Belanja Tidak Terduga digunakan untuk membiayai kejadian yang bersifat luar biasa dan bencana.

Belanja Daerah Tahun 2024 diarahkan pada pengelolaan belanja daerah (belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga) yang dilaksanakan dengan pola yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Belanja daerah Tahun 2024 juga memperhatikan isu strategis dan prioritas pembangunan Tahun 2024 yaitu: 1) Peningkatan Kondusifitas Kota, 2) Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa, dan 3) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib yang mengikat, seperti gaji, tunjangan, honorarium, belanja jasa kantor listrik, air, telpon, internet, belanja premi asuransi, belanja sewa gedung, perlengkapan dan peralatan.
2. Gaji Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). Di Tahun 2023 belanja gaji ASN disusun dengan mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, *access* dan kenaikan tunjangan-tunjangan serta mempertimbangan gaji dan tunjangan tenaga P3K.

3. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) di tahun 2023 berpedoman pada ketetapan tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi. TPP merupakan bentuk penghargaan terhadap kinerja PNS. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS;
4. Pemenuhan belanja prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 yaitu sebanyak 3 (tiga) prioritas pembangunan;
5. Pemenuhan pencapaian program prioritas dan Indikator Kinerja Utama;
6. Pemenuhan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan Kab/Kota yaitu sebanyak 29 jenis pelayanan dasar;
7. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDG`s);
8. Pengalokasian untuk anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBD
9. Pengalokasian anggaran kesehatan minimal 10 persen dari APBD termasuk untuk penanganan pemulihan akibat pandemi *Covid-19*.
10. Pengalokasian belanja untuk infrastruktur pelayanan publik minimal 40 persen dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah. Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah;
11. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah yang diantaranya disebabkan oleh bencana alam atau bencana lainnya;

12. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan peraturan yang berlaku. Belanja hibah berupa tanah, barang atau lainnya dilakukan sesuai kebutuhan dan melihat sisi kemanfaatannya baik kepada individu ataupun lembaga tertentu. Penganggaran hibah dan bansos di Tahun 2024 dilaksanakan dengan mempertimbangkan juga ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
13. Belanja bantuan keuangan dalam rangka penyelenggaraan pemilu dan pilkada Tahun 2024, dimana dilakukan secara bertahap sesuai kebutuhan kepada KPU, Bawaslu dan lembaga lain sesuai kebutuhan;
14. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP.
15. Belanja Daerah telah memperhatikan dan mengakomodir usulan masyarakat melalui musrenbang serta hasil reses/pokok-pokok pikiran DPRD.

Sejak Tahun 2018 pemerintah telah mengubah prinsip dari *money follow function* menjadi *money follow programme* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2024.

Berdasarkan uraian diatas, maka proyeksi belanja daerah Tahun 2024 diproyeksikan sebagai berikut.

Tabel 3.4
Proyeksi Belanja Daerah pada RKPD Tahun 2023

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET APBD 2023 (Parsial)	PROYEKSI RPD 2024	PROYEKSI RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7
2	BELANJA DAERAH	1,201,047,392,056	1,251,744,741,073	1,204,567,228,937	1,019,222,383,163	1,039,260,049,162
2.1	Belanja Operasi	1,033,281,106,123	1,140,361,727,991	1,096,915,847,820	984,359,935,047	994,397,601,046
2.1.1	Belanja Pegawai	526,180,179,614	551,485,949,939	559,915,961,055	559,915,961,055	559,854,151,055
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa*	463,515,031,123	527,282,715,430	482,464,124,016	355,271,079,657	355,370,555,656
2.1.3	Belanja Bunga	-	-	-	-	-
2.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-
2.1.5	Belanja Hibah	35,558,645,386	53,977,089,783	49,611,199,209	64,494,558,972	74,494,558,972
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	8,027,250,000	7,608,300,000	4,924,563,540	4,678,335,363	4,678,335,363
2.2	Belanja Modal*	135,678,606,527	103,778,997,584	99,228,030,825	24,862,448,115	34,862,448,115
2.3	Belanja Tidak Terduga	32,087,679,406	7,604,015,498	8,423,350,292	10,000,000,000	10,000,000,000
2.4	Belanja transfer				-	-
2.4.1	belanja bagi hasil				-	-
2.4.2	belanja bantuan keuangan				-	-
	JUMLAH BELANJA	1,201,047,392,056	1,251,744,741,073	1,204,567,228,937	1,019,222,383,162	1,039,260,049,162
	Surplus / (Defisit) Sebelum Pembiayaan	42,717,032,027	(39,377,070,409)	-23,522,777,959	-21,450,835,923	-21,450,835,923

Sumber: Hasil analisis Bappeda

Berdasarkan data diatas, terlihat bahwa estimasi belanja daerah pada RKPD Tahun 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan APBD Tahun 2023 yaitu sebesar 13,72 % dan bertambah sebesar 1,97 % atau sebesar Rp 20,037,665,999,- dari target yang telah tercantum dalam dokumen RPD. Belanja daerah di estimasikan sebesar sebesar Rp 1,039,260,049,162,- sedangkan Belanja APBD Tahun 2023 adalah sebesar 1,204,567,228,937,-. Kenaikan belanja RKPD dibanding RPD terjadi karena adanya tambahan pendapatan bersumber DAU yang selanjutnya dialokasikan untuk belanja pendukung Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024 baik untuk KPU, Bawaslu, biaya pengamanan dan lain-lainnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan regional, berpedoman juga pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Analisis Standar Belanja (ASB) adalah alat untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau belanja maksimal setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) atau lebih unit kerja perangkat daerah untuk meningkatkan tingkat pelayanan tertentu dalam 1 (satu) tahun anggaran yang berupa personil, barang modal, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua objek sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.

ASB merupakan salah satu elemen utama untuk penganggaran yang berbasis kinerja dalam rangka pencapaian pengelolaan keuangan yang ekonomis, efisien, dan efektif. ASB dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana dalam peraturan tersebut di atas disebutkan bahwa Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu sub kegiatan. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kota Sukabumi

sudah mengembangkan e-ASB yang berbasis teknologi informasi dalam proses penyusunan perencanaan tahun 2024 yang seluruhnya terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) baik dari proses perencanaan maupun penganggaran.

3.2.4 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjelaskan bahwa pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada Tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terjadi defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan-permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Maka dalam hal APBD diperkirakan mengalami defisit, maka pembiayaan untuk menutup defisit tersebut ditetapkan berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal perusahaan daerah yaitu ke Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kota Sukabumi dan PDAM Tirta Bumi Wibawa serta Bank Jabar Banten yang besaran penyertaan modal tersebut berpedoman pada peraturan daerah yang terkait.

Perencanaan penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya. Hal ini untuk menghindari



kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah, maka proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6
Proyeksi Pembiayaan Daerah dalam RKPD Tahun 2023

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET APBD 2023 (Parsial)	PROYEKSI RPD 2024	PROYEKSI RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7
3	PEMBIAYAAN	77,787,076,304	114,919,083,071	23,522,777,959	21,450,835,923	21,450,835,923
3.1	Penerimaan Pembiayaan	79,787,076,304	121,790,911,331	27,022,777,959	23,450,835,923	23,450,835,923
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	79,787,076,304	120,840,911,331	27,022,777,959	23,450,835,923	23,450,835,923
3.1.2	pencairan Dana Cadangan;	-	-	-		
3.1.3	hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-		
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah;	-	-	-		
3.1.5	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau	-	950,000,000	-		
3.1.6	Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.	-	-	-	-	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	2,000,000,000	6,871,828,260	3,500,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.1	pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;	-	-	-		
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2,000,000,000	6,871,828,260	3,500,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
3.2.3	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-		
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-		

KODE	KAPASITAS RIIL / BELANJA	REALISASI 2021	REALISASI 2022	TARGET APBD 2023 (Parsial)	PROYEKSI RPD 2024	PROYEKSI RKPD 2024
1	2	3	4	5	6	7
3.2.5	Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	-	-	-		
	Pembiayaan Neto	77,787,076,304	114,919,083,071	23,522,777,959	21,450,835,923	21,450,835,923
	Surplus / (Defisit) Setelah Pembiayaan	120,504,108,331	75,542,012,662	0	0	0

Sumber: Hasil analisis Bappeda

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan berapa hal sebagai berikut:

1. Pembiayaan untuk proyeksi anggaran tahun 2024 terhadap anggaran tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 9 persen sehingga persentase proyeksi anggaran tahun 2024 berada pada angka 91 persen.
2. Penerimaan Pembiayaan untuk proyeksi anggaran tahun 2024 terhadap anggaran tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 14 persen sehingga persentase proyeksi anggaran tahun 2024 berada pada angka 86 persen.
3. Pengeluaran Pembiayaan untuk proyeksi anggaran tahun 2024 terhadap anggaran tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 43 persen sehingga persentase proyeksi anggaran tahun 2024 berada pada angka 57 persen.

3.3 Alternatif Pembiayaan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung implementasi pembangunan daerah terutama pada program prioritas dan unggulan, maka diperlukan pembiayaan yang cukup besar. Karena besarnya kebutuhan anggaran tersebut dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan, maka Kota Sukabumi dituntut untuk senantiasa terus mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam rangka pembangunan daerah.

Besarnya kebutuhan dana untuk pembangunan di Kota Sukabumi dan terbatasnya sumber-sumber penerimaan konvensional mendorong Pemerintah Daerah untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kota Sukabumi. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain: 1) APBN; 2) APBD Provinsi; 3) Dana Masyarakat/Umat; 4) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)); 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU); dan 6) Hibah. Adapun secara penjelasan dari masing-masing sumber pendanaan tersebut adalah sebagai berikut:

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan Daerah selain bersumber dari APBD Daerah, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan Daerah yang bersumber dari APBN berupa dana perimbangan, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah yang dikelola oleh Perangkat Daerah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kapasitas fiskal Kota Sukabumi masih pada kategori lemah. Hal tersebut didasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa persentase PAD terhadap pendapatan daerah Kota Sukabumi tahun 2022 masih berkisar 30,58 persen. Sekitar 68,20 persen pendapatan daerah masih bergantung pada transfer Pemerintah Pusat. Karena itu, untuk membiayai program prioritas ataupun program yang selaras dengan prioritas nasional, dukungan pembiayaan dari APBN merupakan salah satu solusi yang realistis untuk beberapa tahun ke depan.

2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Kota Sukabumi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui kolaborasi pembiayaan dengan APBD Provinsi Jawa Barat. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam penuntasan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

3) Dana Masyarakat/Umat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Kota

Sukabumi adalah melalui dana masyarakat/umat, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana umat cukup besar. tetapi potensi ini belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana umat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dana yang dikumpulkan pemerintah dan diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan dari sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari berbagai jenis dana umat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

- 4) Corporate Social Responsibility (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL))

Pendanaan pembangunan non APBD Daerah yang lainnya selain dari APBN adalah program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL). Sampai dengan saat ini sudah terdaftar sebanyak 2 (dua) mitra PKBL dan TJSL Daerah. Mitra PKBL dan TJSL diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, namun turut berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan sekitar dalam jangka panjang. Dalam artian bahwa tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak hanya untuk mendapatkan nilai tambah dari masyarakat tetapi tanggung jawab ini haruslah berkesinambungan sampai waktu yang cukup panjang. Program pembangunan yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL adalah program yang berkesinambungan atau *sustainable* serta berdampak positif terhadap masyarakat. Penekanan kepada 3 (tiga) hal tersebut bahwa bantuan yang diberikan dirancang untuk memiliki dampak yang berkelanjutan karena kerjasama program pembangunan PKBL dan TJSL berbeda

dengan donasi bencana alam yang bersifat tidak terduga dan tidak dapat di prediksi. Program yang dikerjasamakan dengan mitra PKBL dan TJSL harus berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial.

- 5) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP).

Berdasarkan regulasi yang berlaku, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerja sama dengan badan usaha. Saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang telah menyadari pentingnya kontribusi pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Pembiayaan daerah untuk infrastruktur masih banyak mengalami kendala karena adanya hambatan keterbatasan anggaran. APBD masih harus difokuskan pada pembiayaan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, sosial, penanganan bencana dan lain-lain. Pada konsisi ini maka skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KBPU) dapat menjadi salah satu solusi, di mana pemerintah, BUMD serta swasta bahu membahu untuk membiayai akselerasi pembangunan terus dengan prinsip gotong royong.

- 6) Hibah.

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata



Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

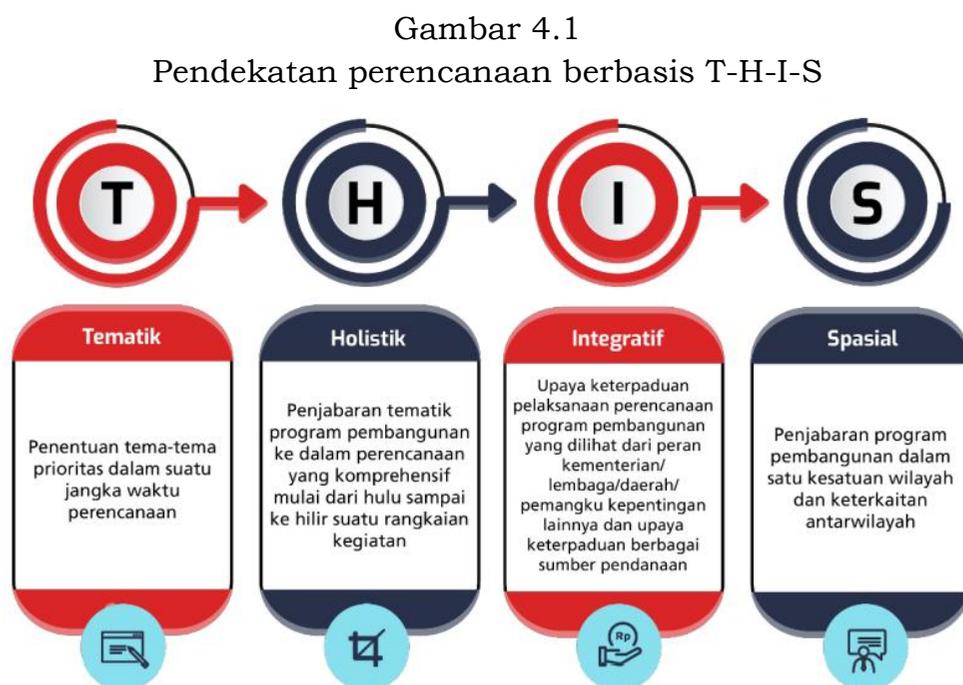
BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2024

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan adalah suatu kondisi yang akan atau diharapkan tercapai pada akhir periode sebuah dokumen perencanaan. Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Daerah ditempuh dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD, kebijakan RPJMN dan RPD Provinsi serta isu-isu strategis pembangunan Daerah. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil atau *outcome* program Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan tahap pembangunan tahun pertama dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026. Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi menggunakan pendekatan substansi perencanaan berbasis Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (T-H-I-S) yang digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2023

Pendekatan T-H-I-S tersebut secara implementatif dilakukan melalui:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian program prioritas pembangunan daerah dengan 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026.
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority program*) serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
3. Menjaga dan memastikan semua tahapan perencanaan dilalui dengan baik dan benar serta tepat waktu dengan mengimplementasikan SIPD serta sistem digital lainnya yang terintegrasi.
4. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan, baik dari pusat, provinsi, Kota Sukabumi, serta dari unsur pemerintah maupun swasta dan masyarakat.
5. Melibatkan peran aktif seluruh *stakeholder* baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah seperti masyarakat, akademisi, dunia usaha, media, komunitas dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

Selanjutnya rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 tersebut akan tetap mengacu dan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

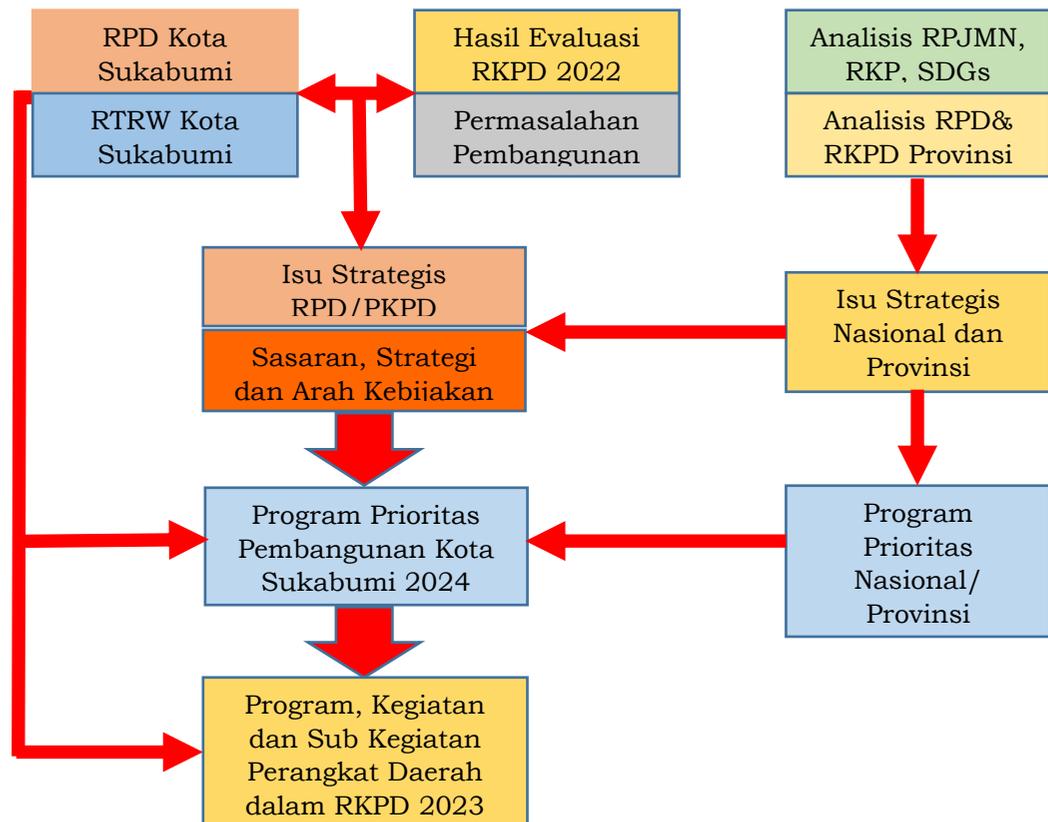
1. RTRW Kota Sukabumi;
2. Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan pada RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026;
3. Hasil evaluasi kinerja RKPD Tahun 2022 dan RKPD Tahun 2023 Triwulan 1;
4. Prioritas Provinsi dan RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024;
5. Prioritas Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024; dan

6. Kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan pembangunan Tahun 2024.

Dalam rangka mengukur keberhasilan pembangunan daerah Kota Sukabumi, maka ditetapkan sejumlah indikator makro dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah beserta targetnya yang nantinya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi tersebut akan menjadi gambaran riil mengenai kondisi dan perkembangan keberhasilan pembangunan daerah yang selanjutnya dapat dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan pemerintah daerah Kota Sukabumi. Selain itu capaian lainnya seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), dokumen perencanaan strategis lainnya serta kondisi sosial dan ekonomi terutama akibat pandemi *Covid-19* tentunya akan tetap menjadi salah satu acuan bagi pengambilan keputusan pimpinan daerah.

Pada proses penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 dilakukan analisis dan kajian terhadap berbagai dokumen perencanaan baik tingkat Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Dokumen RPD termasuk isu strategis, sasaran, strategi dan arah kebijakan merupakan salah satu acuan utama, selain itu hasil evaluasi RKPD Tahun 2022 dan triwulan 1 Tahun 2023 beserta permasalahan pembangunan yang dilengkapi isu strategis dan prioritas pembangunan nasional serta provinsi menjadi acuan yang tidak bisa dipisahkan sehingga pada akhirnya ditentukan prioritas program pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk menjadi fokus dalam pelaksanaan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024. Penjelasan di atas sebagaimana gambar di bawah ini :

Gambar 4.2
Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024



Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2023

4.1.1 Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Tahun 2024

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Terdapat 4 (empat) pilar untuk mencapai tujuan utama dari rencana pembangunan nasional periode terakhir, diantaranya sebagai berikut:

Pilar Pertama Kelembagaan politik dan hukum yang mantap; *Pilar Kedua* Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; *Pilar*

Ketiga Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan *Pilar Keempat* Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Keempat pilar tersebut diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat Program Prioritas, Kegiatan Prioritas dan Proyek Prioritas. Visi pembangunan RPJMN ke IV Tahun 2020-2024 adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Pembangunan nasional dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sangat ditentukan oleh capaian pembangunan seluruh provinsi di Indonesia. Untuk itu perlu dibangun sistem yang terintegrasi dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di tingkat provinsi, yang selanjutnya didukung dan dipedomani oleh kabupaten/kota.

Dalam mendukung Visi dan Misi tingkat Nasional, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional sebagai acuan kebijakan bagi penyusunan perencanaan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Guna memberikan arahan bagi pembangunan nasional tahun 2024, Pemerintah Pusat telah menetapkan Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yaitu **“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**, dengan 8 (delapan) Arah Kebijakan RKP yaitu:

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan

- 3) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan
- 4) Penguatan daya saing usaha
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas
- 7) Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara
- 8) Pelaksanaan pemilu 2024

Secara rinci 8 (delapan) arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Arah kebijakan Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Tingkat Kemiskinan: 6,5-7,5%;
 - b. Tingkat kemiskinan ekstrem: 0-1%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Perlindungan Sosial.

2. Arah kebijakan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita: 14%;
 - b. Insidensi tuberkulosis: 190 per 100.000 penduduk;
 - c. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria: 405 kab/kota;
 - d. Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta: 514 kab/kota;
 - e. Nilai rata-rata hasil PISA: (a) Membaca: 396 b) Matematika: 388 (c) Sains 402.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Reformasi Sistem Kesehatan Nasional;
- MP Refomasi Pendidikan Keterampilan (Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0);
- MP Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting.

3. Arah Kebijakan Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan, yang ditandai dengan pencapaian:
 - a. Pertumbuhan PDB industri pengolahan: 5,4%- 5,8% per target RPJMN 8,1%;

- b. Kontribusi PDB industri pengolahan: 19,5%- 20,6% per Target RPJMN 21,0%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Kawasan Industri Prioritas dan Smelter;
- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;
- MP 10 Destinasi Pariwisata Prioritas;
- MP *Food Estate* (Kawasan Sentra Produksi Pangan);
- Transformasi Digital.

4. Arah kebijakan Penguatan Daya Saing Usaha, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Pertumbuhan Investasi (PMTB): 6,2%-7%;
- b. Nilai devisa pariwisata: USD 7,38–13,0 miliar.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pengelolaan Terpadu UMKM;

5. Arah kebijakan Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase Penurunan emisi GRK kumulatif: 27,27%;
- b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer Nasional: 17%

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3;
- MP Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi.

6. Arah kebijakan Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/ kabupaten-kota: 95%/75%/65%;
- b. Rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman: 92,76% akses layak dan 15% akses aman;
- c. Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan: 25,53%;
- d. Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman: 86% akses layak termasuk 12 % akses aman;
- e. Jumlah Bandara Baru yang Dibangun (kumulatif): 11 lokasi;

f. Rata-rata pemenuhan kebutuhan (konsumsi) listrik: 1.300 kwh/kapita.

7. Arah kebijakan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditandai dengan pencapaian:

Luas area pembangunan Ibu Kota Nusantara: 3.399 Ha dalam 6.671 Ha KIPP, meliputi:

- a. Persentase Pembangunan di Kawasan Istana Presiden: 100%;
- b. Persentase Pembangunan Kantor Kementerian Koordinator: 100%;
- c. Persentase Pembangunan Hunian ASN dan HANKAM: 100%.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- MP Ibu Kota Nusantara;
- MP Wilayah Adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay.

8. Arah kebijakan Pelaksanaan Pemilu 2024, yang ditandai dengan pencapaian:

- a. Jumlah Satker KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota yang menyelenggarakan Pemilu/pemilihan sesuai dengan jadwal: 553 satker.

Dukungan terhadap *Major Project* (MP), antara lain:

- Didukung oleh proyek-proyek prioritas.

Selanjutnya Arah Kebijakan Pembangunan dilaksanakan untuk mencapai Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2024, yang meliputi:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,8% - 5,7%;
2. Tingkat Kemiskinan sebesar 6,5% - 7,5%;
3. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 5,0 – 5,7%;
4. Rasio Gini (nilai) sebesar 0,374-0,377;
5. Indeks Pembangunan Manusia/IPM (nilai) sebesar 73,99 – 74,02;
6. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca/GRK sebesar 27,27%.

Serta indikator lainnya yaitu:

1. Nilai Tukar Nelayan/NTN (nilai) sebesar 107 – 110;
2. Nilai Tukar Petani/NTP (nilai) sebesar 105 – 108.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024.

Pembangunan Provinsi Jawa Barat sebagaimana tertuang dalam Dokumen RPD 2024-2026 memiliki tema “Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat” untuk mewujudkan tema tersebut maka dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Barat. Adapun tujuan dan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Akses Pendidikan masyarakat;
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
3. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat;
4. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda;
5. Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk.

Tujuan 2 Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan;
2. Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah;
3. Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum;
4. Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Tujuan 3 Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur;
2. Meningkatnya kualitas infrastruktur;
3. Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman;
4. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup;

5. Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan menurunnya risiko bencana.

6. Meningkatnya Pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.

Tujuan 4 Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah , dengan sasaran:

1. Meningkatnya Kebebasan, Kesetaraan, dan Kapasitas Lembaga Demokrasi;
2. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
3. Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.

Penjabaran dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 tentu harus disertai dengan target indikator yang telah ditentukan sehingga menjadi tolak ukur dari keberhasilan pencapaian pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	TARGET		
						2023	2024	
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas dan Berdaya Saing		Indeks Pembangunan Manusia		Poin	73,34	73,56	
			1.1	Meningkatnya Akses Pendidikan masyarakat	a.	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,91
		b.			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,69	12,75
		1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	a.	Angka Harapan Hidup	Tahun	73,71	73,90
				b.	Prevelensi Stunting	Perse	19,20	15,52
		1.3	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	a.	Pengeluaran per kapita	Rp.000	11.39	11.504
		1.4	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, serta Pembangunan Pemuda	a.	Indeks Pembangunan Gender	Poin	90,02	90,07
				b.	Indeks Pembangunan Pemuda	Poin	48,23	48,86

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	TARGET	
							2023	2024
		1.5	Terkendalinya Pertumbuhan dan Distribusi Penduduk	a.	Laju Pertumbuhan Penduduk	Perse n	1,43	1,44
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif dan Berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi		Perse n	5,28	5,42
				Gini Ratio (poin)		Poin	0,410	0,408
				Persentase Penduduk Miskin		Perse n	7,54	7,39
		2.1	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perindustrian dan Perdagangan	a.	Laju Pertumbuhan Sektor Industri	Perse n	6,00	5,76
				b.	Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	Perse n	4,45	4,53
		2.2	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Daerah	a.	Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Perse n	4,45	4,50
				b.	Nilai Tuka Petani (NTP)	Poin	100,71	101,67
				c.	Skor Pola Pangan Harapan	Poin	92,8	93,3
		2.3	Meningkatnya pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi makan dan minum	a.	Laju Pertumbuhan Pariwisata	Perse n	26,35	26,87
		2.4	Meningkatnya Nilai Investasi dan Kualitas Usaha yang disertai dengan meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	a.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB	Triliu n Rupi ah	521,78	532,22
b.	Proporsi Kredit UMKM terhadap Total Kredit			Perse n	22,00	23,34		
c.	Tingkat Penganggura n Terbuka			Perse n	8,13	8,01		
3	Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Wilayah yang Didukung Infrastruktur Berkualit			Indeks Kualitas Infrastruktur (poin)		Poin	71,63	72,82
				Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin)		Poin	61,60	66,13
		3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	a.	Tingkat Konektivitas	Perse n	47,00	57,00
				b.	Indeks Penggunaan Air	Poin	11,902	11,896

NO	TUJUAN	SASARAN		INDIKATOR TUJUAN & SASARAN		SATUAN	TARGET			
							2023	2024		
	as dan Lingkungan yang Berkelanjutan		kantong kemiskinan	c.	Konsumsi listrik per kapita	Kwh/kapita	1.15	1.466		
				d.	Persentase rumah tangga hunian layak	Perse	53,9	54,47		
				e.	Akses penanganan sampah di perkotaan	Perse	79,00	76,00		
		3.2	Meningkatnya kualitas infrastruktur	a.	Indeks Kualitas Air (IKA)	Poin	43,27	48,31		
				b.	Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	Poin	75,5	90,07		
				c.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Poin	80,11	82,04		
				d.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Poin	38,90	42,64		
		4	Terciptanya demokrasi dan birokrasi yang berkualitas dan didukung oleh inovasi daerah			Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Barat		Poin	81,32	82,14
						Indeks Reformasi Birokrasi		Poin	A	A
				4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi	a.	Nilai aspek Kebebasan	Poin	91,31	92,11
b.	Nilai aspek Kesetaraan					Poin	74,59	75,39		
c.	Nilai aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi					Poin	79,53	80,33		
4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah			a.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	A	A		
4.3	Peningkatan penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	a.	Indeks Inovasi Daerah	Poin	69,15 (Sangat Inovatif)	69,15 (Sangat Inovatif)				

Sumber: RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 sesuai tabel di atas akan dilaksanakan secara berkesinambungan dari tahun ke tahun selama periode RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024- 2026. Sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran utama pembangunan nasional tahun 2024 yang ditetapkan pemerintah

sebanyak 29 (dua puluh sembilan) sasaran. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dan kolaborasi dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat maupun dari dukungan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024.

Perumusan tujuan dan sasaran beserta indikatornya adalah tahapan strategis yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan kondisi akhir yang akan dicapai pada akhir suatu periode pembangunan. Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang menggambarkan kondisi maupun hasil pembangunan yang lebih spesifik dan sangat berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan. Pencapaian tujuan dan sasaran dievaluasi dengan menggunakan seperangkat indikator kuantitatif yang relevan. Indikator-indikator tersebut ditetapkan dengan maksud untuk mengetahui kinerja utama dalam kurun waktu 2024-2026.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antarperiode, maka Pemerintah Kota Sukabumi dalam merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan mempertimbangkan:

1. Visi dan misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025;
2. Analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025; dan
3. Isu strategis aktual Kota Sukabumi.

Visi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah Terwujudnya Kota Sukabumi sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat

Berlandaskan Iman dan Taqwa. Adapun misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan SDM yang beriman, bertaqwa, dan berbudaya;
2. Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
4. Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi;
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah; dan
6. Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah.

Berdasarkan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan periode terakhir RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, capaian pembangunan pada tahap ini ditandai dengan:

1. SDM yang semakin berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia;
2. Meningkatnya kualitas pendidikan;
3. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat;
4. Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing;
5. Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan; dan
6. Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana.

Berdasarkan irisan visi misi RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, dan isu strategis aktual, maka tujuan dan sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini.

Tabel 4.2
Sandingan Misi, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD, Isu Strategis Aktual serta Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
1	Mewujudkan SDM yang beriman,	SDM yang semakin berkarakter	Kualitas sumber daya manusia (SDM)	Terciptanya kualitas SDM yang	● Meningkatnya derajat pendidikan

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan RPJPD	Isu Strategis Aktual	Tujuan RPD	Sasaran RPD
	bertaqwa, dan berbudaya	cerdas, tangguh, kompetitif, dan berakhlak mulia		berkarakter dan kompetitif	masyarakat <ul style="list-style-type: none">● Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat● Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
2	Mewujudkan pelayanan pendidikan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas pendidikan			
3	Mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat			
4	Mewujudkan pengembangan perdagangan dan sektor lapangan usaha lainnya yang berdaya saing tinggi	Meningkatnya IKM berkelanjutan dan perdagangan yang berdaya saing	<ul style="list-style-type: none">● Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa● Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
5	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan aparatur pemerintah daerah yang profesional dan amanah	Meningkatnya kapasitas ASN dalam menjalankan roda pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">● Inovasi di pemerintahan● Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	<ul style="list-style-type: none">● Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis● Meningkatnya inovasi daerah
6	Mewujudkan Kota Sukabumi yang nyaman dan indah	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang terjangkau dan didukung sarana prasarana	Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan	Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">● Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas● Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Adapun secara rinci tujuan, sasaran, outcome, indikator kinerja abeserta targetnya sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Target Indikator Tujuan dan Sasaran RPD Kota Sukabumi
Tahun 2024-2026

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Tujuan:						
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,35	5,31	5,33	5,37
Sasaran:						
Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	3,80	4,00	4,20	4,40
Outcome:						
Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	Persen	69,3	80	82	85
Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	Persen	4,88	5,88	6,38	6,88
	Persentase ketersediaan pangan pokok	Persen	100	100	100	100
Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Persentase usaha mikro yang naik kelas	Persen	0,01	0,01	0,02	0,03

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan	Persen	20	40	60	80
Meningkatnya promosi produk lokal	Persentase promosi produk lokal yang dilaksanakan	Persen	100	100	100	100
Sasaran:						
Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	29,43	30,93	32,43	33,95
Outcome:						
Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	14	16	19	22
Meningkatnya daya tarik wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	Persen	21,78	21,80	21,90	22
	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Persen	4	4	6	7
Tujuan:						
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,40	75,55	75,75	75,80
Sasaran:						
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,55	71,58	71,68	71,77

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Outcome:						
Terpenuhinya SPM Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	Persen	88,93	100	100	100
Meningkatnya literasi masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	65,34	70,5	71	72
Sasaran:						
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,31	0,33	0,35	0,37
Outcome						
Terpenuhinya SPM Kesehatan	Indeks Pencapaian SPM Kesehatan	Persen	88,93	100	100	100
Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan	Prevalensi stunting pada balita	Persen	6,28	6	5,75	5,5
	Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	Persen	100	100	100	100
	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Persen	13,64	15,88	18,16	20,44
Meningkatnya kepesertaan JKN	Persentase kepesertaan JKN	Persen	98,43	98,5	98,6	98,7
Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	Persen	64,24	65	65,5	66
Sasaran:						
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	30,899	34,001	35,769	37,736

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Outcome:						
Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	80	81	82	83
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	80	85	87,5	90
Tujuan:						
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Indeks Kota Layak Huni	Poin	64,50	65,00	65,25	65,50
Sasaran:						
Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	85,20	86,00	86,20	86,50
Outcome:						
Meningkatnya konektivitas wilayah	Tingkat kemantapan jalan kota	Persen	84,54%	85	86	87
	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	82,85	83,54	83,87	84,2
Meningkatnya pengelolaan sampah dan sanitasi	Cakupan pengelolaan sampah	Persen	99,55	100	100	100
	Persentase jumlah RT yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	Persen	57,87%	58,30	58,73	59,16

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Persentas berkurangnya jumlah RTLH	Persen	100,00%	69.44	38.88	0.69
	Luasan pengurangan kawasan kumuh	Ha	19,79	15	20	15
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	Nyaman	Nyaman	Nyaman
	Indeks RTH	m ² /orang	25	25,5	26	26,5
Sasaran:						
Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Persen	75,31	75,40	75,55	75,60
Outcome:						
Terpenuhinya SPM ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Persentase Konflik Antar Inter Umat Beragama yang terselesaikan	Poin	100	100	100	100
Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir dan longsor yang terlindungi infrastruktur pengendali banjir WS kewenangan kota	Persen	57,32%	62,18	67,03	71, 89
Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Persentase pemenuhan SPM sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Persen	53	55	56	57

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana	Persentase pemenuhan SPM kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persen	100	100	100	100
Tujuan:						
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Indek Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00
Sasaran:						
Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	71,05	73,00	74,00	75,00
Outcome:						
Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persen	100	100	100	100
	Persentase pencapaian IKU	Persen	100	100	100	100
	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Persentase pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan	Persen	96,67	97,33	97,66	98
Meningkatnya kapasitas ASN	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persen	7,68	7,9	8,0	8,5

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persen	45	76	77	78
	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persen	45	80	81	82
Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	100	100
	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk hukum daerah	Persen	100	100	100	100
	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Cakupan pelayanan publik di kecamatan	Persen	100	100	100	100
Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Persentase pengelolaan aplikasi informatika yang digunakan dalam pemerintahan	Persen	90	93	95	97

TUJUAN/SASARAN/OUTCOME	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2022	TARGET TAHUN		
				2024	2025	2026
Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Persentase pelayanan administrasi kependudukan	Persen	100	100	100	100
Sasaran:						
Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif	Inovatif
Outcome:						
Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Persentase instansi/lembaga yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	100

Sumber: Hasil Analisa Bappeda Kota Sukabumi, Tahun 2023

4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2024

4.2.1 Telaahan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024

Sasaran dan prioritas penyusunan RKPD Tahun 2024 agar diselaraskan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan undang-undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Transformasi Ekonomi, Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan pelaksanaan 5 (lima) arahan Presiden tersebut, didefinisikan ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang perlu diperkuat, sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya

saing melalui:

- a) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan
- b) Akselerasi peningkatan nilai tambah *agrofisery industry*, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan;
 - 2) peningkatan pasokan bahan bakar nabati;
 - 3) peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi;
 - 4) peningkatan pemenuhan energi domestik; dan
 - 5) pengembangan industri pendukung EBT.
- b) Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif);
 - 2) pengelolaan hutan berkelanjutan;
 - 3) penyediaan air untuk pertanian;
 - 4) penyediaan air baku untuk kawasan prioritas;
 - 5) pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau; dan
 - 6) pengembangan waduk multiguna.
- c) Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 2) peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan;
 - 3) peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan;

- 4) peningkatan produktivitas, kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar;
 - 5) peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian; dan
 - 6) peningkatan tata kelola sistem pangan nasional.
- d) Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut;
 - 2) peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan;
 - 3) peningkatan produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan;
 - 4) peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya; dan
 - 5) peningkatan Sumber Daya Manusia dan riset kemaritiman dan kelautan serta *database* kelautan dan perikanan.
- e) Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan koperasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar;
 - 2) Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha;
 - 3) peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi;
 - 4) peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha; dan
 - 5) peningkatan nilai tambah usaha sosial.
- f) Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan nonagro yang terintegrasi hulu-hilir;
 - 2) peningkatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa;
 - 3) peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan

- pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok;
- 4) peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital;
 - 5) perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan; dan
 - 6) pengembangan industri halal.
- g) Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa;
 - 2) peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor;
 - 3) pengelolaan impor;
 - 4) peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif;
 - 5) peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global;
 - 6) peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan destinasi branding, dan produk kreatif; dan
 - 7) peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi.
- h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) peningkatan pendalaman sektor keuangan;
 - 2) optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0;
 - 3) peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga;
 - 4) peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata;
 - 5) reformasi fiskal; dan
 - 6) peningkatan ketersediaan dan kualitas data dan informasi perkembangan ekonomi, terutama pangan, kemaritiman, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital.

2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.

Pengembangan wilayah ditujukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan harmonisasi antara rencana pembangunan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan kesinambungan dan keberlanjutan ini dapat dilakukan melalui:

- a) pengembangan sektor/ komoditas/kegiatan unggulan daerah;
 - b) distribusi pusat-pusat pertumbuhan (PKW) ke wilayah belum berkembang;
 - c) peningkatan daya saing wilayah yang inklusif;
 - d) memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia dan Ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis kewilayahan dalam mendukung ekonomi unggulan daerah; dan
 - e) meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia melalui pemenuhan pelayanan dasar secara merata.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Manusia merupakan modal utama pembangunan nasional untuk menuju pembangunan yang inklusif dan merata di seluruh wilayah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing Sumber Daya Manusia yaitu Sumber Daya Manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, melalui:

- a) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
- b) penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
- c) peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
- d) peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
- e) peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
- f) pengentasan kemiskinan; dan
- g) peningkatan produktivitas dan daya saing.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) percepatan cakupan administrasi kependudukan;
 - 2) integrasi sistem administrasi kependudukan;
 - 3) pendampingan dan layanan terpadu; dan
 - 4) pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk.
- b) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) sistem jaminan sosial nasional;
 - 2) bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran;
 - 3) perlindungan sosial adaptif; dan
 - 4) kesejahteraan sosial.
- c) Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi;
 - 2) percepatan perbaikan gizi masyarakat;
 - 3) peningkatan pengendalian penyakit;
 - 4) penguatan gerakan masyarakat hidup sehat (germas); dan
 - 5) penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan.
- d) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran;
 - 2) pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun;
 - 3) peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan;
 - 4) penjaminan mutu pendidikan; dan
 - 5) peningkatan tata kelola pendidikan.
- e) Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pemenuhan hak dan perlindungan anak;
 - 2) peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan; dan
 - 3) kualitas pemuda.

- f) Pengentasan kemiskinan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Akselerasi penguatan ekonomi keluarga;
 - 2) Keperantaraan usaha dan dampak sosial;
 - 3) Reforma Agraria; dan
 - 4) Perhutanan sosial.
 - g) Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri;
 - 2) Penguatan pendidikan tinggi berkualitas;
 - 3) Peningkatan kapabilitas IPTEK dan penciptaan inovasi;
 - 4) Prestasi olahraga.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.

Revolusi mental sebagai gerakan kebudayaan memiliki kedudukan penting dan berperan sentral dalam pembangunan untuk mengubah cara pandang, sikap, perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan. Revolusi mental dilaksanakan secara terpadu yang bertumpu pada:

- a) revolusi mental dalam sistem pendidikan;
- b) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan; dan
- c) revolusi mental dalam sistem sosial.

Selain itu revolusi mental juga diperkuat melalui upaya pemajuan dan pelestarian kebudayaan, memperkuat moderasi beragama; dan meningkatkan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti;
 - 2) revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif;

- 3) revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter;
 - 4) penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental;
 - 5) pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila; dan
 - 6) Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme.
- b) Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal;
 - 2) pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat;
 - 3) perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif;
 - 4) pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh indonesia dalam perkembangan peradaban dunia;
 - 5) pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan.
- c) Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama;
 - 2) penguatan harmoni dan kerukunan umat beragama;
 - 3) penyelarasan relasi agama dan budaya;
 - 4) peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama; dan
 - 5) pengembangan ekonomi dan sumber daya keagamaan.
- d) Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter, dengan kegiatan prioritas, yaitu:

- 1) peningkatan budaya literasi;
 - 2) pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra;
 - 3) pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta; dan
 - 4) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar

Perkuatan infrastruktur ditujukan untuk mendukung aktivitas perekonomian serta mendorong pemerataan pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia akan memastikan pembangunan infrastruktur akan didasarkan kebutuhan dan keunggulan wilayah melalui:

- a) menjadikan keunggulan wilayah sebagai acuan untuk mengetahui kebutuhan infrastruktur wilayah;
- b) peningkatan pengaturan, pembinaan dan pengawasan dalam pembangunan;
- c) pengembangan infrastruktur perkotaan berbasis Teknologi Informasi Komputer (TIK);
- d) rehabilitasi sarana dan prasarana yang sudah tidak efisien; dan
- e) mempermudah perijinan pembangunan infrastruktur.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Infrastruktur Pelayanan Dasar, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau;
 - 2) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman;
 - 3) pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan;
 - 4) keselamatan dan keamanan transportasi;
 - 5) ketahanan kebencanaan infrastruktur; dan
 - 6) waduk *multipurpose* dan modernisasi irigasi.
- b) Infrastruktur Ekonomi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) konektivitas jalan;
 - 2) konektivitas kereta api;

- 3) konektivitas laut;
 - 4) konektivitas udara; dan
 - 5) konektivitas darat.
- c) Infrastruktur Perkotaan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) transportasi perkotaan;
 - 2) infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan;
 - 3) penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan; dan
 - 4) penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan.
- d) Energi Dan Ketenagalistrikan, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) keberlanjutan penyediaan energi dan ketenagalistrikan;
 - 2) akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan; dan
 - 3) kecukupan penyediaan energi dan tenaga listrik.
- e) Transformasi Digital, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
- 1) penuntasan infrastruktur TIK;
 - 2) pemanfaatan infrastruktur TIK; dan
 - 3) fasilitas pendukung transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.

Pembangunan nasional perlu memperhatikan daya dukung sumber daya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, dan perubahan iklim. Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim akan diarahkan melalui kebijakan:

- a) peningkatan kualitas lingkungan hidup;
- b) peningkatan ketahanan bencana dan iklim; dan
- c) pembangunan rendah karbon.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
 - 2) penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya

- alam dan lingkungan hidup;
- 3) pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan
- 4) penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b) Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penanggulangan bencana; dan
 - 2) peningkatan ketahanan iklim.
- c) Pembangunan Rendah Karbon, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) pembangunan energi berkelanjutan;
 - 2) pemulihan lahan berkelanjutan;
 - 3) pengelolaan limbah;
 - 4) pengembangan industri hijau; dan
 - 5) rendah karbon pesisir dan laut.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Negara wajib terus hadir dalam melindungi segenap bangsa, memberikan rasa aman serta pelayanan publik yang berkualitas pada seluruh warga negara dan menegakkan kedaulatan negara. Pemerintah akan terus berupaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yang dapat diakses oleh semua masyarakat melalui:

- a) reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;
- b) meningkatkan hak-hak politik dan kebebasan sipil;
- c) memperbaiki sistem peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;
- d) mempermudah akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi; dan
- e) mempermudah akses terhadap pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri.

Agenda pembangunan ini diturunkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas sebagai berikut:

- a) Konsolidasi Demokrasi, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan kapasitas lembaga demokrasi;
 - 2) penguatan kesetaraan dan kebebasan; dan
 - 3) peningkatan kualitas komunikasi publik.
- b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan integritas NKRI dan perlindungan WNI di Luar Negeri;
 - 2) penguatan kerjasama pembangunan internasional;
- c) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan implementasi manajemen ASN;
 - 2) transformasi pelayanan publik;
 - 3) penataan kelembagaan dan proses bisnis; dan
 - 4) reformasi sistem akuntabilitas kinerja.
- d) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional, dengan kegiatan prioritas, yaitu:
 - 1) penguatan keamanan dalam negeri;
 - 2) penguatan keamanan laut;
 - 3) penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat; dan

Tema pembangunan RKP Tahun 2024 dijabarkan dalam bentuk prioritas pembangunan nasional. Pada dokumen Rancangan RKP Tahun 2023/2024, telah ditetapkan sasaran dan prioritas pembangunan nasional, sebagai berikut:

A. Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024, yaitu:

1. PN 1, Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. PN 2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan, dan Menjamin Pemerataan;
3. PN 3, Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. PN 4, Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. PN 5, Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;

6. PN 6, Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. PN 7, Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

B. Sasaran Nasional (SN) Tahun 2024, yaitu:

1. SN 1, Meningkatnya Daya Dukung dan Kualitas Sumber Daya Ekonomi Sebagai Modalitas Bagi Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan;
2. SN 2, Meningkatnya Nilai Tambah, Lapangan Kerja, Investasi, Ekspor, dan Daya Saing Perekonomian;
3. SN 3, Menurunnya Kesenjangan Antar Wilayah dengan Mendorong Transformasi dan Akselerasi Pembangunan Wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua, dan Tetap Menjaga Momentum Pertumbuhan di Wilayah Jawa, Bali, dan Sumatera;
4. SN 4, Terkendalinya Pertumbuhan Penduduk dan Menguatnya Tata Kelola Kependudukan;
5. SN 5, Meningkatnya Perlindungan Sosial bagi Seluruh Penduduk;
6. SN 6, Terpenuhinya Layanan Dasar Bidang Kesehatan dan Pendidikan;
7. SN 7, Meningkatnya Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda;
8. SN 8, Meningkatnya Aset Produktif Bagi Rumah Tangga Miskin dan Rentan;
9. SN 9, Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing;
10. SN 10, Menguatnya Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Memantapkan Ketahanan Budaya;
11. SN 11, Meningkatnya Pemajuan Kebudayaan untuk Meningkatkan Peran Kebudayaan dalam Pembangunan;
12. SN 12, Meningkatnya Kualitas Kehidupan Masyarakat dan Daya Rekat Sosial;
13. SN 13, Menguatnya Moderasi Beragama untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial dalam Kehidupan Masyarakat;
14. SN 14, Meningkatnya Ketahanan Keluarga untuk

- Memperkokuh Karakter Bangsa;
15. SN 15, Meningkatkan Budaya Literasi untuk Mewujudkan Masyarakat Berpengetahuan, Inovatif dan Kreatif;
 16. SN 16, Meningkatkan Penyediaan Infrastruktur Layanan Dasar;
 17. SN 17, Meningkatkan Konektivitas Untuk Mendukung Kegiatan Ekonomi dan Akses Menuju Pelayanan Dasar;
 18. SN 18, Meningkatkan Layanan Infrastruktur Perkotaan;
 19. SN 19, Meningkatkan Layanan Energi dan Ketenagalistrikan;
 20. SN 20, Meningkatkan Layanan Infrastruktur TIK;
 21. SN 21, Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
 22. SN 22, Berkurangnya Kerugian Akibat Dampak Bencana dan Bahaya Iklim;
 23. SN 23, Meningkatkan Capaian Penurunan Emisi dan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK);
 24. SN 24, Terwujudnya Demokrasi yang Terkonsolidasi, Terpeliharanya Kebebasan, Menguatnya Kapasitas Lembaga-Lembaga Demokrasi, Dan Terjaganya Kesetaraan Warga Negara Secara Optimal; dan
 25. SN 25, Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

4.2.2 Telaahan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, serta pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2023.

Perumusan isu strategis Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan gambaran umum hasil evaluasi pelaksanaan dan permasalahan pembangunan tahun 2022 sebagaimana disajikan pada Bab II, serta hasil penelaahan terhadap kebijakan strategis nasional yang telah diuraikan sebelumnya.

Isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 meliputi:

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas manusia menjadi hal yang penting agar masyarakat Provinsi Jawa Barat dengan penduduk terbanyak di Indonesia, mampu bersaing secara global. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Barat tahun 2022 baru mencapai 73,12, sedangkan target pada tahun 2025 yaitu 75,23 – 76,01, sehingga memerlukan upaya peningkatan diantaranya pada aspek kualitas pendidikan dan kualitas kesehatan.

Kualitas pendidikan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Rata- Rata Lama Sekolah pada tahun 2022 yaitu 12,62 tahun, sedangkan Angka Harapan Lama Sekolah yaitu 12,62 tahun. Permasalahan utama pendidikan ditandai dengan belum optimalnya upaya peningkatan peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.

Adapun kualitas pelayanan kesehatan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan oleh Angka Umum Harapan Hidup mencapai 73,52 tahun, Angka Kematian Bayi yaitu 3,39 per 1000, Angka Kematian Ibu masih mencapai 149,33 per 100.000, dan Angka Prevalensi Stunting pada tahun 2021 yaitu 24,50 persen dengan target pada tahun 2024 yaitu 14,00 persen. Permasalahan utama kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat pada aspek kesehatan diantaranya adalah belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruwilayah dan masyarakat, serta percepatan penurunan stunting dan penanganan AIDS, Tuberculosis, dan Malaria.

Permasalahan terkait kualitas sumber daya manusia Provinsi Jawa Barat juga terdapat pada belum optimalnya upaya peningkatan kualitas dan perlindungan perempuan dan anak yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Gender Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 baru mencapai 89,42 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 90,12 persen. Permasalahan

lainnya adalah belum optimalnya peningkatan ketahanan keluarga dan keluarga berencana, serta upaya pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk. Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 1,42 Persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 1,46 persen.

2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

Tantangan yang dihadapi Provinsi Jawa Barat dalam mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan diantaranya adalah masih tingginya angka kemiskinan, pengangguran terbuka dan ketimpangan pendapatan.

Persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 mencapai 7,98 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 7,45 – 7,26 persen. Upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Barat tidak hanya dilaksanakan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin, tetapi juga menyelesaikan akar permasalahan kemiskinan. Kemiskinan di Jawa Barat lebih banyak terjadi di perdesaan dibandingkan dengan perkotaan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat di desa termasuk penurunan volume perdagangan hasil-hasil pertanian.

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 masih mencapai 8,31 persen, dengan target pada tahun 2025 yaitu 7,45 – 7,26 persen. Faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Provinsi Jawa Barat adalah keterbatasan kesempatan kerja baru, tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja, dan kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri. Untuk diperlukan Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan optimalisasi dalam peningkatan daya saing dan penempatan tenaga kerja.

Adapun ketimpangan pendapatan Provinsi Jawa Barat masih tinggi ditunjukkan oleh Indeks Gini pada tahun 2022 mencapai 0,412 poin, dengan target pada tahun 2025 yaitu 0,35 – 0,30 poin. Untuk itu, dalam rangka mengatasi tantangan pembangunan ekonomi berkelanjutan, Provinsi Jawa Barat perlu melaksanakan

berbagai upaya melalui peningkatan pertumbuhan pada sektor perindustrian dan perdagangan, sektor pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif, serta peningkatan ketahanan pangan daerah.

3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

Isu pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan menjadi tantangan yang cukup besar bagi Provinsi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih terkendala tingkat konektivitas antar wilayah yang belum optimal, sehingga tingkat mobilitas antar wilayah relatif terbatas, ditunjukkan dengan Tingkat Konektivitas Antar Wilayah pada tahun 2021 baru mencapai 43,51 persen, dengan target tahun 2023 yaitu 47,0 persen. Kesenjangan ekonomi antar wilayah kabupaten/kota, dan ketimpangan antara kawasan jalur Utara, Tengah dan Selatan di Jawa Barat, serta ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan ditunjukkan melalui capaian Indeks Williamson Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebesar 0,667 poin, dengan target tahun 2023 yaitu 0,660 poin.

Akar masalah kemiskinan salah satunya adalah belum optimalnya pembangunan infrastruktur dasar. Untuk itu, pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar diantaranya dilaksanakan melalui peningkatan konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan. Permasalahan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah Jawa Barat meliputi belum optimalnya pembangunan infrastruktur jalan, air bersih dan sistem drainase, serta infrastruktur listrik dan telekomunikasi. Selain itu, permasalahan juga terdapat pada belum optimalnya pembangunan infrastruktur pengelolaan air limbah domestik dan limbah industri, pelayanan persampahan, serta belum terpenuhinya standar PSU dalam penyediaan perumahan.

Tantangan terbesar pemerataan pembangunan wilayah dan infrastruktur dasar serta infrastruktur lainnya, adalah daya dukung dan daya tampung lingkungan yang perlu tetap dipertahankan. Kualitas lingkungan hidup Jawa Barat ditunjukkan oleh Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 64,66 poin pada tahun 2022, dengan target pada tahun 2024 yaitu 66,13 poin. Permasalahan utama kualitas lingkungan hidup Jawa Barat masih ditandai dengan belum optimalnya upaya pengendalian pencemaran air, termasuk air laut, pencemaran udara, serta pengendalian perubahan tutupan lahan. Selain itu, masih perlu didorong upaya pembangunan rendah karbon dan peningkatan ketahanan daerah.

4. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Reformasi Birokrasi dengan predikat A pada tahun 2022. Permasalahan utama reformasi birokrasi adalah masih perlunya upaya peningkatan penataan dan penguatan organisasi, deregulasi peraturan perundang-undangan daerah dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum, penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital serta budaya birokrasi dengan ASN yang profesional, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Adapun penerapan inovasi daerah dalam pembangunan di Jawa Barat ditunjukkan dengan Indeks Inovasi Daerah pada tahun 2022 memperoleh predikat Sangat Inovatif.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJPD V (2023-2025), yaitu “Mencapai Keunggulan Masyarakat Jawa Barat di Segala Bidang”, serta Tema RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, yaitu “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 adalah:

“Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”

Tema tersebut memiliki makna bahwa dalam rangka mempertahankan kemandirian masyarakat Jawa Barat, pembangunan

Provinsi Jawa Barat tahun 2024 diarahkan untuk peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kearifan lokal Jawa Barat. Peningkatan daya saing daerah dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan pada berbagai bidang secara seimbang dengan koridor peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Jawa Barat.

Keterkaitan isu strategis berdasarkan RPD Provinsi Jawa Barat tahun 2024, dengan permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.4
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024

No	Isu Strategis RPD Jabar 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Jabar 2024
1	2	3	4
1	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi.2. Belum optimalnya peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah dan masyarakat.3. Masih rendahnya penerapan <i>zero new stunting</i> dan penanganan AIDS, Tuberculosis, dan Malaria.4. Belum optimalnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, pembangunan pemuda, serta ketahanan keluarga dan keluarga berencana.5. Belum optimalnya upaya pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Masih rendahnya penerapan <i>link and match</i> industri kecil-industri besar.2. Belum optimalnya penerapan UMKM dan industri hijau.	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan

No	Isu Strategis RPD Jabar 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Jabar 2024
1	2	3	4
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Percepatan digitalisasi ekonomi masih perlu didorong. 4. Belum optimalnya pembentukan sentra pertanian, perikanan, dan UMKM. 5. Belum optimalnya penerapan pertanian ekologis. 6. Masih perlunya percepatan pengembangan ekonomi lokal pada sektor pariwisata, ekonomi kreatif, industri, UMKM, pertanian, dan perikanan. 7. Nilai inventasi dan kualitas usaha masih perlu ditingkatkan. 8. Belum optimalnya penanggulangan kemiskinan. 9. Belum optimalnya kualitas dan aksesibilitas ketenagakerjaan. 10. Penerapan ketahanan pangan berkelanjutan masih perlu didorong. 11. Masih rendahnya penerapan <i>circular economy</i>. 	
3	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pengembangan dan pembangunan pusat kegiatan pada wilayah terisolir. 2. Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas di wilayah utara dan selatan Jawa Barat. 3. Perlunya percepatan pengembangan kawasan industri Rebana, Kawasan Jabar Selatan, Kawasan Bodebekjur, dan Kawasan Cekungan Bandung. 4. Belum optimalnya penyediaan transportasi massal perkotaan. 5. Belum optimalnya 	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan

No	Isu Strategis RPD Jabar 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Jabar 2024
1	2	3	4
		<p>penyediaan infrastruktur dasar (telekomunikasi, jalan, air bersih, drainase) yang belum menjangkau seluruh wilayah.</p> <p>Akses layanan listrik belum menjangkau seluruh wilayah.</p> <p>7. Belum optimalnya penyediaan hunian layak huni.</p> <p>8. Pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan belum optimal.</p> <p>9. Masih rendahnya pelayanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik.</p> <p>10. Masih rendahnya pemenuhan daya dukung dan daya tampung lingkungan.</p> <p>11. Penerapan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim belum optimal dilaksanakan untuk mendukung perekonomian.</p> <p>12. Belum optimalnya upaya mitigasi, adaptasi dan penanggulangan bencana.</p>	
4	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	<p>1. Belum optimalnya penataan dan penguatan organisasi.</p> <p>2. Belum optimalnya upaya deregulasi peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan kebijakan lainnya serta penegakan hukum.</p> <p>3. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, efisien, dan lincah serta budaya birokrasi dengan ASN yang professional.</p> <p>4. Belum optimalnya tata laksana proses bisnis dan SOP serta keterbukaan informasi.</p> <p>5. Belum optimalnya penataan sistem manajemen SDM</p>	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah

No	Isu Strategis RPD Jabar 2024-2026	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi RKPD 2022	Isu Strategis Pembangunan Jabar 2024
1	2	3	4
		Aparatur. Belum optimalnya penguatan akuntabilitas. 7. Belum optimalnya penguatan pengawasan. 8. Masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik. 9. Belum optimalnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan.	

Sumber: Analisis Bappeda 2023

Prioritas pembangunan daerah disusun dengan menerapkan konsep THIS, yaitu 1) **Tematik** (disesuaikan dengan isu strategis dan tema pembangunan); 2) **Holistik** (menyelesaikan permasalahan secara komprehensif dari hulu sampai hilir); 3) **Integratif** (melibatkan berbagai Perangkat Daerah Provinsi dan terintegrasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota); dan 4) **Spasial** (mengacu pada kebijakan penataan ruang dan kebijakan kewilayahan).

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata;
2. **Prioritas 2**, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama;
3. **Prioritas 3**, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. **Prioritas 4**, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana;
5. **Prioritas 5**, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa;
6. **Prioritas 6**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 disusun berdasarkan arah kebijakan pada RPD Provinsi Jawa Barat 2024- 2026 untuk tahun 2024, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2024, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2024. Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024 juga ditetapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional tahun 2024.

Tabel 4.5
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPD 2024-2026

No	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Tahun 2024
1	2	3	4
1	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi2. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan, serta distribusi yang menjangkau seluruh wilayah3. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar4. Peningkatan minat baca masyarakat5. Penguatan fasilitas kesehatan dan mutu pelayanan kesehatan6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu, Anak dan Remaja7. Peningkatan pelayanan penyakit menular (AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria) yang komprehensif8. Percepatan penurunan stunting dalam mencapai Jabar <i>Zero New Stunting</i>9. Pemenuhan tenaga kesehatan/SDK10. Peningkatan pelayanan penyakit tidak menular yang komprehensif11. Penguatan pembiayaan kesehatan12. Penguatan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi13. Peningkatan partisipasi masyarakat berolahraga14. Penyediaan akses peningkatan kemampuan dan keterampilan masyarakat serta perluasan	<p>P2 Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama</p> <p>P3 Penguatan Sistem Kesehatan Daerah</p>

No	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Tahun 2024
1	2	3	4
		<p>kesempatan kerja dan peluang usaha</p> <ol style="list-style-type: none">15. Peningkatan akses terhadap rumah layak huni16. Pemberdayaan masyarakat dan desa17. Peningkatan perlindungan perempuan18. Peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan19. Pemenuhan hak dan perlindungan anak20. Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang holistik dan integratif sesuai siklus hidup21. Pengembangan kepemimpinan, kepeloporan, kewirausahaan, dan daya saing pemuda22. Pengendalian pertumbuhan dan distribusi penduduk	
2	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Penerapan <i>link and match</i> industri kecil-industri besar2. Pengembangan IKM dan industri hijau3. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur industri serta pengembangan sentra industri terpadu4. Optimalisasi perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta perdagangan digital5. Peningkatan diversifikasi produk ekspor dan pasar tujuan ekspor6. Penguatan jaringan distribusi serta pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok7. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian serta kelautan dan perikanan8. Menjaga keberlanjutan sumber daya pertanian serta tersedianya prasarana dan sarana pertanian9. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian10. Peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan petani11. Pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan	P1 Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata

No	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Tahun 2024
1	2	3	4
		<p>perikanan</p> <ol style="list-style-type: none">12. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan13. Pengembangan sentra pertanian dan perikanan yang terpadu untuk meningkatkan produksi dan produktivitas14. Penerapan prinsip UMKM hijau terutama yang mengembangkan potensi unggulan daerah15. Peningkatan perhutanan sosial16. Perbaikan tata kelola pangan, dengan memperhatikan akses, ketersediaan dan pemanfaatan pangan17. Integrasi Kultur (Budaya) dalam Peningkatan Daya Saing Pangan Lokal18. Pengembangan Smart Fishing dan Sustainable Aquaculture19. Pengembangan destinasi pariwisata dan produk ekonomi kreatif yang bernilai tambah dan berdaya saing20. Peningkatan dan perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dan produk ekonomi kreatif berbasis kemitraan strategis21. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif22. Pengembangan budaya lokal yang mendukung pengembangan pariwisata23. Peningkatan kemudahan berusaha dan berinvestasi24. Promosi dan peningkatan layanan investasi25. Modernisasi Koperasi dan Penciptaan UMKM Naik Kelas26. Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Domestik dan Global27. Peningkatan keterampilan angkatan kerja28. Pengembangan pendidikan vokasional sesuai dengan kebutuhan kerja29. Pendampingan dan penguatan kewirausahaan30. Pengembangan dan penjaminan keberlanjutan usaha kecil	

No	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Tahun 2024
1	2	3	4
3	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan pusat kegiatan baru untuk membuka akses, distribusi penduduk, dan/atau peningkatan ekonomi2. Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas di wilayah Utara dan Selatan Jawa Barat3. Percepatan pembangunan infrastruktur di Kawasan Rebana dan Kawasan Jabar Selatan4. Peningkatan konektivitas antar wilayah terutama untuk mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan5. Pemanfaatan ruang yang efektif6. Pengembangan transportasi massal perkotaan yang ramah lingkungan7. Pemenuhan air bersih untuk rumah tangga, pertanian, dan industri8. Pemerataan akses terhadap layanan listrik menjangkau seluruh wilayah9. Peningkatan layanan infrastruktur persampahan dan air limbah domestik10. Peningkatan kuantitas dan kualitas perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan/atau terdampak bencana dan program pemerintah11. Pengendalian pencemaran dan kerusakan, serta pemulihan kualitas lingkungan hidup12. Peningkatan upaya pemulihan daya dukung dan daya tampung lingkungan13. Rehabilitasi hutan dan lahan Kritis14. Pengelolaan kelautan dan wilayah pesisir yang berkelanjutan15. Penerapan sistem pertanian tanaman terpadu, dan intensifikasi pertanian16. Pengembangan potensi konservasi energi dan baru terbarukan17. Penerapan waste to energy dan circular economy dalam pengelolaan persampahan, serta peningkatan pengendalian <i>food waste</i> dan <i>food loss</i>	<p>P5 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa</p> <p>P4 Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana</p>

No	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Tahun 2024
1	2	3	4
		<p>18. Pencegahan dan penanganan penyakit akibat perubahan iklim secara terpadu dan cepat</p> <p>19. Peningkatan mitigasi dan adaptasi bencana termasuk bencana hidrometeorologi</p>	
4	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	<p>1. Peningkatan kapasitas sektor-sektor atau kelompok untuk mandiri dan otonom Peningkatan kapasitas kelompok yang mengalami diskriminasi dan eksklusi untuk dapat memiliki akses <i>yang setara</i> pada sumber daya di berbagai sektor dan dapat menikmati kondisi setara dalam mengakses sumber daya dan kekuasaan</p> <p>3. Peningkatan kinerja lembaga-lembaga demokrasi yaitu lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi, partai politik, dan penyelenggara pemilu dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan.</p> <p>4. Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, menuju tata kelola pemerintahan yang dinamis (<i>Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance</i>) dalam mewujudkan <i>World Class Government</i></p> <p>5. Penataan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>6. Pengembangan Smart Governance yang unggul dalam rangka mewujudkan Jabar Smart Province.</p> <p>7. Penguatan dan Penataan Organisasi</p> <p>8. Penerapan sistem merit secara konsisten</p> <p>9. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ASN melalui pengembangan <i>corporate university</i> Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi</p> <p>10. Penataan proses bisnis dan SOP pelayanan publik, serta</p>	

No	Isu Strategis Pembangunan Tahun 2024	Arah Kebijakan RPD Tahun 2024	Prioritas Pembangunan Tahun 2024
1	2	3	4
		peningkatan keterbukaan informasi 11. Optimalisasi inovasi daerah berbasis kolaborasi dalam pembangunan dan pengembangan potensi daerah	

Sumber: Hasil Analisis Bappeda 2023

4.2.3 Penelaahan Terhadap Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang antara lain diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses. Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, saran dan masukan tersebut antara lain:

A. Urusan Pemerintah Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Bidang Pendidikan
 - Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran sesuai dengan kriteria/Aturan yang berlaku.
- 2) Kesehatan
 - Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus tepat sasaran sesuai dengan Kriteria/Aturan yang berlaku.
- 3) Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Untuk segera membuat *Master plan Drainase* sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka menanggulangi banjir.
 - Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan.
 - Dalam pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi.

- 4) Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman
 - Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi.
 - Pendataan RTLH serta penaggulangan nya.
- 5) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 - Meningkatkan peran dan fungsi Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) yang ada di setiap RW.
- 6) Bidang Sosial
 - Mengadakan Pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat Berbasis potensi/kebutuhan.
 - Menyediakan rumah singgah bagi para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).

B. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1) Bidang Tenaga Kerja
 - Menginformasikan setiap ada Lowongan Pekerjaan (Loker) kepada Masyarakat.
 - Melakukan Koordinasi dengan pihak Perusahaan dalam penentuan Hak-hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan.
 - Mengadakan pelatihan keterampilan dalam rangka stimulasi pertumbuhan UMKM di Kota Sukabumi.
- 2) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Melakukan Bimbingan dan Konsultasi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Melibatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).
- 3) Bidang Ketahanan Pangan
 - Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat.
 - Peningkatan pemantauan harga sembako untuk menjamin tersedianya kebutuhan makanan pokok.
- 4) Bidang Pertanahan
 - Melakukan Pendataan dan Mentertibkan Hak Kepemilikan Tanah yang belum Bersertifikat.

- Mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kota.
- 5) Bidang Lingkungan Hidup
- Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).
 - Segera merealisasikan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan dengan pola *typing fee*.
- 6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa (Kelurahan)
- Memberikan Bantuan Operasional kepada para Petugas Pos Yandu Balita dan Lansia.
- 7) Bidang Koperasi Dan UMKM
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM.
 - Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku koperasi dan UMKM.
 - Hubungan kesinambungan antara Dinas Koperasi dan UMKM pasca selesainya pembinaan.
- 8) Bidang Penanaman Modal
- Mempermudah regulasi/aturan untuk menarik investor di Kota Sukabumi.
 - Menyediakan Mall pelayanan perijinan 1 (satu) pintu di DPMPTSP.
- 9) Bidang Kebudayaan
- Dalam rangka melestarikan, Mengelola dan mengembangkan Gedung/Tempat peninggalan Sejarah/Cagar Budaya perlu adanya penambahan Anggaran.

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

- 1) Bidang Pariwisata
- Pemberdayaan potensi pariwisata lokal khususnya di kelurahan-kelurahan.
 - Meningkatkan kultur pariwisata di masyarakat khususnya pelaku wisata.
 - Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri.
 - Program destinasi wisata khususnya paket wisata unggulan

melalui Sukabumi *Great sale*.

- Promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri
- Pengembangan SDM dan profesionalisme pariwisata.
- Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.

2) Bidang Pertanian

- Pemantauan kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat.
- Peningkatan keanekaragaman industri tanaman pertanian.
- Monitoring peredaran daging di pasar-pasar tradisional secara rutin dan terjadwal.
- Pemantauan higienes dan halal makanan yang berbahan daging di Hotel, Rumah Makan, dan Warung Makan di Kota Sukabumi.

3) Bidang Perdagangan

- Monitoring dan antisipasi terhadap kenaikan harga, mutu, dan penyediaan sembilan bahan pokok.
- Membuka dan memperluas akses pemasaran baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.
- Peningkatan pengawasan dan pembinaan pasar tradisional.
- Perlindungan bagi pelaku pasar tradisional agar terjaga eksistensinya terhadap persaingan pasar modern.
- Penataan dan penertiban pasar yang beralih fungsi.
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar tradisional secara optimal, terutama terkait jaringan instalasi listrik di Pasar-Pasar tradisional secara keseluruhan.
- Mengoptimalkan Pendapatan pasar tradisional.
- Pemantauan perkembangan pasar Kreatif sehingga diharapkan ada dampak yang positif terhadap pasar Tradisional.

4) Bidang Perindustrian

- Menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk berwirausaha.
- Proteksi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Sukabumi serta evaluasi dan memperketat kontrol terhadap produk-produk impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pembangunan tempat pameran yang memadai untuk usaha-usaha yang ada di Kota Sukabumi maupun di Luar Kota Sukabumi.

5) Bidang Transmigrasi

- Peningkatan kerja sama daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang secara infrastruktur memadai.
- Peningkatan pembekalan Calon Transmigran yang akan dikirim dengan pelatihan yang memadai.

6) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Bidang Perencanaan

- Mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar dalam perencanaan pembangunan lebih akurat/tidak berubah-ubah, dan dapat terintegrasi antara Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- Dalam melakukan perencanaan memperhatikan prinsip partisipasi, kesinambungan dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah.
- Untuk perencanaan pembangunan Kota Sukabumi agar memperhatikan keseimbangan wilayah.

b. Bidang Keuangan (Peningkatan PAD)

- Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor PAD.
- Kajian potensi riil PAD dan peningkatan implementasi dari

hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen.

- Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran diupayakan secara *online*.
- Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi apabila regulasi tentang penghapusan PBB dan BPHTB jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.
- Evaluasi dan laporan hasil PAD dan penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD.

c. Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- Perlunya ada penambahan Formasi / Pengangkatan Guru Agama baik melalui Seleksi P3K maupun seleksi CPNS .
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan Tunjangan Kinerja
- Terselenggaranya pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas PNS

d. Bidang Pemerintahan

- Meningkatkan peran kelembagaan kelurahan dan kecamatan dalam rangka partisipasi pembangunan.
- Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke kelurahan dan kecamatan.
- Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

e. Bidang Hukum dan HAM

- Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah
- Tersedianya *database* tentang Produk-produk Hukum baik peraturan daerah dan peraturan wali kota (Perwali)nya.
- Memverifikasi peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan atau peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan

masyarakat.

f. Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Negeri

- Tersedianya sarana dan prasarana yang representative.
- Meningkatkan kerukunan hidup beragama.
- Meningkatkan peran lembaga/ *stake holders* dalam rangka mengantisipasi/mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan umat beragama.
- Menjaga kondisifitas antar partai politik di Kota Sukabumi.

g. Penanggulangan Bencana

- Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana.
- Menciptakan sistem proteksi dalam bencana kebakaran.
- Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam setiap pembangunan gedung di Kota Sukabumi.
- Perlunya standarisasi gedung/bangunan untuk mengantisipasi bencana/kebakaran.

h. Kebijakan BUMD

a. Perusahaan Daerah Air Minum

- Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat.
- Menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak bagi masyarakat kota Sukabumi.
- Menekan tingkat kebocoran air.
- PDAM diharapkan memberikan kebutuhan air bersih yang maksimal kepada masyarakat Sukabumi.

i. Lain-lain

- Penanganan *Covid-19* termasuk penyediaan APD, tempat tidur, pembangunan sarana prasarana kesehatan dan pengadaan mobil siaga desa;

- Penyelesaian pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bagi warga yang tidak mampu;
- Peningkatan pelayanan bidang pendidikan termasuk penambahan ruang kelas baru, penambahan kuota bantuan bagi pelajar SMA/SMK, beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan sarana prasarana SLB dan pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU);
- Pembangunan sarana prasarana pencegah banjir;
- Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau;

4.2.4 Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Sukabumi

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan

sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Perumusan isu strategis Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat diidentifikasi dari berbagai sumber, diantaranya:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah Tahun 2022;
2. Kondisi terkini Tahun 2023;
3. Arah kebijakan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026;
4. Arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di tingkat pusat;
5. Arah kebijakan Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024; dan
6. Dinamika internasional, nasional, dan regional yang mempengaruhi pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal yang telah disampaikan diatas, maka proses penyusunan isu strategis pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6
Proses Penyusunan Isu Strategis Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<p>Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum dioptimalkan</p> <p>Ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi belum optimal</p> <p>Belum berkembangnya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan dan harga bahan pokok</p> <p>Belum optimalnya pembinaan PKL</p> <p>Tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B</p> <p>Minat masyarakat untuk bertani makin berkurang</p> <p>Distribusi bibit tanaman hortikultura belum optimal</p> <p><i>Urban farming</i> belum menjadi gerakan masif dalam mendukung ketahanan pangan</p> <p>Belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan</p> <p>Fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan belum optimal</p>	<p>Resesi ekonomi global</p> <p>Ketahanan pangan dan energi</p> <p>Transformasi digital</p>	<p>Pemulihan ekonomi pasca Covid-19</p> <p>Ketahanan pangan dan energi</p>	<p>Daya saing ekonomi</p>	<p>Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa</p>

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<p>Belum optimalnya manajemen koperasi</p> <p>Belum optimalnya pola kemitraan antara koperasi dan UMK dengan pengusaha besar</p> <p>Kurangnya promosi produk usaha mikro</p> <p>Belum optimalnya fasilitasi perizinan bagi usaha mikro</p> <p>Belum tersedianya database koperasi dan usaha mikro</p> <p>Investasi sektor industri belum menarik minat investor</p> <p>Potensi investasi belum digali secara optimal</p> <p>Rendahnya IKM produktif</p> <p>Pemanfaatan teknologi bagi industri kecil masih rendah</p> <p>Pemasaran produk IKM yang masih terbatas</p>				
<p>Luas wilayah relatif kecil</p> <p>Belum optimalnya Kota Sukabumi sebagai PKW</p>		<p>Percepatan pembangunan infrastruktur</p>	<p>Ketimpangan Jabar Selatan-Utara</p>	<p>Dampak PSN dan megaprojek lainnya</p>

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
Adanya disparitas pembangunan infrastruktur Belum optimalnya pengelolaan air bersih Belum optimalnya pengelolaan air limbah Belum disusunnya RDTR Fasilitas RTH publik yang belum optimal				
Masih adanya RTLH Permukiman kumuh belum sepenuhnya tertangani Degradasi lingkungan Alih fungsi lahan yang terus berlangsung Belum optimalnya pengelolaan persampahan Kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang Risiko bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir cukup besar Belum adanya peralatan untuk mendeteksi bencana	Perubahan iklim	Pengurangan risiko bencana		Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan
Adanya kesenjangan terkait distribusi kekayaan, produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi, dan ketahanan dalam menghadapi guncangan Akses pendidikan, kesehatan, dan	Arsitektur kesehatan global	Peningkatan kualitas SDM Kemiskinan ekstrem Penanganan stunting	Daya saing SDM Kemiskinan ekstrem dan TPT	Kualitas SDM

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<p>ekonomi masyarakat miskin perlu ditingkatkan</p> <p>Komponen daya beli masyarakat sebagai pembentuk IPM perlu ditingkatkan</p> <p>Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga terbatas</p> <p>Angka putus sekolah perlu ditekan</p> <p>Angka melanjutkan sekolah antarjenjang pendidikan perlu ditingkatkan</p> <p>Asupan gizi masyarakat perlu ditingkatkan</p> <p>Angka kesakitan masyarakat perlu ditekan</p> <p>Terdapat 4 kelurahan yang memiliki angka prevalensi <i>stunting</i> tinggi</p>				
<p>Pelayanan umum di beberapa kecamatan masih belum optimal</p> <p>Rekomendasi oleh APIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti PD</p> <p>Evaluasi program oleh APIP belum sepenuhnya dilakukan</p> <p>Belum idelanya jumlah ASN</p> <p>Penghapusan tenaga honorer</p> <p>Belum tersedianya data center</p>		Reformasi Birokrasi	Reformasi birokrasi	Inovasi di pemerintahan

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Global	Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional	Isu Strategis Aktual
<p>Terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi</p> <p>Belum optimalnya pengamanan informasi</p> <p>Belum semua arsip didigitalisasi</p> <p>Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral</p> <p>Partisipasi dan distribusi data dari pengguna/PD terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah</p>				
<p>Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan masih belum optimal</p> <p>Konflik sosial masih sering terjadi</p> <p>Ormas dan LSM masih banyak yang belum tertib administrasi</p> <p>Masih terdapat anak di bawah umur yang tergabung dalam Ormas dan LSM</p>		<p>Pemilu dan pilkada serentak 2024</p>		<p>Pemilu dan pilkada serentak 2024</p>

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, kemudian berbagai isu dalam pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, serta dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan, maka sesuai dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026, isu strategis pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 ditetapkan sebagai berikut:

1. Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa;

Kontribusi per sektor lapangan usaha terhadap PDRB Kota Sukabumi dalam kurun waktu 3 tahun terakhir didominasi oleh perdagangan, jasa keuangan, dan transportasi. Ketiganya berkontribusi masing-masing lebih dari 10 persen terhadap PDRB Kota Sukabumi. Bahkan untuk sektor perdagangan kontribusinya mencapai angka di atas 37 persen. Kontribusi ketiga sektor tersebut perlu ditingkatkan untuk menguatkan Kota Sukabumi sebagai pusat kegiatan wilayah.

Di Kota Sukabumi masih terdapat sektor potensial yang perlu dioptimalkan yaitu pariwisata dan ekonomi kreatif serta pertanian perkotaan. Sebagai kota yang besar di masa kolonial, berbagai peninggalan yang ada di Kota Sukabumi perlu dilestarikan untuk menunjang atau sebagai destinasi obyek wisata. Demikian juga dengan ekonomi kreatif yang selama ini telah dikembangkan. Upaya untuk mengkapitalisasi kedua sektor tersebut perlu untuk lebih digencarkan.

Pertanian perkotaan merupakan sektor lain yang perlu dioptimalkan juga. Mengingat karekater Sukabumi yang sudah berupa kota namun luas lahan pertaniannya masih luas. Namun tekanan alih fungsi lahan tidak bisa dihindari. Karena itu, pertanian perkotaan merupakan alternatif pengembangan yang perlu dioptimalkan guna meningkatkan kontribusi bagi PDRB dan tentunya untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar.

2. Dampak proyek strategis nasional (PSN) dan mega proyek lainnya;

Pembangunan proyek strategis nasional yang berada di Kota Sukabumi dan sekitarnya terutama infrastruktur jalan tol dan kereta api akan meningkatkan aksesibilitas. Dengan demikian lalu lintas orang dan barang tentunya juga akan semakin meningkat.



Peluang ini perlu dioptimalkan mengingat Sukabumi dikenal juga sebagai kota transit sehingga daya tarik kota perlu dikembangkan dan direvitalisasi untuk semakin memanjakan pendatang yang transit ataupun melakukan aktivitas di Kota Sukabumi.

Mega proyek yang didanai baik dari Provinsi Jawa Barat maupun dari Kota Sukabumi sendiri juga menjadi pengungkit bagi perkembangan kota. Karena itu, perlu tetap dilakukan pembangunan mega proyek terutama yang dapat menjadi pengungkit perekonomian kota.

3. Permukiman kumuh, lingkungan hidup, dan kebencanaan;

Permasalahan perkotaan tidak akan pernah lepas dengan permukiman termasuk kawasan kumuh. Sehingga permukiman kumuh jika tidak diintervensi dengan cepat oleh semua pihak akan menyebabkan runtutan permasalahan lainnya. Walaupun penanganan permukiman kumuh di Kota Sukabumi cukup signifikan mengurangi luas permukiman kumuh dari sekitar 139 Ha hingga sekarang tinggal 5 Ha, namun upaya preventif harus tetap dilakukan.

Penanganan permukiman kumuh tentunya perlu dibarengi dengan penanganan lingkungan hidup secara keseluruhan. Hal ini mengingat degradasi lingkungan seperti penurunan kualitas air, udara, dan tutupan lahan cenderung terjadi tiap tahun. Jika hal ini tidak segera ditangani maka potensi kerusakan lingkungan yang semakin parah tidak dapat dihindarkan.

Kondisi lingkungan yang semakin menurun diperparah dengan risiko bencana yang mengancam Kota Sukabumi. Walaupun Indeks Risiko Bencana Kota Sukabumi masuk kategori menengah namun risiko bencana seperti gempa bumi, longsor, dan banjir cukup tinggi. Sehingga upaya untuk memitigasi bencana harus menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kota Sukabumi.

4. Kualitas sumber daya manusia (SDM);

SDM Kota Sukabumi jika dilihat dari indikator IPM sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Namun demikian, tetap diperlukan upaya untuk



meningkatkan IPM Kota Sukabumi terutama dari komponen harapan lama sekolah. Mengingat komponen ini yang paling rendah kenaikannya.

Walaupun memiliki IPM yang lebih baik dari Provinsi Jawa Barat dan Nasional namun TPT dan Indeks Gini Kota Sukabumi masih lebih baik dari keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai persoalan seperti tingkat produktivitas tenaga kerja yang belum optimal dan merata, terbatasnya lapangan pekerjaan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan yang masih belum menjangkau semua kalangan, dan lainnya. Karena itu, upaya untuk meningkatkan kualitas SDM Kota Sukabumi akan terus dilakukan mengingat dinamika yang terjadi saat ini dan ke depannya akan diperlukan SDM yang tidak hanya cerdas dan terampil tetapi juga adaptif terhadap perubahan yang terjadi.

5. Inovasi di pemerintahan; dan

Pemerintah Kota Sukabumi telah dianugerahi penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu kota terinovatif. Untuk meraih itu, berbagai inovasi yang dihasilkan harus sesuai dengan standar IGA.

Terdapat sejumlah inovasi telah digulirkan Pemerintah Kota Sukabumi di berbagai bidang. Misalnya pada layanan kesehatan ada *homecare*, ambulans sigap, dan puskesmas klinik sore. Di bidang ekonomi, ada program Sukabumi Kelurahan Entrepreneurship Center (kece) untuk membentuk wirausaha baru di kelurahan dan Sukabumi Creative Hub (SCH). Program inovasi lainnya di bidang literasi, rumah singgah di Bandung, pembinaan keagamaan, dan lain sebagainya.

Inovasi di Kota Sukabumi harus terus dilahirkan untuk mengatasi berbagai keterbatasan dan dalam rangka peningkatan pelayanan publik, Inovasi itu sendiri harus berkolaborasi bukan hanya dengan perangkat daerah tapi dengan pihak lainnya baik pihak swasta dan organisasi profesi. Sehingga pada akhirnya, inovasi diharapkan menjadi budaya dalam menjalankan roda pemerintahan.



6. Pemilu dan pilkada serentak tahun 2024.

Tahun 2024 akan menjadi tahun politik besar-besaran di Indonesia, tak terkecuali di Kota Sukabumi. Pada tahun tersebut, pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) bakal digelar serentak. Pemilu dan pilkada serentak 2024 akan menjadi kerja besar dan kerja keras semua pihak. Bagi penyelenggara mau tak mau harus menanggung beban kerja yang jauh lebih berat dibanding pemilu dan pilkada sebelumnya. Tak hanya bagi penyelenggara, pemilu dan pilkada serentak 2024 juga akan menjadi kerja berat bagi partai politik.

Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Badan Kesbangpol diharapkan selalu menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik agar dapat mengawal suksesnya penyelenggaraan pemilu dan pilkada tersebut. Perkembangan situasi politik, dinamika sosial politik, kesiapan partai politik, pelaksanaan pendidikan politik perlu dipantau secara berkala. Tak lupa upaya deteksi dan pencegahan dini guna meminimalisir terjadinya konflik yang dapat mengganggu stabilitas keamanan jelang pemilu dan pilkada 2024 perlu dioptimalkan.

Berdasarkan rumusan 6 (enam) isu strategis di atas, serta tujuan dan sasaran pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2023 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka ditetapkan strategi dan arah kebijakan sebagai upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan yang disusun mengacu pada Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 4.7
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan pelayanan penanaman modal Meningkatkan kualitas sarana perdagangan Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal Memberdayakan pelaku UMKM
		Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat
	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian	Meningkatkan obyek daya tarik wisata Meningkatkan pemasaram wisata
		Mengkapitalisasi potensi ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian	Memanfaatkan dan melindungi HKI

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Terciptanya kualitas SDM yang berkarakter dan kompetitif	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pendidikan
			Meningkatkan literasi masyarakat
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat
			Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja
			Meningkatkan penempatan tenaga kerja
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas jalan kota
			Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
			Meningkatkan pengelolaan persampahan
			Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah
		Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	Mengurangi RTLH
			Mengurangi luas kawasan kumuh
		Meningkatkan pengelolaan	Meningkatkan pengendalian

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		lingkungan hidup	pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
			Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati
	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan situasi kota yang kondusif	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
			Meningkatkan kerukunan umat beragama
		Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana
			Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
			Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
			Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi
			Meningkatkan transparansi pemerintahan
			Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing

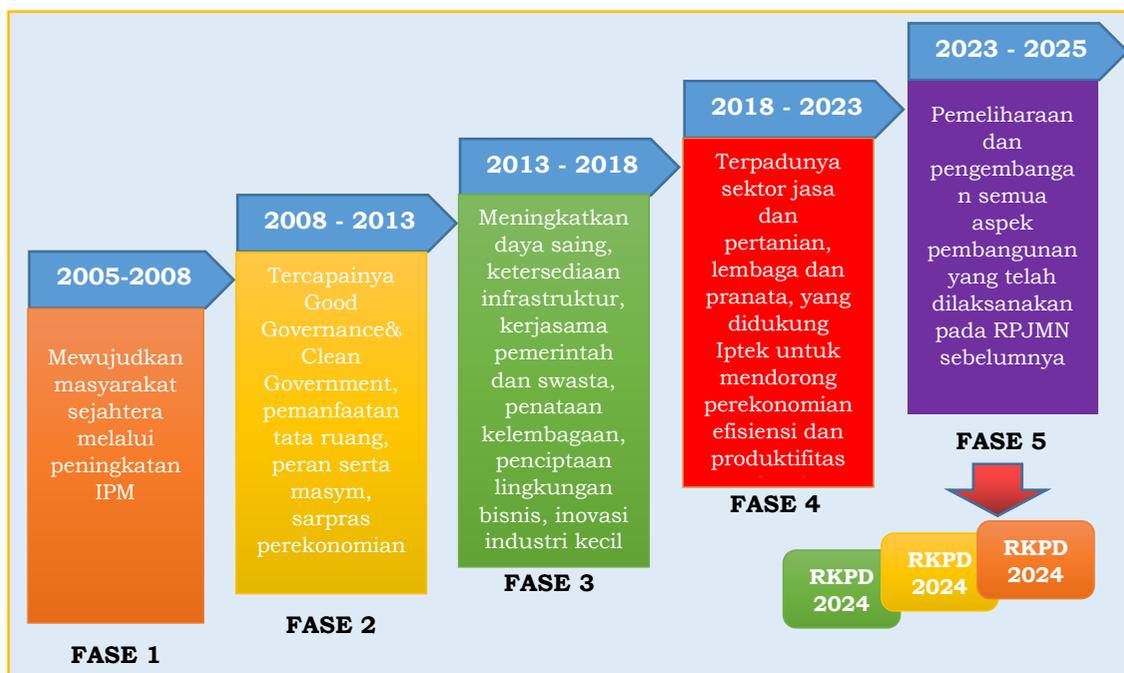
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya inovasi daerah	Penguatan ekosistem inovasi	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi
			Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi
		Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	Implementasi pemanfaatan inovasi

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

4.2.5 Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024

Pelaksanaan pembangunan daerah periode tahun 2023-2025 merupakan tahap pembangunan kelima atau terakhir dari RPJPD Kota Sukabumi tahun 2005 - 2025 yang memiliki tema **“Pemeliharaan dan Pengembangan Semua Aspek Pembangunan yang Telah Dilaksanakan pada RPJM sebelumnya”**. Tema pembangunan tersebut menjadi salah satu pedoman dalam penyusunan RPD yang lebih lanjut akan dijabarkan dalam tema pembangunan setiap tahun dan menjadi pedoman bagi penentuan fokus atau tema pembangunan dalam RKPD tahun 2024 - 2026. Tema pembangunan lima tahunan dalam setiap periode RPJPD disajikan pada Gambar 4.3.

Gambar 4. 3
Tema Pembangunan Lima Tahunan dalam RPJPD dan Penjabarannya ke dalam RKPD

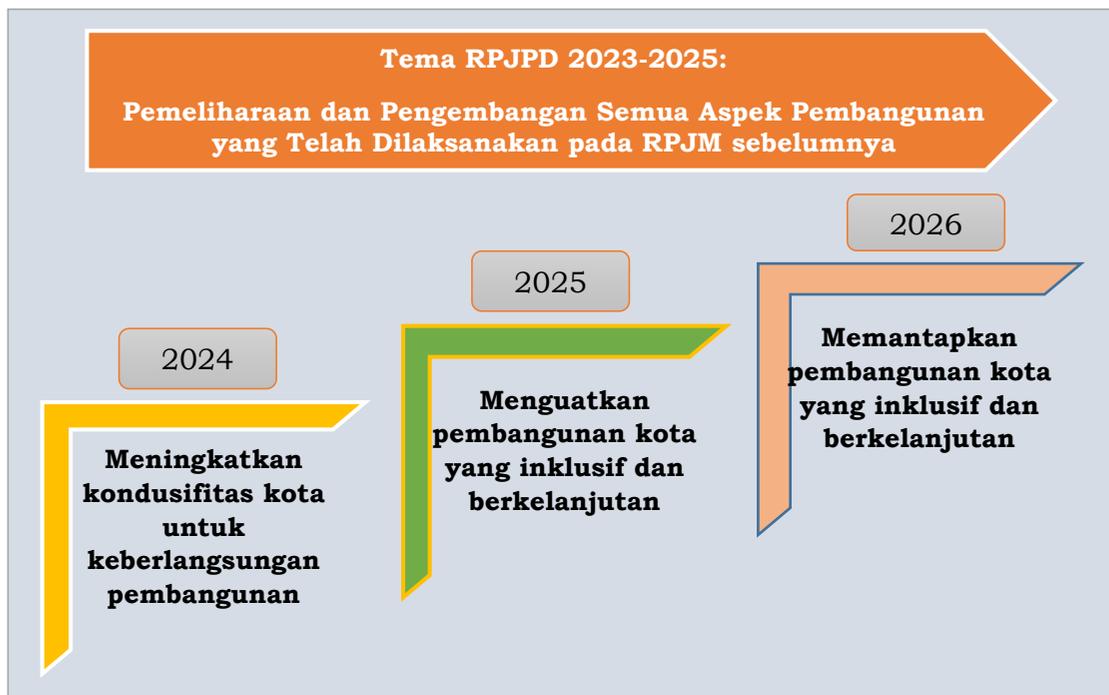


Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Rumusan arah kebijakan untuk merasionalkan pilihan strategi harus memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Fokus atau tema pembangunan setiap tahun selama periode RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut:

Gambar 4.4
Tema atau Fokus Pembangunan Tahunan Periode 2024-2026



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi, 2023 (hasil analisis)

Tema atau fokus pembangunan memberi arah yang jelas bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam rangka pencapaian target sasaran pembangunan tahunan untuk perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan RPD. Tema pembangunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 sebagai tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, adalah:

“Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan”

Tema di atas memiliki makna bahwa pada tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan. Situasi politik yang cenderung meningkat perlu diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik agar keberlangsungan pembangunan tetap terjaga.

Tema tersebut sejalan dengan tema RKPD Provinsi Jawa Barat yaitu **Melanjutkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat** serta telah selaras juga dengan tema RKP yaitu **Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**. Pada prinsipnya ketiga tema tersebut bertujuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan melalui upaya penciptaan kondusifitas serta percepatan pembangunan

ekonomi sehingga dapat mencapai masyarakat yang mandiri, unggul dan sejahtera.

Dalam pelaksanaan tema diatas, maka harus disandingkan dengan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan daerah sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyebutkan bahwa prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD/RPD. Prioritas pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan kebijakan nasional dan daerah, pencapaian target standar pelayanan minimal permasalahan pembangunan daerah, evaluasi hasil RKPD tahun sebelumnya maupun usulan prioritas lainnya.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dilakukan analisis berdasarkan sasaran dan isu strategis RPD, hasil evaluasi RKPD serta kebijakan Provinsi dan Nasional, maka ditetapkan prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi tahun 2024 sebagaimana pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8
Penentuan Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
ø Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif belum dioptimalkan	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa
			Mengkapitalisasi potensi ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian	
ø Ketersediaan pasar rakyat dan sarana distribusi belum optimal			Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	
ø Belum berkembangnya sistem terpadu monitoring serta koordinasi ketersediaan				



Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
dan harga bahan pokok				
ð Belum optimalnya pembinaan PKL				
ð Tingginya alih fungsi lahan termasuk LP2B				
ð Minat masyarakat untuk bertani makin berkurang				
ð Distribusi bibit tanaman hortikultura belum optimal				
ð <i>Urban farming</i> belum menjadi gerakan masif dalam mendukung ketahanan pangan				
ð Belum optimalnya standarisasi budidaya perikanan				
ð Fasilitasi pelaku olahan hasil perikanan belum optimal				
ð Belum optimalnya manajemen koperasi				
ð Belum optimalnya pola kemitraan antara koperasi dan UMK dengan pengusaha besar				
ð Kurangnya promosi produk usaha mikro				
ð Belum optimalnya				



Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
fasilitasi perizinan bagi usaha mikro				
ð Belum tersedianya database koperasi dan usaha mikro				
ð Investasi sektor industri belum menarik minat investor			Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	
ð Potensi investasi belum digali secara optimal				
ð Rendahnya IKM produktif				
ð Pemanfaatan teknologi bagi industri kecil masih rendah				
ð Pemasaran produk IKM yang masih terbatas				
ð Luas wilayah relatif kecil	Dampak PSN dan megaprojek lainnya	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Peningkatan Kondusifitas Kota
ð Belum optimalnya Kota Sukabumi sebagai PKW				
ð Adanya disparitas pembangunan infrastruktur				
ð Belum optimalnya pengelolaan air bersih				
ð Belum optimalnya pengelolaan air limbah				
ð Belum disusunnya				



Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
RDTR				
Ø Fasilitas RTH publik yang belum optimal				
Ø Masih adanya RTLH	Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan		Meningkatkan pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	
Ø Permukiman kumuh belum sepenuhnya tertangani			Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	
Ø Degradasi lingkungan				
Ø Alih fungsi lahan yang terus berlangsung				
Ø Belum optimalnya pengelolaan persampahan				
Ø Kepedulian masyarakat akan lingkungan hidup masih kurang				
Ø Risiko bencana gempa bumi, tanah longsor, dan banjir cukup besar		Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	
Ø Belum adanya peralatan untuk mendeteksi bencana				
Ø Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan masih belum optimal	Pemilu dan pilkada serentak 2024	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan situasi kota yang kondusif	Peningkatan Kondusifitas Kota
Ø Konflik sosial masih sering terjadi				
Ø Ormas dan LSM masih banyak yang belum tertib				



Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
administrasi				
ō Masih terdapat anak di bawah umur yang tergabung dalam Ormas dan LSM				
ō Adanya kesenjangan terkait distribusi kekayaan, produktivitas tenaga kerja, akses ekonomi, dan ketahanan dalam menghadapi goncangan	Kualitas SDM	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	
ō Akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat miskin perlu ditingkatkan				
ō Komponen daya beli masyarakat sebagai pembentuk IPM perlu ditingkatkan				
ō Angka putus sekolah perlu ditekan				
ō Angka melanjutkan sekolah antarjenjang pendidikan perlu ditingkatkan				
ō Lapangan kerja yang terbatas menyebabkan penyerapan tenaga kerja juga terbatas		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	
ō Asupan gizi masyarakat perlu		Meningkatnya derajat kesehatan	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan	

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
ditingkatkan		masyarakat	masyarakat	
• Angka kesakitan masyarakat perlu ditekan				
• Terdapat 4 kelurahan yang memiliki angka prevalensi <i>stunting</i> tinggi				
• Pelayanan umum di beberapa kecamatan masih belum optimal	Inovasi di pemerintahan	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif
• Rekomendasi oleh APIP belum sepenuhnya ditindaklanjuti PD		Meningkatnya inovasi daerah	Penguatan ekosistem inovasi	
• Evaluasi program oleh APIP belum sepenuhnya dilakukan			Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	
• Belum idealnya jumlah ASN				
• Penghapusan tenaga honorer				
• Belum tersedianya data center				
• Terbatasnya pemahaman, pemanfaatan, dan penggunaan teknologi informasi				
• Belum optimalnya pengamanan informasi				
• Belum semua arsip didigitalisasi				

Permasalahan Pembangunan	Isu Strategis Aktual	Sasaran	Strategi	Prioritas Pembangunan
• Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan kebutuhan data statistik sektoral				
• Partisipasi dan distribusi data dari pengguna/PD terhadap kebutuhan pengguna data yang berkualitas sangat rendah				

Sumber: Analisis Bappeda, 2023

Berdasarkan tabel di atas, maka prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kondusifitas Kota

Tahun 2024 merupakan tahun politik dimana pemilu dan pilkada serentak dilaksanakan. Situasi politik yang cenderung meningkat perlu diantisipasi dengan tetap menjaga dan meningkatkan kondusifitas dan stabilitas kota dari berbagai aspek, seperti ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, keamanan dan politik. Hal tersebut agar keberlangsungan pembangunan tetap bisa terjaga dan masyarakat dapat melakukan aktivitas dan kreatifitas sebagaimana biasanya.

2. Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa

Sesuai dengan Visi RPJPD bahwa Kota Sukabumi sebagai pusat peragangan dan jasa yang berkualitas, maka kedua sektor ini harus terus menjadi prioritas dalam pembangunan. Sektor perdagangan dapat dioerkuat juga dengan optimalisasi sektor pariwisata yang nantinya tentu akan berdampak pada meningkatkan sektor perdagangan. Sektor jasa di bidang pendidikan, kesehatan dan lainnya tentu harus tetap menjadi prioritas, karena memang itu sebuah keunggulan dan kelebihan yang dimiliki oleh Kota Sukabumi.

3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif

Pelayanan publik merupakan sebuah kewajiban pemerintah daerah kepada masyarakat, untuk itu maka seluruh jenis pelayanan publik harus terus ditingkatkan kualitasnya. Pelayanan publik merupakan salah satu bagian dari agenda reformasi birokrasi yang juga harus senantiasa di implementasikan oleh pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dimana didalamnya terdapat pelayanan publik maka harus dilakukan secara kreatif dengan berbagai inovasi di perangkat daerah sehingga dapat meningkatkan indeks reformasi birokrasi serta juga indeks inovasi daerah yang pada akhirnya diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Selain prioritas pembangunan daerah, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran telah ditentukan juga program prioritas pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 yang disusun berdasarkan isu strategis, strategi dan arah kebijakan pembangunan. Program prioritas pembangunan daerah menjadi pelaksanaan dari strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan. Program prioritas pembangunan daerah disajikan berdasarkan tujuan, sasaran dan *outcome* dari RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Dengan sifat program prioritas pembangunan daerah yang bersifat strategis, maka pelaksanaan dan penganggarannya harus diutamakan.

Perumusan program prioritas bertujuan untuk menggambarkan rangkaian “kerja” yang dibutuhkan untuk mencapai “kinerja” tujuan dan sasaran pembangunan. Program prioritas tersebut dihasilkan melalui mekanisme *cascading* tujuan, sasaran, dan *outcome* pembangunan. Proses perumusan program prioritas melalui mekanisme *cascading* dinilai lebih logis dan lebih dapat menjaga kesinambungan tujuan dan sasaran dengan program prioritas yang dihasilkan.

Berdasarkan *cascading* yang dilakukan, program prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 terdiri dari 41 program. Program prioritas yang dihasilkan juga telah disesuaikan dengan daftar program menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program prioritas Kota Sukabumi tahun 2024 - 2026 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Program Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
Terciptanya ekonomi Kota Sukabumi yang inklusif	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Meningkatnya iklim usaha yang kondusif	Pelayanan Penanaman Modal	DPMPSTP
		Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Diskumindag
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DKP3
		Mewujudkan UMKM dan wirausaha naik kelas yang mampu bersaing dipasar domestik dan global	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Diskumindag
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Diskumindag
		Meningkatnya promosi produk lokal	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Diskumindag
		Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Meningkatnya kegiatan ekonomi kreatif masyarakat	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
	Meningkatnya daya tarik wisata			Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
			Pemasaran Pariwisata	Disporapar
	Terciptanya kualitas SDM	Meningkatnya derajat	Terpenuhinya SPM pendidikan	Pengelolaan Pendidikan

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB	
yang berkarakter dan kompetitif	pendidikan masyarakat	Meningkatnya literasi masyarakat	Pembinaan Perpustakaan	Dispusip	
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terpenuhinya SPM kesehatan	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinkes	
		Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan			
		Meningkatnya kepesertaan JKN			
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Meningkatnya pembinaan keluarga berencana	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dalduk KB P3A	
		Meningkatnya kompetensi tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker	
Terwujudnya ruang kota yang nyaman dan berkelanjutan	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Meningkatnya konektivitas wilayah	Penyelenggaraan Jalan	DPUTR	
			Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dishub	
		Meningkatnya pengelolaan persampahan dan sanitasi	Pengelolaan Persampahan	DLH	
			Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUTR	
		Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	DPUTR	
			Kawasan Permukiman	DPUTR	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH	
			Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH	
		Terciptanya rasa aman	Terpenuhinya SPM	Peningkatan Ketenteraman	Satpol PP Damkar

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
	dan kesiapsiagaan bencana	ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	dan Ketertiban Umum	
		Meningkatnya kualitas kerukunan umat beragama	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kesbangpol
		Meningkatnya pencegahan, pengendalian dan penanganan resiko banjir dan longsor	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	DPUTR
		Terpenuhinya SPM bagi warga di kawasan rawan bencana dan warga korban bencana	Penanggulangan Bencana	BPBD
		Terpenuhinya SPM kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap bencana bagi korban bencana	Penanganan Bencana	Dinsos
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappeda
		Meningkatnya pengelolaan keuangan dan barang milik daerah	Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKPD
		Meningkatnya kapasitas ASN	Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengadaan	Perekonomian dan Pembangunan	Setda-BPBJ

TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	PROGRAM PRIORITAS	PD PENANGGUNG JAWAB
		barang dan jasa		
		Meningkatnya penyelenggaraan pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
		Meningkatnya kualitas pelayanan dan kebijakan publik	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Setda-Organisasi
			Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Setda-Hukum
			Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Setwan
		Meningkatnya penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
		Meningkatnya penggunaan aplikasi informatika di pemerintahan	Aplikasi Informatika	Diskominfo
		Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan	Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Disdukcapil
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatnya pendayagunaan inovasi dan pengembangan Iptek	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappeda

Sumber: RPD Kota Sukabumi 2024-2026

Prioritas pembangunan dan program prioritas ditetapkan dengan memperhatikan isu strategis daerah. Keterkaitan prioritas pembangunan dan program prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 dengan isu strategis pembangunan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.10
Keterkaitan Isu Strategis, Prioritas Pembangunan dan Program
Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2024

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
1	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	<ol style="list-style-type: none">1) Pelayanan Penanaman Modal2) Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting3) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat4) Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)5) Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan6) Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
2	Dampak PSN dan megaprojek lainnya	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	<ol style="list-style-type: none">1) Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual2) Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata3) Pemasaran Pariwisata
3	Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan	Peningkatan Kondusifitas Kota	<ol style="list-style-type: none">1) Penyelenggaraan Jalan2) Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)3) Pengelolaan Persampahan4) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah5) Perumahan dan Kawasan6) Permukiman Kumuh7) Kawasan Permukiman8) Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup9) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)10) Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)11) Penanggulangan Bencana12) Penanganan Bencana
4	Kualitas SDM	Peningkatan Kondusifitas Kota	<ol style="list-style-type: none">1) Pengelolaan Pendidikan2) Pembinaan Perpustakaan3) Pemenuhan Upaya Kesehatan

ISU STRATEGIS		PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN
			Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 4) Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 5) Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 6) Penempatan Tenaga Kerja
5	Inovasi di pemerintahan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	1) Penelitian dan Pengembangan Daerah 2) Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 4) Pengelolaan Keuangan Daerah 5) Pengembangan Sumber Daya Manusia 6) Perekonomian dan Pembangunan 7) Penyelenggaraan Pengawasan 8) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 9) Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 10) Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD 11) Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik 12) Aplikasi Informatika 13) Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
6	Pemilu dan pilkada serentak 2024	Peningkatan Kondusifitas Kota	1) Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2) Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Berdasarkan tabel diatas, maka apabila kita sandingkan antara isu strategis, prioritas pembangunan dan program prioritas terdapat keterkaitan yang sangat erat. Isu strategis yang selanjutnya menjadi prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dapat kita petakan

diakomodir pada program prioritas yang mana, sehingga kita dapat memastikan bahwa isu strategis dan prioritas pembangunan yang bermula dari berbagai permasalahan dan kondisi terkini Kota Sukabumi dapat diselesaikan melalui berbagai program prioritas yang akan dijalankan pada Tahun 2024.

Apabila kita gambarkan lebih detail, maka keterkaitan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.5
Ketrkaitan Isu Straeis dengan Prioritas Pembangunan



Sumber: Bappeda Kota Sukabumi (diolah)

Strategi dan arah kebijakan pembangunan merupakan salah satu dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan, maka ketiganya harus bisa disandingkan dan bisa terlihat jelas arah kebijakan mana yang menjadi dasar bagi penentuan prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan tersebut. Berikutnya dalam proses implementasi prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan bisa sesuai dengan harapan awal ketika proses penyusunan perencanaan disusun dan pada akhirnya dapat mendukung pencapaian target-target kinerja yang sudah ditetapkan. Pada tabel

dibawah ini akan digambarkan hubungan antara prioritas pembangunan daerah dan program prioritas pembangunan dengan 36 (tiga puluh enam) arah kebijakan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Tabel 4.11
Keterkaitan Prioritas Pembangunan, Program Priotas dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
1	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pelayanan Penanaman Modal	Meningkatkan pelayanan penanaman modal
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Memberdayakan pelaku UMKM
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatkan kualitas sarana perdagangan
		Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Memanfaatkan dan melindungi HKI
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatkan obyek daya tarik wisata
		Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan pemasaram wisata
		Pengelolaan Pendidikan	Meningkatkan pengelolaan pendidikan
		Pembinaan Perpustakaan	Meningkatkan literasi masyarakat
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Penempatan Tenaga Kerja	Meningkatkan penempatan tenaga kerja
2	Peningkatan Kondusifitas Kota	Penyelenggaraan Jalan	Meningkatkan kualitas jalan kota
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan
		Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan persampahan
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Mengurangi luas kawasan kumuh
		Kawasan Permukiman	Mengurangi RTLH
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Meningkatkan kerukunan umat beragama
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana
		Penanggulangan Bencana	Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana
		Penanganan Bencana	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
		Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	PROGRAM PRIORITAS	ARAH KEBIJAKAN
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	
		Perekonomian dan Pembangunan	Meningkatkan transparansi pemerintahan
		Penyelenggaraan Pengawasan	
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
		Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	
		Aplikasi Informatika	
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	
			Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi
			Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi
			Implementasi pemanfaatan inovasi

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022

Pembangunan daerah Kota Sukabumi Tahun 2023 diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPD Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026. Pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran dilakukan melalui berbagai program pembangunan yang ada di seluruh perangkat daerah juga melalui program prioritas pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan agar lebih fokus dan terarah, maka telah ditetapkan tema pembangunan untuk setiap



tahunnya. Tema tersebut tentunya harus bisa sinergi dengan arah kebijakan yang sudah ditetapkan agar dapat mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

Selanjutnya akan digambarkan sinkronisasi antara arah kebijakan dengan fokus/tema pembangunan sebagai berikut:

Tabel 4.12
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Berdasarkan Tema Pembangunan Tahun 2024-2026 per tahun

NO	ARAH KEBIJAKAN	TEMA PEMBANGUNAN		
		Tahun 2024: Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan	Tahun 2025: Memperkuat pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan	Tahun 2026: Memantapkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan
1	Meningkatkan pelayanan penanaman modal	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
2	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
3	Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
4	Memberdayakan pelaku UMKM	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
5	Meningkatkan kualitas sarana perdagangan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
6	Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
7	Memanfaatkan dan melindungi HKI	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
8	Meningkatkan obyek daya tarik wisata	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
9	Meningkatkan pemasaran wisata	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
10	Meningkatkan pengelolaan pendidikan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
11	Meningkatkan literasi masyarakat	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026

NO	ARAH KEBIJAKAN	TEMA PEMBANGUNAN		
		Tahun 2024: Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan	Tahun 2025: Memperkuat pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan	Tahun 2026: Memantapkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan
12	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
13	Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
14	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
15	Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
16	Meningkatkan kualitas jalan kota	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
17	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
18	Meningkatkan pengelolaan persampahan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
19	Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
20	Mengurangi luas kawasan kumuh	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
21	Mengurangi RTLH	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
22	Meningkatkan pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026

NO	ARAH KEBIJAKAN	TEMA PEMBANGUNAN		
		Tahun 2024: Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan	Tahun 2025: Memperkuat pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan	Tahun 2026: Memantapkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan
23	Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
24	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
25	Meningkatkan kerukunan umat beragama	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
26	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
27	Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
28	Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
29	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
30	Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
31	Meningkatkan transparansi pemerintahan	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
32	Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
33	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026

NO	ARAH KEBIJAKAN	TEMA PEMBANGUNAN		
		Tahun 2024: Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan	Tahun 2025: Memperkuat pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan	Tahun 2026: Memantapkan pembangunan kota yang inklusif dan berkelanjutan
34	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
35	Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026
36	Implementasi pemanfaatan inovasi	Mendukung tema Tahun 2024	Mendukung tema Tahun 2025	Mendukung tema Tahun 2026

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Dalam pelaksanaan pembangunan tentunya pemerintah daerah sangat membutuhkan saran masukan dari berbagai pihak terutama dari pihak legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Saran masukan dari DPRD berupa pikir senantiasa disampaikan kepada Pemerintah daerah melalui Bappeda setiap satu minggu sebelum dilaksanakannya Musrenbang Tingkat Kota. Saran masukan tersebut tentunya harus seiring dengan isu strategis dan program prioritas daerah yang sudah ditetapkan dalam RPD. Keterkaitan tersebut digambarkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.12
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
1	Peningkatan Kondusifitas Kota	<ol style="list-style-type: none">1. Meningkatkan peran dan fungsi Pos Keamanan Lingkungan (Pos Kamling) yang ada di setiap RW.2. Pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus tepat sasaran sesuai dengan kriteria/Aturan yang berlaku.3. Pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS) harus tepat sasaran sesuai dengan Kriteria/Aturan yang berlaku.4. Untuk segera membuat <i>Master plan Drainase</i> sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan, khususnya dalam rangka menanggulangi banjir.5. Meningkatkan pemeliharaan jalan kota dan jalan lingkungan secara merata, baik berupa pavingisasi, betonisasi dan pengaspalan.6. Dalam pelaksanaan kegiatan yang besumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota harus bersinergi.7. Menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan cara membangun rusunami, Rusunawa, Rumah murah bersubsidi.8. Pendataan RTLH serta penaggulangan nya.9. Mengadakan Pembinaan dan pelatihan bagi para penyandang cacat Berbasis potensi/kebutuhan.10. Menyediakan rumah singgah bagi para Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT).11. Melakukan Bimbingan dan Konsultasi terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan Melibatkan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3).12. Melakukan Pendataan dan Mentertibkan Hak Kepemilikan Tanah yang belum Bersertifikat.13. Mengamankan aset-aset milik Pemerintah Kota.14. Memberikan Bantuan Operasional kepada para

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<p>Petugas Pos Yandu Balita dan Lansia.</p> <ol style="list-style-type: none">15. Dalam rangka melestarikan, Mengelola dan mengembangkan Gedung/Tempat peninggalan Sejarah/Cagar Budaya perlu adanya penambahan Anggaran.16. Terselenggaranya sosialisasi peraturan daerah17. Tersedianya <i>database</i> tentang Produk-produk Hukum baik peraturan daerah dan peraturan wali kota (Perwali)nya.18. Memverifikasi peraturan daerah yang tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang undangan atau peraturan daerah yang sudah tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.19. Tersedianya sarana dan prasarana yang representative.20. Meningkatkan kerukunan hidup beragama.21. Meningkatkan peran lembaga/<i>stake holders</i> dalam rangka mengantisipasi/mengatasi gejolak dalam kehidupan kerukunan umat beragama.22. Menjaga kondisifitas antar partai politik di Kota Sukabumi.23. Peningkatan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana.24. Menciptakan sistem proteksi dalam bencana kebakaran.25. Meningkatkan koordinasi antar instansi dalam setiap pembangunan gedung di Kota Sukabumi.26. Perlunya standarisasi gedung/bangunan untuk mengantisipasi bencana/kebakaran.27. Penanganan <i>Covid-19</i> termasuk penyediaan APD, tempat tidur, pembangunan sarana prasarana kesehatan dan pengadaan mobil siaga desa;28. Penyelesaian pembayaran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) bagi warga yang tidak mampu;29. Peningkatan pelayanan bidang pendidikan termasuk penambahan ruang kelas baru, penambahan kuota bantuan bagi pelajar SMA/SMK, beasiswa bagi mahasiswa, peningkatan sarana prasarana SLB dan pelaksanaan program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU);30. Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegah banjir;31. Pembangunan jalan baru, perbaikan/perawatan jalan yang ada dan pembangunan jalan untuk lokasi perbatasan yang sulit dijangkau;
2	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	<ol style="list-style-type: none">1) Menginformasikan setiap ada Lowongan Pekerjaan (Loker) kepada Masyarakat.2) Melakukan Koordinasi dengan pihak Perusahaan dalam penentuan Hak-hak dan kewajiban pekerja terhadap perusahaan.3) Mengadakan pelatihan keterampilan dalam rangka stimulasi pertumbuhan UMKM di Kota Sukabumi.



NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<ol style="list-style-type: none">4) Pemberdayaan masyarakat di bidang perekonomian, khususnya olahan pangan masyarakat.5) Peningkatan pemantauan harga sembako untuk menjamin tersedianya kebutuhan makanan pokok.6) Meningkatkan dan memfasilitasi pengelolaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL).7) Segera merealisasikan pengelolaan tempat pembuangan akhir (TPA) yang berwawasan lingkungan dengan pola <i>typing fee</i>.8) Peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui Koperasi dan UMKM.9) Pengawasan dan pembinaan bagi pelaku koperasi dan UMKM.10) Hubungan kesinambungan antara Dinas Koperasi dan UMKM pasca selesainya pembinaan.11) Mempermudah regulasi/aturan untuk menarik investor di Kota Sukabumi.12) Menyediakan Mall pelayanan perijinan 1 (satu) pintu di DPMPSTP.13) Pemberdayaan potensi pariwisata lokal khususnya di kelurahan-kelurahan.14) Meningkatkan kultur pariwisata di masyarakat khususnya pelaku wisata.15) Peningkatan kualitas dan kuantitas promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri.16) Program destinasi wisata khususnya paket wisata unggulan melalui Sukabumi <i>Great sale</i>.17) Promosi pariwisata nusantara ke dalam dan luar negeri18) Pengembangan SDM dan profesionalisme pariwisata.19) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata.20) Pemantauan kesehatan hewan yang dikonsumsi masyarakat.21) Peningkatan keanekaragaman industri tanaman pertanian.22) Monitoring peredaran daging di pasar-pasar tradisional secara rutin dan terjadwal.23) Pemantauan higienes dan halal makanan yang berbahan daging di Hotel, Rumah Makan, dan Warung Makan di Kota Sukabumi.24) Monitoring dan antisipasi terhadap kenaikan harga, mutu, dan penyediaan sembilan bahan pokok.25) Membuka dan memperluas akses pemasaran baik di tingkat Regional, Nasional maupun Internasional.26) Peningkatan pengawasan dan pembinaan pasar tradisional.27) Perlindungan bagi pelaku pasar tradisiona agar

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<p>terjaga eksistensinya terhadap persaingan pasar modern.</p> <p>28) Penataan dan penertiban pasar yang beralih fungsi.</p> <p>29) Pemeliharaan/Rehabilitasi Pasar tradisional secara optimal, terutama terkait jaringan instalasi listrik di Pasar-Pasar tradisional secara keseluruhan.</p> <p>30) Mengoptimalkan Pendapatan pasar tradisional.</p> <p>31) Pemantauan perkembangan pasar Kreatif sehingga diharapkan ada dampak yang positif terhadap pasar Tradisional.</p> <p>32) Menumbuhkembangkan minat masyarakat untuk berwirausaha.</p> <p>33) Proteksi terhadap keberadaan industri kecil dan menengah yang ada di Kota Sukabumi serta evaluasi dan memperketat kontrol terhadap produk-produk impor yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>34) Pembangunan tempat pameran yang memadai untuk usaha- usaha yang ada di Kota Sukabumi maupun di Luar Kota Sukabumi.</p> <p>35) Peningkatan kerja sama daerah dengan Pemerintah dan Pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang secara infrastruktur memadai.</p> <p>36) Peningkatan pembekalan Calon Transmigran yang akan dikirim dengan pelatihan yang memadai.</p> <p>37) Peningkatan mutu dan layanan air bersih yang layak pakai untuk masyarakat.</p> <p>38) Menjalani kerja sama dengan pemerintah daerah sekitar untuk memenuhi kebutuhan air yang layak bagi masyarakat kota Sukabumi.</p> <p>39) Menekan tingkat kebocoran air.</p> <p>40) PDAM diharapkan memberikan kebutuhan air bersih yang maksimal kepada masyarakat Sukabumi.</p>
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	<p>1) Mengintensifkan koordinasi antar Perangkat Daerah agar dalam perencanaan pembangunan lebih akurat/tidak berubah-ubah, dan dapat terintegrasi antara Pemerintah Kota Sukabumi, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.</p> <p>2) Dalam melakukan perencanaan memperhatikan prinsip partisipasi, kesinambungan dan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang daerah. Untuk perencanaan pembangunan Kota Sukabumi agar memperhatikan keseimbangan wilayah.</p> <p>3) Melaksanakan evaluasi dan monitoring di sektor PAD.</p> <p>4) Kajian potensi riil PAD dan peningkatan</p>

NO	PRIORITAS PEMBANGUNAN	POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD
		<p>implementasi dari hasil kajian tersebut secara transparan yang dilakukan oleh tim independen.</p> <ol style="list-style-type: none">5) Sistem Pendapatan dari Sektor Pajak Hotel dan Restoran diupayakan secara <i>online</i>.6) Koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan solusi apabila regulasi tentang penghapusan PBB dan BPHTB jadi dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat.7) Evaluasi dan laporan hasil PAD dan penggunaan secara periodik (per Triwulan) kepada DPRD.8) Perlunya ada penambahan Formasi / Pengangkatan Guru Agama baik melalui Seleksi P3K maupun seleksi CPNS .9) Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan Tunjangan Kinerja10) Terselenggaranya pendidikan dan latihan untuk meningkatkan kualitas PNS11) Meningkatkan peran kelembagaan kelurahan dan kecamatan dalam rangka partisipasi pembangunan.12) Mengusulkan peningkatan anggaran bantuan ke kelurahan dan kecamatan.13) Tersedianya sarana dan prasarana di Kecamatan dan Kelurahan sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Dalam melaksanakan program prioritas pembangunan yang telah ditentukan, maka harus dilakukan mapping dengan program pembangunan yang dilaksanakannya serta dikaitkan dengan sasaran, indikator serta strategi dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024. Kesesuaian sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, serta pagu anggaran pada perangkat daerah disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.13
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 1 “Peningkatan Kondusifitas Kota”

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Peningkatan Kondusifitas Kota	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Poin	86,00	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan	Meningkatkan kualitas jalan kota	Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persen	* 85.15	10,467,790,128	DPUTR
									Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	* 83.54		
							Meningkatkan kualitas penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	83.54	2,497,323,140	DISHUB
							Meningkatkan pengelolaan persampahan	Pengelolaan Persampahan	Cakupan pengelolaan sampah	Persen	100	1,044,856,550	DLH
							Meningkatkan pengelolaan sistem air limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	57.95	1,265,549,905	DPUTR
						Meningkatkan	Mengurangi	Perumahan	Persentase	Persen	1.37		DPUTR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						pembangunan lingkungan perumahan dan permukiman	RTLH	dan Kawasan Permukiman Kumuh	Berkurangnya Jumlah RTLH			33,283,820	
							Mengurangi luas kawasan kumuh	Kawasan Permukiman	Luasan Pengurangan Kawasan Kumuh	Ha	10	3,076,684,393	DPUTR
						Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pengendalian pencemaran/k erusakan lingkungan hidup	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	159,207,935	DLH
							Meningkatkan pengelolaan keragaman hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	indeks RTH	m2/ora ng	25.5	263,703,625	DLH
		Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana	Indeks Rasa Aman	Persen	75,40	Meningkatkan situasi kota yang kondusif	Meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Persen	100	1,281,001,375	SATPOLPP DAMKAR
							Meningkatkan kerukunan umat beragama	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase Konflik Antar Umat Beragama yang terselesaikan	persen	100	357,960,000	KESBANGPOL

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Diantisipasi	persen	100	32,571,252,805	KESBANGPOL
						Meningkatkan kapasitas penanggulangan dan penanganan bencana	Meningkatkan pengelolaan sumber daya air untuk meminimalkan risiko bencana	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir WS Kewenangan Kota	Persen	57.37	1,364,082,204	DPUTR
							Meningkatkan kapasitas penanggulang an bencana	Penanggulang an Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Poin	0,57	351,312,423	BPBD

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
							Meningkatkan kapasitas penanganan bencana	Penanganan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal kebutuhan dasar bagi korban bencana	Persen	100	89,152,807	DINSOS
		Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	Poin	71,58	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan masyarakat	Meningkatkan pengelolaan pendidikan	Pengelolaan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	persen	100	12,514,554,013	DISDIKBUD Dewan Pendidikan PGRI
							Meningkatkan literasi masyarakat	Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	70.5	358,630,700	DISPUSIP
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,33	Meningkatkan akses dan mutu kesehatan masyarakat	Meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan masyarakat	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	persen	92	38,898,044,628	DINKES Forum Kota Sehat Organisasi Profesi Kesehatan
									Prevalensi stunting pada balita	persen	6		

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran (Rp)	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial	persen	100		
									Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	persen	15,88		
									Persentase kepesertaan JKN	persen	98,5		
							Meningkatkan pembinaan keluarga berencana (KB)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	persen	65	128,446,056	DALDUKKBP2A
JUMLAH												106,722,836,507	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Tabel 4.14
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 2 “Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa”

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	4,00	Meningkatkan iklim usaha yang kondusif	Meningkatkan pelayanan penanaman modal	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	80	84,733,635	DPMPSTP
							Meningkatkan kualitas sarana perdagangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	60	1,410,000,688	DISKUMINDAG
							Meningkatkan penggunaan dan promosi produk lokal	Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Dilaksanakan	Persen	100	47,500,000	DISKUMINDAG PT. Shopee PT Lazada KADIN HIPMI
							Memberdayakan pelaku UMKM	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	0,01	1,454,445,611	DISKUMINDAG PT. Shopee PT Lazada KADIN HIPMI

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						Meningkatnya stabilitas pasokan dan harga pangan	Menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Stabilisasi dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Persen	5,88	4,050,563	DISKUMINDAG
							Meningkatkan diversifikasi pangan masyarakat	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan pokok	Persen	100	209,304,238	DKP3
		Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Indeks Kota Kreatif	Poin	30,93	Mengoptimalkan potensi pariwisata sebagai penopang perekonomian	Meningkatkan obyek daya tarik wisata	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	16	376,556,868	DISPORAPAR
							Meningkatkan pemasaran wisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	21,80	376,556,868	DISPORAPAR
						Mengkapitalisasi potensi ekonomi kreatif sebagai penopang perekonomian	Memfaatkan dan melindungi HKI	Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	Event	4	66,903,465	DISPORAPAR

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	34,001	Meningkatkan kompetensi tenaga kerja	Meningkatkan pelatihan tenaga kerja	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	81	408,215,000	DISNAKER
							Meningkatkan penempatan tenaga kerja	Penempatan Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	Persen	85	26,600,000	DISNAKER
JUMLAH												4,464,866,936	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2022

Tabel 4.15
Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas, Pagu Anggaran dan Instansi/Perangkat Daerah Penanggungjawab
Pada Prioritas Pembangunan 3 “Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif”

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	73,00	Melaksanakan reformasi birokrasi melalui penguatan 8 area perubahan	Meningkatkan manajemen kinerja pemerintahan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Standar	Persen	100	1,742,378,708	BAPPEDA
									Persentase Pencapaian IKU	Persen	100		
								Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Tingkat Kota	Persen	100	1,835,757,390	BAPPEDA
							Meningkatkan integritas dan budaya anti korupsi	Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	97,33	2,474,064,684	BPKPD
								Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persen	7.9	1,257,203,305	BKPSDM
							Meningkatkan transparansi pemerintahan	Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persen	76	629,008,625	INSPEKTORAT

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Pera ngkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persen	80		
							Meningkatkan pelayanan publik yang responsif dan berdaya saing	Perekonomian dan Pembangunan	Persentase Pengendalian Pelaksanaan APBD	Persen	100	533,037,058	SETDA
									Persentase Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Perekonomian Daerah	Persen	100		
									Persentase Penyelenggaraan Pengadaan yang Dilaksanakan secara Online	Persen	100		
								Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	34,045,181,650	

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									Persentase Perangkat Daerah yang Mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Menenuhi Aspek Penilaian	Persen	80		
									Indeks Pelayanan Publik	Persen	3,40		
								Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Persen	100	14,311,122,231	SETDA
									Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	90		
									Persentase Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persen	100		
								Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Persen	100	15,284,347,850	SETWAN

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,771,351,475	KEC. CIKOLE
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,388,179,995	KEC. GUNUNG PUYUH
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	97	1,165,047,653	KEC. CITAMIANG
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	88,25	1,534,900,845	KEC. WARUDOYONG
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,118,313,733	KEC. BAROS
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,393,088,408	KEC. LEMBURSITU
									Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	80	1,128,114,811	KEC. CIBEUREUM
								Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	93	53,239,700	DISKOMINFO

No	Prioritas Pembangunan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Pagu Anggaran	Instansi/Perangkat Daerah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan adminisrai kependudukan	Persen	100	28,737,500	DISDUKCAPIL
		Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Penguatan ekosistem inovasi	Meningkatkan fasilitasi dan pendampingan litbang serta inovasi	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	770,564,975	BAPPEDA
							Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam inovasi						
							Meningkatkan jejaring litbang dan inovasi						
						Meningkatkan pendayagunaan dan pengembangan IPTEK	Implementasi pemanfaatan inovasi						
Jumlah												82,463,640,596	

Sumber: Analiss Bappeda Kota Sukabumi Tahun 2023

4.2.6 Sinkronisasi dan Keterkaitan Antara Prioritas Pembangunan Kota Sukabumi dengan Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2024

Untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah serta antar pusat dan daerah, maka isu-isu strategis yang ditetapkan oleh Pusat, Propinsi, dan Kota Sukabumi harus saling berkaitan dan saling mengisi satu dengan lainnya. Oleh karenanya, berikut ini digambarkan keterkaitan antara isu strategis Pemerintah Pusat, Propinsi Jawa Barat, dan isu strategis Kota Sukabumi sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.16
Sinergitas Isu Strategis Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kota Sukabumi Tahun 2024

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Regional/Provinsi	Isu Strategis Aktual Kota Sukabumi
Pemulihan ekonomi pasca Covid-19	Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan	Ekonomi bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
Ketahanan pangan dan energi		
Percepatan pembangunan infrastruktur	Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang Berkelanjutan	Dampak PSN dan megaproyek lainnya
Pengurangan risiko bencana		Permukiman kumuh, lingkungan hidup dan kebencanaan
Peningkatan kualitas SDM	Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Kualitas SDM
Kemiskinan ekstrem		
Penanganan stunting		
Reformasi Birokrasi	Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah	Inovasi di pemerintahan
Pemilu dan pilkada serentak 2024		Pemilu dan pilkada serentak 2024

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Selain isu strategis, maka prioritas pembangunan juga harus senantiasa sinergis dan selaras untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan yang dilakukan Kota Sukabumi selaras dengan prioritas Provinsi Jawa Barat dan Nasional sehingga terjadi kolaborasi pembangunan di setiap wilayah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Tabel 4.17
Keselarasan Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2024

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
1	Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Inovasi, Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan, serta Pengembangan Pariwisata
2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan		
3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	Peningkatan Kondusifitas Kota	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan serta Pendidikan Agama Penguatan Sistem Kesehatan Daerah
4	Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar		Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
5	Mengembangkan Lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim		Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa
6	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah

NO	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PRIORITAS PEMBANGUNAN JAWA BARAT
7	Memperkuat Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	Budaya Kreatif & Inovatif	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Keterkaitan sasaran pembangunan Kota Sukabumi dengan sasaran RKPD Provinsi Jawa Barat serta sasaran pembangunan nasional Tahun 2024 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.18
Persandingan Keselarasan Sasaran Prioritas Nasional RKP Tahun 2024 dengan Sasaran Prioritas RKPD Provinsi Jawa Barat dan Kota Sukabumi Tahun 2024

Sasaran RKP Tahun 2024	Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2024	Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024
S1 Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	S2.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	S1 Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	S2.2 Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan ketahanan pangan daerah	S2 Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
	S2.3 Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	
S2 Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian	S2.1 Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	S1 Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
	S2.4 Meningkatnya nilai investasi dan kualitas usaha serta meningkatnya daya saing dan penempatan tenaga kerja	

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024	
		S3.1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah dan pelayanan infrastruktur guna mendukung perekonomian dan meminimalkan kantong kemiskinan	S2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
S3	Terjaganya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kawasan Barat Indonesia (KBI)	S2.1	Meningkatnya pertumbuhan sektor perindustrian dan perdagangan	S1	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
		S2.2	Meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan dan ketahanan pangan daerah		
		S2.3	Meningkatnya kinerja pariwisata berkelas dunia dan ekonomi kreatif	S2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
S4	Terkendalnya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	S1.5	Terkendalnya pertumbuhan dan distribusi penduduk	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
S5	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	S1.3	Meningkatnya standar hiduplayak masyarakat	S7	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
				S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
S6	Terpenuhinya layanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan	S1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		S1.2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	S4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024	
S7	Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda	S1.4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
		S1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	S4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
S8	Meningkatnya aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	S1.3	Meningkatnya standar hidup layak masyarakat	S7	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
				S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
S9	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	S1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	S5	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja
S10	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	S4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	S7	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
				S4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
S11	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	S1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	S4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
		S4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan		
S12	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dan daya rekat sosial	S4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	S7	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024	
S13	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	S4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	S7	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
S14	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkuat karakter bangsa	S1.4	Meningkatnya kualitas dan perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan pemuda	S3	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
				S7	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
S15	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif, dan kreatif	S1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan menengah dan khusus, serta pendidikan informal dan inklusi	S9	Meningkatnya inovasi daerah
		S4.3	Meningkatnya penerapan inovasi daerah dalam pembangunan	S4	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat
S16	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	S3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	S6	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
		S3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup		
S17	Meningkatnya konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan akses menuju pelayanan dasar	S3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	S1	Tercipta ekonomi Kota Sukabumi yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa
				S2	Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif
S18	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	S3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	S6	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
S19	Meningkatnya layanan energi dan ketenagalistrikan	S3.1	Meningkatnya konektivitas antarwilayah dan pelayanan infrastruktur	S6	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas



Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024	
		S3.3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah		
S20	Meningkatnya layanan infrastruktur TIK	S4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	S8	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
S21	Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup	S3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S6	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
		S3.3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah		
S22	Berkurangnya kerugian akibat dampak bencana dan bahaya iklim	S3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	S7	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
		S3.3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah		
S23	Meningkatnya capaian penurunan emisi dan intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terhadap baseline	S3.3	Meningkatnya pembangunan rendah karbon dan ketahanan daerah	S6	Terciptanya infrastruktur dan lingkungan hidup yang berkualitas
S24	Terwujudnya demokrasi yang terkonsolidasi, terpeliharanya kebebasan, menguatnya kapasitas lembaga-lembaga demokrasi, dan terjaganya kesetaraan warga negara secara optimal	S4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	S8	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
				S7	Terciptanya rasa aman dan kesiapsiagaan bencana
S25	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	S4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	S8	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis

Sasaran RKP Tahun 2024		Sasaran RKPD Provinsi Tahun 2024		Sasaran RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024	
S26	Optimalnya kebijakan luar negeri	S4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	S8	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
S27	Meningkatnya penegakan hukum nasional yang mantap	S4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	S8	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
S28	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	S4.2	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah	S8	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis
S29	Terjaganya keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia	S4.1	Meningkatnya kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi	S8	Terwujudnya reformasi birokrasi dalam mendukung pemerintahan yang dinamis

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Apabila dilihat dari keterkaitan indikator sasaran prioritas nasional, indikator prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan indikator prioritas pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 dapat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.19
Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Kota Sukabumi, Indikator Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat dengan dengan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2024

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024
Porsi EBT dalam bauran energi nasional (%)	Tingkat Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) (nilai)	Skor Pola Pangan Harapan (SPPH) (Poin)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024
Pengelolaan dan Pemanfaatan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) secara berkelanjutan (WPP)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Rasio kewirausahaan nasional (%)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Pertumbuhan PDB pertanian (%)f	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Pertumbuhan PDB perikanan (%)	Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1) (%)	Laju pertumbuhan sektor industri (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1a) (%)	Laju pertumbuhan sektor industri (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Nilai devisa pariwisata (8.9.1©)a) (miliar US\$)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	Indeks Kota Kreatif
Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1a) (%)	Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB (%)	Indeks Kota Kreatif
Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	1. Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
	2. Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	Laju pertumbuhan sektor perdagangan (%)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Laju pertumbuhan	1. Kontribusi Pariwisata terhadap	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024
PDRB KBI (%/tahun)	PDRB (%)	terhadap PDRB
	2. Laju pertumbuhan Sektor Industri (%)	
	3. Laju pertumbuhan Sektor Perdagangan (%)	
	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB (triliun rupiah)	
IPM KBI (nilai min-maks)	1. Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi Indeks Pendidikan
	2. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	
	3. Rata-rata lama sekolah (Tahun)	
	4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan (Rp.000)	
Persentase penduduk miskin KBI (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi Indeks Rasa Aman
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) (per wanita usia subur usia 15–49 tahun)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
Persentase cakupan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi Indeks Pendidikan
Proporsi penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
Angka Kematian Ibu (AKI) (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi Stunting (%)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
Persentase merokok penduduk usia 10– 18 tahun (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
Nilai rata-rata hasil PISA: Matematika (nilai) Membaca (nilai) Sains (nilai)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Indeks Pendidikan
Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Indeks Pendidikan
Harapan lama sekolah (tahun)	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Indeks Pendidikan
Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	Indeks Pendidikan Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Poin)	Indeks Pendidikan Indeks Keluarga Sehat Sukabumi
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) (Poin)	Indeks Pendidikan
Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki	Persentase Penduduk Miskin (%)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi Indeks Rasa Aman



Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024
aset produktif (%)		
Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	Indeks Pendidikan
Jumlah PT yang masuk ke dalam world class university (PT)	Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	Indeks Pendidikan
Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	Rata-Rata lama sekolah (Tahun)	Indeks Pendidikan
Peringkat Global Innovation Index	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Capaian Revolusi Mental (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Pembangunan Kebudayaan (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Pembangunan Masyarakat (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Kerukunan Umat Beragama (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
Nilai Budaya Literasi (nilai)	Indeks Inovasi Daerah (Poin)	Indeks Inovasi Daerah
Rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	Persentase Rumah Tangga Hunian Layak (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per 10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	Tingkat Konektivitas (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Persentase luas daerah irigasi yang dimodernisasi (kumulatif, %)	Nilai Tukar Petani (Poin)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	Indeks Penggunaan Air	Indeks Kepuasan

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024
(kumulatif, %)	(Poin)	Layanan Infrastruktur
Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (jam/ 100 km)	Tingkat Konektivitas (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Persentase rute pelayaran yang saling terhubung (loop) (%)	Tingkat Konektivitas (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	Tingkat Konektivitas (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Persentase capaian On Time Performance (OTP) transportasi udara (%)	Tingkat Konektivitas (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	Tingkat Konektivitas (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Persentase rumah tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau di perkotaan (%)	Persentase rumah tangga hunian layak (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Rasio elektrifikasi (%)	Persentase penduduk miskin (%)	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi Indeks Rasa Aman
Rata-rata pemenuhan kebutuhan (Konsumsi) listrik (kWh/Kapita)	Pengeluaran per kapita (Rp. 000)	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB
Penurunan emisi GRK sektor energi (juta ton)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) (nilai)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Poin)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan iklim terhadap total	Indeks Risiko bencana (Poin)	Indeks Rasa Aman

Indikator Sasaran Prioritas Nasional Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Daerah Tahun 2024	Indikator Sasaran Prioritas Kota Sukabumi Tahun 2024
PDB (%)		
Persentase penurunan emisi GRK (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Persentase penurunan intensitas emisi GRK (%)	Tingkat Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (%)	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur
Indeks Demokrasi Indonesia (nilai)	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi
Tingkat Kepercayaan Masyarakat terhadap Konten dan Akses Informasi Publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Pengaruh dan Peran Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Pembangunan Hukum (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Reformasi Birokrasi
Indeks Pelayanan Publik Nasional (nilai)	Indeks Reformasi Birokrasi (Kategori)	Indeks Reformasi Birokrasi
Persentase Luas Wilayah NKRI yang Dapat Dijaga Keutuhannya (%)	Indeks Demokrasi Indonesia (Poin)	Indeks Reformasi Birokrasi

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

RPJMN Tahun 2020-2024 telah ditetapkan 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat *mainstreaming* ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian

target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Untuk mendukung tercapainya tujuan pelaksanaan pengarusutamaan di atas, Pemerintah Kota Sukabumi telah mensinkronkan program-program pembangunan daerah Tahun 2023 untuk pencapaian target tersebut. Berikut program-program pembangunan tersebut.

Tabel 4.20
Perbandingan Program Pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024
dengan Arah Kebijakan Pengarusutamaan (Mainstreaming)
Pembangunan Nasional Tahun 2024

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 1 TANPA KEMISKINAN	
<ul style="list-style-type: none">• Target 1.2 Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.• Target 1.3 Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.• Target 1.4. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru, dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial3. Program Pemberdayaan Sosial4. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)5. Program Pengendalian Penduduk6. Program Pengelolaan Pendidikan7. Program Pengelolaan Pendidikan8. Program Pencatatan Sipil

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 2 TANPA KELAPARAN	
<ul style="list-style-type: none">• Target 2.1. Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.• Target 2.2 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.• Target 2.3 Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat2. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera	
<ul style="list-style-type: none">• Target 3.1 Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.• Target 3.3. pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.• Target 3.4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.• Target 3.5. Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkoba dan penggunaan alkohol yang membahayakan.• Target 3.7. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Rehabilitasi Sosial2. Program Rehabilitasi Sosial3. Program Pemberdayaan Sosial4. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)5. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)7. Program Pencatatan Sipil

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none">• Target 3.8. Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat-obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.• Target 3.a.1* Memperkuat pelaksanaan the Framework Convention on Tobacco Control WHO di seluruh negara sebagai langkah yang tepat.• Target 3.b.1(a) Mendukung penelitian dan pengembangan vaksin dan obat penyakit menular dan tidak menular yang terutama berpengaruh terhadap negara berkembang, menyediakan akses terhadap obat dan vaksin dasar yang terjangkau, sesuai the Doha Declaration tentang the TRIPS Agreement and Public Health, yang menegaskan hak negara berkembang untuk menggunakan secara penuh ketentuan dalam Kesepakatan atas Aspek-Aspek Perdagangan dari Hak Kekayaan Intelektual terkait keleluasaan untuk melindungi kesehatan masyarakat, dan khususnya, menyediakan akses obat bagi semua.• Target 3.c.1* Meningkatkan secara signifikan pembiayaan kesehatan dan rekrutmen, pengembangan, pelatihan, dan retensi tenaga kesehatan di negara berkembang, khususnya negara kurang berkembang, dan negara berkembang pulau kecil.	
Tujuan 4 PENDIDIKAN BERKUALITAS	
<ul style="list-style-type: none">• Target 4.1. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.• Target 4.2. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Pendidikan2. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none">• Target 4.3. Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.• Target 4.4. Pada tahun 2030, meningkatkan secara signifikan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknik dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan Global• Target 4.6. Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	
Tujuan 5 KESETARAAN GENDER	
<ul style="list-style-type: none">• Target 5.1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun.• Target 5.2 Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.• Target 5.3 Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.• Target 5.5 Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.• Target 5.6 Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil revidi dari konferensi-konferensi tersebut.• Target 5.b. Meningkatkan penggunaan teknologi yang memungkinkan, khususnya teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan.	<ol style="list-style-type: none">1. Program Peningkatan Kualitas Keluarga2. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
Tujuan 6 AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK	
<ul style="list-style-type: none">• Target 6.1. Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua• Target 6.2 Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.• Target 6.3 Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.• Target 6.4 Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.• Target 6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)
Tujuan 7 Energi Bersih dan Terjangkau	
<ul style="list-style-type: none">• Target 7.1. Pada tahun 2030, menjamin akses universal layanan energi yang terjangkau, andal dan modern.	
Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	
<ul style="list-style-type: none">• Target 8.1. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7 persen pertumbuhan produk domestik bruto per tahun di negara kurang berkembang.• Target 8.2. Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<p>teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.</p> <ul style="list-style-type: none">• Target 8.3. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.• Target 8.5. Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.• Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.• Target 8.10. Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	
Tujuan 9 Industri, Inovasi, dan Infrastruktur	
<ul style="list-style-type: none">• Target 9.2. Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.• Target 9.4 Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan semua negara sesuai kemampuan masing-masing.• Target 9.c. Secara signifikan meningkatkan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, dan mengusahakan penyediaan akses universal dan terjangkau Internet di	

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
negara-negara kurang berkembang pada tahun 2020.	
Tujuan 10 Berkurangnya Kesenjangan	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 10.1 Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. • Target 10.2 Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya. • Target 10.3. Menjamin kesempatan yang sama dan mengurangi kesenjangan hasil, termasuk dengan menghapus hukum, kebijakan dan praktik yang diskriminatif, dan mempromosikan legislasi, kebijakan dan tindakan yang tepat terkait legislasi dan kebijakan tersebut. 	
Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar , serta menata kawasan kumuh. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj) 2. Program Penanggulangan Bencana
Tujuan 12 Kosumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 12.4 ada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. • Target 12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3) 2. Program Pengelolaan Persampahan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<ul style="list-style-type: none">• Target 12.6 Mendorong perusahaan, terutama perusahaan besar dan transnasional, untuk mengadopsi praktek-praktek berkelanjutan dan mengintegrasikan informasi keberlanjutan dalam siklus pelaporan mereka.• Target 12.8. Pada tahun 2030, menjamin bahwa masyarakat di mana pun memiliki informasi yang relevan dan kesadaran terhadap pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup yang selaras dengan alam.	
Tujuan 14 Ekosistem Lautan	
<ul style="list-style-type: none">• Target 14.5 Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya 10 persen dari wilayah pesisir dan laut, konsisten dengan hukum nasional dan internasional dan berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.• Target 14.6 Pada thn 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan & tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang & negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	
Tujuan 16 PERDAMAIAN KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH	
<ul style="list-style-type: none">• Target 16.1. Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan terkait angka kematian dimanapun.• Target 16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.• Target 16.3 Menggalakkan negara berdasarkan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.• Target 16.5 Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.• Target 16.6 Mengembangkan lembaga yang	<ol style="list-style-type: none">1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah2. Program Perekonomian Dan Pembangunan3. Program Kepegawaian Daerah4. Program Pencatatan Sipil



Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<p>efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Target 16.7 Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan. • Target 16.9 Pada tahun 2030, memberikan identitas yang syah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran. • Target 16.10 Menjamin akses publik terhadap informasi dan melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional dan kesepakatan internasional. 	
Tujuan 17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan	
<ul style="list-style-type: none"> • Target 17.1 Memperkuat mobilisasi sumber daya domestik, termasuk melalui dukungan internasional kepada negara berkembang, untuk meningkatkan kapasitas lokal bagi pengumpulan pajak dan pendapatan lainnya. • Target 17.6 Meningkatkan kerjasama Utara-Selatan, Selatan-Selatan dan kerjasama triangular secara regional dan internasional terkait dan akses terhadap sains, teknologi dan inovasi, dan meningkatkan berbagi pengetahuan berdasar kesepakatan timbal balik, termasuk melalui koordinasi yang lebih baik antara mekanisme yang telah ada, khususnya di tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan melalui mekanisme fasilitasi teknologi global. • Target 17.8 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. • Target 17.17 Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama. • Target 17.18 Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Target Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)	Program Perangkat Daerah
<p>negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.</p> <ul style="list-style-type: none">• Target 17.19 Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

Prioritas Nasional (PN) pada Tahun 2023 ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024. Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut, maka telah dilakukan pemetaan pencapaian prioritas nasional berdasarkan program perencanaan pembangunan yang bisa mendukung pencapaiannya. Lebih jelas pemetaan tersebut sebagaimana yang tercantum pada tabel 4.26 dibawah ini:

Tabel 4.21
Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional (PN) Tahun 2024

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PN.01 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan										
1	Pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	1. Akselerasi pengembangan pembangkit energi terbarukan		Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa						
		2. Peningkatan pasokan bahan bakar nabati								
		3. Peningkatan pelaksanaan konservasi dan efisiensi energi								
		4. Peningkatan pemenuhan energi								

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		domestik								
		5. Pengembangan industri pendukung EBT			Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase Pameran yang Dilaksanakan dan Informasi Industry secara Lengkap dan Terkini	Persen	100	34,559,670	DISKUMI NDAG
2	Peningkatan kuantitas/ke tahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	1. Penyediaan air untuk pertanian	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan pokok	Persen	100	209,304,238	DKP3
		2. Penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Pemeliharaan, pemulihan dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau								
		4. Pengembangan waduk multiguna								
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	1. Peningkatan kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan pokok	Persen	100	209,304,238	DKP3
		2. Peningkatan ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan	Persentase Ketersediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan	Persen	25	35,411,013	DKP3

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		secara berkelanjutan			Kemandirian Pangan					
		3. Peningkatan produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar								
		4. Peningkatan keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian dan digitalisasi pertanian			Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luas Lahan Pertanian yang Mengikuti AUTP	Persen	30	8,198,263	DKP3
		5. Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional								

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	1. Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan	Peningkatan Kondusifitas Kota	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Pangan pokok	Persen	100	209,304,238	DKP3
		2. Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produktivitas Budidaya Perikanan	Ton/ha	25,87	376,556,868	DKP3
		3. Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan			Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase Ketersediaan Ikan	Persen	110	66,903,465	DKP3

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil menengah (UMKM), dan koperasi	1. Peningkatan kemitraan usaha antara usaha mikro kecil dan usaha menengah besar	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	0,01	1,454,445,611	DISKUMI NDAG
		2. Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha								
		3. Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Persen	19,83	77,330,000	DISKUMI NDAG
		4. Peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha			Program Pengembangan UMKM	Persentase Meningkatnya Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	Persen	0,47	441,275,000	DISKUMI NDAG
		5. Peningkatan nilai tambah usaha								

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		sosial								
6	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sector riil, dan industrialisasi	1. Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	60	1,410,000,688	DISKUMI NDAG
		2. Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	21,80	376,556,868	DISPORA PAR

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Nilai tambah ekonomi kreatif	Persen	16	376,556,868	DISPORAPAR
		4. Perbaiki iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan			Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	Persen	80	84,733,635	DPMPTSP
		5. Pengembangan industri halal								
7	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan	1. Peningkatan diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai	Persen	80	84,733,635	DPMPTSP

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	penguatan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN)					Ketentuan				
		2. Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor								
		3. Pengelolaan impor	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
		4. Peningkatan kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif			Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Dilaksanakan	Persen	100	47500000	DISKUMI NDAG

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Peningkatan partisipasi dalam jaringan produksi global	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
		6. Peningkatan citra dan diversifikasi pemasaran destinasi pariwisata prioritas dan desinasi branding, dan produk kreatif	Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Pariwisata		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	60	1410000688	DISKUMI NDAG
8	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	1. Peningkatan pendalaman sektor keuangan		Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa						

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi							
		3. Peningkatan sistem logistik dan stabilitas harga			Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	60	1,410,000,688	DISKUMI NDAG
		4. Peningkatan penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata								
PN.02 Membangun Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan										
1	Pembangunan Wilayah Sumatera	1. Pengembangan Kawasan strategis	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata							

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan							
2	Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	2. Pengembangan sektor unggulan	Pemulihan dan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Inovasi	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan	Persen	60	1,410,000,688	DISKUMI NDAG
3	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	3. Pengembangan Kawasan perkotaan (khusus penilaian provinsi)	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Pembangunan Wilayah Kalimantan	4. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan, dan transmigrasi (khusus penilaian provinsi dan kabupaten)	Gerakan membangun desa							
			Pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup							
5	Pembangunan Wilayah Sulawesi	5. Kelembagaan dan keuangan daerah	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah							
6	Pembangunan Wilayah Maluku									

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pengembangan Wilayah Papua									
PN.03 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing										
1	Perlindungan sosial dan tata kelola kependudukan	1. Percepatan cakupan administrasi kependudukan		Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Cakupan pelayanan adminisrai kependudukan	Persen	100	28,737,500	DISDUKC APIL
		2. Integrasi sistem administrasi kependudukan			Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Dokumen Pendaftaran Penduduk	persen	92	385,265,993	DISDUKC APIL
		3. Pendampingan layanan terpadu	Pemulihan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi		Program Pencatatan Sipil	Cakupan Dokumen Pencatatan Sipil	Persen	100	42,266,070	DISDUKC APIL
		4. Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian			Program Pengendalian Penduduk	Persentase Rumah Data Kependudukan di Kampung KB	persen	12.5	123,739,400	DALDUK KBP2A

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		penduduk								
2	Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial	1. Sistem jaminan sosial nasional	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase kepesertaan JKN	persen	98,5	38,898,044,628	DINKES
		2. Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran			Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar yang sesuai standar	Persen	100	1,331,261,553	DINSOS
		3. Perlindungan sosial adaptif			Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial yang bermutu	Persen	100	47,500,000	DINSOS

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Kesejahteraan sosial			Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS).	Persen	50	1,753,298,340	DINSOS
3	Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan	1. Peningkatan kesehatan ibu, anak, Keluarga Berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Reformasi Sistem Kesehatan Daerah	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase keluarga yang mengikuti program KB	persen	65	128,446,056	DALDUK KBP2A
		2. Percepatan perbaikan gizi masyarakat			Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan	Indeks Pencapaian SPM (IP SPM) Kesehatan	persen	92	38,898,044,628	DINKES

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					dan Upaya Kesehatan Masyarakat					
		3. Peningkatan pengendalian penyakit				Prevalensi stunting pada balita	persen	6		DINKES
		4. Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase pemberdayaan masyarakat kesehatan	persen	100	2,584,968,596	DINKES
		5. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan			Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Persentase pembinaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan dan minuman	persen	100	200,000,000	DINKES
4	Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas	1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengeloan Pendidikan	Indeks Pencapaian SPM Pendidikan	persen	100	12,514,554,013	DISDIKBUD

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Pemerataan akses dan wajib belajar 12 tahun								
		3. Peningkatan pengelolaan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan			Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Indeks Pemerataan guru	angka	0.2	56,895,310	DISDIKB UD
		4. Penjaminan mutu pendidikan			Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	40	47,500,000	DISDIKB UD
		5. Peningkatan tata kelola pendidikan								
5	Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak		Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD Kota	persen	79	160,806,215	DALDUK KBP2A

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan			Program Perlindungan Perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	persen	0.008	95,308,845	DALDUK KBP2A
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Kualitas Keluarga	persen	72.5	338,802,167	DALDUK KBP2A
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Terpilah Gender dan Anak	Dokumen	2	23,750,000	DALDUK KBP2A
					Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	persen	0.034	61,568,740	DALDUK KBP2A

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Kualitas pemuda			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Diberdayakan	Persen	80	860,913,750	DISPORAPAR
6	Pengentasan kemiskinan	1. Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Reformasi Sistem Perlindungan Sosial	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha Mikro yang Naik Kelas	Persen	0,01	1,454,445,611	DISKUMI NDAG
		2. Keperantaraan usaha dan dampak sosial								
		3. Reformasi agraria	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Perhutanan sosial	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
7	Peningkatan produktivitas dan daya saing	1. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri	Reformasi sistem Pendidikan dan pemajuan kebudayaan	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja yang ditingkatkan kompetensinya	Persen	81	408,215,000	DISNAKER
		2. Prestasi olahraga			Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Jumlah Raihan Medali pada Event Olah Raga Tingkat Provinsi dan Nasional	Medali	18	2,730,120,825	DISPORA PAR
PN.04 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan										

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memperkuat ketahanan budaya bangsa dan membentuk mentalitas bangsa yang maju, modern, dan berkarakter	1. Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti		Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Satuan Pendidikan Yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	persen	40	47,500,000	DISDIKBUD
		2. Revolusi mental dalam tata kelola		Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan	Persen	80	34,045,181,650	SETDA

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Menenuhi Aspek Penilaian				
		3. Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter								
		4. Pembangunan dan pembudayaan sistem ekonomi kerakyatan berlandaskan Pancasila								

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme			Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pemahaman Wawasan Kebangsaan, Bela Negara dan Karakter Kebangsaan	persen	100	595,846,064	KESBAN GPOL

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Meningkatkan pemajuan dan pelestarian kebudayaan untuk memperkuat karakter dan mempertahankan jati diri bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia	1. Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi masyarakat terhadap tinjauan Sejarah Lokal	persen	60	54,671,978	DISDIKBUD

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat			Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi dan dikembangkan	jumlah	13	14,755,210	DISDIKBUD
		3. Perlindungan hak kebudayaan dan ekspresi budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif								
		4. Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan								

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter	1. Peningkatan budaya literasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	70.5	358,630,700	DISPUSIP
		2. Pengembangan, pembinaan, dan perlindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah serta sastra			Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	Prosentase koleksi budaya etnis dan naskah kuno yang dimiliki	Persen	1.2	38,000,000	DISPUSIP
		3. Pengembangan budaya iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah		Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase PD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	Persen	100	770,564,975	BAPPEDA

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Reformasi Sistem Pendidikan dan Pemajuan Kebudayaan		Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	70.5	358,630,700	DISPUSIP
PN.05 Memperkuat Infrastruktur untuk mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar										
1	Infrastruktur pelayanan dasar	1. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Kawasan Permukiman	Luasan Pengurangan Kawasan Kumuh	Ha	10	3,076,684,393	DPUTR
		2. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir WS Kewenangan	Persen	57.37	1,364,082,204	DPUTR

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Kota				
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Minum yang Layak dan Aman	Persen	100	409,437,310	DPUTR
		3. Pengelolaan air tanah dan air baku berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	57.95	1,265,549,905	DPUTR
		4. Keselamatan dan keamanan transportasi	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	83,54	2,497,323,140	DISHUB

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persen	85.15	10,467,790,128	DPUTR
		5. Ketahanan kebencanaan infrastruktur	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase RTHKP dalam Kondisi Baik	Persen	78.95	2,184,783,400	DPUTR
		6. Waduk multipurpose dan modernisasi irigasi	Penguatan Sistem Ketahanan Pangan Berkelanjutan		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rasio Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir dan Longsor yang Terlindungi Infrastruktur Pengendali Banjir WS Kewenangan Kota	Persen	57.37	1,364,082,204	DPUTR

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Infrastruktur ekonomi	1. Konektivitas jalan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan Kota	Persen	85.15	10,467,790,128	DPUTR
		2. Konektivitas darat	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	83,54	2,497,323,140	DISHUB
3	Infrastruktur perkotaan (khusus penilaian provinsi dan kota)	1. Transportasi perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase ruas jalan yang memenuhi standar PJU	Persen	83,54	2,497,323,140	DISHUB

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Infrastruktur dan ekosistem TIK perkotaan	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan		Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase RTHKP dalam Kondisi Baik	Persen	78.95	2,184,783,400	DPUTR
		3. Penyediaan akses air minum dan sanitasi layak dan aman di perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Minum yang Layak dan Aman	Persen	100	409,437,310	DPUTR
		4. Penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau di perkotaan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Kawasan Permukiman	Luasan Pengurangan Kawasan Kumuh	Ha	10	3,076,684,393	DPUTR

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Transformasi digital	1. Penuntasan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	93	53,239,700	DISKOMINFO
		2. Pemanfaatan infrastruktur TIK	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan							
		2. Fasilitas pendukung transformasi digital	Reformasi Sistem Pendidikan Dan Pemajuan Kebudayaan		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Indeks KIP	Persen	90	367,593,250	DISKOMINFO

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PN.06 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim										
1	Peningkatan kualitas lingkungan hidup	1. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	159,207,935	DLH
		2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kenyamanan	Predikat	Nyaman	159,207,935	DLH
		3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Persentase limbah B3	Persen	100	8,307,750	DLH

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					(Limbah B3)					
		4. Penguatan kelembagaan dan penegakan hukum di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan pengaduan lingkungan hidup	Persen	100	78,308,310	DLH
2	Peningkatan ketahanan bencana dan iklim	1. Penanggulangan bencana	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana	Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Penanggulangan Bencana	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal sub urusan bencana bagi daerah rawan dan korban bencana	Poin	0,57	351,312,423	BPBD
		2. Peningkatan ketahanan iklim	Reformasi Sistem Kesiapsiagaan Penanggulangan Risiko Bencana							

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Pembangunan rendah karbon	1. Pembangunan energi berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kondusifitas Kota						
		2. Pemulihan lahan berkelanjutan	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Penatagunaan Tanah	Persentase Penatagunaan Tanah yang Sesuai dengan Perencanaan Tata Ruang	Persen	70	19,000,000	DPUTR
		3. Pengelolaan limbah	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Jumlah RT yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Persen	57.95	1,265,549,905	DPUTR

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Pengembangan industri hijau	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup							
PN.07 Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik										
1	Konsolidasi Demokrasi	1. Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi		Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Diantisipasi	persen	100	32,571,252,805	KESBAN GPOL
		2. Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan			Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan	Persentase Pendidikan Politik di masyarakat	persen	100	778,148,837	KESBAN GPOL

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik					
		3. Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik								
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	1. Penguatan Integrasi NKRI dan Perlindungan WNI di luar Negeri		Peningkatan Kondusifitas Kota						
		2. Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional			Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Peningkatan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	90	14,311,122,231	SETDA
		3. Peningkatan Peran Indonesia di Tingkat Regional dan Global								

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Penegakan Hukum Nasional	1. Penataan Regulasi		Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Koordinasi dan Fasilitasi Produk Hukum Daerah	Persen	100	14,311,122,231	SETDA
		2. Perbaiki Sistem Hukum dan Perdata			Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase propemperda yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah	Persen	100	15,284,347,850	SETWAN
		3. Penguatan Sistem Anti Korupsi			Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI yang Ditindaklanjuti	Persen	76	629,008,625	INSPEKTORAT
						Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP yang Ditindaklanjuti	Persen	80		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Peningkatan Akses Terhadap Keadilan								
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	1. Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Inovasi Pelayanan Publik Dan Penataan Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif	Program Kepegawaian Daerah	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja	Point	61	507,720,043	BKPSDM
						Nilai Kriteria Pengembangan Karir	Point	63		
		2. Transformasi Pelayanan			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Pelayanan Publik	Persen	3,40	34,045,181,650	SETDA
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Cakupan Pelayanan Publik di Kecamatan	Persen	100	1,771,351,475	KECAMATAN

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					dan Pelayanan Publik					
		3. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Perangkat Daerah yang Mengikuti Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Menenuhi Aspek Penilaian	Persen	80	34,045,181,650	SETDA
		4. Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pembangunan			Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Sesuai Standar	Persen	100	1,742,378,708	BAPPEDA
						Persentase Pencapaian IKU	Persen	100		

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dan Tingkat Kota	Persen	100	1,835,757,390	BAPPEDA
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	1. Penguatan Keamanan Dalam Negeri		Peningkatan Kondusifitas Kota	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Konflik Sosial Yang Diantisipasi	persen	100	32,571,252,805	KESBAN GPOL
		2. Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi <i>Confidence Building Measures (CBM)</i>								
		3. Penguatan Keamanan Laut								

NO	PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS PEMBANGUNAN PROVINSI	PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA SUKABUMI	PROGRAM PRIORITAS DAERAH	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	TARGET 2024	PAGU ANGGARAN	PD PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4. Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat			Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase pemenuhan standar pelayanan minimal trantibmas	Persen	100	1,281,001,375	SATPOLPP
		5. Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber			Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika yang Digunakan dalam Pemerintahan	Persen	93	53,239,700	DISKOMINFO
JUMLAH									381,153,779,657	

Sumber: Hasil Analisa Bappeda, 2023

4.2.7 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Kebijakan pembangunan kewilayahan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sukabumi Tahun 2022-2042 yang dijabarkan melalui kebijakan pengembangan wilayah, serta kebijakan struktur dan pola ruang. Pada dasarnya tujuan penataan ruang wilayah kota merupakan arahan perwujudan ruang wilayah kota yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota adalah mewujudkan penataan ruang Daerah yang produktif, aman, nyaman, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pada bidang Pendidikan, Kesehatan, pariwisata, perdagangan dan jasa.

4.2.7.1 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kota

Kebijakan penetapan struktur ruang wilayah Daerah meliputi:

1. perwujudan pusat kegiatan yang memperkuat kegiatan pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kegiatan lainnya secara optimal;
2. peningkatan aksesibilitas dan transportasi; dan
3. peningkatan kualitas

Pusat-pusat Pelayanan yang direncanakan di Daerah meliputi:

1. Pusat Pelayanan Kota (PPK), Pusat pelayanan Daerah ditetapkan di 2 lokasi yaitu pusat kota di Kecamatan Cikole dan Kecamatan Cibereum. Pusat pelayanan kota berfungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan pusat pemerintahan. Pusat pelayanan kota yang direncanakan sampai dengan tahun 2042 adalah Pusat Pelayanan Pusat Kota Cikole dan Cibereum. Pusat Pelayanan Pusat Kota melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Utara, sedangkan Pusat pelayanan Babakan melayani Sub Wilayah Kota (SWK) Selatan;
2. Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK), Sub pusat pelayanan kota terdiri 5 (lima) sub pusat pelayanan kota yang dikembangkan yaitu:

- a. SPPK di Kelurahan Gunungpuyuh, Kecamatan Gunungpuyuh;
 - b. SPPK di Kelurahan Citamiang, Kecamatan Citamiang;
 - c. SPPK di Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong;
 - d. SPPK di Kelurahan Sudajaya Hilir, Kecamatan Baros; dan
 - e. SPPK di Kelurahan Lembursitu, Kecamatan Lembursitu.
3. Pusat Lingkungan (PL), merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.

4.2.7.2 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang Wilayah Kota

Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah Daerah meliputi:

1. pelestarian kawasan lindung terutama di daerah sempadan sungai dan Wilayah utara kota;
2. Perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota;
3. pengendalian kegiatan budi daya yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan;
4. pengembangan kawasan permukiman yang berwawasan lingkungan dan mitigasi bencana; dan
5. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

4.2.7.3 Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis Wilayah Kota

Kebijakan pengembangan kawasan strategis meliputi:

1. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;
2. Kawasan strategis sosial budaya; dan
3. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kebijakan ini terdiri atas 3 (tiga) kawasan yaitu:

- 1) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, yang bertujuan untuk:
 - a) mengembangkan Kawasan agrowisata dan Kawasan pariwisata yang terpadu sebagai daya tarik dan obyek wisata;

- b) mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah; dan
 - c) memberikan Insentif dan stimulan pelayanan sarana dan prasarana penunjang kegiatan ekonomi untuk mempercepat perwujudan Kawasan strategis ekonomi.
- 2) Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya, yang bertujuan untuk:
- a) mengembangkan Kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan
 - b) mengembangkan Kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada Masyarakat.
- 3) Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk:
- a) mempertahankan fungsi lindung di Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang yang memiliki fungsi ekologis tinggi; dan
 - b) mengembangkan konsep ekowisata pada Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang.

Secara rinci kebijakan pembangunan kewilayahan di Kota Sukabumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.27
Kebijakan Pembangunan Kewilayahan di Kota Sukabumi
Tahun 2024

No.	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
1.	KSK I Pertumbuhan Ekonomi KSK II Sosial Budaya KSK III Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	KSK I Pertumbuhan Ekonomi : a. Kecamatan Cibereum b. Baros c. Lembursitu d. Warudoyong KSK II Sosial Budaya a. Kecamatan Gunungpuyuh b. Kecamatan Warudoyong c. Kecamatan Citamiang d. Kecamatan Cikole	1. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan pada bidang pendidikan, kesehatan, dan perdagangan berskala regional; 2. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan; 3. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana kota.	1. pengembangan Kawasan Strategis pertumbuhan ekonomi a. menetapkan kawasan pusat kota dan kawasan selatan kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala regional; dan b. menata kawasan dalam rangka mendorong kegiatan ekonomi lokal serta mendorong masuknya investasi. 2. pengembangan Kawasan Strategis sosial budaya	Perwujudan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek pertumbuhan ekonomi a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kecamatan Cibereum (Kelurahan Babakan) dan Jl. Lingkar Perwujudan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek social budaya a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pusat Kota Sukabumi (Kecamatan Cikole) dan Pusat

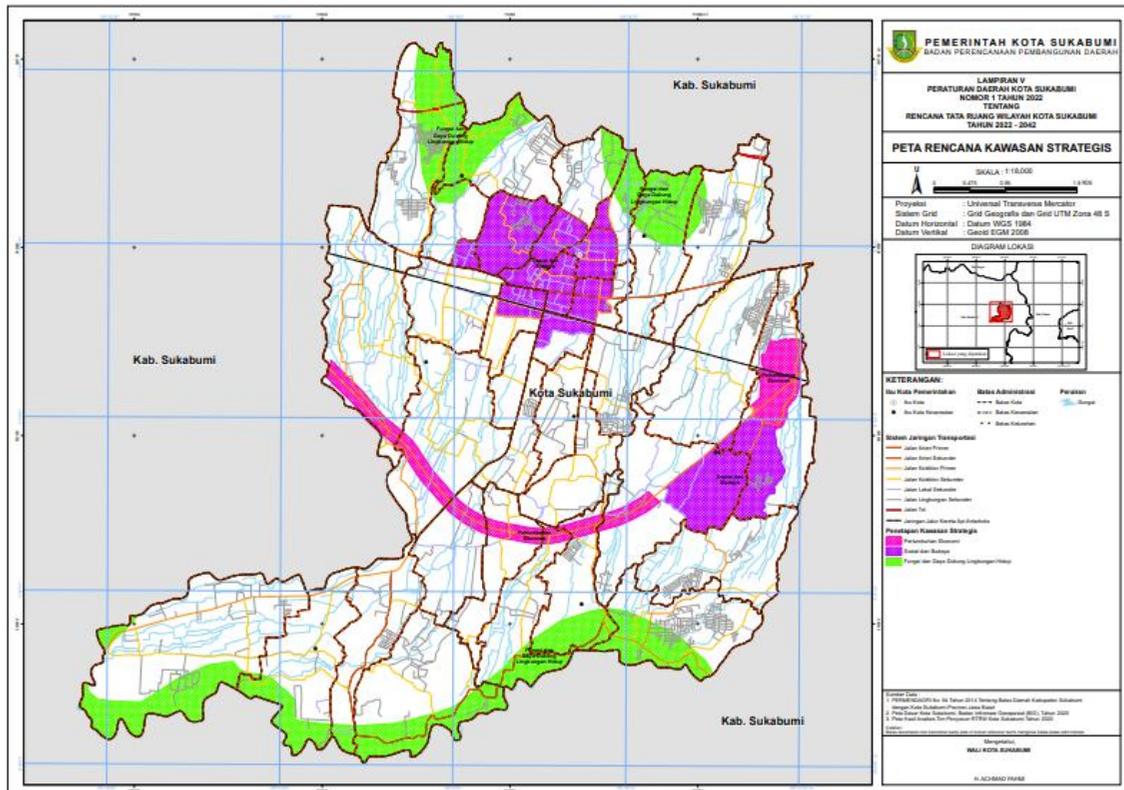
No.	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
		e. Kecamatan Cibeureum KSK III Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup : a. Kecamatan Gunungpuyuh b. Kecamatan Cikole c. Kecamatan Baros d. Kecamatan Lembursitu		a. mengembangkan kawasan pusat pendidikan tinggi skala regional; dan b. mengembangkan kawasan pusat perkantoran pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. 3. pengembangan Kawasan Strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup a. Mempertahankan fungsi lindung di Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang yang memiliki fungsi ekologis tinggi; dan b. Mengembangkan konsep	Pemerintahan baru di Kecamatan cibeureum b. Penataan pedestrian dan jalur hijau, pembangunan fasilitas parkir bersama, dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Pusat Kota Sukabumi (Kecamatan Cikole) dan Pusat Pemerintahan baru di Kecamatan Cibeureum Perwujudan Kawasan yang memiliki nilai strategis dari aspek fungsi dan daya dukung lingkungan hidup a. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Sungai Cipelang (Kecamatan Gunungpuyuh) dan

No.	Kawasan Strategis Kota	Kab/Kota	Kebijakan KSK	Arah Pengembangan Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW	Prioritas Pembangunan/Program Pembangunan RPJMD/Indikasi Program RTRW
				ekowisata pada Kawasan sepanjang Sungai Cimandiri dan hulu Sungai Cipelang	Kawasan Sungai Cimandiri (Kelurahan Cikundul dan Situmekar)

Sumber: Hasil Analisis Bappeda

Berdasarkan rencana pengembangan diatas, maka penetapan kawasan strategis kota tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4.7
Peta Rencana Kawasan Strategis



Sumber : PERDA RTRW Kota Sukabumi

4.2.6. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Selain program prioritas dan program unggulan yang telah disebutkan sebelumnya, maka prioritas pembangunan juga diarahkan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal atau SPM sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dinyatakan bahwa Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah memprioritaskan penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar ke dalam dokumen perencanaan yaitu RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.



Secara definisi pelayanan dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Sedangkan Standar Pelayanan Minimal adapun ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis yang dilakukan pada BAB II, masih ditemukan SPM yang memang masih belum tercapai atau belum optimal dalam implementasinya dilapangan. Hal tersebut disebabkan berbagai hal seperti adanya keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana prasarana pendukung serta tentunya sumber daya manusia yang juga mengalami keterbatasan atau difokuskan pada hal lain yang sangat diperlukan.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam pencapaian target SPM tahun 2024 perlu dilakukan berbagai strategi agar SPM ini bisa terlaksana dengan baik bahkan bisa mencapai target secara keseluruhan. Jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) jenis, sebagaimana disajikan pada Tabel 4.27 berikut.

Tabel 4.28
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024 s.d 2026

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
SPM PENDIDIKAN							
1	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah WNI usia 5-6 Tahun yang ber partisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
2	Pendidikan Dasar	Jumlah WNI usia 7-15 Tahun yang ber partisipasi dalam pendidikan Dasar	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
3	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah WNI usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau pendidikan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	100%	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIKBUD
SPM KESEHATAN							
4	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
5	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Pelayanan kesehatan balita	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
8	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
9	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
10	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
12	Pelayanan kesehatan diabetes melitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%	100%	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
13	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
14	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
15	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100%	100%	100%	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
SPM PEKERJAAN UMUM							
16	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase penduduk berakses air minum	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	DPUTR
17	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%	100%	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah	DPUTR
SPM PERUMAHAN RAKYAT							
18	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten kota/ kabupaten	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
19	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase Jumlah Rumah Layak Huni	100%	100%	100%	Program Pengembangan Perumahan	DPUTR
SPM KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT							
20	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Gangguan Kamtramtibmas yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
21	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakan	100%	100%	100%	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
22	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase layanan informasi rawan bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
23	Peayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana	BPBD
24	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Bencana;	BPBD

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
25	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	100%	Program Penanggulangan Kebakaran	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
SPM SOSIAL							
26	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Persentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
27	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Persentase Anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
28	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
29	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Persentase tuna sosial terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Target Tahun			Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2024	2025	2026		
30	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	100%	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

4.3 Inovasi Daerah

Keberhasilan pembangunan Kota Sukabumi dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi. Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung oleh berbagai inovasi dari segala bidang, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan tahunan daerah, dalam program pembangunan daerah serta proses pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah Kota Sukabumi. Lebih lanjut, Pemerintah Daerah Kota Sukabumi melakukan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana inovasi yang dilakukan merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat mendukung percepatan pembangunan.

Dengan di implementasikannya berbagai inovasi di Kota Sukabumi, maka hal tersebut sangat dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sehingga mendukung pula capaian kinerja yang sudah ditetapkan. Selain itu, berbagai inovasi yang telah dilakukan ternyata juga telah mendapat penilaian dari berbagai pihak baik tingkat nasional maupun tingkat provinsi sehingga terdapat beberapa inovasi yang mendapat penghargaan. Penghargaan tersebut selanjutnya akan mempengaruhi pula pendapatan yang akan diterima Kota Sukabumi dari pemerintah pusat sebagai salah satu bentuk apresiasi kinerja daerah salah satunya melalui anggaran Dana Insentif Daerah (DID) yang diberikan pemerintah pusat setiap tahunnya.

Pada Tahun 2022 dan awal 2023 terdapat beberapa penghargaan bagi Kota Sukabumi baik yang berupa inovasi ataupun bukan termasuk inovasi baik dari tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Penghargaan tersebut diantaranya adalah:

1. Penghargaan Kategori Publik Service Of The Year dari Mark Plus Inc. dalam ajang Markplus Indonesia Festival Jabar Banten the 10th Annual Human 5.0 untuk Dinsos, DKP3, Casip, DPMPSTP;

2. Penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Tahun 2022 dengan predikat Madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Penghargaan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Award Implementasi Manajemen ASN Terbaik Kategori Kota Sedang Tingkat Nasional tahun 2022;
4. Penghargaan sebagai kepala daerah Inovastor pada ajang Sukabumi Award 2022;
5. Penghargaan dari Provinsi Jawa Barat dalam penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota Se-Jawa Barat “Adminduk Juara” dengan predikat terbaik 1 pada kategori penduduk kecil Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022;
6. Penghargaan Green Leadership Nirwasita Tantra 2022 sebagai Wali Kota yang peduli pada pengelolaan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta;
7. Penghargaan dari ICCN atas kontribusinya dan perhaitiannya pada pengembangan ekosistem Industri Kreatif Indonesia;
8. Penghargaan dari ICCN atas kontribusinya dan perhaitiannya pada pengembangan ekosistem Industri Kreatif Indonesia;
9. Best Progressif Tata Kelola Satu Data Indonesia;
10. Penghargaan pada Kegiatan UMKM JUARA AWARD tingkat Jawa Barat;
11. Anggota JDIH Terbaik II Tahun 2022 Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Provinsi Jawa Barat;
12. Penghargaan Innovative Government Award (IGA);
13. Terbaik 1 PPKM Award
14. Kota Toleran peringkat ke-6
15. Terbaik ke-2 Penyerapan Anggaran Tertinggi
16. Terbaik 1 Penilaian Pembangunan Daerah Tingkat Provinsi, dan Nasional;

Selain inovasi di atas masih terdapat banyak jenis inovasi yang dilakukan oleh perangkat daerah maupun unit kerja di bawahnya sebagaimana yang akan disampaikan pada tabel 4.29 di



bawah ini. Inovasi yang akan ditampilkan tersebut seluruhnya masih dilaksanakan atau berjalan sampai akhir Tahun 2021 ini, hal tersebut didapatkan dari hasil pemetaan dan kunjungan lapangan ke perangkat daerah atau unit kerja yang melaksanakan inovasi tersebut. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk pembinaan dari pemerintah daerah sekaligus juga dalam mengumpulkan dokumen pendukung inovasi sebagai langkah dalam memenuhi persyaratan Inovasi Government Award (IGA).

Dalam tabel di bawah ini juga akan dilengkapi penjelasan atau deskripsi dari masing-masing inovasi yang dilakukan serta penambahan keterangan tertentu seperti apabila inovasi tersebut berbasis teknologi informasi. Hasil pendataan tersebut dilakukan pada Inovasi yang masih berjalan yang terbaru yaitu yang di inisiasi pada tahun 2020, 2021 dan 2022. Secara rinci penjelasan tersebut terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.29
Inovasi Daerah Kota Sukabumi

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
1	Puskesmas Pabuaran	LASEGAR (Lapas Sehat Dan Bugar)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
2		TAWA MAS DAVID (Tanggap Waspada Penganggulungan COVID-19)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
3		RADIO AKTIF (Ragam Acara Edukasi Dan Obrolan Interaktif Masalah Kesehatan)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
4		POLA JITU (Pengelolaan Layanan Konseling Jiwa Terpadu)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
5		SABA KOTA (Selasa sabtu Bahas Masalah Kesehatan Bersama Dan Merata)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa
6		SE-GIZI CEPAT (Konseling Gizi Cegah Penyakit Tidak Menular)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
7		REKAN ASIK (Rencanakan Persalinan Aman Dan ASI Eksklusif)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa
8		GEULIS (Gerakan Leungitkeun Stunting)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
9		PASTI RENYAH (Partisipasi Masyarakat Terhadap Rendahnya Cakupan D/S Di Posyandu)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa
10		JAMALI TB (Jadikan Masyarakat Peduli TB)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
11		KALAPA (Kader Peduli Aktif Program KIA)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial
12	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SI IBU (Sistem Informasi Kebudayaan dan Promosi Pariwisata)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi	pendidikan, kebudayaan
13		SIRAKSA	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, kepegawaian
14		SIPEKEK Wayang MOCI ECPRES Solusi Pembelajaran Akibat Pandemi Covid 19	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pendidikan, pendidikan dan pelatihan
15		Panel Informasi Seni (PASINI)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, kebudayaan
16		Cahaya Museum Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan	Digital	pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
			Daerah		
17		Pojok Urang	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kebudayaan
18		Small Museum Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata
19		Pojok Budaya	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pendidikan, sosial, kebudayaan, pariwisata
20		Revitalisasi Gotong Sisig	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pendidikan, sosial, kebudayaan
21	Puskesmas Limusnunggal	PDKT (Program Dampingi Kasus TB)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
22		RASA AMAN (Gerakan Atasi Sampah Aktifkan Jamban)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
23		GEMAR MENGAJI (Gerakan Masyarakat Memperdulikan Kesehatan dan Gangguan Jiwa)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
24		HAI CINTA (Himbauan Aktif Ikut Imunisasi Cermin Peduli Bayi dan Balita)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
25		GUCI EMAS (Gerakan Cukupi Gizi Melalui Edukasi Masyarakat)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan
26		KASEP PIS-AN (Kegiatan Akselerasi, Sinergitas dan Elaborasi PIS-PK Antar Program)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan
27		KLIK UP (Kelola Layanan Puskesmas Terintegrasi Pada Kegiatan Upaya Kesehatan Perorangan)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
28	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Layanan KITA CERDAS	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
29		Batik Milik Anda	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika
30		Layanan KAMI HEBAT	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika
31		Layanan PATEPANG SONO	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika
32		Layanan KADO TERINDAH	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi dan informatika
33		LAYANAN ANANDA SEHAT (Layanan Akta Kelahiran Anda Melalui Daring, Segera – Mudah dan Cepat)	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
34	Kelurahan Benteng	DAWAI CANTIK (Data Dasa Wisma Informatif, Canggih, Efektif & Akurat)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
35		BLASTERAN BERSIN (Blusukan Bagi-bagi Masker Gratis, Sosialisasi Protokol Kesehatan dan Bereskan Target Vaksin)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
36		GEROBAK KAGETS (Gerakan Obral Kebaikan - Ketagihan Berbagi Terhadap Sesama)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial
37		PERPUSTAKAAN DIGITAL "GELEDEG BENTAR" (Gerakan Literasi Digital Untuk Benteng Pintar)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pendidikan, perpustakaan
38		CILUKBA (Cinta Literasi Untuk Kecerdasan Ibu Dan Anak)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pendidikan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
39		BOS SUPEL (Benteng Online Service Surat Pelayanan)	Inovasi pelayanan publik	Digital	Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
40	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	SIBANGDUKEP (Sinergitas Pembangunan Terpadu Kepemudaan Berbasis e-Youth)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kepemudaan dan olah raga
41		PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	kepemudaan dan olah raga
42		POWER (Promosi Online Pariwisata Tersebar Berkelanjutan)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pariwisata
43		SCH (Sukabumi Creative Hub)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pariwisata

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
44		GURAK (Minggu Bergerak)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kepemudaan dan olah raga
45	Puskesmas Cibeureum Hilir	REUSEUP (Remaja Urang Sehat jeung Pinter)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan
46		SEMUT (Sehat Dengan Minum Jamu Tradisional)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
47		GEGEBER (Gelora Gerakan Bersih-Bersih)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kesehatan, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa
48		KONSULTAN (Konsultasi dan Penyuluhan Kesehatan)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
49		SENYUM BERSERI (Konseling dan Penyuluhan Untuk Mulut Bersih dan Sehat dari Karies)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
50	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	Strategi One Roof (One Region, One Offtaker)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pangan, pertanian
51		SI PELAYAN CANTIK (Sistem Informasi Peningkatan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Berbasis Catatan Statistik)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pertanian
52		GPM LING (Gelar Pangan Murah Keliling)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pangan
53		PIKACHU (Pelayanan terIntegrasi Kepegawaian, Catatan Harian dan Umum)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	pangan, pertanian, kepegawaian
54		GEMILANG (Gerakan Tanam Ikan Sebagai Penyelang)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kelautan dan perikanan
55	Kelurahan Jayamekar	GARASI KEUANGAN (Gerakan Literasi Keuangan)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa, koperasi, usaha kecil, dan menengah, pendidikan dan pelatihan

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
56		Beas Perelek	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial
57		KORAN JAYAMEKAR (Kotak Saran Kelurahan Jayamekar)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa, fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
58		Layanan SI MEKAR	Inovasi pelayanan publik	Digital	komunikasi dan informatika, fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
59	Kecamatan Baros	SIKAP (Sistem Kepuasan Pelayanan)	Inovasi pelayanan publik	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
60		SISKAMLINK (Sistem Informasi dan Surat Keterangan Melalui LINK)	Inovasi pelayanan publik	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
61		SURKAT (Survei Kepuasan Masyarakat)	Inovasi pelayanan publik	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
62		E-PENGADUAN (Elektronik Pengaduan)	Inovasi pelayanan publik	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
63	Puskesmas Baros	SERULING BAPER (Seru-seruan Konseling Bareng Apoteker)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kesehatan
64		JPGS CEPAT (Jalan Pagi gerakan pungut Sampah Cegah Penyakit Menular Dan Tidak Menular)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kesehatan

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
65		KUOTA SEGIGA (Kucegah Stunting Dengan Sekolah Gizi Keluarga)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
66		SABTU UTS (Sabtu UKM Goes To School)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kesehatan
67	Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	Perencanaan pengembangan aplikasi Digital Sukabumi Kece untuk UMKM Kota Sukabumi, terdiri dari aplikasi Mobile Apps (Android) dan Web Portal yang dilengkapi dengan Dashboard Manajemen System	Inovasi pelayanan publik	Digital	koperasi, usaha kecil, dan menengah
68		Cinderamata.com	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Teknologi	perindustrian

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
69		SiKiPoster UMKM	Inovasi pelayanan publik	Digital	perindustrian
70		Pelayanan TER..LA..LU (Pelayanan Tera/Tera Ulang Terpadu)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	perdagangan
71	Puskesmas Selabatu	DILAN MILEA (Peduli Kesehatan Millenial Kita))	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan Desa, kepemudaan dan olah raga
72		MANIS MANJA (Pemantauan Makanan Jajanan Aman Hygienis dan Sehat)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial, pangan, perdagangan
73		LAKTASIE (Layanan Komprehensif Tingkatkan Asi Eksklusif)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan Desa
74	Bappeda	SIGENKO (Sistem Informasi Geografis Kota Sukabumi)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan
75		Map Information City Of Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	pariwisata

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
76		SIBASI (Sistem Basis Data Inovasi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Teknologi	penelitian dan pengembangan
77	Puskesmas Nanggaleng	Love Mom Bersama Puskesmas Nanggaleng	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
78		Klinik Konseling Terpadu Puskesmas Nanggaleng	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
79		(SI ITEUNG MODIS) Sarana Informasi Tentang Kandungan Melalui Media Sosial	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
80	RSUD SYAMSUDIN, SH	Sistem Informasi Manajemen Tracing Covid-19 (SIMTRAC-19)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	kesehatan
81		RIJARI (Periksa Jantung Sendiri)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	kesehatan
82		MANTUL (Pelayanan Teman Tuli)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
83	Dinas Perhubungan	PANON PENDEKAR (Pembayaran Non Tunai Pengujian Kendaraan Bermotor)	Inovasi pelayanan publik	Digital	perhubungan, statistik

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
84		RAOS (Rekomendasi Analisis Dampak Lalu Lintas Online)	Inovasi pelayanan publik	Digital	perhubungan
85	Inspektorat	MATATERPANA (Meta Data Terintegrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
86		PAKAR (Portal Pengaduan dan Konsultasi Aparatur dan Masyarakat)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
87	Puskesmas Cikundul	GEMA AFICK (Gerakan Masyarakat Beraktifitas Fisik Dengan Puskesmas Cikundul)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa, kepemudaan dan olah raga
88		MEPELING (Metode Penyuluhan Keliling)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa,

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
					komunikasi dan informatika
89	Kelurahan Sudajayahilir	IMAH BERSEPTICK TANK (Investasi Menabung Sampah Untuk Membuat Septick Tank)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa, koperasi, usaha kecil, dan menengah, pendidikan dan pelatihan
90		ARMADA SETIA (Asosiasi Remaja Mesjid Dan Pemuda Serta Edukasi Talikasih Ibu Dan Anak)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan Desa, kepemudaan dan olah raga
91	Kecamatan Citamiang	SWALAYAN (SISTEM WHATSAPP PELAYANAN ADMINSTRASI) KECAMATAN CITAMIANG	Inovasi pelayanan publik	Digital	komunikasi dan informatika, fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
92		Pelayanan Teknologi Informasi Keluar Masuk Surat (PETI KEMAS)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi	komunikasi dan informatika
93	Puskesmas Sukakarya	INDUKSI (Informasi Edukasi kesehatan Mom Masa Kini)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
94		ELING (Edukasi Keliling)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa
95	Puskesmas Cipelang	KRIWIL (Kuriling Wilayah)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
96		RUTAN BESI (Rumah Tangga Bebas Polusi)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
97	DP2KBP3A	POS MAMAH (Posyandu Mapay Imah)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa
98		JAPATI KENCANA (Jaringan Akses Pelayanan Terintegrasi Keluarga Berencana)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
99	Dinas Tenaga Kerja	MONALISA (Mobil Naker Keliling Seputar Kota)	Inovasi pelayanan publik	Digital	tenaga kerja
100		JOB FAIR VIRTUAL	Inovasi pelayanan publik	Digital	tenaga kerja
101	Dinas Komunikasi dan Informatika	Website Covid 19 Pemerintah Kota Sukabumi	Inovasi pelayanan publik	Digital	komunikasi dan informatika
102		SUPER (Sukabumi Participatory Responder)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	komunikasi dan informatika
103	Dinas Lingkungan Hidup	SIMPELDONG (Sistem Informasi Pelayanan dan Pelaporan Dokumen Lingkungan)	Inovasi pelayanan publik	Digital	lingkungan hidup
104		Sistem Informasi Pelayanan dan Pelaporan Dokumen Lingkungan	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	lingkungan hidup
105	Sekretariat Daerah	AD - E-PERFORMANCE	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
106		PeDe HaDe	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	perencanaan, keuangan, fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
107	Puskesmas Benteng	SIMOCHI (Strategi Imunisasi Mobile Cegah PD3I)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial
108		SILATAS (Sistem Pendaftaran online Lansia)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, sosial
109	Kelurahan Cikundul	Warung Sabtu Berkah	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan
110		TABAROK (Tabungan Barokah)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, sosial
111	Kelurahan Lembursitu	SIGAMPIL (Sistem Gampang Pelayanan dan Informasi Lembursitu)	Inovasi pelayanan publik	Digital	sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa, komunikasi dan informatika

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
112		NGAWIH SUNDA (Nganjang Ka Wilayah Supaya Nambah Deukeut Ka Warga)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pemberdayaan masyarakat dan Desa
113	PDAM	PAH (Teknologi Pemanfaatan Air Hujan Sekala Rumah Tangga)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Penelitian dan Pengembangan
114	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	AVATAR	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman
115		SIPEKA	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pekerjaan umum dan penataan ruang
116	Kelurahan Cikole	CIKOLE CERIA (Pelayanan Online Kelurahan Cikole yang Cepat, Efektif, Ramah, Ikhlas dan Amanah)	Inovasi pelayanan publik	Digital	sosial

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
117	Satpol PP dan Damkar	PASIGIT (Pengawasan Sistem Digital)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
118	Dinas Kesehatan	e-Moetan (elektronik monitoring pelaksanaan kegiatan)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	kesehatan
119	Labkesda	LABKESDA On The Way Rumah Pasien (LABKESDA OTW)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, komunikasi dan informatika
120	DPMPTSP	SIJIMAT (Siap Jemput Perizinan Masyarakat)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	penanaman modal
121	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Sukabumi	Sorgum Sebagai Alternatif Pengganti Pangan Pokok Di Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pangan
122	Dinas Perpustakaan dan Arsip	CENDOL (Cerita Dongeng Online)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, perpustakaan
123	Kesbangpol	SIKOI (Sistem Informasi Kesbangpol Terintegrasi)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
					masyarakat, sosial
124	Kecamatan Lembursitu	SIPINTAR (Sistem Pelayanan Siap Antar)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial, pertanahan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan Desa
125	Kecamatan Cikole	PENDAKK Di Kelurahan	Inovasi pelayanan publik	Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
126	Puskesmas Sukabumi	Cegah Tangkal Penyakit Paru	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
127	BKPSDM	Competency Development Need Analysis (Cdna) Untuk Pemetaan Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai Mendorong Terbentuknya Sdm Unggul Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	kepegawaian

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
128	Dinas Sosial	Udunan Online	Inovasi pelayanan publik	Digital	pendidikan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, sosial
129	Kecamatan Cibeureum	SI BEO (Sistem Informasi Layanan Berbasis Elektronik)	Inovasi pelayanan publik	Digital	komunikasi dan informatika
130	Puskesmas Gedong Panjang	DEWA ULAR (Deteksi Awal Upaya Pencegahan Penyakit Tidak Menular)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan
131	Kelurahan Baros	APELMANIS (Aplikasi Pelayanan Masyarakat Humanis)	Inovasi pelayanan publik	Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa, komunikasi dan informatika
132	Puskesmas Lembursitu	SIMANIS (Aksi Masyarakat Cinta Hidup Bersih Dan Sehat)	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan
133	RSUD Al Mulk	SIPRAJA	Inovasi pelayanan publik	Digital	kesehatan, komunikasi dan informatika
134	Perumda BPR	TAS (Tabungan Anak Sekolah)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, keuangan, pendidikan dan pelatihan

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
135	Kelurahan Cikondang	SILENT (Sistem Pelayanan Efektif dan Transparan)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan Desa, kearsipan
136	Kelurahan Limusnunggal	SASUKE (Sistem Antar-jemput Surat Kematian)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	sosial, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
137	Kecamatan Gunggunpuyuh	SIKALEM (Sistem Kotak Layanan Elektronik Mandiri)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
138	Kelurahan Tipar	MENJAGA TIPAR (Menjaring Aspirasi Warga Tipar)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	pemberdayaan masyarakat dan Desa
139	Kelurahan Citamiang	SiPOTONG (Sistem Pelayanan Online Ti Orang Citamiang)	Inovasi pelayanan publik	Digital	sosial
140	Kecamatan Warudoyong	BENGGEL (Berkunjung Ke Kelurahan)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
					masyarakat, sosial
141	Sekretariat Dewan	SIMLEG (Sistem Informasi Legislasi)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
142	Kelurahan Cisarua	CINTA PACAR (Cisarua Nerima Data Pelayanan Lancar)	Inovasi pelayanan publik	Digital	komunikasi dan informatika
143	Kelurahan Warudoyong	BERJUMPA SAWAL BERES (Beberesih Jumat Pagi Sapa Warga Bersih Sehat)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup
144	Kelurahan Cipanengah	LADU MANIS (Layanan Terpadu Masyarakat Tersenyum Manis)	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Non Digital	kesehatan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
145	Kelurahan Nanggaleng	LALEUR JAKA (Layanan Diluar Jam Kerja) Kelurahan Nanggaleng	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
146	Kelurahan Gedongpanjang	GEPUK WA GP (Gerakan Peduli Kesehatan Warga Gedong Panjang)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial
147	Kelurahan Sukakarya	PEWAYANG (Pelayanan Melalui WhatApp Sukakarya Cemerlang)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	sosial, komunikasi dan informatika
148	Kelurahan Jayaraksa	MELATI GAMBIR (Melayani Sepenuh Hati Agar Warga Gembira)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kearsipan
149	Puskesmas Karang Tengah	AD - TOSS - TB (Temukan Obati Sampai Sembuh penderita TBC)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan Desa
150	BPBD	SiEdan	Inovasi tata kelola pemerintahan daerah	Teknologi	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, lingkungan hidup
151	Kelurahan Cibeureum Hilir	SIPETRIK (Sistem Pelayanan Elektronik Administrasi Surat dikirim Ke Rumah)	Inovasi pelayanan publik	Teknologi	sosial, komunikasi dan informatika

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
152	Kelurahan Gunungpuyuh	PELANGI HATI (Pelayanan Sinergi Kelurahan Yang Humanis dan Inovatif)	Inovasi pelayanan publik	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
153	Kelurahan Karamat	PUSLINGKAR (Perpustakaan Keliling Kelurahan Karamat)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	pendidikan, pemberdayaan masyarakat dan Desa, perpustakaan
154	Kelurahan Subang Jaya	SILANCAH GAYA	Inovasi pelayanan publik	Digital	fungsi penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
155	Kelurahan Nyomplong	PAHARI (Pelayanan Hari Libur)	Inovasi pelayanan publik	Digital	ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
156	Kelurahan Selabatu	GEMA SERIBU (Gerakan Masyarakat Selabatu Rela Ikhlas Berbagi Dan Membantu)	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	kesehatan, sosial

No	Perangkat Daerah/Instansi/BUMD	Judul Inovasi	Bentuk Inovasi	Jenis	Urusan Pemerintah
157	Kelurahan Sindangsari	Wisata Edukasi Kelurahan Sindangsari	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	pendidikan, pariwisata
158	Puskesmas Tipar	SEJUTA CERITA (Selasa Jumat Tahu Dengan Bercerita)	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	kesehatan, sosial

Sumber : Hasil analisis Bappeda, Tahun 2023

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2024

Rencana program dan kegiatan daerah Tahun 2024 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah Tahun 2022 dan 2023 untuk penyusunan RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 mulai dari tingkat Kelurahan sampai dengan Tingkat Kota. Musrenbang menjadi media/sarana untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kota Sukabumi.

Di Kota Sukabumi, penentuan program dan kegiatan daerah Tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026, khususnya pada tahun berkenaan dengan memperhatikan hasil penyesuaian proyeksi pendapatan dan belanja daerah, serta memperhatikan keterkaitannya dengan Prioritas Pembangunan Nasional dan Prioritas Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 dan program prioritas pembangunan daerah yang sudah ditetapkan dalam dokumen RPD.

5.1 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang tertuang di dalam RKPD Tahun 2024 dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif. Program dan kegiatan hasil pemetaan ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2024.



Proses penyusunan RKPD Tahun 2024 menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri khususnya Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, dimana dalam SIPD tersebut tidak menggunakan rincian objek belanja tetapi berdasarkan kamus usulan atau rincian aktivitas yang akan dilaksanakan dalam setiap sub kegiatan yang diusulkan.

Seluruh perangkat daerah mengusulkan rencana kerja pada SIPD dengan melakukan entri kamus usulan atau rincian aktivitas sehingga dari awal proses perencanaan sudah dapat diketahui apa tujuan, siapa sasaran dan bagaimana pelaksanaan kegiatannya, sehingga nanti dapat dilakukan penelaahan terhadap kesesuaian dengan indikator kinerja yang akan dicapainya sebagaimana dokumen perencanaan lainnya seperti Rencana Strategis perangkat daerah dan Rencana Pembangunan Daerah.

Dalam proses pengusulan pagu anggaran Tahun 2024, perangkat daerah pada awalnya diarahkan untuk mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan, namun demikian setelah dilakukan analisis, penelaahan dan verifikasi ternyata kebutuhan belanja masih belum terpenuhi terutama dalam mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak Tahun 2024. Untuk itu maka berdasarkan hasil analisis dan diskusi dengan seluruh tim penyusun RKPD, maka kebutuhan tersebut dipenuhi dengan menaikkan pendapatan pada komponen belanja transfer DAU yaitu di estimasikan sama dengan pendapatan DAU pada APBD murni Tahun 2023.

Rekapitulasi usulan pagu anggaran Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 pada tabel berikut ini:

Tabel 5.1
Pagu Usulan Perangkat Daerah dan Proyeksi Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PAGU RPD	JUMLAH PAGU RKPD
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	144,232,828,280	145,047,468,050
2	Dinas Kesehatan	417,323,880,087	418,140,292,343
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	37,195,528,500	40,221,023,237
4	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran	11,182,691,808	11,396,710,934
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3,245,642,387	3,420,313,234
6	Dinas Sosial	7,683,003,760	8,077,978,186
7	Dinas Tenaga Kerja	3,741,903,507	4,005,756,508
8	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	6,764,342,282	7,277,052,770
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	10,728,539,461	11,300,312,130
10	Dinas Lingkungan Hidup	24,578,255,378	27,563,916,234
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6,119,967,147	6,442,070,680
12	Dinas Perhubungan	15,883,325,402	16,719,289,897
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	5,350,450,100	5,598,230,582
14	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan	12,926,264,113	13,466,593,801
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,783,923,754	4,985,709,215
16	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	10,018,126,755	10,137,125,159
17	Dinas Perpustakaan dan	4,817,322,630	5,039,797,131

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PAGU RPD	JUMLAH PAGU RKPD
1	2	3	4
	Kearsipan		
18	Sekretariat Daerah	48,889,340,939	49,756,992,882
19	Sekretariat DPRD	52,715,638,455	52,687,829,205
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13,370,735,953	14,749,491,003
21	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	53,672,407,541	50,173,037,810
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7,130,057,445	7,314,186,673
23	Inspektorat Daerah	8,426,044,168	8,692,221,473
24	Kecamatan Cikole	12,462,368,267	12,849,648,489
25	Kecamatan Gunung Puyuh	9,487,929,450	9,786,949,995
26	Kecamatan Citamiang	10,070,888,632	10,531,627,019
27	Kecamatan Warudoyong	10,774,697,874	11,337,335,731
28	Kecamatan Baros	8,479,775,387	8,587,989,667
29	Kecamatan Lembur Situ	9,694,089,568	10,050,864,792
30	Kecamatan Cibeureum	9,122,650,552	9,415,569,020
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	38,349,763,595	44,486,665,312
JUMLAH		1,019,222,383,177	1,039,260,049,162

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Apabila dilihat dari urusannya, dan dikaitkan dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam melakukan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah, maka akan terlihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 5.2
Jumlah Usulan Program, Kegiatan dan Anggaran
Per Urusan Pada RKPD Tahun 2024

NO	URUSAN	JUM LAH PROG RAM	JUM LAH KEGI ATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
1	Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan	5	15	144,762,274,578	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan	5	17	418,140,292,343	Dinas Kesehatan
3	Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	10	21	38,360,663,237	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	4	7	1,860,360,000	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	3	15	11,396,710,934	Satuan Polisi Pamongpraja dan Pemadam Kebakaran
6	Urusan Pemerintahan Bidang ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	2	9	3,420,313,234	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	7	18	8,077,978,186	Dinas Sosial
8	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	5	13	3,918,756,508	Dinas Tenaga Kerja
9	Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	6	12	791,634,333	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
10	Urusan Pemerintahan Bidang Pangan	5	14	10,009,157,695	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
11	Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup	10	18	27,563,916,234	Dinas Lingkungan Hidup



NO	URUSAN	JUM LAH PROG RAM	JUM LAH KEGI ATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
12	Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	5	13	6,442,070,680	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13	Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4	13	6,485,418,437	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
14	Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan	2	15	16,719,289,897	Dinas Perhubungan
15	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	3	8	5,543,531,132	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah	6	11	10,421,895,651	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
17	Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal	5	10	4,985,709,215	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga	3	12	9,128,022,159	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
19	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik	1	1	29,658,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
20	Urusan Pemerintahan Bidang Persandian	1	2	25,041,450	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan	5	6	285,193,472	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



NO	URUSAN	JUM LAH PROG RAM	JUM LAH KEGI ATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
22	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan	2	9	4,884,755,326	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
23	Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan	2	4	155,041,805	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan	2	4	476,800,350	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
25	Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata	4	5	1,009,103,000	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
26	Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian	5	9	814,354,085	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
27	Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan	4	5	1,591,944,550	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
28	Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian	3	3	1,452,753,600	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan
29	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	1	1	87,000,000	Dinas Tenaga Kerja
30	Sekretariat Daerah	3	19	49,756,992,882	Sekretariat Daerah
31	Sekretariat DRD	2	16	52,687,829,205	Sekretariat DPRD
32	Perencanaan	3	15	13,624,290,503	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
33	Keuangan	4	13	50,173,037,810	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
34	Kepegawaian	2	11	6,071,983,368	Badan Kepegawaian dan



NO	URUSAN	JUM LAH PROG RAM	JUM LAH KEGI ATAN	JUMLAH PAGU	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
					Pengembangan Sumber Daya Manusia
35	Pendidikan Dan Pelatihan	1	2	1,242,203,305	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
36	Penelitian Dan Pengembangan	1	2	1,126,910,500	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
37	Inspektorat Daerah	3	11	8,692,221,473	Inspektorat Daerah
38	Kecamatan Administrasi	5	13	12,849,648,489	Kecamatan Cikole
39	Kecamatan Administrasi	5	15	9,786,949,995	Kecamatan Gunung Puyuh
40	Kecamatan Administrasi	5	12	10,531,627,019	Kecamatan Citamiang
41	Kecamatan Administrasi	5	14	11,337,335,731	Kecamatan Warudoyong
42	Kecamatan Administrasi	5	14	8,587,989,667	Kecamatan Baros
43	Kecamatan Administrasi	5	13	10,050,864,792	Kecamatan Lembur Situ
44	Kecamatan Administrasi	5	12	9,415,569,020	Kecamatan Cibeureum
45	Kesatuan Bangsa Dan Politik	6	13	44,486,665,312	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Jumlah		197	502	1,039,260,049,162	

Sumber : Sistem Informasi Pemerintah Daerah Kota Sukabumi

Penyusunan pagu anggaran pada RKPD Tahun 2024 sangat mempertimbangkan prioritas pembangunan dan program prioritas yang tercantum pada perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Dari hasil analisis yang dilakukan, maka didapatkan data bahwa pagu anggaran RKPD Tahun 2024 yang mendukung pencapaian tiga prioritas pembangunan dan

indikator kinerja utama kepala daerah adalah sebesar Rp. **193,651,344,039,-** atau sekitar 20 % dari total belanja RKPD yang tersebar di berbagai perangkat daerah pengampu. Lebih jelasnya rincian pagu anggaran tersebut seperti tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.3
Rekapitulasi Anggaran Pada RKPD Tahun 2023
Berdasarkan Prioritas Pembangunan dan Pencapaian IKU Daerah

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
1	Peningkatan Kondusifitas Kota		106,722,836,507	
		Penyelenggaraan Jalan	10,467,790,128	DPUTR
		Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2,497,323,140	DISHUB
		Pengelolaan Persampahan	1,044,856,550	DLH
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1,265,549,905	DPUTR
		Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	33,283,820	DPUTR
		Kawasan Permukiman	3,076,684,393	DPUTR
		Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	159,207,935	DLH
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	263,703,625	DLH
		Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1,281,001,375	SATPOLPP DAMKAR
		Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	357,960,000	KESBANG POL
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas	32,571,252,805	KESBANG POL



No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		
		Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1,364,082,204	DPUTR
		Penanggulangan Bencana	351,312,423	BPBD
		Penanganan Bencana	89,152,807	DINSOS
		Pengelolaan Pendidikan	12,514,554,013	DISDIKBUD
		Pembinaan Perpustakaan	358,630,700	DISPUSIP
		Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	38,898,044,628	DINKES
		Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	128,446,056	DALDUKK BP2A
2	Optimalisasi Sektor Perdagangan dan Jasa		4,464,866,936	
		Pelayanan Penanaman Modal	84,733,635	DPMPSTSP
		Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1,410,000,688	DISKUMIN DAG
		Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	47,500,000	DISKUMIN DAG
		Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	1,454,445,611	DISKUMIN DAG
		Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	4,050,563	DISKUMIN DAG
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	209,304,238	DKP3
		Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan	376,556,868	DISPORAPAR



No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		Intelektual		
		Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	376,556,868	DISPORAPAR
		Pemasaran Pariwisata	66,903,465	DISPORAPAR
		Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	408,215,000	DISNAKER
		Penempatan Tenaga Kerja	26,600,000	DISNAKER
3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Dengan Penguatan Budaya Kreatif & Inovatif		82,463,640,596	
		Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1,742,378,708	BAPPEDA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1,835,757,390	BAPPEDA
		Pengelolaan Keuangan Daerah	2,474,064,684	BPKPD
		Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,257,203,305	BKPSDM
		Penyelenggaraan Pengawasan	629,008,625	INSPEKTORAT
		Perekonomian dan Pembangunan	533,037,058	SETDA
		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	34,045,181,650	
		Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	14,311,122,231	SETDA
		Dukungan Pelaksanaan Tugas	15,284,347,850	SETWAN

No	Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan Daerah	Pagu Anggaran	Perangkat Daerah
1	2	3	4	5
		dan Fungsi DPRD		
		Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1,771,351,475	KEC. CIKOLE
			1,388,179,995	KEC. GUNUNG PUYUH
			1,165,047,653	KEC. CITAMIAN G
			1,534,900,845	KEC. WARUDO YONG
			1,118,313,733	KEC. BAROS
			1,393,088,408	KEC. LEMBURS ITU
			1,128,114,811	KEC. CIBEURE UM
		Pengelolaan Aplikasi Informatika	53,239,700	DISKOMINFO
		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	28,737,500	DISDUKCAPIL
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	770,564,975	BAPPEDA
Jumlah			193,651,344,039	

Bappeda: Hasil Analisis Bappeda

Sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa proses perencanaan harus mengakomodir harus mengakomodir kebutuhan atau usulan masyarakat melalui Musrenbang serta pokok-pokok pikiran DPRD. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan RKPD Tahun 2023, usulan masyarakat serta pokok pikiran DPRD yang seluruhnya sudah diakomodir oleh perangkat daerah pengampu sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.4
Rekapitulasi Usulan Masyarakat Melalui Musrenbang
Yang Diakomodir Perangkat Daerah

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
1	Bantuan usaha	2
2	Bes Beton/Plate	1
3	Bimtek	8
4	BKB Kit Stunting	1
5	Budidaya ikan	1
6	Pengadaan CCTV	2
7	Drein pembuangan	1
8	Insentif/Honor	6
9	Jambore masyarakat	1
10	Kampung Siaga	1
11	Layanan BPJS	1
12	Normalisasi sungai	2
13	Oprasional masyarakat	1
14	Pekarangan Pangan Lestari	1
15	Pelatihan	130
16	Pelebaran sungai	1
17	pemasangan P.J.G	1
18	Pemasangan pavingblok	3
19	Pembangunan Bendungan	1
20	Pembangunan drainase	8
21	Pembangunan Gedung Kantor	1
22	Pembangunan gorong	1
23	Pembangunan jalan	9
24	Pembangunan SAB	4
25	Pembangunan sanitasi	3
26	Pembangunan Sekolah SMA/SMK	1
27	Pembangunan SPAM	2
28	Pembangunan TPT	24



No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
29	Pembangunan Trotoar	1
30	Pembentukan Kampung KB	1
31	Pemberdayaan masyarakat	6
32	Pemberdayaan Penguatan STBM	1
33	Pemberdayaan PKK	1
34	Pemberdayaan Pokja Pa'ud	1
35	Pemberdayaan Rakor Stunting	1
36	Pembinaan Posyandu Remaja	2
37	Pembuatan drainase	1
38	Pembuatan Jalan	3
39	Pengadaan Seragam Linmas Lengkap	1
40	Pengembangan Agroeduwisata	1
41	Pengembangan Kelompok Tani Istri Binangkit	1
42	Pengembangan Program Bangga Kencana	1
43	Peningkatan Kapaitas	2
44	perbaikan jembatan	1
45	Perbaikan sarana prasarana	1
46	Perbaikan Trotoar	1
47	Percepatan Penurunan Stunting	1
48	Persampahan	8
49	PJU	8
50	Pondasi Selokan	1
51	Posrem Kit	1
52	Posyandu Kit	1
53	Rabat Beton	1
54	Rakor Stunting	1
55	Rebah jalan	1
56	Rehab Drainase	19
57	Rehab gedung	1
58	Rehab gorong	4

No	Jenis Usulan	Jumlah Usulan
59	Rehab Irigasi	8
60	Rehab jalan	35
61	Rehab jembatan	1
62	Rehab mck	2
63	Rehab Mesjid	1
64	Rehab pintu air	1
65	Rehab posyandu	1
66	Rehab saluran air	2
67	Rehab selokan	1
68	Rehab talud	13
69	Renovasi MCK	2
70	Rutilahu	10
71	Sarana Air Bersih (SAB)	5
72	Septictank	9
73	Sarana prasarana posyandu	11
74	Sarana dan prasarana kelurahan	22
75	Sarana Dan Prasarana PKK	2
76	Sarana prasarana PAUD	1
77	Seragam linmas	1
78	Sosialisasi masyarakat	8
79	SPAL PCV	1
80	Tenda pesta	1

Sumber: Bappeda Kota Sukabumi

5.2 Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Secara umum program prioritas terkait erat dengan upaya pencapaian sasaran daerah, dimana sasaran daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai. Sasaran dijabarkan ke dalam indikator sasaran, yang dijabarkan kembali melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Dengan demikian, maka diharapkan sasaran daerah yang telah ditetapkan



dapat dicapai dari akumulasi output setiap pelaksanaan sub kegiatan yang mendukung pencapaian output kegiatan serta selanjutnya mendukung pencapaian outcome program yang sudah ditentukan dalam dokumen perencanaan lima tahunan serta diterjemahkan dalam dokumen perencanaan tahunan.

Daftar kegiatan prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan dalam bentuk Matriks Rencana Kerja Tahunan (RKT) menurut kelompok Perangkat Daerah serta berdasarkan urusan yang diampunya pada Dokumen RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 atau **Buku II**, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 ini.

BAB VI

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, Kepala Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memajukan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah yang dipimpinnya. Keberhasilan pemimpin dalam mewujudkan cita-cita dapat dinilai melalui ketercapaian indikator-indikator pembangunan yang ditetapkan.

Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan indikator kinerja suatu keluaran dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan tanggung jawab kewenangan dalam waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa kinerja tersebut diukur dengan indikator yang telah tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ketercapaian indikator menjadi parameter keberhasilan Kepala Daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dapat menggunakan formula yang disajikan dalam tabel lampiran ini. Lampiran indikator dapat diperbaharui oleh pemerintah Daerah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja ini merupakan indikator-indikator

kinerja *outcomes* atau *impact* yang dirumuskan berdasarkan analisis pengaruh dari suatu indikator atau lebih terhadap ukuran capaian kinerja tujuan dan sasaran. Selain itu, ditetapkan juga target pencapaiannya sebagai patokan untuk mengukur tingkat capaian keberhasilan, efektivitas dan efisiensi pengelolaan pemerintahan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Selain penetapan IKU dan IKK Pemerintah Daerah Kota Sukabumi, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026. Namun demikian seiring perjalanan waktu dilakukan penyesuaian ulang yang di inisiasi oleh Provinsi dan pada akhirnya disepakati oleh pihak Provinsi dan Kota Sukabumi. Target indikator makro hasil penyesuaian tersebut sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 6.1
Target Indikator Makro Kota Sukabumi

INDIKATOR	RPJMN	RPD Provinsi	RPD Kota Sukabumi	RKPD Kota Sukabumi
	2024	2024	2024	2024
LPE (%)	6,20	5,67	5,37	5,40
Kemiskinan (%)	8,15	7,68	8,00	8,00
TPT (%)	3,10	8,01	8,41	8,00
IPM (Poin)	74,60-84,23	73,56	75,55	75,65
Rasio Gini (Poin)	0,360-0,474	0,408	0,475	0,475

Sumber: RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dan kesepakatan Provinsi

Selanjutnya Kota Sukabumi telah menentukan Indikator Pembangunan Daerah yang merupakan indikator antara bagi pencapaian Indikator Makro sebagaimana yang tertuang dalam Tabel 6.1 diatas. Indikator tersebut kemudian disusun target pencapaiannya yang mengacu pada realisasi pada tahun sebelumnya serta kondisi

terkini pencapaian indikator. Indikator Pembangunan Daerah tersebut sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 6.2
Proyeksi Indikator Pembangunan Daerah Kota Sukabumi
Tahun 2024

No	Indikator	Satuan	Target RKPD 2024
1	Inflasi (%)	%	4
2	Jumlah Penduduk Miskin (Juta Orang)	Juta Orang	28,5
3	PDRB Perkapita (ADHK) (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	27,132
4	PDRB Perkapita (ADHB) (Juta Rupiah)	Juta Rupiah	42,608
5	Pengeluaran Perkapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	Ribu Rupiah/ Orang/ Tahun	11,600
6	Usia Harapan Hidup (UHH) (Tahun)	Tahun	73,00
7	Rata-rata Lama Sekolah (RLS) (Tahun)	Tahun	10,25
8	Harapan Lama Sekolah (HLS) (Tahun)	Tahun	13,70

Sumber: Hasil analisis BAPPEDA

6.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penetapan indikator kinerja utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan. Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan itu tidak hanya dipengaruhi oleh keberhasilan pencapaian *outcome* dan *output* saja, akan tetapi dipengaruhi juga oleh faktor lingkungan baik internal dan eksternal.

Penetapan IKU yang dijabarkan dalam bentuk target setiap tahun akan menjadi sarana bagi Pemerintah Kota Sukabumi dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kota Sukabumi.

Oleh karena itu, dalam penentuan target IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan capaian target IKU pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/tren di masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian IKU tersebut. Karena itu, IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 akan terdiri dari 12 indikator. Adapun IKU Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.2.

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Sukabumi
Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN		
			2024	2025	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,37	5,39	5,41
2	Kontribusi Sektor Perdagangan dan Jasa terhadap PDRB	Persen	4,00	4,20	4,40
3	Indeks Kota Kreatif	Poin	30,93	32,43	33,95
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,55	75,75	75,80
5	Indeks Pendidikan	Poin	71,58	71,68	71,77
6	Indeks Keluarga Sehat Sukabumi	Poin	0,33	0,35	0,37
7	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rp/ Pekerja	34,001	35,769	37,736
8	Indeks Kota Layak Huni	Poin	65,00	65,25	65,50
9	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Persen	86,00	86,20	86,50
10	Indeks Rasa Aman	Poin	75,40	75,55	75,60
11	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	73	74	75
12	Indeks Inovasi Daerah	Predikat	Inovatif	Inovatif	Inovatif

Sumber: RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

6.2 Penetapan Proyeksi Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*). Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Penetapan indikator kinerja daerah (IKD) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Di mana keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut direfleksikan dalam tiga aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan gambaran pencapaian indikator kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial dan indikator seni budaya dan olahraga. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, iklim berinvestasi, serta inovasi dan kreativitas daerah. Adapun aspek pelayanan umum dapat diketahui dari gambaran pencapaian indikator urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib pelayanan non dasar dan urusan pilihan.

IKD berisikan IKK dan indikator program prioritas lainnya yang terdapat dalam RPD Kota Sukabumi. IKK Pemerintah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari capaian pembangunan jangka menengah sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sukabumi Tahun 2024-2026.

Dalam penentuan target IKD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 tetap memperhatikan capaian target IKD pada periode sebelumnya dan memperhatikan kecenderungan/tren di masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian IKD tersebut. IKD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.4.

Tabel 6.4
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,37	5,39	5,41	Diskumindag, Disporapar, DKP3, DPMPTSP, Disnaker, Bappeda
2	Rasio Gini	Poin	0,475	0,470	0,460	Diskumindag, Disnaker, Dinsos, Bappeda
3	Angka Kemiskinan	Persen	8,00	7,96	7,94	Dinsos, Bappeda
4	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	75,55	75,75	75,80	Disdikbud, Dinkes, Diskumindag, Bappeda
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	8,41	8,25	8,00	Diskumindag, Disnaker, Bappeda
6	Pendapatan Per Kapita					Diskumindag, Disporapar, DKP3, DPMPTSP, Bappeda
	a. ADHK	Juta	27,132	27,897	29,298	
	b. ADHB	Juta	42,608	44,977	47,477	
7	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	10.15	10.17	10.19	Disdikbud
8	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.59	13.6	13.61	Disdikbud
9	Angka Harapan Hidup	Tahun	73	73,20	73,5	Dinkes
10	Prevalensi Stunting	Persen	14	13.9	13.85	Dinkes
11	Indeks Ketahanan Keluarga	Poin	79,64	79,69	79,74	DalduKBPPA
12	Skor Pola Pangan Harapan	Persen	86.5	87.3	88.1	DKP3
13	Indeks Pembangunan Gender	Poin	91.93	92.03	92.13	DalduKBPPA
ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Pengeluaran Per Kapita	Rp/Orang	966.69	982.55	998.66	Diskumindag, Disporapar, DKP3, DPMPTSP, Bappeda
2	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	85	86	87	DPUTR

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
3	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Poin	78.13	78.16	78.19	Kesbangpol, Kesra, SatpolPP
4	Rasio Ketergantungan	Persen	44,90	44,83	44,73	Disdukcapil, Bappeda
ASPEK PELAYANAN UMUM						
PENDIDIKAN						
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Persen	100	100	100	Disdikbud
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	100	100	100	Disdikbud
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Persen	100	100	100	Disdikbud
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	100	100	100	Disdikbud
KESEHATAN						
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Angka	320/1000 pddk	322/1000 pddk	324/1000 pddk	Dinkes
2	Persentase RS Rujukan tngkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Persen	100	100	100	Dinkes
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Persen	100	100	100	Dinkes
4	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi	Persen	100	100	100	Dinkes



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
	baru lahir					
5	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Persen	100	100	100	Dinkes
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Persen	100	100	100	Dinkes
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kabupaten/kota	Persen	62,18	67,03	71,89	DPUTR
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	56,18	56,94	57,70	DPUTR
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	Persen	100	100	100	DPUTR
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	58,30	58,73	59,16	DPUTR
5	Rasio kepatuhan IMB kabupaten/kota	Persen	100	100	100	DPUTR
6	Tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota	Persen	85,00	86,00	87,00	DPUTR
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analis yang memiliki sertifikat kompeten	Persen	40,94	55,56	73,10	DPUTR

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Persen	100	100	100	DPUTR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Persen	100	100	100	DPUTR
2	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	Persen	9,95	23,02	32,82	DPUTR
3	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Persen	0,96	0,53	0,01	DPUTR
4	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Persen	100	100	100	DPUTR
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	Satpol PP Damkar
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	100	100	100	Satpol PP Damkar
3	Warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persen	94	95	95	BPBD
4	Warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	94	95	95	BPBD
5	Warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	94	95	95	BPBD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100	100	Satpol PP Damkar
7	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	Menit	< 12	< 12	< 12	Satpol PP Damkar
8	Indeks Kapasitas Bencana Daerah	Poin	0,55	0,56	0,57	BPBD
SOSIAL						
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100	Dinsos
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100	Dinsos
TENAGA KERJA						
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	Disnaker
2	Persentase Tenaga Kerja bersertifikat kompetensi	Persen	28	28.5	29	Disnaker
3	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen	27,5	30	32,5	Disnaker

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antarkerja dalam wilayah kabupaten/kota	Persen	90	90	90	Disnaker
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	50	60	80	Dalduk KB P2A
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	Angka	0,034	0,0335	0,033	Dalduk KB P2A
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Angka	0,008	0,0075	0,007	Dalduk KB P2A
PANGAN						
1	Persentase ketersediaan cadangan pangan pokok Pemerintah	Persen	22	23	23	DKP3
PERTANAHAN						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	86,37	87,37	88,37	DPUTR
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Persen	0,04	0,05	0,06	DPUTR
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	Persen	86,37	87,37	88,37	DPUTR



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/kota	Poin	59,80	59,90	60,00	DLH
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten/kota	Persen	99,00	100	100	DLH
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	0,04	0,05	0,06	DLH
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Perekaman KTP elektronik	Persen	100	100	100	Disdukcapil
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Persen	60	70	80	Disdukcapil
3	Kepemilikan akta kelahiran	Persen	100	100	100	Disdukcapil
4	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Persen	73,91	87	100	Disdukcapil
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,16	2,14	2,12	Dalduk KB P2A
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR</i>)	Persen	67	67,5	68	Dalduk KB P2A
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	11,13	11,12	11,12	Dalduk KB P2A

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
PERHUBUNGAN						
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Angka	1	1	1	Dishub
2	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	Angka	0,36	0,35	0,34	Dishub
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	40	50	60	Diskominfo
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	40	45	50	Diskominfo
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota	Persen	65	65	70	Diskominfo
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH						
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	Persen	19,83	20,68	21,53	Diskumindag
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	Persen	0,47	0,63	0,78	Diskumindag
PENANAMAN MODAL						
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	Persen	10	10	10	DPMPSTP
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA						
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	25,47	26,69	27,99	Disporapar
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	22,63	22,64	22,68	Disporapar

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	18	25	50	Disporapar
STATISTIK						
1	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	55	60	65	Diskominfo
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	55	60	65	Diskominfo
PERSANDIAN						
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	20	25	25	Diskominfo
2	Persentase keterhubungan jaring komunikasi sandi	Persen	60	70	80	Diskominfo
KEBUDAYAAN						
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Unit/ Persen	76	77	78	Disdikbud
PERPUSTAKAAN						
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	72	73	74	Dispupip
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	98	98,02	98,05	Dispupip
KEARSIPAN						
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	64	64,50	64,80	Dispupip

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban tiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	67	67,50	68	Dispusip
KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota	Jumlah (ton)	25,87	26,08	26,29	DKP3
PARIWISATA						
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	3.1	3.2	3.3	Disporapar
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	2	23.5	24	Disporapar
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen/ Hari	85	86	87	Disporapar
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Miliar Rupiah	272	272.1	272.2	Disporapar
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rupiah	22.448 .213.6 89	22.448. 213.698	22.448 .213.6 98	Disporapar
PERTANIAN						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton	19.316	19.464	19.512	DKP3
2	Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Persen	100	100	100	DKP3

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
PERDAGANGAN						
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Persen	80	80	80	DPMPTSP
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Persen	55	65	75	DKP3
3	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	28,57	33,33	38,1	Diskumindag
PERINDUSTRIAN						
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persen	3,55	4,05	4,55	Diskumindag
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	10	10	10	DPMPTSP
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	80	80	80	DPMPTSP
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	80	80	80	DPMPTSP



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
5	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Buku	1	1	1	Diskumindag
SEKRETARIAT DAERAH						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	0	Setda
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	3	2,5	2	Setda
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	63	64	65	Setda
4	Prosentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	Persen	38	39	40	Setda
5	Persentase penyelenggaraan pengadaan yang dilakukan secara online	Persen	100	100	100	Setda
6	Indeks Pelayanan Publik	Persen	3,40	3,50	3,60	Setda
7	Persentase koordinasi dan fasilitasi produk perundang-undangan	Persen	100	100	100	Setda
SEKRETARIAT DEWAN						
1	Persentase propperpmda yang ditetapkan dengan peraturan daerah	Persen	100	100	100	Setwan



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
PERENCANAAN						
1	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan sesuai standar	Persen	100	100	100	Bappeda
2	Persentase pencapaian IKU	Persen	100	100	100	Bappeda
3	Persentase keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dan tingkat kota	Persen	100	100	100	Bappeda
KEUANGAN						
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WTP	WTP	BPKPD
2	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Persen	29,54	30,27	31,02	BPKPD
3	Rasio PAD	Persen	2,82	2,96	3,11	BPKPD
4	Rasio belanja urusan pemerintahan umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	87	88	89	BPKPD
5	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	4	5	6	BPKPD
6	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	1,5	2	3	BPKPD
7	Manajemen aset	Persen	90	90	90	BPKPD
8	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	9	8	7	BPKPD
9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Persen	100	100	100	BPKPD
10	Persentase Pengelolaan Keuangan Daerah Sesuai Ketentuan	Persen	97,33	97,66	98	BPKPD

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
KEPEGAWAIAN						
1	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	78	79	80	BKPSDM
2	Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	8,1	8,5	8,7	BKPSDM
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Rasio	38	38,5	39	BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
1	Persentase ASN yang mengikuti pelatihan kompetensi	Persen	7,9	8	8,5	BKPSDM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1	Persentase PD yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah	Persen	100	100	100	Bappeda
PENGAWASAN (INSPEKTORAT)						
1	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI yang ditindaklanjuti	Persen	76	77	78	Inspektorat
2	Persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP yang ditindaklanjuti	Persen	80	81	82	Inspektorat
3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	3	3	Inspektorat
4	Peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	3	3	3	Inspektorat

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN			PD PENANGGUNG JAWAB
			2024	2025	2026	
KEWILAYAHAN (KECAMATAN)						
1	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Cikole	Persen	100	100	100	Kecamatan Cikole
2	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Gunung Puyuh	Persen	100	100	100	Kecamatan Gunung Puyuh
3	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Citamiang	Persen	97	97.3	97.5	Kecamatan Citamiang
4	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Warudoyong	Persen	88,25	88,3	88,35	Kecamatan Warudoyong
5	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Baros	Persen	100	100	100	Kecamatan Baros
6	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Lembur Situ	Persen	100	100	100	Kecamatan Lembur Situ
7	Cakupan pelayanan publik di kecamatan Cibeureum	Persen	80	80	80	Kecamatan Cibeureum
PEMERINTAHAN UMUM (KESBANGPOL)						
1	Persentase konflik antar/inter umat beragama yang terselesaikan	Persen	100	100	100	Bakesbangpol

Sumber: RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026

BAB VII PENUTUP

RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun pertama pelaksanaan RPD Kota Sukabumi Tahun 2024-2026 dengan tema pembangunan **“Meningkatkan kondusifitas kota untuk keberlangsungan pembangunan”**. Program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD tahun 2024 disusun dengan orientasi pada pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial. Penyusunan RKPD Tahun 2024 dilakukan dengan melihat keserasiannya dengan prioritas Nasional dan prioritas Provinsi Jawa Barat.

Perencanaan pembangunan Kota Sukabumi Tahun 2024 yang dijabarkan melalui RKPD Tahun 2024 ini disusun dengan tetap memperhatikan point-point sebagai berikut:

1. Tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 3 (tiga) prioritas pembangunan daerah dengan 4 (empat) tujuan dan 9 (sembilan) sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Sukabumi Tahun 2024 – 2026;
2. Memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas serta sasaran prioritas pembangunan Kota Sukabumi dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow output priority programs*) serta program prioritas dan unggulan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024;
3. Kolaborasi antar berbagai sumber pendanaan dan melibatkan peran aktif seluruh stakeholder baik dari pemerintah maupun diluar pemerintah.

Selanjutnya RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 ini akan dijadikan :

1. Dasar bagi penyempurnaan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 terutama bagi perencanaan dan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah.
2. Merupakan pedoman penyusunan rancangan Kebijakan Umum



APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) serta Rancangan APBD Tahun 2024, yang nantinya akan dibahas bersama DPRD Kota Sukabumi.

Akhirnya semoga perencanaan pembangunan daerah sebagaimana yang telah tertuang dalam RKPD Kota Sukabumi Tahun 2024 ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Semoga seluruh pihak yang terkait dapat berkontribusi aktif dalam mengawal, melaksanakan dan mewujudkan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan pemantapan daya saing daerah menuju peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang unggul.

Sukabumi, 7 Juli 2023
WALI KOTA SUKABUMI,

ACHMAD FAHMI



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2023**